



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

A photograph of a lush green agricultural field in the background, with a white and yellow curved banner across the middle. In the foreground, there is a vibrant arrangement of various fresh vegetables including yellow bell peppers, purple eggplants, red tomatoes, orange carrots, green cucumbers, and white onions.

Masterplan
Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jawa Timur, Tahun 2015-2019

Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
[]



Pertanian merupakan salah satu sektor andalan dalam menunjang perekonomian di Jawa Timur. Jadi sudah waktunya unsur-unsur pembangunan pertanian tetap menjadi perhatian, salah satunya adalah pengembangan tanaman pangan dan hortikultura.

Dengan dicanangkannya NAWA CITA oleh Presiden Republik Indonesia, yaitu agenda prioritas Kabinet Kerja yang salah satunya adalah mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, dengan tujuan terpenuhinya kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri secara mandiri, serta mampu melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama usaha pertanian pangan.

Upaya mewujudkan kedaulatan pangan terutama untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur dilakukan melalui pengembangan kawasan yang dirancang untuk mencapai swasembada pangan secara bertahap diikuti dengan peningkatan nilai tambah usaha pertanian secara luas untuk meningkatkan kesejahteraan petani terutama dalam menghadapi perkembangan ekonomi global.

Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan yang memuat strategi dan skenario rencana aksi pengembangan kawasan namun juga sebagai evaluasi terhadap kinerja pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur. Dengan demikian muara dari dokumen perencanaan ini adalah upaya pencapaian produksi tanaman pangan dan hortikultura tahun 2015 hingga tahun 2019 sebagaimana direncanakan dalam RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 atau dirumuskan sebagai kebijakan strategis di dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019.

Diharapkan informasi yang termuat dalam Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur diharapkan mampu mendorong dan mengakselerasi gerak dan langkah para pelaku pembangunan dan digunakan sebagai pedoman dan arahan dalam merencanakan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura seluruh Kabupaten / Kota di Jawa Timur serta semua pihak yang berkepentingan terutama pengambilan kebijakan untuk diterapkan sebagai bagian strategi pengembangan sektor pertanian di Jawa Timur.

Surabaya, Desember 2015
Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur

Dr. Ir. Wibowo Ekoputro, MMT
Pembina Utama Madya
NIP. 19561130 198302 1 003

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan Eksekutif Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur ini memberikan gambaran ringkas mengenai kebijakan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 berupa arah, sasaran, dan fokus serta indikator untuk pencapaian peningkatan produksi komoditas unggulan nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, jeruk bawang merah dan cabai merah sekaligus mengatasi permasalahan sistemik ketahanan pangan di Indonesia.

Sebagai dokumen perencanaan, Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura berfungsi sebagai bahan referensi dalam pelaksanaan pembangunan sektor pertanian di Jawa Timur sebagaimana tertuang dalam visi dan misi dari Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur. Visi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015 - 2019 adalah “Terwujudnya Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan melalui Pengembangan Kawasan untuk kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur”. Untuk mewujudkan visi tersebut, misi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura: 1) Mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk secara berkelanjutan; 2) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk yang aman konsumsi dan berdaya saing tinggi; dan 3) Mewujudkan usaha pertanian dengan menumbuhkan ekonomi produktif di kawasan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk.

Sasaran pengembangan kawasan ke depan perlu disesuaikan terkait dengan cakupan pembangunan sektor pertanian yang lebih luas dan skala yang lebih besar guna mengungkit peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Untuk mencapai sasaran yang diharapkan, maka strategi yang diusung dalam dokumen ini adalah : 1) Penguatan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura; 2) Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi; 3) Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian; 4) Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani.

Berdasarkan strategi yang telah diformulasikan, maka untuk melaksanakan strategi ditetapkan kebijakan operasional dengan pendekatan sistem agribisnis melalui penerapan teknologi dan penguatan kelembagaan untuk percepatan upaya pencapaian swasembada menuju kedaulatana pangan. Teknologi budidaya diharapkan mampu menjawab kebutuhan lahan produksi yang terus meningkat sementara lahan subur semakin terbatas, karena dikonversi untuk kepentingan non-pertanian. Teknologi panen dan pasca panen dikembangkan untuk mengurangi kehilangan hasil, meningkatkan keragaman produk, dan memperpanjang masa ketersediaan pangan. Sistem pemasaran untuk mengefisiensikan proses tataniaga dan memperluas jaringan informasi. Implementasi dari semua tahapan tersebut harus pula dibarengi dengan upaya penguatan kelembagaan petani dan kelompoknya mengingat bahwa keberhasilan program ditentukan oleh kesesuaian teknologi yang dikembangkan dengan kebutuhan petani, kemampuan petani untuk mengakses dan mengimplementasikan teknologi, serta mekanisme / proses transfer teknologi.

Road Map dan Rencana Aksi didalam Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura tahun 2015 dimulai dari

aspek : a) Hulu; b) Onfarm; c) Hilir dan d) Pendukung. Road Map dan Rencana Aksi tahun 2015 :

1. Padi pada aspek a) Hulu : Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pembinaan Penangkar benih, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES; b) Onfarm meliputi Optimalisasi lahan dan sarana prasarana, Penerapan sistem tanam jajar legowo, SRI, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI; c) Hilir berupa Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu, Pengembangan Industri Olahan dan d) Pendukung, dimulai dengan Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan, Pengendalian Inflasi.
2. Jagung, pada aspek a) Hulu: Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES; b) Onfarm meliputi Optimalisasi sarana prasarana, Penerapan sistem tanam jajar legowo, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI; c) Hilir berupa Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu; dan d) Pendukung, dimulai dengan Penguatan Kelembagaan Pemasaran, dan Kemitraan.
3. Kedelai a) Hulu : Penguatan sistem perbenihan yang menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi; b) Onfarm meliputi : Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI; c) Hilir berupa Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen dan d) Pendukung, dimulai dengan Penguatan Kelembagaan, Pemasaran, Kemitraan;
4. Ubi Kayu tahun 2015 pada aspek a) Hulu : Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat; b) Onfarm meliputi Optimalisasi lahan, Pengamanan Produksi; c) Hilir berupa Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil dan d)

Pendukung, dimulai dengan Penguatan Kelembagaan Pemasaran, dan Kemitraan;

5. Jeruk Siam / Keprok tahun 2015 pada aspek a) Hulu : pembangunan infrastruktur kebun (pengairan dan jalan produksi), perluasan areal, akses permodalan, alsin pertanian; b) Onfarm meliputi Sekolah Lapang (SL) GAP/SOP budidaya, SL PHT, Pelatihan Petugas, Petani dan penangkar benih, Pendampingan teknis, pembangunan kebun, peremajaan tanaman, penerapan GAP, pengendalian OPT, pengawasan sertifikasi benih, registrasi kebun; c) Hilir berupa Peningkatan kapabilitas petugas, petani dan penangkar jeruk dan d) Pendukung, dimulai dengan Pengembangan kemitraan, promosi dan pameran;
6. Bawang Merah tahun 2015 pada aspek a) Hulu : perluasan areal alat/ sistem irigasi teknis; b) Onfarm meliputi Sosialisasi penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT; c) Hilir : ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya; d) Pendukung : penyiapan gudang simpan.
7. Cabai Merah tahun 2015 pada aspek a) Hulu : Penyediaan sarana prasarana budidaya dan irigasi; b) Onfarm meliputi Sosialisasi dan penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan, registrasi lahan usaha, teknologi budidaya off season; c) Hilir berupa ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya dan d) Pendukung : alat pengolah/pengering.

Sedangkan di tahun 2019 sebagai tahun akhir Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura :

1. Padi yaitu : a) Hulu : Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pemantapan Penangkar benih, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES; b) Onfarm : Optimalisasi lahan dan sarana

- produksi, SRI, GPPTT, SLPHT; c) Hilir : Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI, Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Penerapan penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu, Pengembangan Industri Olahan d) Pendukung : Penguatan Kelembagaan, Pemasaran, Kemitraan, Pengendalian Inflasi.
2. Jagung : a) Hulu : Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES; b) Onfarm : Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI; c) Hilir : Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu; d) Pendukung : Penguatan Kelembagaan Pemasaran, dan Kemitraan.
 3. Kedelai a) Hulu : Penguatan sistem perbenihan yang menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi; b) Onfarm meliputi : Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI; c) Hilir berupa Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen dan d) Pendukung, dimulai dengan Penguatan Kelembagaan, Pemasaran, Kemitraan.
 4. Ubi Kayu pada aspek a) Hulu : Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat; b) Onfarm meliputi Optimalisasi lahan, Pengamanan Produksi; c) Hilir berupa Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil dan d) Pendukung, dimulai dengan Penguatan Kelembagaan Pemasaran, dan Kemitraan.
 5. Jeruk, yaitu : a) Hulu : akses permodalan, alsin pertanian; b) Onfarm : penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, penerapan sistem manajemen mutu produk, sertifikasi kebun, penerapan sistem manajemen rantai pasopenerapan GAP/SOP budidaya, GHP, penerapan sistem manajemen mutu produk, sertifikasi kebun, Penguatan kelembagaan; c) Hilir : Peningkatan kapabilitas petugas, petani dan penangkar jeruk; dan d) Pendukung : rintisan pengembangan industri pengolahan (sebagai antisipasi over produksi), promosi dan pameran;
 6. Bawang Merah, yaitu : a) Hulu : perluasan areal, alat/ sistem irigasi teknis; b) Onfarm : penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan; c) Hilir : ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya, akses permodalan; d) Pendukung : penyiapan gudang simpan, alat pengolahan, peningkatan kapasitas kelembagaan;
 7. Cabai Merah, yaitu : a) Hulu : Penyediaan sarana prasarana budidaya dan irigasi, perluasan areal, akses permodalan; b) Onfarm meliputi Penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan, registrasi lahan usaha, teknologi budidaya off season; c) Hilir : ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya, akses permodalan; d) Pendukung : alat pengolah/pengering Perluasan Pasar.

DAFTAR ISI

halaman

PENGANTAR -----	ii	
RINGKASAN EKSEKUTIF -----	iii	
DAFTAR ISI -----	vi	
DAFTAR TABEL -----	viii	
DAFTAR GAMBAR -----	ix	
DAFTAR BOX -----	xi	
DAFTAR LAMPIRAN -----	xii	
DAFTAR PUSTAKA -----	xiii	
I. PENDAHULUAN -----	1	
1.1. Latar Belakang -----	2	
1.2. Tujuan -----	5	
1.3. Sasaran yang Diharapkan -----	6	
1.4. Dasar Hukum -----	6	
1.5. Pengertian -----	7	
1.6. Ruang Lingkup -----	10	
1.7. Sistimatika -----	11	
II. ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN -----	13	
2.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura -----	14	
2.2. Visi dan Misi -----	20	
2.3. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur -----	21	
2.4. Sasaran Strategis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur -----	23	
2.5. Program Prioritas -----	23	
III. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR -----	25	
3.1. Tinjauan Pustaka -----	26	
3.2. Kerangka Pemikiran -----	35	
IV. METODOLOGI -----	37	
4.1. Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data -----	38	
4.2. Metode Pendekatan -----	39	
4.3. Metode Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi -----	40	
V. POTENSI KOMODITAS UNGGULAN DAN KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA -----	42	
5.1. Kondisi Umum Wilayah, Agroekologis dan Lingkungan -----	42	
5.2. Kependudukan dan Sosial Budaya dan Kesejahteraan -----	50	
5.3. Sarana Prasarana dan Kelembagaan -----	53	
5.4. Ekonomi, Konsumsi dan Pemasaran Hasil Pertanian -----	56	
5.5. Sumber Daya Manusia -----	59	
VI. ANALISA PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN DAN KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA -----	61	
6.1. Analisa Biofisik Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Tanaman dan Hortikultura -----	62	
6.2. Analisa Kependudukan, Sosial Budaya dan Kesejahteraan -----	68	
6.3. Analisa Sarana Prasarana dan Kelembagaan -----	75	
6.4. Analisa Ekonomi, Konsumsi dan Pengembangan Pemasaran Hasil -----	78	
6.5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian -----	90	
6.6. Implikasi Kebijakan -----	91	
VII. STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA -----	94	
7.1. Strategi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura -----	96	

7.2.	Kebijakan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura -----	98
7.3.	Langkah Operasional -----	98
7.4.	Indikator Keberhasilan -----	100
7.5.	Indikator Keberhasilan -----	108
VIII.	ROAD MAP DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA -----	109
8.1.	Overview Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) Jawa Timur -----	110
8.2.	Road Map dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur -----	112
IX.	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN -----	152
9.1.	Pemantauan dan Evaluasi -----	153
9.2.	Pelaporan -----	154
X.	PENUTUP -----	156
10.1.	Kesimpulan -----	157
10.2.	Rencana Tindak Lanjut -----	160

DAFTAR TABEL

	Halaman
5.1. Klasifikasi Tanah -----	46
5.2. Penggunaan Lahan Eksisting Jawa Timur Tahun 2014 -----	49
5.3. Karakteristik Penduduk Jawa Timur pada Tahun 2010 – 2015	51
5.4. Perkembangan Penduduk Miskin Jawa Timur pada Tahun 2010 – 2014 -----	52
5.5. Rata-rata Pendapatan Per Rumah Tangga Pertanian Menurut Sumber Pendapatan/Penerimaan selama Setahun (000 Rp) -----	53
5.6. Jumlah Waduk, Volume Tampung, Kapasitas Efektif dan Luas Daerah Genangan pada Wilayah Sungai di Jawa Timur -----	54
5.7. Jumlah Mata Air, Debit Rerata Tahunan dan Volume Tahunan di Wilayah Sungai UPT PSDAW di Jawa Timur Tahun 2012 -----	55
5.8. Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 2014 (Miliar Rupiah) -----	56
5.9. Konsumsi Rata-rata Beras, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Bawang Merah, Cabe Merah dan Jeruk per Kapita Setahun di Indonesia, 2009-2013 -----	58
5.10. Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Jawa Timur yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2014 -----	59
5.11. Karakteristik Tenaga Kerja Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan Jawa Timur Tahun 2014 -----	59
 6.1. Perkembangan Lahan Pertanian Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 -----	65
6.2. Tekanan Penduduk (TP) terhadap Lahan Sawah di Jawa Timur Tahun 2010-2014 -----	66
6.3. Kebutuhan dan Ketersediaan Alat dan mesin Pertanian di Jawa Timur Tahun 2010-2014 -----	77
6.4. Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2010-2014 -----	81
6.5. Analisa Ketersediaan Pangan Jawa Timur Tahun 2010-2014 -	85
6.6. Produksi, Konsumsi dan Surplus Komoditas Tanaman Pangan Utama Jawa Timur Tahun 2014 -----	87
6.7. Produksi, Konsumsi dan Surplus Hortikultura Utama Jawa Timur Tahun 2014 -----	88
 7.1. Ciri-ciri Kawasan Pertanian menurut Tahapan Perkembangannya -----	96
7.2. Klasifikasi Kawasan Tanaman Pangan menurut Perkembangannya -----	97
7.3. Klasifikasi Kawasan Hortikultura -----	97
 8.1. Klasifikasi Kawasan Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 2015 -----	114
8.2. Klasifikasi Kawasan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015 -----	135
8.3. Profil Jeruk Siam / Keprok Jawa Timur Tahun 2015 -----	136
8.4. Profil Bawang Merah Jawa Timur Tahun 2015 -----	140
8.5. Profil Cabai Merah Jawa Timur Tahun 2015 -----	145
 9.1.	

DAFTAR GAMBAR

	<i>Halaman</i>
1.1. Padi -----	2
2.1. Bawang Merah -----	14
2.2. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015-2019 -----	24
3.1. Kerangka Pemikiran Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur -----	36
5.1. Jeruk Siam / Keprok -----	43
5.2. Peta Ketinggian Lahan -----	44
5.3. Peta Kemiringan Lereng -----	44
5.4. Peta Jenis Tanah -----	45
5.5. Keadaan Jumlah Curah Hujan Tahun 2010- 2014 -----	46
5.6. Keadaan Rerata Jumlah Curah Hujan Tahun 2010- 2014 -----	47
5.7. Rumah Tangga Pertanian dengan Sumber Pendapatan Utama Usaha Sektor Pertanian (Sensus Pertanian 2013)-----	52
6.1. Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Provinsi Jawa Timur -----	63
6.2. Luas dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur -----	64
6.3. Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Jawa Timur 2010-2014 -----	68
6.4. Piramida Penduduk Jawa Timur 2010 dan 2015 -----	69
6.5. Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaan Jawa Timur 2010-2014 -----	69
6.6. Peta Sebaran Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Kabupaten / Kota Tahun 2013 -----	70
6.7. Peta Sebaran Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Tahun 2013 -----	70
6.8. Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai, ST2003 dan ST2013 -----	71
6.9. Perbandingan Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan dan Petani Gurem Tahun 2013 -----	71
6.10. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Bulanan Tahun 2012 - 2014 (2012=100) -----	73
6.11. Nilai Tukar Petani SubSektor Jawa Timur Tahun 2012 – 2014 -----	73
6.12. Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Bulanan Tahun 2014 (2012=100) -----	74
6.13. Jaringan Irigasi Usahatani / Jaringan Irigasi Desa, 2014 -----	75
6.14. Jaringan Irigasi Usahatani / Jaringan Irigasi Desa, 2014 -----	75
6.15. Distribusi PDRB (ADHB) Seri 2010 Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Tahun 2014 (%) -----	78
6.16. Distribusi PDRB (ADHB) Seri 2010 Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Tahun 2010 - 2014 (%) -----	78
6.17. Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Tahun 2010 – 2014 (%) -----	79
6.18. Rasio Ketersediaan Pangan (' I_{AV} ') Jawa Timur Tahun 2014 -----	86
6.19. Rerata Kontribusi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur terhadap Nasional Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2010-2014 (persen) -----	92
8.1. Peta Rerata Produktivitas Padi Jawa Timur Tahun 2010 – 2014 -----	115
8.2. Peta Kawasan Padi Tahun 2015 -----	116

8.3.	Tahapan Pengembangan Kawasan Padi di Jawa Timur	
	Tahun 2015 – 2019 -----	118
8.4.	Alternatif dan Peluang Industri Beras -----	119
8.5.	Peta Rerata Produktivitas Jagung Jawa Timur	
	Tahun 2010 – 2014 -----	120
8.6.	Peta Kawasan Jagung Tahun 2015 -----	121
8.7.	Tahapan Pengembangan Kawasan Jagung di Jawa Timur	
	Tahun 2015 – 2019 -----	122
8.8.	Alternatif dan Peluang Industri Jagung -----	124
8.9.	Peta Rerata Produktivitas Kedelai Jawa Timur	
	Tahun 2010 – 2014 -----	125
8.10.	Peta Kawasan Kedelai Tahun 2015 -----	126
8.11.	Tahapan Pengembangan Kawasan Kedelai di Jawa Timur	
	Tahun 2015 – 2019 -----	127
8.12.	Alternatif dan Peluang Industri Kedelai -----	128
8.13.	Peta Rerata Produktivitas Ubi Kayu Jawa Timur	
	Tahun 2010 – 2014 -----	130
8.14.	Peta Kawasan Ubi Kayu Tahun 2015 -----	131
8.15.	Tahapan Pengembangan Kawasan Ubi Kayu di Jawa Timur	
	Tahun 2015 – 2019 -----	132
8.16.	Alternatif dan Peluang Industri Ubi Kayu -----	133
8.17.	Peta Kawasan Jeruk Siam / Keprok Jawa Timur	
	Tahun 2015 -----	137
8.18.	Tahapan Pengembangan Kawasan Jeruk di Jawa Timur	
	Tahun 2015 – 2019 -----	138
8.19.	Alternatif dan Peluang Industri Jeruk -----	139
8.20.	Peta Kawasan Bawang Merah di Jawa Timur	
	Tahun 2015-----	142
8.21.	Tahapan Pengembangan Kawasan Bawang Merah	
	di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 -----	143
8.22.	Alternatif dan Peluang Industri Bawang Merah -----	144
8.23.	Peta Kawasan Cabai Merah Jawa Timur Tahun 2015 -----	145
8.24.	Tahapan Pengembangan Kawasan Cabai Merah	
	di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 -----	147
8.25.	Alternatif dan Peluang Industri Cabai Merah -----	148

DAFTAR BOX**DAFTAR LAMPIRAN***Halaman*

1.1.	8 Kawasan Agropolitan di Jawa Timur -----	3
2.1.	Sasaran Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur -----	22
3.1.	Pendekatan Kawasan Komoditas Unggulan -----	27
3.2.	Konsep Pengembangan Wilayah -----	31
6.1.	Rumus Kebutuhan Alsintan Indeks, BEP dan Kapasitas Alsintan -----	76
6.2.	Sasaran Luas Tanam dan Luas Panen -----	77
6.3.	Analisis Aspek Ketersediaan Pangan -----	80
6.4.	Pola Konsumsi -----	84
7.1.	Kriteria Dasar Kawasan -----	96

1.	Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Timur
2.	Peta Kawasan Padi Tahun 2015
3.	Peta Kawasan Jagung Tahun 2015
4.	Peta Kawasan Kedelai Tahun 2015
5.	Peta Kawasan Ubi Kayu Tahun 2015

DAFTAR PUSTAKA

1. _____, 2015, Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2015-2019, Kementerian Pertanian, Jakarta;
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permentan /OT.140/ 9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
3. Peraturan Daerah nomor : 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2019;
4. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 03/Kpts/PD.120/ 1/2015 tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu Nasional;
5. Keputusan Menteri Pertanian nomor : 45/Kpts/PD.120 /1/2015 tentang Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah dan Jeruk Nasional;
6. Peraturan Menteri Pertanian nomor : 50/Permentan/CT.140 /8/2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;
7. Bambang Winarso, 2013, Kebijakan Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan dalam Mendukung Program Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) Studi Kasus di Propinsi Gorontalo;
8. _____, 2003, Petunjuk Teknis Penelitian Dan Pengkajian Nasional Hortikultura Dan Indikator Pembangunan Pertanian, Balai Pengkajian Dan Pengembangan Teknologi Pertanian Badan Penelitian Dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian;
9. _____, 2005, Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta;
10. _____, 2005, Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta;
11. _____, 2005, Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Kedelai, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta;
12. _____, 2005, Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Ubi Kayu, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta;
13. _____, 2005, Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jeruk, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta;
14. _____, 2005, Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Bawang Merah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta;
15. _____, 2005, Prospek Dan Arah Pengembangan Agribisnis: Dukungan Aspek Mekanisasi Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta;
16. _____, 2006, Indonesia 2005 – 2025 Buku Putih Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Bidang Ketahanan Pangan, Kementerian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Jakarta;
17. _____, 2008, Teknologi Budidaya Cabai Merah, Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian Jakarta;
18. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 69 / 2009 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2010;

19. _____, 2011, Road Map / Rancang Bangun Pengembangan Kawasan Bawang Merah di Jawa Timur 2012 ~ 2014, Dinas pertanian Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 93 / 2010 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2011;
21. _____, 2011, Road Map / Rancang Bangun Pengembangan Kawasan Cabai Merah di Jawa Timur 2012 ~ 2014, Dinas pertanian Provinsi Jawa Timur;
22. _____, 2011, Jawa Timur Dalam Angka 2011, BPS Provinsi Jawa Timur;
23. Ari Krisnohadi, 2011, Tekanan Penduduk dan Trend Perubahan Penggunaan Lahan Potensial untuk Pertanian di Kota Singkawang Kalimantan Barat, Prosiding Seminar Nasional Budidaya Pertanian | Urgensi dan Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Bengkulu;
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 81 / 2011 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2012;
25. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 / 2012 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2013;
26. _____, 2012, Jawa Timur Dalam Angka 2012, BPS Provinsi Jawa Timur;
27. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 78 / 2013 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2014;
28. _____, 2013, Kalender Tanam Terpadu, Penelitian, Pengkajian, Pengembangan dan Penerapan, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta;
29. _____, 2013, Jawa Timur Dalam Angka 2013, BPS Provinsi Jawa Timur;
30. _____, 2013, Berita Resmi Statistik No. 82/12/35 Th. XI, 2 Desember 2013 tentang Hasil Sensus Pertanian 2013 (Angka Tetap);
31. _____, 2013, Potret Usaha Pertanian Provinsi Jawa Timur Menurut Subsektor (Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 dan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013), BPS Provinsi Jawa Timur;
32. _____, 2013, Buletin Konsumsi Pangan edisi volume 4 nomor 2 tahun 2013, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta;
33. _____, 2013, Buletin Konsumsi Pangan edisi volume 4 nomor 3 tahun 2013, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta;
34. _____, 2013, Buletin Konsumsi Pangan edisi volume 4 nomor 4 tahun 2013, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur No 72 / 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Timur Tahun 2015;
36. _____, 2014, Jawa Timur Dalam Angka 2014, BPS Provinsi Jawa Timur;
37. _____, 2014, Metode Perencanaan Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta;
38. Menteri Pertanian, 2014, Lampiran 2. Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/Ot.140/7/2010, Tanggal : 27 Juli 2010 Tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi, Kementerian Pertanian, Jakarta;
39. _____, 2014, Buletin Konsumsi Pangan edisi volume 5 nomor 1 tahun 2014, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian, Jakarta;
40. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 8 Januari 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
41. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah;
42. _____, 2015, Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan pertanian Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Provinsi Jawa Timur, Kementerian Pertanian, Jakarta;
43. _____, 2015, Jawa Timur Dalam Angka 2015, BPS Provinsi Jawa Timur;
44. _____, 2015, Neraca Bahan Makanan (NBM) Pusdatin Kementerian Pertanian, Jakarta;



1



Gambar 1.1. Padi



PENDAHULUAN

Latar Belakang

Saat ini, pembangunan pertanian terutama tanaman pangan dan hortikultura memasuki pada tahap-3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), dengan periode RPJMN tahun 2015-2019. Sektor pertanian masih menjadi sektor penting dalam pembangunan ekonomi nasional karena peran strategis sektor pertanian dalam kontribusinya sebagai penyedia bahan pangan dan bahan baku industri, penyumbang PDB, penghasil devisa negara, penyerap tenaga kerja, sumber utama pendapatan rumah tangga perdesaan, penyedia bahan pakan dan bioenergi.

Sejalan dengan NAWACITA, yaitu Sembilan Agenda Prioritas Kabinet Kerja yang mengarahkan pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, sehingga Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian tahun 2015-2019 berupaya meningkatkan peran strategis pertanian melalui 7 (tujuh) Strategi Utama Penguatan Pembangunan Pertanian untuk Kedaulatan Pangan (P3KP) meliputi (1) peningkatan ketersediaan dan pemanfaatan lahan, (2) peningkatan infrastruktur dan sarana pertanian, (3) pengembangan dan perluasan logistik benih/bibit, (4) penguatan kelembagaan petani, (5) pengembangan dan penguatan pembiayaan, (6) pengembangan dan penguatan bioindustri dan bioenergi, serta (7) penguatan jaringan pasar produk pertanian. Di dalam Renstra tersebut memuat target yang terkait dengan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura : 1) Swasembada padi, jagung dan kedelai dengan pertumbuhan padi sebesar 3 persen pertahun, jagung sebesar 5,4 persen pertahun dan kedelai sebesar 27,5 persen pertahun; 2) Peningkatan komoditas dengan tambah berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor untuk komoditas cabai, bawang merah, mangga, nenas, manggis, salak, kentang, jeruk; 3) Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi untuk ubi kayu; 4) Peningkatan pendapatan keluarga petani.

Box 1.1.

8 Kawasan Agropolitan di Jawa Timur

1. Kawasan Agropolitan Madura ditetapkan pada Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep;
2. Kawasan Agropolitan Ijen ditetapkan pada Kabupaten Jember, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Bondowoso, dan Kabupaten Banyuwangi;
3. Kawasan Agropolitan Bromo - Tengger - Semeru terdiri : Kota Malang, Kabupaten Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo dan Kabupaten Lumajang;
4. Kawasan Agropolitan Wilis meliputi : merupakan kawasan strategis perbatasan provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah, ditetapkan pada Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, dan Kabupaten Pacitan;
5. Kawasan Metropolitan ditetapkan pada Kota Surabaya, Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Mojokerto dan Kabupaten Mojokerto;
6. Kawasan Segitiga Emas ditetapkan pada Kabupaten Tuban - Lamongan - Bojonegoro sebagai wilayah inti pengembangan Cluster Segitiga Emas dan Kabupaten Gresik sebagai pendukung;
7. Kawasan Regional Kelud ditetapkan pada Kabupaten Jombang, Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, dan Kota Blitar;
8. Kawasan Pesisir dan Pulau - pulau kecil diarahkan pada wilayah yang berada pada pesisir Jawa Timur dan wilayah kepulauan.

Upaya pencapaian target tersebut tentulah tidak mudah, mengingat pembangunan tanaman pangan dan hortikultura masih dihadapkan pada beberapa permasalahan mendasar diantaranya adalah meningkatnya kerusakan lingkungan dan perubahan iklim global, terbatasnya ketersediaan infrastruktur, belum optimalnya sistem perbenihan, terbatasnya akses petani terhadap permodalan, masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani, meningkatnya alih fungsi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian, serta batasan administratif serta berorientasi pada kegiatan-kegiatan yang tidak mampu menjadi faktor pengungkit karena belum optimalnya koordinasi kerja antar sektor, antar jenjang pemerintahan provinsi dengan kabupaten/kota, dan antar pemerintahan kabupaten/kota akibat belum tersedianya rancangan bangun pembangunan tanaman pangan dan hortikultura secara menyeluruh yang memungkinkan terciptanya kerjasama antar daerah sehingga tumpang tindih kegiatan dapat dihindari dan pembangunan pertanian dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Fokus pembangunan Jawa Timur tahun 2014-2019 diarahkan pada pemantapan perkotaan pusat kegiatan nasional sebagai metropolitan di Jawa Timur, pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan peningkatan kantong-kantong produksi utama dengan pusat pengolahan dan pemasaran sebagai inti pengembangan sistem agropolitan serta memantapkan pengembangan kawasan strategis dengan membagi peran strategis pembangunan kewilayahan sebagaimana termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnisnya serta mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian agribisnis diwilayah sekitarnya. Pengembangan kawasan / cluster kewilayahan menjadi dasar penetapan sasaran kebijakan pengembangan kewilayahan untuk meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi, infrastruktur, sosial dan budaya di seluruh wilayah Jawa Timur sebagai kawasan agropolitan.

Sehubungan dengan hal di atas, perlu disusun rancangan bangun pengembangan komoditas strategis dalam suatu kawasan yang mampu mendorong

terciptanya kerjasama antar daerah guna menjamin terpenuhinya ketersediaan pasokan produksi komoditas pangan dengan tetap memberikan keuntungan yang memadai bagi petani dan produsen melalui pemberian berbagai insentif produksi dan jaminan harga pasar hasil panen yang layak. Rancang bangun pengembangan komoditas strategis yang disusun harus sejalan dengan pendekatan sistem perencanaan dan pembangunan nasional dan sesuai dengan aspirasi/kebutuhan masyarakat dan didasarkan pada kelayakan teknis, sosial ekonomis dan lingkungan. Dengan demikian, penyusunan rancang bangun pengembangan komoditas strategis merupakan bentuk pendekatan yang terpadu dan menyeluruh dalam perencanaan yang didasarkan atas kelayakan dan kesesuaian terhadap prasyarat dan potensi dampaknya terhadap pengaruh timbal balik dari teknis budidaya, agroekosistem dan faktor sosial-ekonomi.

Keterpaduan pengembangan komoditas yang didukung secara horisontal dan vertikal oleh segenap pelaku dan pemangku kepentingan dalam suatu kawasan pertanian yang berskala ekonomis, mensyaratkan pendekatan yang menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Hingga saat ini telah banyak peraturan-peraturan yang dibuat dalam rangka pembangunan pertanian, tetapi peraturan tersebut belum dapat dijadikan sebagai rujukan operasional yang bersifat komprehensif yang dapat dijadikan acuan operasional bagi daerah dalam menyusun rancang bangun pewilayahan dan pengembangan kawasan pertanian komoditas strategis dan komoditas unggulan nasional di daerah. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian masih bersifat umum bagi semua komoditas pertanian, dan dimaksudkan sebagai dasar dalam pelaksanaan rekomendasi kawasan peruntukan pertanian pada Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota bagi setiap pemangku kepentingan yang akan menggunakan peruntukan kawasan pertanian.

Peran pengembangan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur dalam kontribusi terhadap pembangunan ekonomi Jawa Timur dalam pembentukan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) dan menjadi basis mata pencaharian masyarakat

perdesaan sehingga dipandang penting penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur. Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian nasional di tingkat provinsi melalui pemilihan sektor unggulan sebagai basis pembangunan kawasan perlu yang mempertimbangkan sumberdaya yang ada, multiplier effect, maupun kesesuaian dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat Jawa Timur. Sebagai rancang bangun dan instrumen perencanaan kawasan tanaman pangan dan hortikultura, Master Plan disusun berdasarkan potensi sumberdaya lahan dengan mempertimbangkan penggunaan lahan saat ini (present land use), kawasan lindung, kelayakan usahatani, ketersediaan tenaga kerja, sosial ekonomi dan budaya masyarakat, sarana dan prasarana transportasi serta sarana dan prasarana perekonomian lainnya.

1.2. Tujuan

Tersusunnya Master Plan sebagai amanat UU no. 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional dalam mengembangkan tanaman pangan dan hortikultura Jawa Timur sebagai komoditas strategis dan komoditas unggulan nasional. Dengan demikian, Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur ini disusun dengan tujuan:

1. Sebagai acuan untuk merencanakan dan menetapkan sasaran dan lokasi kegiatan untuk mendukung pencapaian target produksi dan produktivitas (padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah dan jeruk siam/keprok);
2. sebagai acuan untuk pengambilan keputusan dalam menetapkan kebijakan pengembangan komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah dan jeruk siam/keprok sebagai komoditas strategis dan unggulan yang secara komprehensif, terpadu dari aspek hulu, hilir maupun aspek penunjangnya untuk mewujudkan sinergitas, terintegrasi, mengingat pengembangan kawasan

tanaman pangan dan hortikultura yang sinergis, terintegrasi, menjadi acuan dari Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

1.3. Sasaran yang Diharapkan

Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Jawa Timur merupakan dokumen perencanaan pertanian dalam pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura yang memadukan program dan kegiatan pertanian menjadi suatu kesatuan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan dengan sasaran untuk mewujudkan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor serta peningkatan kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani. Sebagai dokumen perencanaan, sasaran yang diharapkan dari Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura, yaitu diperoleh output rancang bangun pengembangan kawasan komoditas unggulan nasional di kabupaten se Jawa Timur.

1.4. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara

- Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 149 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5068);
 7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Nomor 132 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 5170);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5106);
 12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/ Permentan/OT .140/9/2009 tentang Kriteria Teknis Kawasan Peruntukan Pertanian;
 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/RC.1 10/1/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2010-2014;
 15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/CT.140/8/ 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian;

1.5. Pengertian

Istilah / pengertian dan definisi yang digunakan dalam Master Plan

Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur ialah:

1. Aglomerasi adalah pengelompokan jenis usaha tertentu sehingga membentuk suatu kawasan khusus;
2. Benih tanaman yang selanjutnya disebut benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan / atau mengembangbiakkan tanaman;
3. Konektivitas adalah hubungan antar wilayah yang saling melengkapi membentuk satu kesatuan kawasan;
4. Pengelolaan Tanaman dan Sumberdaya Terpadu (PTT) adalah suatu pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani melalui perbaikan sistem/pendekatan dalam perakitan paket teknologi yang sinergis antar komponen teknologi, dilakukan secara partisipatif oleh petani serta bersifat spesifik lokasi. Komponen teknologi PTT ditentukan bersama-sama petani melalui analisis kebutuhan teknologi (need assessment). Komponen teknologi PTT dasar/compulsory adalah teknologi yang dianjurkan untuk diterapkan di semua lokasi. Komponen teknologi PTT pilihan adalah teknologi pilihan disesuaikan dengan kondisi, kemauan, dan kemampuan. Komponen teknologi PTT pilihan dapat menjadi compulsory apabila hasil KKP (Kajian Kebutuhan dan Peluang) memprioritaskan komponen teknologi yang dimaksud menjadi keharusan untuk pemecahan masalah utama suatu wilayah, demikian pula sebaliknya bagi komponen teknologi dasar;
5. *Good Agriculture Practices* (GAP) adalah norma budidaya tanaman hortikultura sesuai dengan kaidah-kaidah yang benar dan tepat;
6. Kelompoktani adalah sejumlah petani yang tergabung dalam satu hamparan/wilayah yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan untuk meningkatkan usaha agribisnis dan memudahkan pengelolaan dalam proses distribusi, baik itu benih, pestisida, sarana produksi dan lain-lain;
7. Rencana Usahatani Kelompok (RUK) adalah rencana kerja usahatani dari kelompoktani untuk satu periode musim tanam yang disusun melalui musyawarah dan kesepakatan bersama dalam pengelolaan usahatani sehamparan wilayah kelompoktani yang memuat uraian kebutuhan saprodi yang meliputi: jenis, volume, harga satuan dan jumlah uang yang diajukan untuk

- pembelian saprodi sesuai kebutuhan di lapangan (spesifik lokasi) dan pengeluaran lainnya (bantuan tanam jajar legowo, pertemuan kelompok) dan lainnya;
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
 9. Benih Bina adalah b enih dari varietas unggul yang telah dilepas produksi dan peredarannya diawasi;
 10. Benih Varietas Unggul Bersertifikat adalah benih bina yang telah disertifikasi;
 11. Benih bersubsidi adalah benih padi (inbrida dan hibrida) bersertifikat yang mendapat subsidi bersumber dari dana APBN;
 12. Swadaya adalah semua upaya yang dilakukan petani dengan sumber pembiayaan yang berasal dari modal petani sendiri;
 13. Wilayah Fokus adalah lokasi peningkatan produktivitas/IP di areal/kawasan dan non kawasan/rintisan/reguler GP-PTT;
 14. Wilayah Non-Fokus adalah lokasi peningkatan produktivitas/IP di luar areal/kawasan dan non kawasan/rintisan/regular GP-PTT;
 15. *Carry Over* adalah sisa pertanaman kegiatan tahun berjalan tetapi produksi tidak berkontribusi pada tahun tersebut, namun akan berkontribusi pada tahun berikutnya;
 16. Kebun / lahan usaha adalah tempat membudidayakan tanaman hortikultura dengan sistem pengelolaan tertentu;
 17. Kemitraan adalah kerja sama antar pihak terkait yang saling mendukung dan saling melengkapi melalui kesepakatan tertentu;
 18. Kawasan Agribisnis Hortikultura adalah suatu ruang geografis yang didelineasi oleh ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur yang sama sehingga membentuk kawasan yang berisi berbagai kegiatan usaha berbasis hortikultura termasuk penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen, pemasaran, serta berbagai kegiatan pendukungnya;
 19. Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indeks kemampuan daya beli petani dalam

- membayai kebutuhan hidup rumah tangga yang merupakan rasio antara harga tertimbang setiap komoditas yang diterima petani dengan harga tertimbang konsumsi makanan, konsumsi non-makanan, biaya produksi dan penambahan barang modal yang dibayar petani;
20. Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan;
 21. Pelaku usaha adalah petani, kelompok tani, gabungan kelompok tani, asosiasi, atau badan usaha yang bergerak di bidang budidaya hortikultura;
 22. Perlindungan tanaman adalah upaya untuk mencegah kerugian pada budidaya tanaman yang diakibatkan oleh Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
 23. Pewilayahan komoditas adalah penentuan wilayah yang diperuntukkan bagi pengembangan suatu komoditas berdasarkan kesesuaian tanah dan agroklimat, sosio ekonomi dan pemasaran serta persediaan prasarana, sarana dan teknologinya;
 24. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah uraian langkah - langkah operasional standar dari kegiatan tertentu;
 25. Registrasi kebun/lahan usaha adalah proses penomoran atau pengkodean kebun/lahan usaha yang telah memenuhi persyaratan penerapan GAP;
 26. Tanaman buah adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman buah pohon, tanaman buah merambat dan semusim, tanaman buah terna, dan tanaman buah perdu;
 27. Tanaman sayuran adalah tanaman budidaya yang terdiri atas tanaman sayuran buah, tanaman sayuran daun, tanaman sayuran umbi, dan jamur.

1.6. Ruang Lingkup

Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur diawali dengan mengenali potensi berdasarkan ketersediaan dan kondisi pemanfaatan sumberdaya alam, prasarana wilayah dan ketersediaan pelayanan sosial-ekonomi.

Selanjutnya Penyusunan Master Plan untuk Pengembangan Komoditas

Unggulan dilakukan dengan memisahkan Kawasan Budidaya dengan Kawasan non Budidaya (Kawasan Lindung) yang berpedoman, mengacu dan memperhatikan : 1) dokumen perencanaan jangka menengah nasional di bidang pertanian (Rencana Strategis) Kementerian Pertanian/Renstra K/L; 2) Rencana Strategis Direktorat Jenderal / Badan lingkup Kementerian Pertanian); 3) dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031; 4) Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019.

1.7. Sistimatika

Komponen isi dari Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur dengan rincian sistematika sebagai berikut :

- Bab I : Pendahuluan yang memuat Latar Belakang, Maksud, Tujuan dan Sasaran Penyusunan Master Plan, Hasil yang diharapkan, Dasar Hukum, Pengertian dan Ruang Lingkup serta Sistematika;
- Bab II : Memuat Isu Strategis dan Arah Kebijakan Pengembangan Kawasan yang mencakup Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan, Program Prioritas;
- Bab III : Tinjauan Pustaka, Landasan Teori dan Kerangka Pemikiran yang merupakan dasar penyusunan Master Plan yang dilengkapi Tantangan dan Permasalahan Pembangunan Tanaman Pangan (Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu) dan Hortikultura (Cabai, Bawang Merah dan jeruk);
- Bab IV : Metodologi yang menjelaskan Jenis dan Sumber data, Metode Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data;
- Bab V : Mencakup Perkembangan kondisi saat ini, Potensi Produksi dan

PENDAHULUAN

Potensi Jawa Timur, yang meliputi : Kondisi Umum Wilayah, Agroekologis dan Lingkungan, Kependudukan dan Sosial Budaya, Kelembagaan, Sarana dan Prasarana Penunjang, dan Perekonomian, Konsumsi dan Pemasaran Hasil Pertanian, Aspek Sumber Daya Manusia;

- Bab VI : Analisis Perencanaan Pengembangan yang memuat : Analisis Biofisik Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura; Analisa Kependudukan, Sosial Budaya dan Kesejahteraan; Analisa Sarana Prasarana dan Kelembagaan; Analisa Ekonomi, Konsumsi dan Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian; Analisa Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian; Implementasi Kebijakan Pertanian;
- Bab VII : Strategi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur, Kriteria dan Indikator Keberhasilan;
- Bab VIII : Road Map dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015-2019 yang menjelaskan Strategi, Program dan Rencana Aksi;
- Bab IX : Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan;
- Bab X : Penutup yang terdiri Kesimpulan, Saran dan Rencana Tindak Lanjut.



2



Gambar 2.1. Bawang Merah



ISU STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

2.1. Permasalahan dan Tantangan Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pembangunan periode 2014-2019 pada dasarnya merupakan kelanjutan dan peningkatan pelaksanaan pembangunan pada periode sebelumnya (2009 – 2014). Agar pembangunan dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan memenuhi target sasaran yang ditetapkan, diperlukan gambaran permasalahan yang akan dihadapi pada periode pembangunan jangka waktu lima tahun ke depan. Permasalahan mendasar yang dihadapi sektor pertanian, khususnya dalam jangka waktu 2015-2019, adalah masih rendahnya kontribusi tanaman bahan makanan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Timur dan Nilai Tukar Petani (NTP).

Dua permasalahan mendasar tersebut disebabkan beberapa permasalahan pokok dalam pengembangan tanaman pangan untuk komoditas padi, jagung, kedelai dan ubi kayu di Jawa Timur maupun pengembangan hortikultura terutama pada komoditas cabai, bawang merah dan jeruk tidak jauh berbeda, yaitu masih belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura yang diakibatkan :

1. Sempitnya rata-rata kepemilikan lahan pertanian (0,39 hektar);
2. Menurunnya daya dukung sumber daya alam, lingkungan yang dieksplotasi berlebihan, anomali iklim dan, degradasi lahan;
3. Belum optimalnya infrastruktur pertanian;
4. Tingkat kehilangan hasil (losses) yang masih cukup tinggi dan masih rendahnya daya saing produk-produk pertanian terhadap produk impor;

5. Lemahnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani;
6. Belum optimalnya kelembagaan petani;
7. Relatif terbatasnya tingkat pendidikan petani .

Berbagai permasalahan mendasar tersebut menjadi isu strategis sekaligus tantangan bagi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura kedepan, diantaranya adalah :

1. Upaya pemenuhan ketersediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan di Jawa Timur masih rentan terhadap isu pemanasan global yang berdampak terjadinya perubahan iklim;
2. Tingginya alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian serta terjadinya degradasi sumberdaya alam;
3. Kelembagaan petani yang masih lemah, yang disebabkan masih relatif rendahnya kualitas sumber daya manusia petani;
4. Lemahnya akses petani terhadap permodalan, dan terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana produksi pertanian (benih, pupuk, pestisida, alsintan) pendukung pengembangan sistem agribisnis;
5. Fluktuasi harga produk pertanian akibat ketersediaan bahan pangan tidak kontinyu sepanjang tahun serta lemahnya tata niaga produk pertanian dan panjangnya rantai distribusi produk pertanian;
6. Pengelolaan usahatani yang berorientasi pasar regional dan internasional.

Secara lebih spesifik, permasalahan dari komoditas padi, jagung, kedelai dan ubi kayu, cabai, bawang merah serta jeruk diuraikan sebagai berikut:

a. Padi

Sumaryanto, 2009 mengemukakan bahwa upaya yang harus ditempuh untuk memantapkan ketahanan pangan mencakup aspek kuantitatif maupun kualitatif. Pola konsumsi pangan penduduk sangat terdominasi beras, padahal ketergantungan yang berlebihan terhadap satu jenis komoditas sangatlah rawan. Dari sisi konsumsi, mengakibatkan penyempitan spektrum pilihan komoditas yang mestinya dapat dimanfaatkan untuk pangan. Dari sisi produksi juga rawan karena: a) pertumbuhan produksi padi sangat ditentukan oleh

ketersediaan air irigasi yang cukup; b) laju konversi lahan sawah ke non sawah semakin sulit dikendalikan, dan c) lahan yang secara teknis sosial ekonomi layak dijadikan sawah semakin berkurang.

b. Jagung dan Kedelai

Permasalahan spesifik dalam pengembangan jagung dan kedelai antara lain: a) masih rendahnya tingkat adopsi teknologi budidaya spesifik lokasi di tingkat petani, sebagai akibat rendahnya kemampuan permodalan petani untuk dapat menyerap perkembangan teknologi produksi yang cukup pesat, b) persaingan (kompetisi) tanaman pada lahan usahatani, dengan tanaman lain yang memiliki profitabilitas usahatani yang lebih tinggi, c) serangan hama penyakit jagung dan kedelai, dan d) Kondisi iklim tropis, terutama pada usaha pertanaman kedelai, dimana perkembangannya relatif lebih rendah di daerah tropis dibanding di daerah sub tropis sehingga produktivitasnya juga rendah. Dalam konteks demikian, upaya pengembangan jagung dan kedelai nasional haruslah dilakukan secara intensif, dan juga dalam hal pengembangan arealnya perlu dilakukan ekstensifikasi khususnya di luar Jawa seiring dengan program percepatan dan perluasan ekonomi nasional. Hasil kajian Sudaryanto dan Swastika (2007), menunjukkan bahwa belum berkembangnya areal kedelai nasional sebagai cerminan atas masih rendahnya insentif bagi petani untuk bertanam kedelai. Harga kedelai impor yang murah, menjadi salah satu tidak kondusifnya pengembangan kedelai nasional.

c. Bawang Merah

3 (tiga) permasalahan utama dari pengembangan bawang merah yang harus diatasi, yakni : a) upaya peningkatan produktivitas belum optimal; b) terjadinya kelebihan produksi (over supply); dan c) fluktuasi harga di sentra produksi. Adapun beberapa permasalahan lainnya :

1) Aspek Teknologi On Farm dan Off Farm

- Masih rendahnya mutu produk dan inefisensi usahatani akibat belum diterapkannya teknologi budidaya yang baik (GAP)
- Rendahnya penyediaan dan penggunaan benih bermutu; karena kemampuan teknologi budidaya dan perbanyak benih oleh

penangkar masih terbatas sehingga petani menggunakan benihnya sendiri;

- Benih varietas lokal yang ada tidak mampu beradaptasi sepanjang musim sehingga terpaksa menggunakan benih introduksi yang berasal dari impor;
- Sering terjadinya fluktuasi harga bawang sehingga tidak memberikan jaminan akan kelangsungan usaha;
- Bawang merah impor masuk pada saat panen bahkan di pasok ke daerah sentra produksi sehingga harga jual petani jatuh;
- Biaya produksi terus meningkat akibat penggunaan bahan kimia yang berlebihan (tidak sesuai aturan), harga input kimiawi terus meningkat sementara petani punya ketergantungan akan bahan tersebut;
- Tingginya serangan OPT utama;
- Belum berkembangnya pengusahaan secara organik;
- Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil terbatas

2) Aspek Sosial Ekonom

- Kelembagaan kelompok tani belum mantap
- Rendahnya efisiensi usahatani
- Sistem kerja penyuluhan belum optimal
- Rendahnya tingkat konsumsi produk hortikultura
- Rendahnya akses permodalan petani
- Masih kurangnya sistem informasi pasar
- In-efisiensi jaringan pemasaran / tata niaga

3) Aspek Pendukung

- Rendahnya penggunaan alsintan
- Belum optimalnya pengembangan komoditas prospektif
- Belum optimalnya jumlah ubinan hortikultura
- Belum diterapkannya standarisasi mutu produk
- Masih rendahnya pemanfaatan lahan perkarangan
- Kurangnya optimalnya pengembangan kemampuan dan wawasan petugas.

d. Cabai merah

Sekalipun cabai merah mempunyai prospek permintaan yang baik, tetapi sistem agribisnis cabai merah dalam skala usaha kecil masih menghadapi

berbagai masalah atau kendala. Beberapa permasalahan mendasar yang dihadapi dalam pengembangan kawasan cabai merah, yaitu:

- 1) Aspek Teknologi On Farm dan Off Farm
 - Masih rendahnya mutu produk dan inefisiensi usahatani akibat belum diterapkannya teknologi budidaya yang baik (GAP);
 - Masih banyak komponen teknologi pra-panen lainnya belum diterapkan secara tepat guna seperti pemupukan berimbang melalui akar, aplikasi PPC/ZPT melalui daun, pemeliharaan tanaman secara intensif, penggunaan mulsa plastik atau jerami, pengendalian hama/penyakit serta gulma;
 - Tingginya serangan OPT utama;
 - Penanganan pasca panen dan pengolahan hasil terbatas
- 2) Aspek Sosial Ekonomi;
 - Tidak adanya kepastian penjualan;
 - Harga sangat berfluktuasi;
 - Rendahnya margin usaha, akibat usahatani yang inefisiensi;
 - Kelembagaan kelompok tani belum mantap
 - Sistem kerja penyuluhan belum optimal
 - Rendahnya akses permodalan petani serta ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan teknis perbankan
 - Masih kurangnya sistem informasi pasar dan lemahnya akses pasar
 - In-efisiensi jaringan pemasaran / tata niaga
- 3) Aspek Pendukung
 - Belum optimalnya jumlah ubinan hortikultura
 - Belum diterapkannya standarisasi mutu produk
 - Masih rendahnya pemanfaatan lahan perkarangan
 - Kurangnya optimalnya pengembangan kemampuan dan wawasan petugas.

d. Jeruk

Upaya peningkatan produksi dan mutu jeruk dihadapkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1) Hulu

- Ketersediaan benih yang bermutu di masing-masing sentra masih terbatas, karena belum berkembangnya usaha penangkaran oleh petani / kelompok tani terutama dalam prosedur pelabelan;
- Masih terbatasnya sarana pendukung dalam pengembangan kebun Jeruk seperti Jalan Usaha Tani (JUT), sumur dangkal/embung permanen, pompa air untuk irigasi dan mengantisipasi terjadinya kekeringan;
- Fasilitasi Unit Pembuatan Pupuk Organik (Chopper, Rumah Pupu Granulator) belum secara maksimal diarahkan peruntukannya bagi kebun Jeruk petani;
- Fasilitasi sarana / prasarana budidaya (Hand / power sprayer, kultivator) dan peralatan panen (keranjang panen, alat panen, alat angkut) yang masih kurang;

2) On Farm / budidaya

- Teknik budidaya belum optimal terutama pemupukan yang tidak tepat waktu karena tergantung air hujan;
- Kesadaran penggunaan pupuk berimbang antara pupuk anorganik dan organik pada padi masih kurang;
- Pengendalian OPT khususnya CVPD yang kurang maksimal. Perkembangan hama penyakit dari tahun ke tahun sangat fluktuatif baik macam maupun tingkat serangannya;
- Serangan hama dan penyakit masih menjadi kendala mengingat keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki petani;
- Anjuran teknis budidaya yang baik (GAP) belum sepenuhnya dikuasai/dilaksanakan oleh petani;

3) Hilir

- Penanganan pasca panen masih bersifat tradisional sehingga mengakibatkan kualitas dan tampilan produk yang tidak optimal;
- Terbatasnya keberadaan sarana/prasarana pengolahan Jeruk di sentra produksi;
- Kurangnya dukungan permodalan dari lembaga keuangan untuk petani, sehingga kesulitan pemenuhan sarana prasarana produksi yang memadai;

- Pemasaran hasil Jeruk belum efisien, masih dilakukan secara perorangan dengan harga cenderung fluktuatif dan masih dikuasai tengkulak;
- Kelembagaan petani masih lemah dalam pengumpulan dan pemasaran hasil.

2.2. Visi dan Misi

"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong," merupakan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015 - 2019 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 sekaligus juga menjabarkan Visi, Program Aksi Presiden/Wakil Presiden. Visi tersebut dijabarkan menjadi Tujuh Misi serta Sembilan Agenda Prioritas (NAWA CITA) yang didalamnya memuat rencana Pembangunan pertanian lima tahun ke depan, yaitu (1) Peningkatan Agroindustri, dan (2) Peningkatan Kedaulatan Pangan. Selanjutnya mengacu agenda prioritas tersebut, dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian ditetapkan visi "Terwujudnya Sistem Pertanian - Bioindustri Berkelanjutan yang Menghasilkan Beragam Pangan Sehat dan Produk Bernilai Tambah Tinggi Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Kedaulatan Pangan dan Kesejahteraan Petani".

Mempertimbangkan visi pemerintah pusat maupun visi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014- 2019, yaitu "Jawa Timur Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Mandiri, Berdaya Saing dan Berakhhlak," sekaligus mengikuti dinamika tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian kedepan yang lebih berpihak kepada kesejahteraan petani dirumuskan, "Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk kesejahteraan petani" sebagai visi Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura.

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut, perlu ditetapkan beberapa misi Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur adalah, sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang aman konsumsi dan berdaya saing tinggi; dan
- 3) Mewujudkan usaha pertanian dengan menumbuhkan ekonomi produktif di pedesaan.

Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur lima tahun kedepan mempunyai tujuan :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan bahan baku industri pengolahan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi tanaman pangan dan hortikultura;
3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani.

Menyelaraskan visi pembangunan tanaman pangan dan hortikultura untuk menjadikan Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk kesejahteraan petani, serta berdasarkan hasil analisis SWOT maka ditetapkan Visi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur, yaitu:

"Terwujudnya Jawa Timur sebagai Pusat Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura yang Berdaya Saing dan Berwawasan Lingkungan melalui Pengembangan Kawasan untuk kesejahteraan Masyarakat Jawa Timur"

Dari visi ini diturunkan misi, tujuan, sasaran, serta strategi dan program pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura Jawa Timur untuk komoditas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai, bawang merah dan jeruk siam/keprok. Misi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Dan Hortikultura Jawa Timur adalah :

- 1) Mewujudkan kemandirian pangan melalui peningkatan produksi dan produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk secara berkelanjutan;
- 2) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan padi, jagung, kedelai, ubi kayu,

Box 2.1. Sasaran Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur:

Tanaman Pangan

Padi	:	Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep
Jagung	:	Kabupaten Ponorogo, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Situbondo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Tuban, Lamongan,
Kedelai	:	Kabupaten Kabupaten Ponorogo, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Jombang, Nganjuk, Ngawi, Magetan, Lamongan, Sampang
Ubi Kayu	:	Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Jombang, Magetan, Tuban

Hortikultura

Cabai	:	Kabupaten Pacitan, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Magetan, Gresik, Sampang, Pamekasan
Bawang Merah	:	Kabupaten Kediri, Malang, Probolinggo, Nganjuk, Bojonegoro, Magetan, Ngawi, Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep, Kota Batu
Jeruk Keprok/Siam	:	Kabupaten Jember, Banyuwangi, Malang, Magetan, Ponorogo, Pamekasan, Sumenep, Kota Batu, Blitar, Lumajang, Tuban dan Kediri

cabai merah, bawang merah dan jeruk yang aman konsumsi dan berdaya saing tinggi; dan

- 3) Mewujudkan usaha pertanian dengan menumbuhkan ekonomi produktif di kawasan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk.

2.3. Maksud dan Tujuan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur

Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Dan hortikultura dimaksudkan untuk mendukung tercapainya tujuan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur. Jadi jelaslah bahwa pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur adalah untuk memadukan serangkaian program dan kegiatan yang utuh baik dalam perspektif sistem maupun kewilayahan, sehingga dapat mendorong peningkatan daya saing komoditas, wilayah serta pada gilirannya kesejahteraan petani sebagai pelaku usaha tani. Tujuan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur sebagai berikut :

1. Meningkatkan produksi, produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk
2. meningkatkan nilai tambah dan daya saing padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk
3. Meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan petani di kawasan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk.

2.3.1. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan

Secara nasional, tujuan dan sasaran pengembangan kawasan tanaman pangan di Jawa Timur mengacu Keputusan Menteri Pertanian nomor 03/Kpts/PD.120/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi kayu Nasional dengan tujuan pengembangan kawasan tanaman pangan di Jawa Timur lima tahun kedepan seiring dengan tujuan pembangunan tanaman dan hortikultura Jawa Timur adalah : meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas padi, jagung, kedelai dan ubi kayu untuk meningkatkan pendapatan petani.

2.3.2. Pengembangan Kawasan Hortikultura

Berppedoman dengan Keputusan Menteri Pertanian nomor 45/Kpts/PD.120/1/2015 tentang Penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah dan Jeruk Nasional, tujuan pengembangan kawasan hortikultura di Jawa Timur lima tahun kedepan adalah meningkatkan produksi, produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas cabai, bawang merah dan jeruk untuk meningkatkan pendapatan petani.

2.4. Sasaran Strategis Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur

1. Peningkatan produksi, produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk di sentra produksi
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk dalam memenuhi pasar domestik dan ekspor
3. Peningkatan pendapatan keluarga petani di kawasan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk.

2.5. Program Prioritas

Mengacu dokumen perencanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 – 2019 maka Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagai berikut :

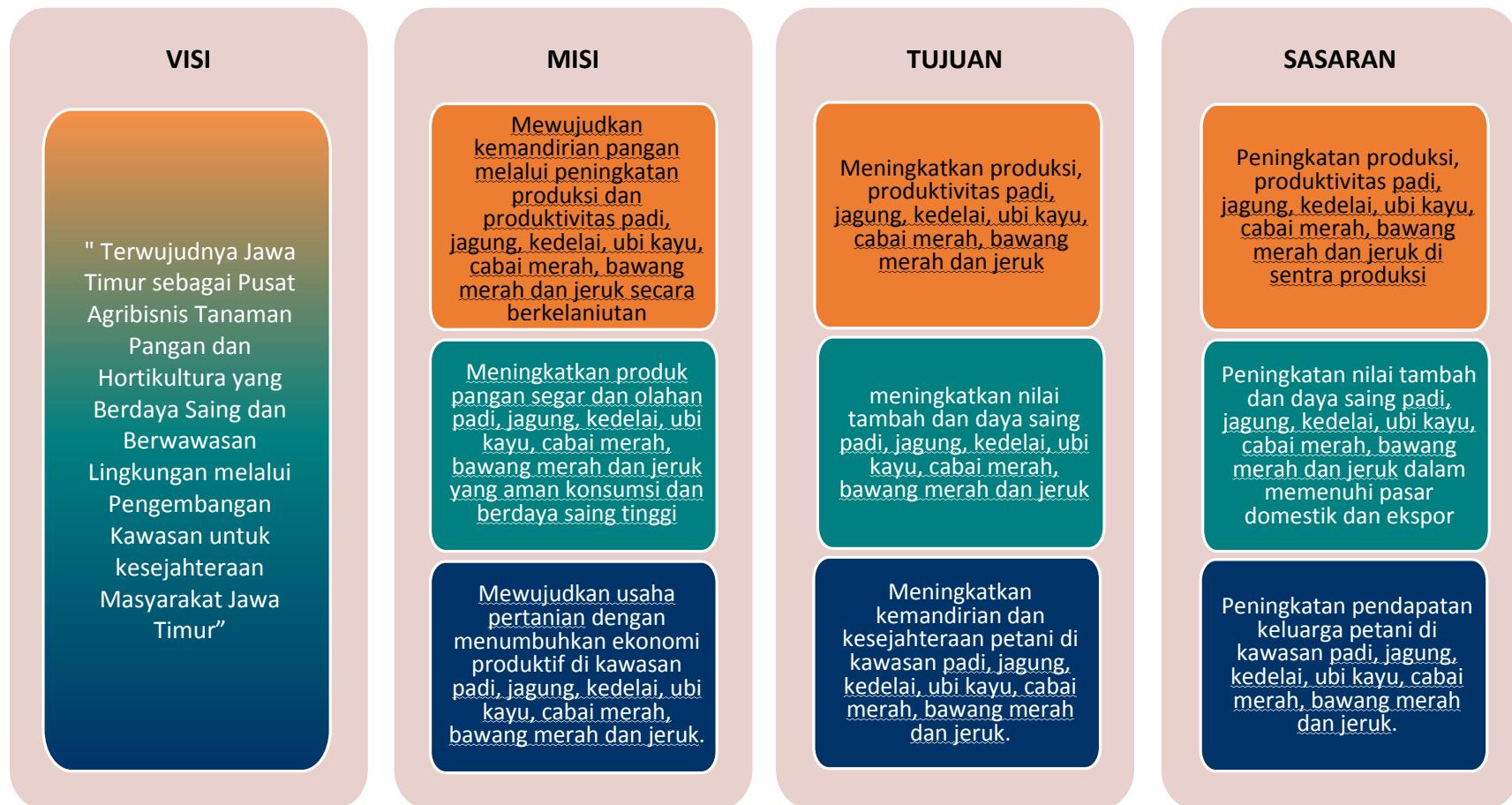
1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan;
2. Program Pengembangan Agribisnis;
3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian.

Selanjutnya Program Pembangunan Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut diimplementasikan kedalam program prioritas Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur dalam kurun waktu 2015 – 2019. Program pembangunan Jawa Timur yang merupakan program prioritas pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura tersebut

diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gambar 2.2.

Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015-2019





TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR



3

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR

3.1. Tinjauan Pustaka

3.1.1. Landasan Teori Pengembangan Komoditas Unggulan dan Kawasan Pertanian

Pemahaman mengenai teori lokasi untuk pemilihan lokasi kawasan pertanian menjadi sangat penting dalam pengembangan kawasan pertanian. Kesalahan dalam penentuan lokasi akan berakibat pada ketidakberhasilan melakukan pembangunan kawasan pertanian. Pemilihan lokasi menjadi dasar dalam pengembangan kawasan pertanian, dan berkaitan dengan hal ini pengembangan kawasan pertanian memerlukan upaya perencanaan penggunaan lahan yang berada dalam wilayah yang akan dikembangkan sebagai kawasan pertanian. Beberapa teori dasar yang menjadi landasan pengembangan kawasan secara umum, termasuk pada pengembangan kawasan pertanian.

Teori lokasi merupakan salah satu teori dasar yang perlu dipahami dalam perencanaan pembangunan wilayah dan pengembangan kawasan pertanian. Dalam buku Metode Perencanaan Pertanian, 2014, dijelaskan bahwa pemilihan lokasi kawasan pertanian selain ditentukan oleh kesesuaian kondisi agroekosistem terhadap pengembangan komoditas, juga ditentukan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan bahan baku lokal, volume permintaan lokal dan permintaan dari luar, bahan baku dan hasil produksi atau output baik berupa barang atau jasa yang dapat dipindahkan akibat adanya permintaan dari dalam maupun luar. Berkaitan dengan hal ini, biaya transportasi dan transaksi karena adanya jarak, dan infrastruktur atau prasarana ekonomi dan aksesibilitas lokasi menjadi salah satu topik yang juga dibahas dalam teori lokasi. Teori lokasi berkembang sejak awal abad 19 dan terdapat tiga tokoh atau pencipta landasan teori lokasi, yaitu Von Thunen, Weber dan Christaller.

Box 3.1. Pendekatan Kawasan Komoditas Unggulan

Dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan, terdapat empat pendekatan yang harus dilaksanakan secara berkesinambungan:

- (1) Pendekatan agroekosistem,
- (2) Pendekatan sistem agribisnis,
- (3) Pendekatan partisipatif, dan
- (4) Pendekatan terpadu.

a. Teori Lokasi Von Thunen

Von Thunen adalah ahli ekonomi pertanian Jerman yang membuat teori tentang lokasi pertanian. Sebagai Bapak dari teori lokasi atau kawasan pertanian, pada tahun 1826 Von Thunen mengidentifikasi perbedaan lokasi dari berbagai kegiatan pertanian atas dasar perbedaan sewa lahan. Menurut Von Thunen, tingkat sewa lahan paling mahal di pusat pasar dan makin rendah apabila makin jauh dari pasar. Hubungan sewa lahan dengan jarak kepasar dengan menggunakan kurva permintaan, dimana perbandingan (selisih) antara harga jual dengan biaya produksi masing-masing jenis produksi memiliki kemampuan yang berbeda untuk membayar sewa lahan. Teori ini menjadi acuan penting dalam pengembangan wilayah terutama dalam menentukan berbagai kegiatan perekonomian. Berdasarkan teori ini dapat ditentukan berbagai zonasi (zoning) atau pewilayahan kawasan termasuk kawasan pertanian.

Dalam perkembangan saat ini, terdapat beberapa kelemahan teori ini diantaranya : 1) kemajuan transportasi dapat menghemat banyak waktu dan biaya; 2) beberapa daerah tidak lagi hanya memiliki satu pusat pasar saja tetapi terdapat dua atau lebih pusat pasar; 3) adanya berbagai bentuk pengawetan dan pengolahan produk pertanian yang mencegah risiko busuk pada pengiriman jarak jauh; 4) kondisi topografi setiap daerah berbeda-beda, sehingga hasil pertanian yang akan dihasilkan akan berbeda; 5) dalam perkembangannya sebuah wilayah atau sebuah negara yang menjadi wilayah atau negara industri mampu membentuk kelompok produksi sehingga tidak terpengaruh pada kota; 6) pengusahaan komoditas berkembang sehingga antara produksi dan konsumsi dapat membentuk usaha bersama yang menyangkut pemasarannya (perkembangan diversifikasi vertikal dan horisontal).

b. Teori Lokasi Weber

Alfred Weber pada tahun 1909 melakukan analisis tentang lokasi kegiatan industri. Menurut teori Weber, pemilihan lokasi industri didasarkan atas prinsip

minimisasi biaya, yaitu lokasi setiap industri tergantung pada total biaya transportasi dan tenaga kerja dimana penjumlahan keduanya harus minimum. Tempat dengan total biaya transportasi dan tenaga kerja yang minimum identik dengan tingkat keuntungan yang maksimum. Menurut Weber ada tiga faktor yang memengaruhi lokasi industri, yaitu biaya transportasi, upah tenaga kerja, dan kekuatan aglomerasi atau deaglomerasi. Dalam menjelaskan keterkaitan biaya transportasi dan bahan baku. Biaya transportasi merupakan faktor pertama dalam menentukan lokasi sedangkan faktor lainnya merupakan faktor yang dapat memodifikasi lokasi. Jadi, titik terendah biaya transportasi adalah titik yang menunjukkan biaya minimum untuk angkutan bahan baku dan distribusi hasil produksi.

Biaya transpotasi dipengaruhi oleh berat lokasional (berat total semua barang berupa input yang harus diangkut ke tempat produksi untuk menghasilkan satu satuan output ditambah be output yang akan dibawa ke pasar). Berat total itu terdiri dari satu satuan produk akhir ditambah semua berat input yang harus diangkut ke lokasi pabrik seperti bahan mentah, bahan setengah jadi, bahan penolong dan lain-lain yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan output. Dipandang dari segi tata guna lahan, model Weber berguna untuk merencanakan lokasi industri dalam rangka menyuplai pasar wilayah, pasar nasional dan pasar dunia. Dalam model ini, fungsi tujuan biasanya meminimumkan ongkos transportasi sebagai fungsi dari jarak dan berat barang yang harus diangkut (input dan output). Model ini memiliki kelemahan terutama pada asumsi biaya transportasi dan biaya produksi yang bersifat konstan, tidak memerhatikan faktor lain seperti adanya kelembagaan dan terlalu menekankan pada posisi lokasi input.

c. Teori Lokasi Christaller

Christaller (1933) menjelaskan bagaimana susunan besaran kota, jumlah kota, dan distribusinya di dalam satu wilayah. Teori Christaller dikenal dengan dengan teori model tempat sentral (central place model theory). Christaller mengemukakan bahwa tanah yang positif adalah tanah yang mendukung pusat kota. Secara ideal maka kota merupakan pusat daerah yang produktif, dengan tempat sentral merupakan pusat kota. Berdasarkan prinsip aglomerasi, ekonomi kota kecil

bergantung pada tersedianya dan adanya kegiatan \ ada pada kota besar. Dalam hubungan antara kota dengan rumah tinggal, Christaller mengatakan bahwa rumah tangga memaksimalkan kegunaan kepuasan dalam rangka pemilihan tempat tinggal atau permukiman. Salah satu hal penting yang banyak dibahas dalam teori lokasi Christaller adalah pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat dikembangkan untuk melihat suatu lokasi yang memiliki daya tarik, dimana orang ingin mendatangi. Hal ini terkait dengan besarnya daya tarik pada pusat tersebut dan jarak antara lokasi dengan pusat tersebut.

3.1.2. Konsep Dasar Pengembangan Wilayah

Pengembangan kawasan pertanian memiliki model-model atau kerangka operasional pengembangan kawasan berdasarkan konsep pengembangan dalam teori pembangunan wilayah. Pengembangan kawasan ditujukan sebagai upaya memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup di wilayah tertentu, memperkecil pertumbuhan, dan ketimpangan kesejahteraan antar wilayah. Menurut Undang-Undang nomor : 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.

Berbagai konsep pengembangan wilayah yang pernah diterapkan (Bappenas, 2006): 1) pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya; 2) pengembangan wilayah berbasis penataan ruang; 3) pengembangan wilayah terpadu (menekankan kerja sama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal); 4) pengembangan wilayah berdasarkan klaster dengan tujuan: a) memperoleh manfaat kesejahteraan; kesempatan kerja, dan ekspor; b) memperoleh kesempatan untuk mengembangkan inovasi dan perdagangan melalui jaringan kerja yang kuat; c) berkembangnya pasar dan jaringan kerja internasional; d) berkembangnya infrastruktur pendukung; e) berkembangnya budaya baru dalam upaya-upaya kerja sama, dengan biaya transaksi yang rendah; f) tumbuhnya generasi pengusaha-pengusaha lokal baru yang memiliki sendiri usaha bisnisnya; (g) berkembangnya kemitraan dengan pemerintah yang didasarkan atas rasa saling ketergantungan.

**Box 3.2. Konsep Pengembangan Wilayah
(Bappenas, 2006)**

1. Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Karakter Sumberdaya, memiliki berbagai pendekatan diantaranya: 1) pengembangan wilayah berbasis sumberdaya; 2) pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan; 3) pengembangan wilayah berbasis efisiensi; 4) pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan;
2. Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis Penataan Ruang, dengan pendekataan penataan ruang wilayah yang membagi wilayah ke dalam: (1) pusat pertumbuhan; (2) integrasi fungsional; (3) desentralisasi;
3. Konsep Pengembangan Wilayah Terpadu menekankan kerja sama antar sektor untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal;
4. Konsep Pengembangan Wilayah Berbasis klaster berfokus pada keterkaitan dan ketergantungan antara pelaku-pelaku dalam suatu jaringan kerja produksi, jasa pelayanan, dan inovasi pengembangannya dengan motor penggerak sektor industri.

3.1.3. Pengembangan Kawasan Komoditas Unggulan

Menurut Hanafiah (1999) dalam Metode Perencanaan Pertanian, komoditas unggulan yang dikembangkan setidaknya dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu: 1) komoditas unggulan basis ekonomi dan (2) komoditas unggulan nonbasis ekonomi. Komoditas unggulan basis ekonomi adalah komoditas unggulan yang dikembangkan dalam kerangka pengembangan ekonomi dan berorientasi pasar lokal, regional, nasional, maupun internasional. Konsep efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis, keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif menentukan pertumbuhan komoditas basis ekonomi melalui kemampuannya bersaing di pasar nasional dan internasional. Komoditas unggulan nonbasis ekonomi adalah komoditas unggulan yang dikembangkan dalam kerangka pengembangan stabilitas sosial, ekonomi dan politis yang lebih berorientasi bagi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pasar dalam negeri sendiri. Komoditas ini dikenal sebagai komoditas strategis.

Selanjutnya Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian menentukan kelompok komoditas kawasan pertanian : (1) kawasan tanaman pangan; (2) kawasan hortikultura; (3) kawasan perkebunan; dan (4) kawasan peternakan. Mengingat rancang bangun kawasan yang disusun merupakan Master Plan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur, sehingga penting diketahui kawasan pertanian untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

a. Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan tanaman pangan adalah kawasan usaha tanaman pangan yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha tanaman pangan. Kawasan tanaman pangan dapat berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru dan lokasinya dapat berupa hamparan atau spot partial namun terhubung dengan aksesibilitas memadai. Kriteria khusus kawasan tanaman pangan dalam aspek luas agregat kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan tanaman pangan adalah: padi, jagung, dan ubi kayu minimal 5.000 hektar; kedelai minimal 2.000 hektar; kacang tanah minimal 1.000 hektar; serta kacang hijau dan ubi jalar minimal 500 hektar.

Disamping aspek luas agregat, kriteria khusus kawasan tanaman pangan juga mencakup berbagai aspek teknis lainnya yang bersifat spesifik komoditas.

b. Kawasan Hortikultura

Kawasan hortikultura adalah sebaran usaha hortikultura yang disatukan oleh faktor alamiah, sosial budaya, dan infrastruktur fisik buatan, serta dibatasi oleh agroekosistem yang sama sedemikian rupa sehingga mencapai skala ekonomi dan efektivitas manajemen usaha hortikultura. Kawasan hortikultura dapat meliputi kawasan yang telah eksis maupun lokasi baru yang memiliki potensi sumberdaya alam yang sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau spot partial (luasan terpisah) dalam satu kawasan yang terhubung dengan aksesibilitas memadai. Kriteria khusus kawasan hortikultura mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas baik untuk tanaman buah, sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias.

3.1.4. Konsep Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Daryanto dan Hafizrianda (2010), menyatakan bahwa pendekatan pengembangan wilayah dengan berbasis pada komoditas unggulan dengan kriteria : sebagai penggerak ekonomi wilayah, memiliki keterkaitan kedepan kebelakang (*forward and backward linkages*), memiliki daya saing (*competitiveness*) dengan komoditas lain di pasar domestik dan ekspor, memiliki keterkaitan ekonomi dengan wilayah lain (*regional linkages*), memiliki status penggunaan inovasi teknologi yang dapat menyerap tenaga kerja secara optimal, dapat bertahan dalam jangka panjang (siklus pertumbuhan), tidak rentan terhadap gejolak eksternal dan internal, didukung oleh multi kebijakan, dan pengembangannya berorientasi pada kelestarian sumberdaya alam. Artinya pemwilayahan komoditas pertanian disusun dengan mempertimbangkan kualitas dan ketersediaan sumberdaya lahan, manusia, dan infrastruktur yang tersedia agar diperoleh produk pertanian yang optimal dan berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem dan usaha agribisnis (Hartomi dan Suhardjo, 2001)

Pendekatan yang digunakan untuk penyusunan Master Plan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur adalah pendekatan sistem agribisnis

dengan sasaran : 1) meningkatnya kuantitas produksi, kualitas produk dan kesinambungan produksi komoditas yang dihasilkan; 2) meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengembangan komoditas unggulan. Pengembangan komoditas pertanian dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu yang meliputi aspek pengadaan input produksi, proses produksi komoditas, aspek pemasaran, pengolahan komoditas, serta aspek penyuluhan dan permodalan.

Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura tersebut dibangun melalui pendekatan agribisnis dengan orientasi produksi untuk memenuhi kebutuhan pangan local serta untuk memenuhi permintaan pasar terutama pasar ekspor. Keterpaduan kegiatan yang dibangun dalam kawasan pertanian tersebut lebih diarahkan untuk dapat menghasilkan produk berdaya saing melalui peningkatan kuantitas produksi dan produktivitas melalui berbagai instrumen mencakup perluasan areal, penggunaan benih/bibit unggul, aplikasi teknologi budidaya, pengairan dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek hulu (benih/bibit unggul) dan aspek budidaya (kuantitas produksi), serta tetap mengedepankan aspek kualitas dan efisiensi. Sedangkan kawasan pertanian hortikultura dengan komoditas sayuran dan buah unggulan yang bernilai tinggi dan diminati pasar, diarahkan menjadi pemasok permintaan pasar lokal dan internasional. Keterpaduan kegiatan yang dibangun lebih diarahkan untuk dapat meningkatkan daya saing produk melalui peningkatan produksi dan kualitas produk, kontinuitas ketersediaan produk, pengolahan pasca panen dan kegiatan-kegiatan lainnya dengan titik berat kepada aspek budidaya (praktik GAP) dan aspek pasca panen (pengolahan, penyimpanan dan peningkatan kualitas).

Mengacu Peraturan Menteri Pertanian No. 50 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian, pendekatan pembangunan pertanian ke depan menitikberatkan pada pengembangan kawasan pertanian yang meliputi Sentra Pertanian dan Kawasan Pertanian. Sentra Pertanian merupakan bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Disamping itu, sentra merupakan area yang lebih khusus untuk suatu komoditas dalam kegiatan ekonomi yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk berkembangnya produk tersebut. Pada area sentra terdapat suatu kesatuan fungsional secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur dan kelembagaan serta SDM, yang berpotensi

untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan. Sedangkan yang dimaksud dengan Kawasan Pertanian adalah gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.

Selanjutnya Kawasan pertanian menurut administrasi pengelolaan terdiri dari: a) Kawasan Pertanian Nasional; b) Kawasan Pertanian Provinsi; dan c) Kawasan Pertanian Kabupaten/Kota. Dengan demikian, kawasan pertanian yang akan dikembangkan di Jawa Timur merupakan kawasan pertanian tingkat provinsi dengan penetapan Gubernur. Kawasan Pertanian Provinsi memiliki kriteria: 1) memiliki kontribusi produksi yang signifikan atau berpotensi tinggi terhadap pembentukan produksi provinsi; 2) difasilitasi oleh APBD provinsi dan atau dapat didukung APBN sebagai pendamping (untuk provinsi yang mengembangkan 40 komoditas unggulan nasional); 3) mengembangkan komoditas unggulan provinsi dan / atau 40 komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

3.1.5. Perencanaan Pengembangan Kawasan Pertanian

Penyusunan rencana pengembangan kawasan pertanian merupakan tahap awal serangkaian proses dan kegiatan pembangunan pada kawasan pertanian, dan mencakup serangkaian proses sebagai berikut: 1) penentuan komoditas prioritas; 2) penentuan lokasi kawasan pada kabupaten/kota; 3) penyusunan Master Plan pengembangan kawasan pertanian; 4) penyusunan rencana aksi pengembangan kawasan pertanian; 5) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan pertanian lingkup provinsi; dan 6) sinkronisasi rencana pengembangan kawasan lingkup Kementerian Pertanian.

Berdasarkan studi-studi yang pernah dilakukan, perencanaan dan pemilihan atau penentuan komoditas unggulan dan lokasi kawasan komoditas unggulan pertanian dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, yaitu: 1) ditetapkan komoditas unggulan pada kabupaten/kota tertentu dan selanjutnya dilakukan penetapan lokasi kawasan pengembangannya (Ratnawa et.al. 2000 dan 2001); 2) dilakukan pemilihan komoditas unggulan secara nasional untuk ditetapkan, selanjutnya dilakukan

pemilihan provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan sebagai dasar penetapan kawasan pengembangan seperti yang dilakukan oleh Siregar et.al. (2003); 3) berdasarkan komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas kawasan pengembangannya seperti yang dilakukan oleh Setiyanto et.a (2012) dan Tim Biro Perencanaan, Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, dan Balai Besar Sumber Daya Lahan Pertanian (2012 dan 2013); dan 4) ditetapkan dahulu lokasi kawasan selanjutnya dilakukan pemilihan prioritas komoditas unggulan yang akan dikembangkan untuk ditetapkan.

Berdasarkan Permentan 50 Tahun 2012, secara skematis metode penetapan lokasi pengembangan kawasan pertanian dilakukan dengan dua metode, yaitu: 1) pola pengembangan kawasan yang sudah ada; dan 2) pola pengembangan kawasan baru. Penentuan kawasan baru dapat didasarkan pada komodi yang potensial, dan ketersediaan lahan yang sesuai untuk mendukung pengembangan komodi tersebut (commodity driven). Ada kalanya lokasi potensial sudah ada, namun belum terdapat komoditas yang layak untuk dikembangkan. Secara nasional, komoditas unggulan yang dikembangkan dalam bentuk kawasan pertanian 40 (empat puluh) komoditas unggulan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2015-2019.

Arah dan kebijakan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura unggulan sesuai Permentan Nomor 50/2012, kawasan pertanian diklasifikasikan dalam tiga kategori : 1) kawasan belum berkembang; 2) kawasan yang cukup berkembang; 3) kawasan telah berkembang. Selanjutnya proses pengembangan kawasan dikelompokkan dalam lima kelompok : 1) tahap inisiasi; 2) tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; 3) tahap pengembangan kawasan; 4) tahap pemantapan kawasan; dan 5) tahap perluasan dan integrasi antar kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada keterkaitan antar sentra pertanian, kekuatan subsistem agribisnis yang ada (hulu, produk dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan.

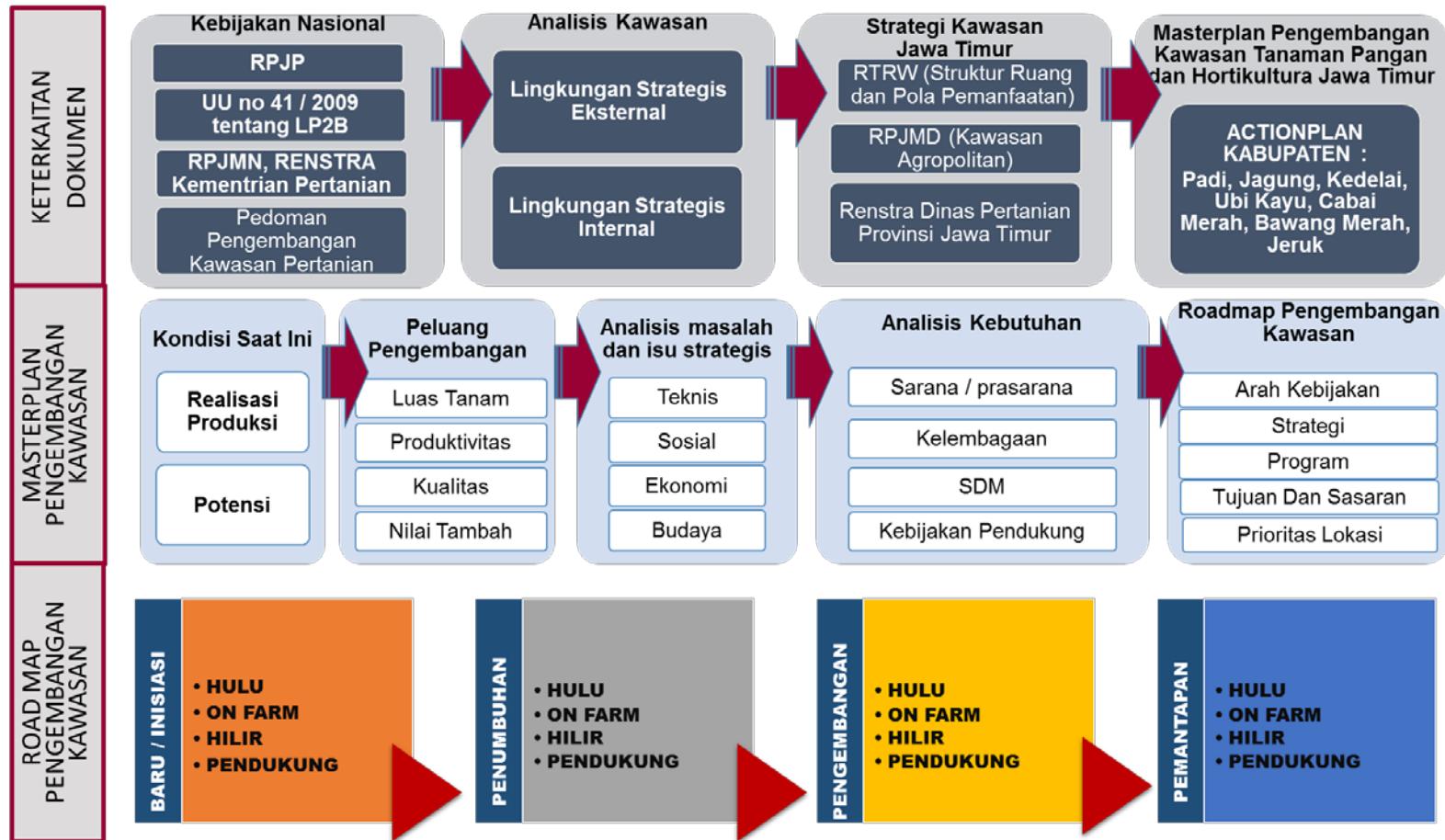
3.2. Kerangka Pemikiran

Master Plan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura adalah rancang bangun dan instrumen perencanaan untuk menjabarkan arah kebijakan, strategi, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan komoditas unggulan pertanian nasional di tingkat provinsi. Kerangka pikir dalam penyusunan Master Plan Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur memiliki keterkaitan berbagai dokumen pengembangan kawasan seperti Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 yang membagi kawasan budidaya untuk komoditas tanaman pangan dan hortikultura serta dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Jawa Timur Tahun 2014-2019 yang memuat pembagian kawasan agropolitan.

Penyusunan Master Plan ini juga mengakomodir rencana aksi pengembangan kawasan dari kabupaten / kota. Sebagai rancang bangun dan instrumen perencanaan kabupaten / kota, rencana aksi (action plan) menjabarkan secara lebih operasional Master Plan yang telah disusun dan menjadi rencana detail kawasan pertanian di kabupaten/kota yang disusun setiap tahun untuk jangka waktu 5 tahun. Rencana aksi disusun dalam bentuk matriks rencana program yang komponen isinya mencakup: 1) jenis kegiatan dan volume; 2) lokasi (kecamatan / desa); 3) jadual pelaksanaan; 4) satuan kerja pelaksana; 5) proyeksi kebutuhan dan sumber pendanaan; 6) indikator output dan outcome. Secara ringkas kerangka pemikiran Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur.

Gambar 3.1.

Kerangka Pemikiran Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur





4

METODOLOGI



METODOLOGI

Penyusunan Master Plan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur meliputi beberapa tahapan kegiatan utama, yaitu : 1) Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data; 2) Pendekatan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur; dan 3) Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur dengan melakukan tinjauan kebijakan dan peraturan, analisis isu strategis tentang komoditas dan analisis potensi, peluang, kendala dan masalah pengembangan komoditas di tiap kawasan, serta berbagai alat analisis lainnya.

4.1. Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data

Data yang dikumpulkan dalam penyusunan Master Plan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur meliputi data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung, baik dari lapangan maupun dari laboratorium. Sedangkan data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari instansi-instansi terkait.

4.1.1. Pengumpulan Data Primer dan Sekunder

Data primer diperoleh melalui survei lapangan yang meliputi observasi lapangan, verifikasi data sekunder, dan wawancara dengan stakeholder terkait. Penelitian lapang meliputi penggunaan lahan, pengumpulan data iklim, sosial ekonomi serta teknologi budidaya. Data sekunder dikumpulkan dari data-data yang dipublikasikan oleh dinas/lembaga pemerintah, seperti Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, Bappeda Provinsi Jawa Timur, Badan ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota sebagai berikut:

1. Kondisi fisik wilayah;
2. Kependudukan/demografi;

3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031;
5. Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
6. Perekonomian wilayah;
7. Infrastruktur wilayah;
8. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2010;
9. Hasil Sensus Pertanian Tahun 2013;
10. Hasil Survei Ekonomi Nasional (Susenas) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas);
11. Data Statistik Pertanian terkait Luas Panen, Produksi dan Produktivitas;
12. Data Sarana Prasarana Pertanian;
13. Data Kelembagaan Pertanian;
14. Ketersediaan tenaga lapangan;

4.1.2. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan penilaian terhadap berbagai keadaan yang dilakukan berdasarkan pendekatan dan metode serta teknik analisis data. Berikut disajikan teknik analisis pada masing-masing data yang digunakan dalam penyusunan Master Plan.

4.2. Metode Pendekatan

Pendekatan pengembangan kawasan dirancang untuk meningkatkan efektivitas kegiatan, efisiensi anggaran dan mendorong keberlanjutan kawasan komoditas unggulan. Salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam pengembangan kawasan komoditas unggulan adalah meningkatnya kuantitas produksi, kualitas produk dan kesinambungan produksi komoditas yang dihasilkan. Dalam rangka pencapaian sasaran tersebut dan meningkatkan efektivitas serta efisiensi pengembangan komoditas unggulan, maka pengembangan kawasan komoditas unggulan harus dilaksanakan melalui pendekatan sistem agribisnis. Hal ini mengandung pengertian bahwa pengembangan komoditas pertanian di kawasan komoditas unggulan harus dilaksanakan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari pengadaan input produksi hingga pemasaran produk yang dihasilkan petani. Dengan

kata lain, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengembangan kawasan komoditas unggulan dapat meliputi aspek pengadaan input produksi, proses produksi komoditas, aspek pemasaran, pengolahan komoditas, serta aspek penyuluhan dan permodalan, yang disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan komoditas unggulan di kawasan setempat.

4.3. Metode Penyusunan Strategi dan Rencana Aksi

Secara garis besar rumusan strategi pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura dengan pendekatan agribisnis melalui tiga tahapan hasil Analisis SWOT yaitu: (1) inventarisasi secara mendalam faktor-faktor internal dan eksternal; (2) penentuan bobot dan ranking masing-masing faktor penentu dan penetapan skor masing-masing faktor penentu. Faktor internal mencakup strengts (kekuatan) dan weakness (kelemahan), sedangkan faktor eksternal mencakup opportunities (peluang) dan threats (ancaman).

Faktor lingkungan internal dan eksternal dijabarkan dalam strengts, weaknes, opportunities dan threats sebagai berikut :

Kekuatan (Strength=S)

1. Daya dukung sumberdaya alam, lahan pertanian dan komoditas
2. Sarana Prasarana dan Infrastruktur penunjang produksi dan pemasaran hasil pertanian tersedia
3. Tersedianya teknologi budidaya dan pengolahan hasil
4. Jumlah SDM petani dan aparat pertanian cukup besar

Kelemahan (Weakness=W)

1. Rata-rata kepemilikan lahan pertanian yang sempit
2. Rendahnya kemampuan petani dan kelompoknya dalam mengakses permodalan, dan teknologi serta masih tergantung kepada bantuan atau program pemerintah
3. Terbatasnya sarana prasarana produksi, panen dan pengolahan pertanian dan tidak berfungsi optimal
4. Industri hilir belum berkembang

Peluang (Opportunity=O)

1. Kebutuhan pangan terhadap komoditas tanaman pangan dan hortikultura sangat tinggi seiring pertumbuhan penduduk Jawa Timur
2. Peluang pasar produk pertanian karena Jawa Timur merupakan lumbung pangan nasional
3. Peluang pasar hasil olahan pertanian sangat terbuka terutama hortikultura dengan tingkat konsumsi terhadap cukup tinggi dan cenderung sangat elastis terhadap peningkatan pendapatan dan perubahan gaya hidup

Ancaman (Threats=T)

1. Adanya persaingan global terhadap produk pertanian Jawa Timur
2. Masih rendahnya kesadaran terhadap mutu produk pertanian melalui sertifikasi
3. Harga produk hortikultura kalah bersaing terhadap harga impor
4. Perubahan gaya hidup masyarakat yang lebih memilih produk impor



POTENSI KOMODITAS UNGGULAN KAWASAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

JAWA TIMUR

POTENSI KOMODITAS UNGGULAN KAWASAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JAWA TIMUR

5

Gambar 5.1. Jeruk Keprok



5.1. Kondisi Umum Wilayah, Agroekologis dan Lingkungan

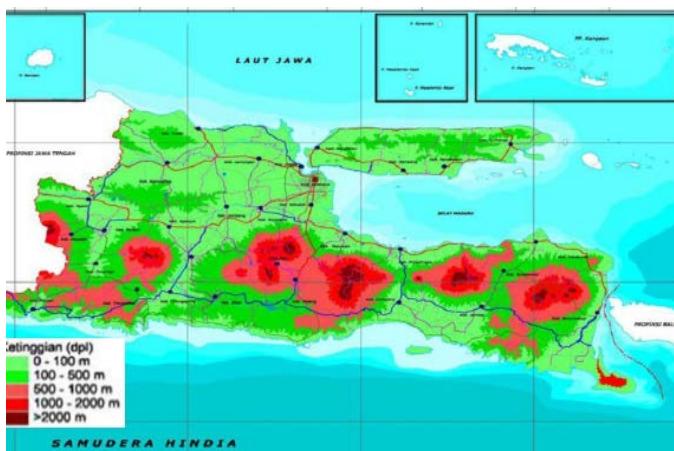
Wilayah Provinsi Jawa Timur dengan luas 48.039,14 Km² memiliki batas-batas sebagai berikut: sebelah Utara Laut Jawa, sebelah Timur Selat Bali, sebelah Selatan Samudera Hindia, dan sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Secara astronomis terletak antara 111°,0'-114°,4' Bujur Timur dan 7°,12'-8°,48' Lintang Selatan. Sebagian besar wilayah Jawa Timur terdiri dari 90persen wilayah daratan dan 10 persen wilayah Kepulauan termasuk Madura. Secara administratif berdasarkan Permendagri No. 18 Tahun 2013 tentang Buku Induk Kode Wilayah, Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten/Kota (29 Kabupaten dan 9 Kota) yang mempunyai 664 Kecamatan dengan 783 Kelurahan dan 7.7 22 Desa.

Salah satu faktor penting yang mempengaruhi tingkat kesuburan tanah adalah banyaknya gunung berapi yang masih aktif. Provinsi Jawa Timur mempunyai beberapa gunung berapi yang masih aktif yang tersebar mulai mulai dari perbatasan barat ke timur meliputi Gunung Lawu, Gunung Kelud, Gunung Bromo, Gunung Argopuro, dan Gunung Ijen dengan gunung tertinggi yaitu Gunung Semeru.

Faktor topografi, jenis tanah dan geologi memberikan pengaruh besar terhadap tingkat erosi yang tinggi di wilayah lajur gunung api tengah seperti Magetan, Trenggalek, Tulungagung, Tuban, Kediri, Blitar, Malang, Probolinggo, Situbondo dan Bondowoso dan daerah perbukitan gamping seperti Madura dan Pacitan dari lajur pegunungan selatan. Pegunungan gamping dengan tingkat kesuburan tanah yang marginal dan mempunyai kecenderungan menjadi tanah kritis.

POTENSI KOMODITAS UNGGULAN KAWASAN

Gambar 5.2.
Peta Ketinggian Lahan



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Lajur gunung api tengah dengan beberapa gunung api yang masih aktif, seperti Gunung Lawu, Wilis, Kelud, Kawi, Arjuno, Semeru, Bromo, Raung, Merapi dan lainnya merupakan ancaman bencana alam letusan gunung api, baik berupa banjir atau longsoran lahar, aliran lava, awan panas, gas beracun maupun gempa vulkanik yang perlu diwaspadai sejak dulu. Lajur ini juga rawan longsor dan gempa bumi tektonik, karena tanahnya yang tidak begitu mampat, lapisan tanahnya tebal dengan kelerengan yang curam dan terletak di atas struktur sesar dan patahan.

Panjang bentangan Barat-Timur Provinsi Jawa Timur sekitar 400 kilometer dan lebar bentangan utara-selatan sekitar 200 kilometer. Jawa Timur memiliki wilayah kepulauan yang terdiri dari pulau bernama sebanyak 232 pulau, pulau tanpa nama sebanyak 55 sehingga total keseluruhan pulau kecil yang dimiliki Provinsi Jawa Timur sebanyak 287 pulau (Sumber : Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2004). Pulau Madura adalah pulau terbesar di Jawa Timur, di sebelah timur Pulau Madura terdapat gugusan pulau, paling timur adalah Kepulauan Kangean, dan paling utara adalah Kepulauan Masalembu. Pulau Bawean berada sekitar 150 kilometer sebelah utara pulau Jawa, sedangkan bagian selatan meliputi pulau Nusa Barung, Sempu, Sekel dan Panehan.

Gambar 5.3.
Peta Kemiringan Lereng



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Kawasan pesisir dan laut Jawa Timur secara umum dapat dikelompokkan menjadi kawasan pesisir utara, pesisir timur dan pesisir selatan. Kawasan pesisir utara dan timur umumnya dimanfaatkan untuk transportasi laut, pelestarian alam, budidaya laut, pariwisata dan pemukiman nelayan. Sedangkan kawasan pesisir selatan, umumnya merupakan pantai terjal dan berhadapan langsung dengan Samudera Hindia yang kondisi gelombang dan ombaknya besar. Wilayah yang termasuk zona pesisir utara Jawa Timur adalah Kabupaten Tuban, Lamongan, Gresik, Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Sumenep, dan Kota Pasuruan, Probolinggo. Wilayah yang masuk dalam zona pesisir timur adalah kabupaten Banyuwangi. Sedangkan wilayah yang masuk dalam zona pesisir selatan adalah Kabupaten Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, dan Jember

Berdasarkan struktur fisik dan kondisi geografis, Jawa Timur dapat dikelompokkan sebagai berikut : (1) Bagian Utara dan Madura merupakan daerah yang relatif kurang subur yang berupa pantai, dataran rendah dan pegunungan;

Gambar 5.4.
Peta Jenis Tanah



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

(2) Bagian Tengah merupakan daerah yang relatif subur; (3) Bagian Selatan- Barat merupakan pegunungan yang memiliki potensi tambang cukup besar; (4) Bagian Timur pegunungan dan perbukitan yang memiliki potensi perkebunan, hutan dan tambang.

Kondisi topografi Provinsi Jawa Timur terbagi menjadi 2 (dua) aspek antara lain : a) Ketinggian Lahan; b) Kemiringan Lereng. Secara topografi wilayah daratan Jawa Timur dibedakan menjadi beberapa wilayah ketinggian, yaitu :

- Ketinggian 0 - 100 meter dari permukaan laut: meliputi 41,39 persen dari seluruh luas wilayah dengan topografi relatif datar dan bergelombang.
- Ketinggian 100 - 500 meter dari permukaan laut: meliputi 36,58 persen dari luas wilayah dengan topografi bergelombang dan bergunung.
- Ketinggian 500 - 1000 meter dari permukaan laut: meliputi 9,49 persen dari luas wilayah dengan kondisi berbukit.
- Ketinggian lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut : meliputi 12,55 persen dari seluruh luas wilayah dengan topografi bergunung dan terjal.

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan lereng 0-15 persen hampir di seluruh dataran rendah Provinsi Jawa Timur, sedangkan untuk kemiringan lereng 15-40 persen berada pada daerah perbukitan dan pegunungan, dengan kemiringan lereng > 40 persen berada pada daerah pegunungan.

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur merupakan kawasan subur dengan berbagai jenis tanah seperti Halosen, Pleistosen, Pliosen, Miosen, dan Kquarter yang dipengaruhi adanya gunung berapi. Sekitar 20,60 persen luas wilayah yaitu wilayah puncak gunung api dan perbukitan gamping yang mempunyai sifat erosif, sehingga tidak baik untuk dibudidayakan sebagai lahan pertanian.

Sebagian besar wilayah Jawa Timur mempunyai kemiringan tanah 0-15 persen, sekitar 65,49 persen dari luas wilayah yaitu wilayah dataran aluvial antar gunung api sampai delta sungai dan wilayah pesisir yang mempunyai tingkat kesuburan tinggi dan dataran aluvial di lajur Kendeng yang subur, sedang dataran aluvial di daerah gamping lajur Rembang dan lajur Pegunungan Selatan cukup subur.

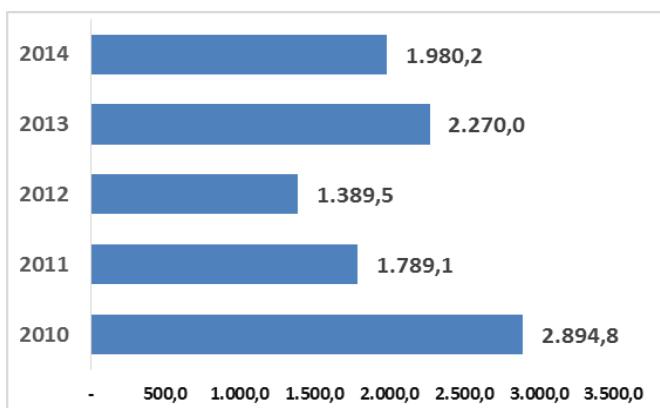
POTENSI KOMODITAS UNGGULAN KAWASAN

Tabel 5.1
Klasifikasi Tanah

Klasifikasi	Luas (Ha)	Prosentase (%)
Alfisol	600.000	19,80
Andosol	114.375	3,80
Entisol	731.250	24,10
Inceptisol	82.500	2,70
Enceptisol	680.625	22,50
Vertisol	319.375	10,50
Molisol	50.625	1,70
Oxisol	451.875	14,90
Jumlah	3.030.000	100,00

Sumber : BPPT Karangploso, 1997

Gambar 5.5.
Keadaan Jumlah Curah Hujan Tahun 2010- 2014



Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Jawa Timur Tahun 2014 (Jawa Timur dalam Angka Tahun 2011-2014, BPS Jawa Timur)

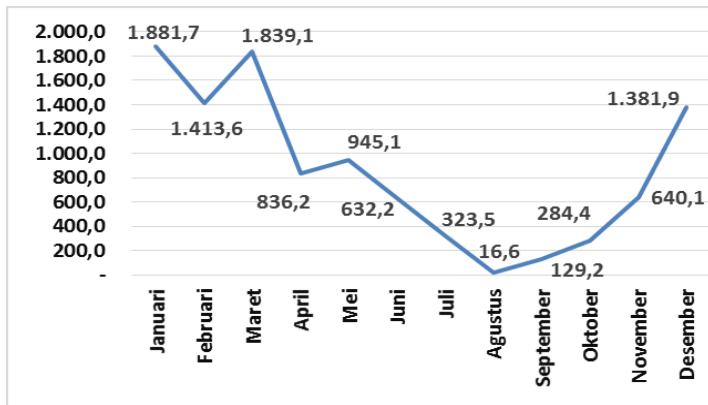
Klasifikasi tanah Jawa Timur berdasarkan sistem "Soil Taxonomy USDA 1990" terdiri dari ordo-ordo tanah, Alfisol, Andisol, Entisol, Inceptisol, Enceptisol, Vertisol, Mollisol dan Oxisol. Klasifikasi tanah pertanian sangatlah penting, mengingat untuk mewujudkan pertanian modern, tangguh dan efisien, maka teknologi pertanian spesifik lokasi menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan daya saing pertanian dalam pengembangan kawasan agribisnis berbasis komoditas di Jawa Timur Tabel 5.1).

Jika ditinjau dari kondisi suhu udara, pada tahun 2014 di Provinsi Jawa Timur suhu udara maksimum mencapai 35,0 derajat Celcius pada bulan April dan Oktober dan suhu udara minimum 21,0 derajat Celcius pada bulan September dengan kecepatan angin maksimum mencapai 20 knots yang terjadi pada bulan Januari dan Februari.

Kondisi iklim Provinsi Jawa Timur secara umum termasuk iklim tropis yang mengenal 2 (dua) perubahan putaran musim, yaitu musim Kemarau (Mei-Okttober) dan musim Penghujan (November-sampai sekitar bulan April). Hingga bulan Desember seluruh wilayah di Jawa Timur sudah memasuki musim penghujan. Hampir setiap hari hujan mengguyur semua wilayah dengan intensitas ringan hingga lebat. Jika ditinjau dari kondisi curah hujan dan hari hujan Jawa Timur selama 5 (lima) tahun terakhir, yaitu tahun 2010 hingga tahun 2014 yang menunjukkan jumlah curah hujan mencapai 10.323,6 mm atau sebesar 860,3 mm pertahunnya. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2010 dengan jumlah curah hujan mencapai 2.894,8 mm (rerata 241,2 mm perbulannya) dan tahun 2013 mencapai 2.270,0 mm (rerata 189,2 mm perbulannya). Curah hujan terrendah terjadi pada tahun 2012 yang mencapai 1.389,5 mm atau sebesar 115,8 mm perbulannya. Gambaran Jumlah Curah Hujan Jawa Timur tahun 2010 - 2014 pada Gambar 5.5 dan Rerata Curah Hujan Perbulan pada Gambar 5.6.

Gambaran sumberdaya alam seperti iklim, fisiografi maupun lahan sangat mempengaruhi pengembangan komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur. Iklim sangat penting dalam penentuan jenis tanaman yang akan ditanam

Gambar 5.6.
Keadaan Rerata Curah Hujan Perbulan Tahun 2010- 2014



Sumber : Stasiun Meteorologi Klas I Juanda Jawa Timur Tahun 2014 (Jawa Timur dalam Angka Tahun 2011-2014, BPS Jawa Timur)

karena menyangkut kesesuaian habitat dari tanaman tersebut. Adanya perubahan iklim mempengaruhi pola tanam tanaman pertanian.

Berdasarkan Agroclimatic Map of Java and Madura (Oldeman, 1975), kondisi lengas tanah di Jawa Timur menunjukkan bahwa lengas tanah yang dominan adalah kategori Ustic dengan tipe C3, D3 dan E mempunyai luasan 2.333.750 ha atau 77,01 persen, kategori berikutnya adalah Udic dengan tipe B2, C2 dan D2 seluas 673.750 ha atau 22,23 persen sedangkan luasan 23.125 ha atau 0,76 persen.

Kondisi rejim suhu yang berpengaruh terhadap pertumbuhan komoditas tanaman adalah suhu tanah pada kedalaman 50 cm. Sedangkan kondisi fisiografi dan bentuk wilayah juga mempengaruhi pertumbuhan tanaman secara langsung melalui tanah dan iklim. Peranan fisiografi pada potensi pertanian suatu lahan adalah pengaruhnya terhadap erodibilitas tanah.

Berdasarkan karakter biofisik wilayah yang meliputi kondisi iklim, fisiografi dan sumberdaya lahan, maka provinsi Jawa Timur dibedakan menjadi 5 zona agroekologi utama dengan 30 sub zona, yaitu zona I, zona II, zona III, zona IV dan zona V. Zona agroekologi sesuai dengan alternatif pengembangan komoditas pertanian di Jawa Timur:

- Zona I, dengan kelerengan > 40persen dan beda ketinggian mencapai > 300 m, merupakan jajaran perbukitan dan pegunungan vulkanik dengan ketinggian tempat > 700 m, tipe pemanfaatan lahan:
 - Sub zona lay2, suhu panas dan agak kering dengan alternatif komoditas buah-buahan dataran rendah antara lain: rambutan, srikaya, manggis, durian, nangka, mangga, duku, delima dan jambu biji;
 - Sub zona lby2, suhu sejuk dan agak kering dengan alternatif komoditas : apel, jambu, leci dan jeruk;
- Zona II, mempunyai kelerengan 15 – 40persen dengan beda ketinggian mencapai 50 – 300 m, terletak pada dataran rendah (< 700 m). Tipe pemanfaatan lahan:

- Sub zona IIax, suhu panas dan lembab cocok untuk komoditas : rambutan, durian, duku dan manggis;
 - Sub zona IIay, suhu panas dan agak kering, komoditas mangga, srikaya, delima, dan jambu biji dapat dikembangkan pada zona ini;
 - Sub zona IIax, suhu sejuk dan lembab, komoditas yang sesuai untuk dikembangkan adalah cinnamon, lengkeng, leci, jambu dan jeruk;
 - Sub zona IIby, suhu sejuk dan agak kering, pengembangan komoditas apel, leci, jambu, anggur dan jeruk cocok untuk zona ini;
- c. Zona III, mempunyai kelerangan \pm 8 – 15 m serta beda ketinggian \pm 10 – 50 m dengan fisiografi dataran dan lereng bawah volkan, serta sebagian kecil kipas alluvial yang tersebar pada dataran rendah < 700 m dan dataran tinggi > 700 m. Tipe pemanfaatan lahan:
- Sub zona IIIax, suhu panas dan lembab dengan alternatif komoditas : kacang tanah, kedelai, jagung dan sayuran seperti terong, kacang panjang dan sawi;
 - Sub zona IIIay, suhu panas dan agak kering dengan alternatif komoditas : mangga, srikaya dan palawija;
 - Sub zona IIIbx, suhu dan lembab dengan alternatif komoditas : cinnamon, lengkeng, leci, jambu dan sayuran dataran tinggi seperti wortel, cabe, kentang, kubis dan tomat;
 - Sub zona IIby, suhu sejuk dan agak kering dengan alternatif komoditas : apel, leci, jambu, anggur, wortel, cabe dan kentang;
- d. Zona IV, mempunyai kelerangan 0 – 8 persen dengan beda ketinggian < 10 m pada daerah alluvial, dataran karstik, kipas alluvial, teras sungai dan dataran banjir. Zona ini tersebar pada dataran rendah < 700 m. Tipe pemanfaatan lahan:
- Sub zona IVax1, IVax1.i dan IVax1.ir, tingkat kesuburan tanah ukup baik dan umumnya terletak pada daerah kiri dan kanan sungai dengan tipe pemanfaatan lahan basah dataran rendah (padi sawah dan kangkung);
 - Sub zona IVax2, merupakan wilayah dengan penyebaran pada dataran volkan, karstik alluvial dan kipas alluvial, dengan tingkat kesuburan tanah

dan drainase yang cukup baik untuk sistem pertanian lahan kering dataran rendah (padi gogo, kacang-kacangan, cabe dan umbi-umbian);

- Sub zona IVay2 dan IVay2.e, mempunyai kemiringan lahan < 8persen dengan tingkat kesuburan tanah rendah sehingga memerlukan pemupukan dan pengapuran sesuai tanaman yang dibudidayakan serta irigasi teratur. Komoditas yang dapat dikembangkan : cabe, padi gogo, jagung, kacang-kacangan, dan umbi-umbian.

Secara umum wilayah Provinsi Jawa Timur dapat dibagi 2 bagian besar, tutupan lahan lindung dan lahan budidaya. Kawasan lindung memiliki luas kurang lebih 578.374 ha atau sekitar 12,10 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa Timur, termasuk di dalamnya kawasan lindung mutlak di mana terdapat cagar alam seluas kurang lebih 10.958 ha, suaka margasatwa seluas kurang lebih 18.009 ha, taman nasional seluas kurang lebih 176.696 ha, taman hutan raya seluas kurang lebih 27.868,3 ha serta taman wisata alam seluas kurang lebih 298 ha (SK Menteri Kehutanan Nomor 395/Menhut-11/2011). Adapun, penggunaan lahan budidaya adalah seluas kurang lebih 4.201.403,70 Ha atau 87,90 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Gambaran perubahan proporsi penggunaan lahan di Jawa Timur menunjukkan kecenderungan menurunnya luas wilayah pertanian. Pertanian lahan basah memiliki luas kurang lebih 911.863 Ha atau 19,08 persen dari luas wilayah provinsi Jawa Timur. Penggunaan lahan kawasan terbangun dikendalikan agar tidak mengkonversi luas pertanian lahan basah, terutama sawah irigasi teknis. Secara lebih rinci diuraikan pada Gambar 5.6 Penggunaan Lahan Eksisting Jawa Timur dan Tabel 5.2 Peta Penggunaan Lahan Eksisting Jawa Timur.

Tabel 5.2
Penggunaan Lahan Eksisting Jawa Timur Tahun 2014

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (ha)	Prosentase (%)
A.	KAWASAN LINDUNG	578.571,3	12,1
1.	Hutan Lindung	344.742,0	7,2
2.	Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam	233.829,3	4,9
	1) Suaka Margasatwa	18.009,0	0,4
	2) Cagar Alam	10.958,0	0,2

No.	Penggunaan Lahan	Eksisting (ha)	Prosentase (%)
	3) Taman Nasional	176.696,0	3,7
	4) Taman Hutan Raya	27.868,3	0,6
	5) Taman Wisata Alam	298,0	0,0
B.	KAWASAN BUDIDAYA	4.201.403,7	87,9
1.	Kawasan Hutan Produksi	782.772,0	16,4
2.	Kawasan Hutan Rakvat	361.570,3	7,6
3.	Kawasan Pertanian	2.020.490,7	42,3
	1) Pertanian Lahan Basah	911.863,0	19,1
	2) Pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur	1.108.627,7	23,2
4.	Kawasan Perkebunan	359.481,0	7,5
5.	Kawasan Industri	7.403,8	0,2
6.	Kawasan Pemukiman	595.255,0	12,5
7.	Lainnya	74.430,9	1,6
	TOTAL	4.779.975,0	100,0

Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Provinsi Jawa Timur memiliki 7 (tujuh) Wilayah Sungai, yaitu : 1) Wilayah Sungai Bengawan Solo; 2) Wilayah Sungai Brantas; 3) Wilayah Sungai Madura-Bawean; 4) Wilayah Sungai Welang - Rejoso; 5) Wilayah Sungai Bondoyudo - Bedadung; 6) Wilayah Sungai Pekalen- Sampean dan 7) Wilayah Sungai Baru - Bajulmati dengan potensi lahan pertanian di Jawa Timur meliputi pertanian lahan basah (sawah), pertanian lahan kering, dan hortikultura dengan total luas 3.506.802 hektar atau sebesar 72,67 persen dari 4.825.800 hektar luas wilayah provinsi Jawa Timur.

5.2. Kependudukan, Sosial Budaya dan Kesejahteraan

Dari segi demografi, perkembangan penduduk menurut hasil Sensus Penduduk 2010 di Jawa Timur, menunjukkan jumlah penduduk Jawa Timur sebanyak 37.476.011 orang, terdiri dari 18.488.290 laki-laki dan 18.987.721 perempuan. Dibandingkan dengan provinsi lainnya, Jawa Timur merupakan provinsi dengan penduduk terbesar kedua di Indonesia setelah Jawa Barat yang mencapai 43.117.260 orang dengan jumlah penduduk tertinggi Kota Surabaya sebanyak 2.765.908 orang dan terendah yaitu Kota Mojokerto dengan jumlah penduduk

sebesar 120.132 orang. Sejak tahun 2000, pertumbuhan penduduk di Jawa Timur sudah di bawah 1,00 persen per tahun. Kabupaten/kota yang memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk di atas 2,00 persen hanya Kabupaten Sidoarjo. Sementara kabupaten/kota yang memiliki tingkat laju pertumbuhan penduduk terendah adalah Kabupaten Ngawi sebesar 0,05 persen, bahkan Kabupaten Lamongan tumbuh minus 0,02 persen. Selanjutnya perkembangan jumlah penduduk Jawa Timur hasil proyeksi yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur (Jawa Timur Dalam Angka 2014), yaitu sebesar 38.363,20 ribu jiwa pada tahun 2013 atau meningkat 886,44 ribu jiwa dibandingkan hasil Sensus Penduduk 2010. Jumlah penduduk Jawa Timur terus mengalami perkembangan pada tahun 2014 sebesar 247,01 ribu jiwa atau tumbuh sebesar 0,69 persen menjadi 38.610,20 ribu jiwa terdiri 19.051,6 ribu jiwa laki-laki dan 19.558,6 ribu perempuan yang tersebar di 38 Kabupaten dan Kota se Jawa Timur dengan sebaran jumlah penduduk yang paling besar di Kota Surabaya, yaitu 2.833,90 ribu jiwa, diikuti Kabupaten Malang 2.527,10 ribu jiwa dan Kabupaten Jember 2.394,60 ribu jiwa.

Di Jawa Timur, umumnya kaum lelaki menjadi kepala rumah tangga yang bertanggungjawab dalam mencari nafkah untuk anggota rumah tangganya karena laki-laki yang dianggap mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sedangkan kaum perempuan masih diposisikan sebagai ibu rumah tangga yang bertugas mengelola nafkah dari kepala keuang serta mengurus kebutuhan anggota rumah tangganya. Demikian pula kondisi rumah tangga pertanian masih didominasi laki-laki dengan hasil ST2013 menunjukkan bahwa dari sebanyak 6,18 juta orang petani di Jawa Timur sebanyak 4,62 juta orang (74,77 persen) dan hanya dijumpai sekitar sebanyak 1,56 juta orang (25,23 persen) kepala rumah tangga dari kaum perempuan.

Tabel 5.3
Karakteristik Penduduk Jawa Timur pada Tahun 2010 – 2015

Tahun	Jumlah Penduduk ribu Jiwa						Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (km ²)	Usia 15-64 tahun (%)
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan			
2010	18.512,6	19.053,2	37.565,8	4.882,6	32.683,2	37.565,8	0,64	783,0	68,5
2011	18.655,5	19.185,2	37.840,7	4.917,3	32.923,3	37.840,7	0,81	789,0	68,6

Tahun	Jumlah Penduduk ribu Jiwa						Pertumbuhan Penduduk (%)	Kepadatan (km ²)	Usia 15-64 tahun (%)
	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan	Perkotaan	Pedesaan	Perkotaan + Pedesaan			
2012	18.793,0	19.313,6	38.106,6	4.951,3	33.155,3	38.106,6	0,72	790,8	68,8
2013	18.925,1	19.438,1	38.363,2	4.985,3	33.377,9	38.363,2	0,70	795,0	69,0
2014	19.051,6	19.558,6	38.610,2	5.012,7	33.597,5	38.610,2	0,69	800,1	69,2
2015	19.172,4	19.675,2	38.847,6	5.042,8	33.804,8	38.847,6	0,61	805,0	69,3

Sumber: BPS Indonesia (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035)

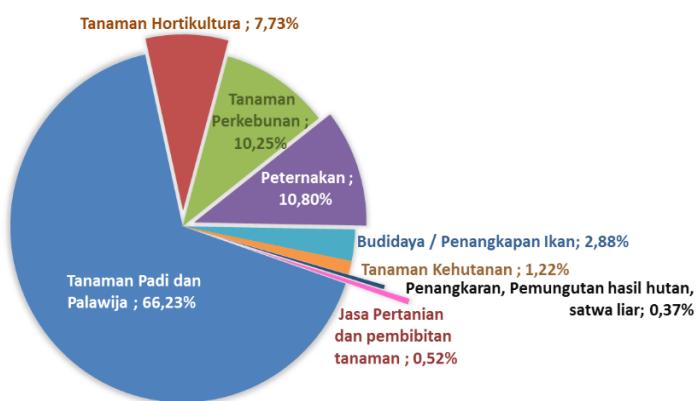
Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur tahun 2014 sebanyak 4.748.420 jiwa atau 17,13 persen dari jumlah 27.727.800 jiwa penduduk miskin di Indonesia (<http://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1488>) dan sebanyak 3.216.530 jiwa merupakan penduduk miskin yang tinggal di pedesaan dan sebagian besar merupakan petani. Kejemuhan sebagai penduduk miskin di sektor pertanian, menggerakkan hati mereka untuk mencoba mengadu nasib di sektor lain yang diyakini lebih menjanjikan.

Tabel 5.4
Perkembangan Penduduk Miskin Jawa Timur pada Tahun 2010 - 2014

Tahun	Penduduk Miskin (000)			Penduduk (000)		
	Kota	Desa	Kota+Desa	Kota	Desa	Kota+Desa
2010	1.873,5	3.655,8	5.529,3	4.883	32.683	37.566
2011	1.768,2	3.588,0	5.356,2	4.917	32.923	37.841
2012	1.606,0	3.354,6	4.960,5	4.951	33.155	38.107
2013	1.622,0	3.243,8	4.865,8	4.985	33.378	38.363
2014	1.531,9	3.216,5	4.748,4	5.013	33.598	38.610

Sumber: BPS Indonesia, 2015

Gambar 5.7.
Rumah Tangga Pertanian dengan Sumber Pendapatan Utama Usaha Sektor Pertanian (Sensus Pertanian 2013)



Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 dan Survei Pendapatan Rumah Tangga Usaha Pertanian 2013 dalam buku Potret Usaha Pertanian Provinsi Jawa Timur Menurut Subsektor menunjukkan bahwa jumlah rumah tangga pertanian yang mempunyai sumber pendapatan utama dari usaha di sektor pertanian sebagian besar (66,23 persen) rumah tangga pertanian mempunyai sumber pendapatan utama dari usaha tanaman padi dan palawija. Sementara itu, sebanyak 10,80 persen rumah tangga pertanian mempunyai pendapatan utama

Tabel 5.5
Rata-rata Pendapatan Per Rumah Tangga Pertanian
Menurut Sumber Pendapatan/Penerimaan Selama
Setahun (000 Rp)

No	Sumber Pendapatan / Penerimaan	Rata-Rata Pendapatan (000 Rp)	Percentase (%)
1	Usaha di Sektor Pertanian	10.507,50	43,56
2	Usaha di Luar Sektor Pertanian	3.316,28	13,75
3	Pendapatan/Penerimaan Lain dan Transfer	3.606,51	14,95
4	Buruh Pertanian	1.931,95	8,01
5	Buruh di Luar Pertanian	4.757,45	19,72
Jumlah		24.119,69	100,00

Sumber: BPS Indonesia (Sensus Pertanian 2013)

dari usaha peternakan. Usaha pertanian lain yang banyak menjadi sumber pendapatan utama rumah tangga pertanian adalah usaha tanaman perkebunan dan hortikultura masing-masing sebanyak 10,25 persen dan 7,73 persen rumah tangga pertanian. Sementara rumah tangga pertanian yang menjadikan usaha pertanian lain seperti budidaya ikan, penangkapan ikan, dan usaha di subsektor kehutanan sebagai sumber pendapatan utama sebesar 2,88 persen dan 1,59 persen.

5.3. Sarana Prasarana dan Kelembagaan

Infrastruktur, sarana dan prasarana sangat penting bagi pengembangan wilayah di Jawa Timur. Infrastruktur yang memadai erat kaitannya dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat. Sarana transportasi berdasarkan data BPS Jawa Timur (Jawa Timur dalam Angka Tahun 2014) tercatat bahwa panjang jalan raya di Jawa Timur yang tergolong jalan provinsi adalah 1.760,91 km. Sekitar 36,90 persen dari total panjang jalan provinsi pada tahun 2012 adalah termasuk dalam kategori baik, 48,82 persen termasuk dalam kategori sedang, dan yang rusak ringan dan berat ada 14,27 persen. Kondisi jembatan provinsi Jawa Timur sebanyak 1.212 buah dengan panjang 13.215 meter dan dalam kondisi baik sebanyak 1.135 buah dengan panjang 12.572 meter, sisanya dalam keadaan rusak ringan. Prasarana penyeberangan mempunyai peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat, baik internal provinsi maupun antar provinsi melalui Lintas Ujung – Kamal, Lintas Gilimanuk – Ketapang dan Lintas Jangkar – Kalianget. Perkembangan perekonomian Jawa Timur menuntut pergerakan barang yang semakin banyak volumenya, dan semakin cepat didukung empat pelabuhan di Jawa Timur (Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Gresik, Pelabuhan Probolinggo Dan Pelabuhan Tanjung Wangi) antar pulau dan aktivitas ekspor dan impor dengan volume peti kemas yang bongkar muat yang tinggi. Ketersediaan pelabuhan yang memadai sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting, karena bukan hanya pelaku bisnis saja yang dapat memperoleh manfaat, tapi juga harus rakyat di seputar pelabuhan dan juga perekonomian Jawa Timur. Selain dukungan infrastruktur darat dan air, penyediaan transportasi melalui udara di Jawa Timur dilakukan di 3 (tiga) Bandara Juanda dan Bandara Abdulrahman Saleh dan Bandara Blimbingsari Banyuwangi.

Sesuai dengan Keputusan Presiden nomor 12 tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai di Jawa Timur. Di Jawa Timur terdapat 7 (tujuh) wilayah sungai yang memiliki 686 Daerah Aliran Sungai (DAS), yaitu : 1) Wilayah Sungai Bengawan Solo memiliki 94 DAS (lintas Provinsi dan menjadi kewenangan Pusat); 2) Wilayah Sungai Brantas memiliki 220 DAS (strategis nasional/ kewenangan Pusat); 3) Wilayah Sungai Madura - Bawean memiliki 173 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi); 4) Wilayah Sungai Welang - Rejoso memiliki 36 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi); 5) Wilayah Sungai Bondoyudo - Bedadung memiliki 47 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi); 6) Wilayah Sungai Pekalen - Sampean memiliki 56 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi) dan 7) Wilayah Sungai Baru - Bajulmati memiliki 60 DAS (lintas Kabupaten/ kewenangan Provinsi).

Tabel 5.6

Jumlah Waduk, Volume Tampung, Kapasitas Efektif dan Luas Daerah Genangan pada Wilayah Sungai di Jawa Timur

Wilayah Sungai	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Bengawan Solo (waduk)	61	61	61	61	61	61
Volume Tampung (10^3 m 3)	588.977,63	588.977,63	588.977,63	590.384,63	590.384,63	590.384,63
Kapasitas Efektif (10^3 m 3)	363.212,80	363.212,80	363.212,80	365.423,80	365.423,80	365.423,80
Luas Daerah Genangan (km 2)	3.612,79	3.612,79	3.612,79	3.612,79	3.612,79	3.612,79
Brantas (waduk)	21	21	21	21	21	21
Volume Tampung (10^3 m 3)	459.458,00	459.458,00	459.458,00	459.458,00	475.367,00	475.367,00
Kapasitas Efektif (10^3 m 3)	412.640,90	412.640,90	412.640,90	412.640,90	435.954,90	435.954,90
Luas Daerah Genangan (km 2)	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.913,75	2.913,75
Welang - Rejoso	-	-	-	-	-	-
Pekalen - Sampean	-	-	-	-	-	-
Baru - Bajulmati	-	-	-	-	-	-
Bondoyudo - Bedadung	-	-	-	-	-	-
Madura (waduk)	1	1	1	1	1	1
Volume Tampung (10^3 m 3)	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapasitas Efektif (10^3 m 3)	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
Luas Daerah Genangan (km 2)	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8

Sumber : Pengairan dalam angka dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013

Provinsi Jawa Timur memiliki jumlah mata air yang cukup banyak dan tersebar di seluruh Wilayah sungai. Berdasarkan data Pengairan dalam angka dari tahun 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, luas catchment Area yang dapat diidentifikasi berdasarkan wilayah sungai, cenderung nilainya tetap. Selain Sungai, sumber daya air yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air adalah 89 buah waduk tersebar hampir di seluruh Jawa Timur. Sedangkan jumlah mata air yang ada masih tetap tidak mengalami perubahan yaitu sebanyak 4.389 mata air, yang memiliki debit rerata tahunan yang sama yaitu $73,20 \text{ m}^3/\text{detik}$, serta memiliki volume tahunan $2.308,57 \text{ m}^3$.

Tabel 5.7
Jumlah Mata Air, Debit Rerata Tahunan dan Volume Tahunan di Wilayah Sungai UPT PSDAW di Jawa Timur Tahun 2012

No	Wilayah Sungai UPTPSAWS Kabupaten/Kota	Jumlah Mata Air(buah)	Debit Rerata Tahunan (m^3/detik)	Volume Tahunan (10^6 m^3)
1	Bengawan Solo (Kabupaten Madiun, Magetan, Ngawi, Ponorogo, Pacitan)	1.037,00	8,22	259,26
2	Bengawan Solo (Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Tuban, Lamongan)	135,00	1,55	48,85
3	Brantas (Bango Gedangan, Kabupaten /Kota Malang dan Kota Batu, Kabupaten /Kota Blitar, Tulungagung, Trenggalek)	1.046,00	15,21	479,76
4	Puncu Selodono (Kabupaten Kediri, Nganjuk, Jombang)	508,00	10,74	338,67
5	Buntung Paketingan (Kabupaten Sidoarjo, Mojokerto, Kota Surabaya)	43,00	1,99	62,60
6	Welang - Rejoso, Gembong Pekalen (Kabupaten Pasuruan, Probolinggo)	514,00	6,44	203,09
7	Pekalen - Sampean, Sampean Baru (Kabupaten Situbondo, Bondowoso)	176,00	5,62	177,00
8	Baru - Bajulmati, Sampean Baru (Kabupaten Banyuwangi)	232,00	11,25	354,78
9	Bondoyudo - Bedadung, Bondoyudo – Mayang (Kabupaten Lumajang, Jember)	570,00	3,65	115,11
10	Madura (Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep)	128,00	8,54	269,33
	Jumlah	4.389,00	73,21	2.308,45

Sumber :Pengairan dalam angka (tahun 2008, 2009, 2011, 2012, 2013)

Sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Bagian Kedua tentang Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian, yang terinci dalam Pasal 16, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan / atau mengelola prasarana

Pertanian yang meliputi: jalan usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. Selanjutnya dalam Pasal 17 juga menyebutkan bahwa selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan / atau mengelola prasarana pertanian yang dibutuhkan Petani. Sebaliknya Petani memiliki kewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada.

5.4. Ekonomi, Konsumsi dan Pemasaran Hasil Pertanian

Salah satu indikator untuk mengukur kemakmuran daerah adalah tercapainya Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB). Besaran PDRB menunjukkan tingkat produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi, besarnya laju pertumbuhan ekonomi, dan struktur perekonomian pada suatu periode di daerah tertentu sekaligus merangkum perolehan nilai tambah yang dihasilkan. Sektor pertanian dalam perekonomian Jawa Timur cukup memegang peran penting karena merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi cukup besar. Sebagai sektor primer yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertanian mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tergantung pada kesuburan lahan dan teknologi yang ditetapkan serta kondisi iklim. Dalam perhitungan PDRB, yang termasuk dalam sub sektor tanaman pangan dan hortikultura meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil produk ikutannya seperti beras tumbuk, dan gapplek.

Tabel 5.8
Produk Domestik Regional Bruto Jawa Timur Tahun 2014 (Miliar Rupiah)

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014 *)	%
Atas Dasar Harga Berlaku						
PDRB Jawa Timur	990.649,44	1.119.877,16	1.247.767,29	1.382.434,85	1.540.696,53	11,68
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133.504,56	148.768,80	168.232,62	186.038,31	211.517,66	12,20
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	108.672,39	121.326,74	134.184,78	146.635,06	165.814,01	11,15

Uraian	2010	2011	2012	2013	2014 *)	%
a. Tan Pangan	46.010,26	50.379,83	56.484,23	62.031,96	69.697,38	10,95
b. Hortikultura	13.372,87	14.931,59	15.278,16	16.022,99	18.540,44	8,64
Atas Dasar Harga Konstan						
PDRB Jawa Timur	990.648,84	1.054.401,77	1.124.464,64	1.192.841,86	1.262.700,21	6,25
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	133.504,56	138.870,09	146.002,57	150.463,72	155.924,12	3,96
Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian	108.672,39	112.521,77	116.214,18	117.512,83	121.145,30	2,76
a. Tan Pangan	46.010,26	46.435,34	47.585,49	48.241,23	49.931,73	2,07
b. Hortikultura	13.372,87	14.305,89	14.461,71	14.298,05	14.635,69	2,32

Sumber : Berita Resmi Statistik Provinsi Jawa Timur No. 13/02/Th.XIII, 5 Februari 2015

Saat ini, Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2014 (Angka sangat sementara) sebesar 5,86 persen mengalami penurunan sebesar 0,22 persen jika dibandingkan tahun 2014 (Angka sementara) yang mencapai 6,08 persen. Kontribusi PDRB subsektor tanaman pangan dan hortikultura meliputi: a) Produk meliputi penyediaan pangan bagi penduduk, penyediaan bahan baku industri makanan dan minuman; b) Pasar yaitu pembentukan pasar domestik untuk barang industri dan konsumsi; c) Faktor produksi, yaitu penurunan peranan pertanian di pembangunan ekonomi maka terjadi transfer surplus modal dan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain; dan d) Devisa melalui ekspor produk pertanian dan produk pertanian yang menggantikan produk import.

Dalam tahun 2015, Indonesia berhadapan dengan Pasar Tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Terbentuknya pasar tunggal ASEAN semakin membuka peluang pasar. Dari segi kekuatan ekonomi, maka ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan berbasis produksi tunggal yang di dalamnya akan terjadi arus barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terdidik/profesional yang bebas, serta arus modal yang lebih bebas di antara negara-negara ASEAN. Di Jawa Timur, pemasaran hasil pertanian terdiri : a) Pemasaran Domestik; dan b) Pemasaran Internasional. Pengembangan Pemasaran Dalam Negeri diarahkan terciptanya mekanisme pasar yang berkeadilan, sistem pemasaran yang efisien dan efektif, meningkatnya posisi tawar petani/ pelaku usaha, meningkatnya pangsa pasar

Tabel 5.9
Konsumsi Rata-rata Beras, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Bawang Merah, Cabe Merah dan Jeruk per Kapita Setahun di Indonesia, 2009-2013

Konsumsi (kg/kapita/th)	Nasional					Jawa Timur
	2010	2011	2012	2013	2014	2014
Beras	90,16	89,48	87,24	85,51	84,29	79,56
Jagung pipilan	1,56	1,20	1,51	1,30	0,94	3,12
Kacang kedele	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,02
Ubi Kayu	5,06	5,79	3,60	3,49	0,40	3,36
Bawang merah	2,53	2,36	2,80	2,25	2,57	2,64
Cabe merah	1,53	0,15	1,84	1,44	1,60	0,66
Jeruk	4,17	3,48	3,48	3,48	3,48	2,88

Sumber : Kementerian Pertanian RI (Survei Sosial Ekonomi Nasional, 2009 – 2014)

produk lokal di pasar domestik, dan meningkatnya konsumsi terhadap produk pertanian Indonesia, serta terpantauanya harga komoditas hasil pertanian. Sedangkan Pengembangan Pemasaran Internasional dimaksudkan untuk percepatan peningkatan ekspor hasil pertanian, baik dalam bentuk segar maupun olahan sehingga dapat meningkatkan pangsa pasar produk lokal di pasar internasional dan sekaligus meningkatkan perolehan devisa negara sekaligus dimaksudkan untuk melindungi produk pertanian dalam negeri melalui kebijakan yang kondusif dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku pada WTO.

Kebutuhan dasar manusia adalah pemenuhan atas pangan yang cukup, bergizi serta aman sehingga menjadi syarat utama dalam mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas untuk melaksanakan pembangunan. Kebutuhan pangan merupakan penjumlahan dari kebutuhan pangan untuk konsumsi langsung, kebutuhan industri dan permintaan lainnya. Seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan terhadap jenis dan kualitas produk makanan juga semakin meningkat dan beragam. Ernst Engel (1857) menyatakan, apabila selera tidak berbeda maka persentase pengeluaran untuk makanan menurun dengan semakin meningkatnya pendapatan. Dengan demikian akan menggambarkan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data Susenas, pengeluaran penduduk Indonesia untuk makanan dan non makanan sejak tahun 2007 menunjukkan pergeseran dengan persentase pengeluaran untuk makanan lebih besar dibandingkan pengeluaran untuk non makanan seimbang dengan pengeluaran makanan terhadap total pengeluaran penduduk Indonesia per kapita per tahun. Pangan pokok adalah makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal. Sebagian besar penduduk Jawa Timur makanan utama adalah beras. Meskipun konsumsi beras menurun, tingkat konsumsi rata-rata masyarakat Indonesia tergolong tinggi bahkan menduduki peringkat atas dunia. Data BPS menunjukkan bahwa pada tahun 1996 secara agregat, pola konsumsi pangan pokok di Indonesia didominasi oleh beras, bahkan di perdesaan beras telah menjadi pola pangan pokok tunggal.

5.5. Sumber Daya Manusia

Tabel 5.10
Penduduk Berumur 15 Tahun ke Atas di Jawa Timur yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama, 2014

Lapangan Pekerjaan Utama	2014
Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan	7.261.367
Pertambangan dan Penggalian	143.338
Industri Pengolahan	2.776.552
Listrik, Gas, dan Air	35.849
Bangunan	1.259.443
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel	4.026.671
Angkutan, Pergudangan, dan Komunikasi	686.972
Keuangan, Asuransi, Usaha Persewaan Bangunan, Tanah, dan Jasa Perusahaan	421.788
Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan	2.694.528
Jumlah	19 306 508

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2014

Hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) merupakan data strategis bagi Jawa Timur, karena sektor pertanian merupakan sektor dominan setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran (PHR), dan sektor industri. Hasil Sakernas yang dilaksanakan bulan Agustus 2014 diperoleh perkembangan berdasarkan pekerjaan utama pada usia produktif pada Tabel 5.10.

Dalam mengoptimalkan program pembangunan tanaman pangan dan hortikultura, tenagakerja mempunyai peran yang sangat penting. Tenaga kerja pertanian (dalam arti sempit) merupakan tenaga kerja terbesar dengan jumlahnya mencapai 7,26 juta jiwa pada bulan Agustus 2014 atau 37,61 persen dari jumlah tenaga kerja Jawa Timur yang tersebar ke dalam empat sub sektor pertanian. Secara nasional, prosentase tenaga kerja pertanian di Jawa Timur sebesar 18,63 persen dari tenaga kerja pertanian nasional yang mencapai 38,97 juta jiwa. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang besar tersebut, ternyata hanya mampu memberikan kontribusi PDRB Jawa Timur tahun 2014 sebesar 13,73 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian masih rendah, dan hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan adopsi teknologi. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, yang akhirnya mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur. Selanjutnya berdasarkan dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional oleh BPS perkembangan tahun 2014 terlihat pada Tabel 5.11.

Tabel 5.11
Karakteristik Tenaga Kerja Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan Jawa Timur Tahun 2014

Uraian	Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (orang)				
	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
Jenis Kelamin	4.401.450	60,61	2.859.917	39,39	7.261.367
Umur Petani					
< 15 Tahun	153.316	72,72	57.516	27,28	210.832
15 - 24 Tahun	226.018	67,37	109.453	32,63	335.471
25 - 34 Tahun	688.397	63,71	392.154	36,29	1.080.551
35 - 44 Tahun	883.542	56,74	673.646	43,26	1.557.188

Uraian	Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan (orang)				
	Laki-laki	%	Perempuan	%	Jumlah
45 - 54 Tahun	1.000.415	54,72	827.676	45,28	1.828.091
55 - 59 Tahun	485.725	59,87	325.589	40,13	811.314
> 60 Tahun	964.037	67,04	473.883	32,96	1.437.920
Pendidikan					
Tidak Sekolah	422.422	40,81	612.714	59,19	1.035.136
Tidak Tamat SD	1.060.323	57,68	778.093	42,32	1.838.416
Sekolah Dasar	1.812.981	62,35	1.094.770	37,65	2.907.751
SLTP	661.007	70,30	279.275	29,70	940.282
SLTA	407.500	82,08	88.965	17,92	496.465
Diploma/Akademi	10.629	85,20	1.847	14,80	12.476
Universitas	26.588	86,21	4.253	13,79	30.841

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (*Keadaan Angkatan Kerja di Jawa Timur, Agustus 2014*

Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian di Jawa Timur sampai dengan akhir tahun 2014 sebagai berikut :

- Jumlah aparat Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur sebanyak 1.094 orang yang terdiri dari golongan IV sebanyak 118 orang (10,79 persen), golongan III sebanyak 772 orang (68,74 persen), golongan II sebanyak 211 orang (19,10 persen), dan golongan I sebanyak 15 orang (1,37 persen);
- Perkembangan Petugas Pertanian Kecamatan (Mantri Pertanian) sebagai petugas yang berinteraksi dengan petani / kelompoktani sebanyak 664 orang;
- Petugas Pengamat Hama Penyakit/Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (PHP/POPT) sebanyak 470 orang tersebar di 29 kabupaten dan 7 laboratorium (Laboratorium Pandaan – Pasuruan, Jabon – Mojokerto, Pamekasan, Madiun, Tanggul – Jember, Kening – Tuban, Tulungagung);
- Pengawas benih sebanyak 107 orang yang tersebar di 38 kabupaten termasuk analisis benih diprovinsi;
- Jumlah penyuluh pertanian (Badan Ketahanan Pangan, 2014) sebanyak 2.266 penyuluh PNS dan 2.419 penyuluh THL-TB;
- Perkembangan Kelompoktani sampai dengan akhir tahun 2014 sebanyak 31.433 kelompok dan yang tergabung dalam Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) sebanyak 6.105 gapoktan.



6

ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JAWA TIMUR

6

ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN KOMODITAS UNGGULAN KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JAWA TIMUR

6.1. Analisis Biofisik Sumberdaya Lahan untuk Pengembangan Tanaman dan Hortikultura

Potensi pengembangan wilayah Provinsi Jawa Timur dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah ((RTRW) Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 meliputi beberapa aspek antara lain potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, dan pertambangan. Potensi Lahan Pertanian berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor: 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Timur meliputi pertanian lahan basah (sawah), pertanian lahan kering, dan hortikultura. Dokumen RTRW tersebut juga memuat potensi lahan pertanian dengan luas eksisting kawasan pertanian 2.020.491,71 ha terdiri pertanian lahan basah sebesar 911.863 ha dan pertanian lahan kering/tegalan/kebun campur sebesar 1.108.627,71 ha (Gambar 6.1 dan 6.2). Rencana penggunaan lahan untuk pertanian lahan basah berupa Sawah beririgasi teknis dengan luas sekurang-kurangnya 957.239 Ha atau 20,03 persen dari luas Jawa Timur dengan peningkatan jaringan irigasi semi teknis dan sederhana menjadi irigasi teknis yang tersebar di masing-masing wilayah sungai. Rencana pengembangan pertanian lahan kering di wilayah Provinsi Jawa Timur dalam dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011 – 2031 tersebut ditetapkan dengan luas sekurang-kurangnya 849.033 Ha atau 17,76 persen dari luas Jawa Timur yang diarahkan pada daerah-daerah yang belum terlayani oleh jaringan irigasi.

Gambar 6.1.

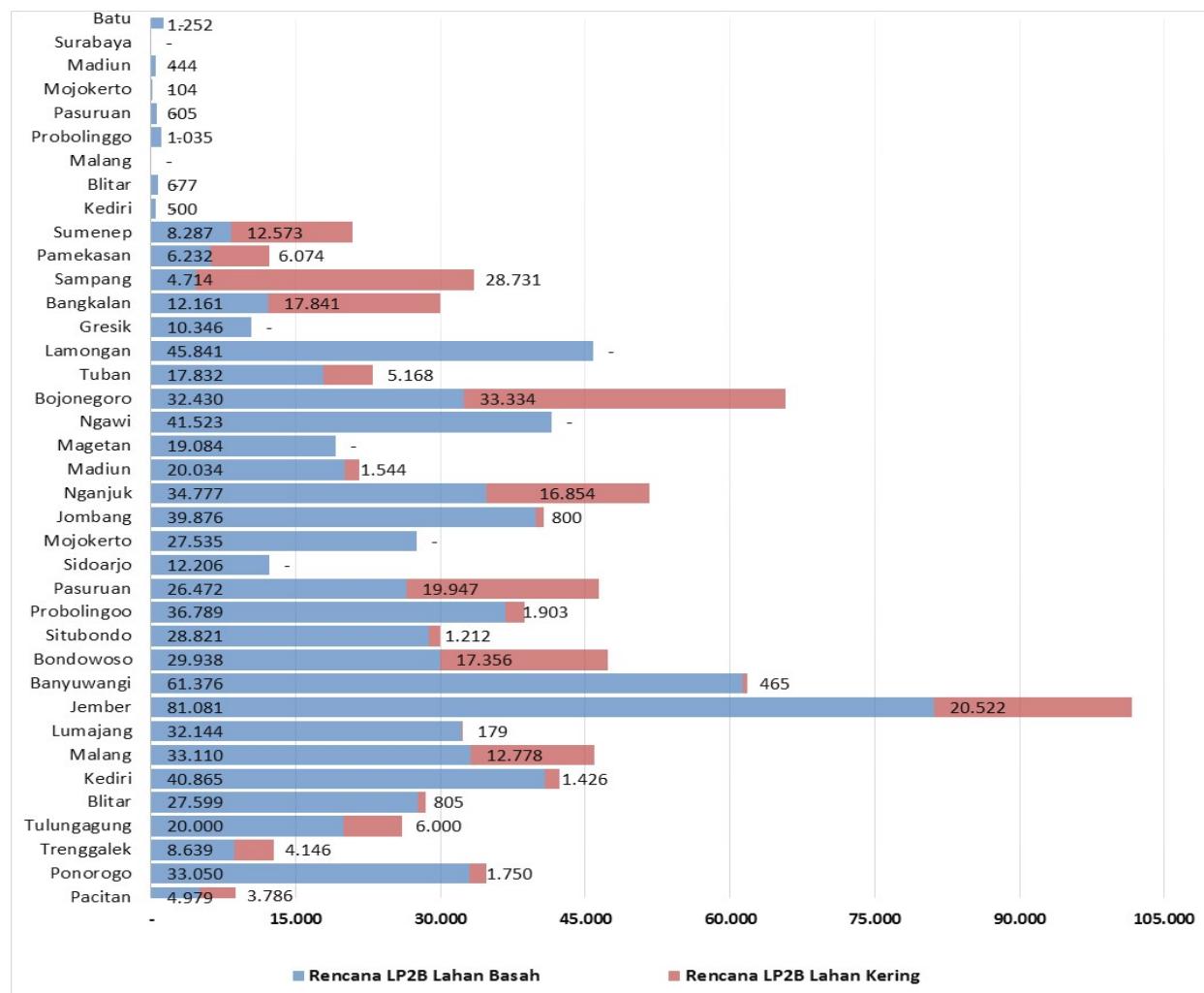
Peta Peruntukan Pertanian Pangan Lahan Basah dan Kering Provinsi Jawa Timur



Sumber: RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031

Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, perlu dilakukan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan sehingga dapat menjamin ketersediaan pangan (Gambar 6.2).

Gambar 6.2
Luas dan Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelaanjutan (LP2B) Kabupaten/Kota di Jawa Timur



Sumber: Perda no 5 Tahun 2012 (RTRW Provinsi Jawa Timur Tahun 2011-2031)

Berdasarkan hal tersebut provinsi Jawa Timur menetapkan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) di Jawa Timur Seluas kurang lebih 1.017.549,72 Ha

dengan rincian lahan basah seluas 802.357,9 Ha dan lahan kering seluas 215.191,83 Ha. Perkembangan potensi lahan pertanian di Jawa Timur berdasarkan Rekapitulasi Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan, 2010-2014 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur bersama Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2015 meliputi pertanian lahan basah (sawah), pertanian lahan kering, dan hortikultura dengan total luas 3.506.802 hektar atau sebesar 72,67 persen dari 4.825.800 hektar luas wilayah provinsi Jawa Timur yang terlihat pada Tabel 6.1.

Tabel 6.1
Perkembangan Lahan Pertanian Jawa Timur Tahun 2010 - 2014

Jenis Lahan	2010	2011	2012	2013	2014	laju ¹⁾ perubahan lahan = P_t $[P_t = P_0 (1 + \frac{r}{m})^t]$
1. Lahan Sawah	1.173.620	1.171.810	1.174.616	1.179.264	1.177.160	0,08
Sawah irigasi	933.681	931.107	931.603	928.307	924.513	(0,25)
Sawah non irigasi	239.939	240.703	243.013	250.957	252.647	1,30
2. Lahan Pertanian Bukan Sawah	1.746.899	1.778.075	2.101.517	2.235.935	2.329.642	7,46
- Tegal/kebun	1.114.530	1.128.083	1.129.772	1.141.452	1.131.743	0,38
- Ladang/huma	44.312	37.331	37.800	37.520	37.439	(4,13)
- Lahan yang sementara tidak diusahakan	10.813	10.814	10.474	15.270	11.994	2,63
- Lainnya (perkebunan, hutan rakyat tambak, kolam/tebat/ empang, dll)	577.244	601.847	923.471	1.041.693	1.148.466	18,77

Sumber : Rekapitulasi Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan oleh Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dan BPS Provinsi Jawa Timur tanggal 27 Maret 2015,

¹⁾ perhitungan laju perubahan penggunaan lahan sawah (Pambudi, 2008)

Penggunaan lahan sawah pada tahun 2014 seluas 1.177.160 hektar berkurang 2.104 dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 1.179.264 hektar. Perubahan penggunaan lahan sawah di Jawa Timur tahun 2010-2014 melalui perhitungan laju perubahan penggunaan lahan sawah (Pambudi, 2008). Dari hasil analisis perubahan penggunaan lahan pertanian lahan basah berupa sawah

Tabel 6.2
Tekanan Penduduk (TP) terhadap Lahan Sawah
di Jawa Timur Tahun 2010-2014

Tahun	Penduduk (jiwa)= P_0	Luas min layak hidup (ha/KK) = Z	Fraksi Petani (%) = f_1	Lahan Sawah (hektar) = L	Tekanan Penduduk (TP) = $\frac{(1-x) Z_0 f_1 P_0}{L} (1+r)^t$
2010	37.565.800	0,73	9,5	1.173.620	1,49
2011	37.840.700	1,37	8,4	1.171.810	2,50
2012	38.106.600	0,92	8,0	1.174.616	1,59
2013	38.363.200	1,29	8,5	1.179.264	2,40
2014	38.610.200	1,45	11,3	1.177.160	3,61

Sumber : Analisa data sekunder BPS Jawa Timur, 2014, Statistik Ketenagakerjaan Pertanian (Kementerian Pertanian RI tahun 2014), Sensus Pertanian 2013, (Pergub nomor 69 tahun 2009, Pergub. No 93 tahun 2010, Pergub. No 81 tahun 2011, Pergub. No 72 tahun 2012 dan Pergub. No 78 tahun 2013 tentang UMK Jawa Timur), (inpres no 7 tahun 2009 dan inpres no 3 tahun 2012 tentang HPP Gabah)

menunjukkan bahwa dalam kurun waktu lima tahun (t), yakni dari tahun 2010 (P_0) sampai dengan 2014 (P_t) terjadi laju perubahan luas penggunaan lahan sebesar 0,08 persen atau 885 hektar setiap tahunnya, yang terdiri laju sawah irigasi yang semakin menurun sebesar -0,25 persen dan sawah non irigasi sebesar 1,30 persen.

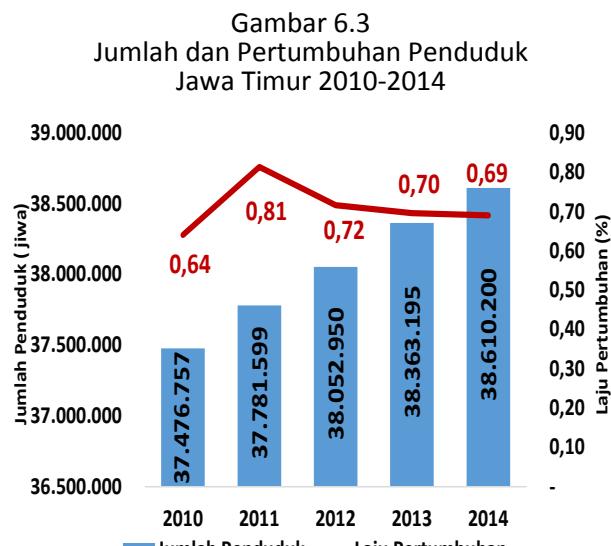
Perubahan lahan sawah setiap tahunnya disebabkan dinamika perubahan pemanfaatan lahan seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dan perkembangan struktur perekonomian, kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian semakin meningkat. Alih fungsi lahan pertanian yang kian sulit dihindari justru semakin memicu lahan di sekitarnya beralih fungsi secara progresif sebagian besar disebabkan adanya tekanan penduduk. Besarnya tekanan penduduk terhadap lahan merupakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas lahan minimal untuk dapat hidup layak (Otto Soemarwoto, 1985). Sehingga jika produktifitas lahan makin tinggi maka pendapatan petani penggarap juga semakin tinggi dan makin besar pendapatan yang bekerja diluar sektor pertanian dengan demikian besarnya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian akan makin rendah. Besarnya tekanan penduduk (TP) terhadap lahan sawah di Jawa Timur merupakan perbandingan lurus dari luas lahan minimal untuk hidup layak (Z), fraksi jumlah petani tanaman pangan terhadap jumlah penduduk Jawa Timur (f_1) dan jumlah penduduk tahun 2010 (P_0) terhadap luas lahan sawah seluruhnya (L). Rerata pertumbuhan penduduk Jawa Timur tahun 2010-2014 yang diperhitungkan sebesar 0,71 persen. Sedangkan konstanta x merupakan persentase kontribusi pendapatan di luar sector pertanian secara rata-rata, besarnya x adalah 35 persen. (Ilda Bagus Mantra, 2003 :79). Pendekatan luas lahan minimal layak hidup (Z) melalui rerata perbandingan pendapatan usahatani padi sawah dalam setahun sesuai besar HPP Gabah Kering Giling terhadap UMK yang ditetapkan Gubernur untuk tiap kabupaten. Hasil analisa tekanan penduduk (TP) terhadap lahan sawah di Jawa Timur tahun 2013 hingga 2014 menunjukkan telah terjadi tekanan penduduk melebihi batas kemampuan lahan sawah di Jawa Timur mengingat nilai Tekanan Penduduk (TP) di klasifikasikan menjadi tiga, yaitu:

- $TP > 1$ menunjukkan terjadi tekanan penduduk melebihi batas kemampuan lahan

- TP = 1 menunjukkan penggunaan lahan pertanian optimal terhadap kemampuan lahan
- TP < 1 menunjukkan belum terjadi tekanan penduduk terhadap lahan atau dapat dikatakan lahan daerah tersebut masih kurang dimanfaatkan.

Krisnohadi (2011), melihat tekanan penduduk atas lahan terus meningkat dan sudah melebihi daya dukung lahan untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non pertanian menyebabkan terjadinya peningkatan luas permukaan kedap (impervious area) sehingga memicu peningkatan aliran permukaan yang menjadi komponen terbesar penyumbang banjir. Selain itu, peningkatan permukaan kedap akan menyebabkan penurunan infiltrasi yang akan mendorong penurunan cadangan air tanah. Akibatnya saat musim kemarau, terjadinya kelangkaan ketersediaan air tanah.

Tantangan terbesar dari pengembangan pertanian di Jawa Timur adalah tingginya perubahan pemanfaatan lahan sawah dari tahun ketahun. Perubahan pemanfaatan lahan sawah tersebut disebabkan banyak hal salah satunya terjadi alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Untuk mencukupi kebutuhan pangan nasional dan kebutuhan pangan Provinsi Jawa Timur, dilakukan pengendalian laju perubahan fungsi lahan persawahan menjadi non persawahan yaitu : a) Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur, Nomor 5 Tahun 2013, Tanggal 21 Juni 2013 yang menetapkan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B); b) meningkatkan fungsi dan peran serta tanggung jawab kelompoktani HIPPA melalui pelatihan dan pembinaan kelompok serta pengembangan TGA ditingkat usahatani; c) pengembangan dan optimalisasi pemanfaatan lahan tada hujan dengan mengembangkan pompa air dan potensi air tanah dangkal yang ada disuatu daerah atau sumber air lainnya.



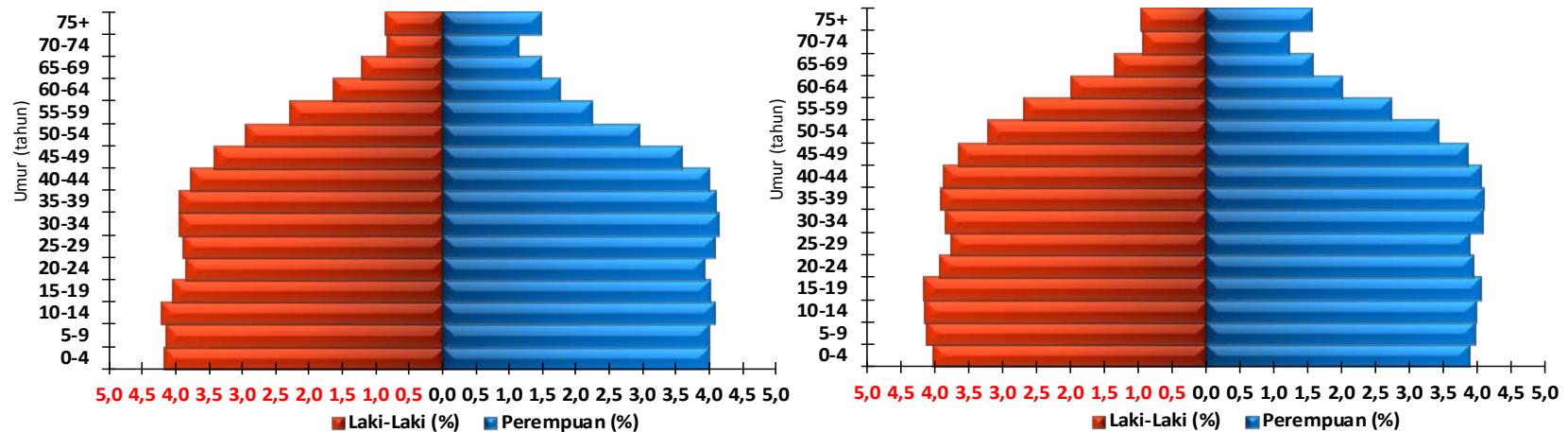
Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)

Perkembangan lahan kering tertinggi Jawa Timur berada di Kabupaten Sumenep seluas 118.848 hektar, Kabupaten Malang memiliki luasan 97.524 hektar dan berikutnya Sampang seluas 78.514 hektar. Lahan kering di kabupaten Sumenep memberi kontribusi cukup tinggi untuk areal tanam komoditas jagung seluas 139.934 hektar atau mencapai 10,50 persen dari 1.131.743 hektar luas lahan kering di Jawa Timur. Di Jawa Timur, sebagian besar lahan beririgasi terletak di wilayah utara yang termasuk Daerah Aliran Sungai atau sepanjang pesisir Bengawan Solo meliputi kabupaten Lamongan, Bojonegoro, Ngawi, dan Daerah Aliran Sungai Brantas di Kabupaten Jombang, Nganjuk, Kediri serta kabupaten Jember, Banyuwangi dan Pasuruan. Sedangkan sawah tada hujan mayoritas berada di wilayah Madura (Bangkalan dan Sampang), Bojonegoro, Tuban dan Ponorogo.

6.2. Analisa Kependudukan, Sosial Budaya dan Kesejahteraan

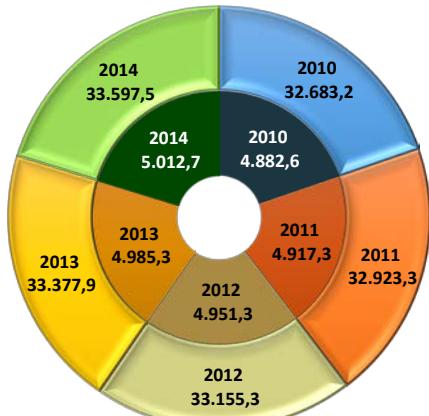
Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia Tahun 2010-2035 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Jawa Timur terus mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu dari 37.476,76 ribu jiwa pada tahun 2010 menjadi 38.610,20 ribu jiwa pada tahun 2014 (Gambar 6.3). Walaupun demikian, pertumbuhan rata - rata per tahun selama periode 2010-2014 menunjukkan kecenderungan terus menurun, turunnya laju pertumbuhan ini ditentukan oleh turunnya tingkat kelahiran dan kematian. Komposisi penduduk laki-laki dan perempuan di Jawa Timur pada tahun 2010 dibandingkan tahun 2014 tidak banyak perbedaan, dengan prosentase paling banyak adalah perempuan pada kisaran umur 30 – 39 tahun, sedangkan untuk laki-laki pada kisaran umur 5 – 14 tahun (Gambar 6.4).

Gambar 6.4
Piramida Penduduk Jawa Timur 2010 dan 2015



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)

Gambar 6.5
Jumlah Penduduk Perkotaan dan Perdesaan
Jawa Timur 2010-2014

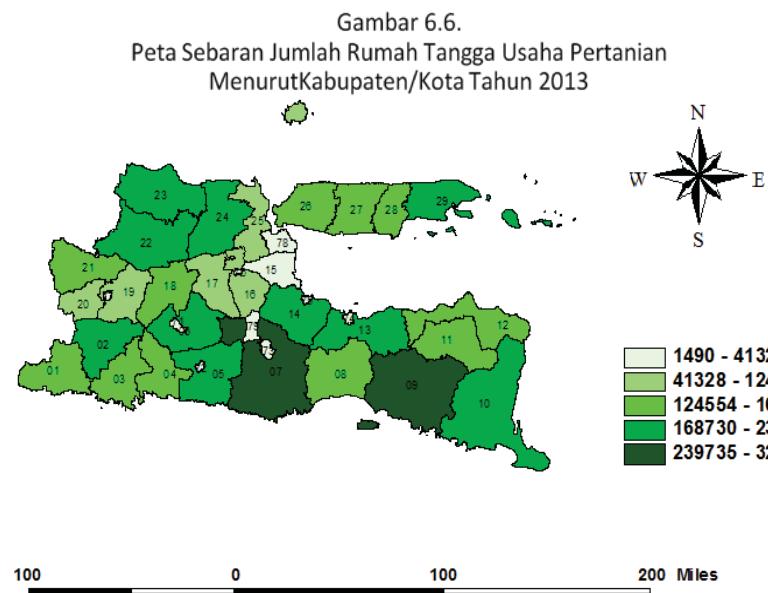


Keterangan : Perkotaan (Lingkaran dalam) dan Pedesaan (lingkaran luar)

Sumber : (Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035)

Pertumbuhan jumlah penduduk Jawa Timur selama lima tahun (2010 – 2014) disetiap Kabupaten / Kota sangat bervariasi, pertumbuhan tertinggi di Kabupaten Sidoarjo sebesar 1,68 persen diikuti Gresik dan Sampang yang masing Kabupaten / Kota sangat cepat disebabkan pergeseran penduduk dari desa ke kota (Gambar 6.5).

Berdasarkan hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2013 (ST 2013) diperoleh jumlah rumah tangga usaha pertanian di Jawa Timur sebesar 4.978.358 rumah tangga. Hal tersebut menunjukkan penurunan sebesar 1.336.012 rumah tangga atau 21,16 persen jika dibandingkan dengan Sensus Pertanian 2003 (ST 2003) yang mencapai 6.314.370 rumah tangga. Jumlah rumah tangga terbanyak berada di Kabupaten Malang (328 ribu rumah tangga), diikuti Jember (326 ribu rumah tangga) dan Bojonegoro (240 ribu rumah tangga). Sebaliknya yang terendah di Kota Mojokerto (1,5 ribu rumah tangga) dan Kota Madiun (2,4 ribu rumah tangga) terlihat pada Gambar 6.6 dan Gambar 6.7.



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Potensi Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2013)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (Potensi Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2013)

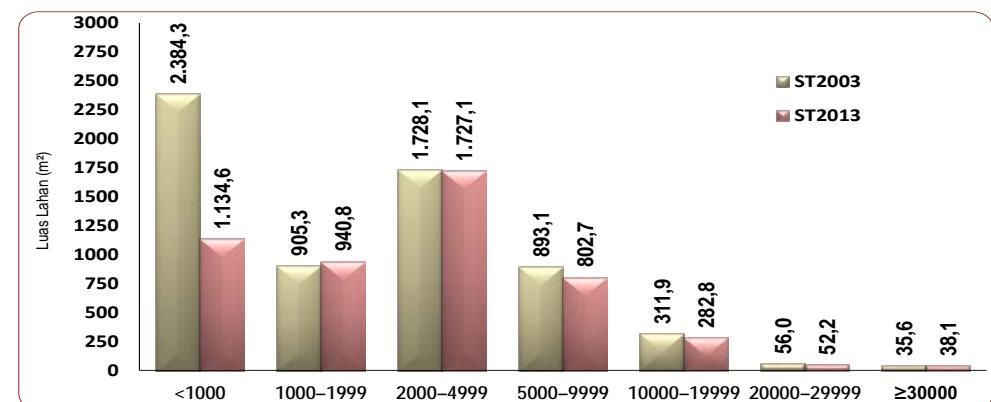
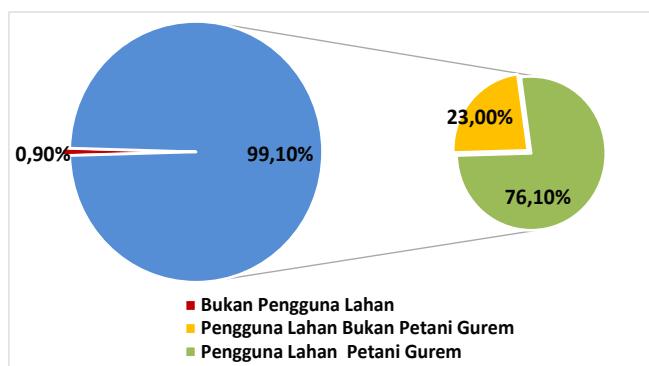
Apabila diklasifikasikan menurut golongan luas lahan, hasil ST2013 menunjukkan jumlah rumah tangga usaha pertanian yang menguasai lahan kurang dari 0,10 hektar (1.000 m^2) mendominasi jumlah rumah tangga usaha pertanian di Provinsi Jawa Timur (1,13 juta rumah tangga). Rumah tangga usaha pertanian dengan luas lahan yang dikuasai antara 0,10–0,19 hektar ($1.000\text{--}1.999 \text{ m}^2$) pada ST2013 sebanyak 940,83 ribu rumah tangga, meningkat sebesar 3,92 persen (35,48 ribu rumah tangga) bila dibandingkan dengan ST2003 yang tercatat sebanyak 905,35. Pada Gambar 6.8. menunjukkan golongan luas lahan 0,20–0,49 hektar ($2.000\text{--}4.999 \text{ m}^2$) tercatat mempunyai jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 1,73 juta rumah tangga pada ST2013, menurun sebanyak 993 rumah tangga jika dibandingkan ST2003. Sedangkan untuk golongan luas lahan yang dikuasai lebih dari 0,50 hektar (5.000 m^2), jumlah usaha rumah tangga pertanian hasil ST2013 sedikit menurun dibandingkan dengan hasil ST2003. Rumah tangga pertanian pengguna lahan dapat digolongkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu rumah tangga petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang

menguasai lahan kurang dari 0,50 hektar) dan rumah tangga bukan petani gurem (rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan yang menguasai lahan yang dikuasai lebih dari 0,50 hektar (5.000 m^2). Hasil ST2013 menunjukkan bahwa dari sebesar 99,06 persen rumah tangga usaha pertanian pengguna lahan, sebesar 76,16 persennya (3,76 juta rumah tangga) merupakan rumah tangga petani gurem, sedangkan rumah tangga bukan petani gurem sebesar 23,84 persen (1,18 juta rumah tangga) yang terlihat pada Gambar 6.8. dan Gambar 6.9.

Seperti yang dijelaskan oleh Tjondronegoro (2006) "Tanah sebagai

Gambar 6.9
Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Menurut Golongan Luas Lahan yang Dikuasai, ST2003 dan ST2013

Gambar 6.8
Perbandingan Rumah Tangga Pertanian Pengguna Lahan dan Petani Gurem Tahun 2013



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur (ST 2013)

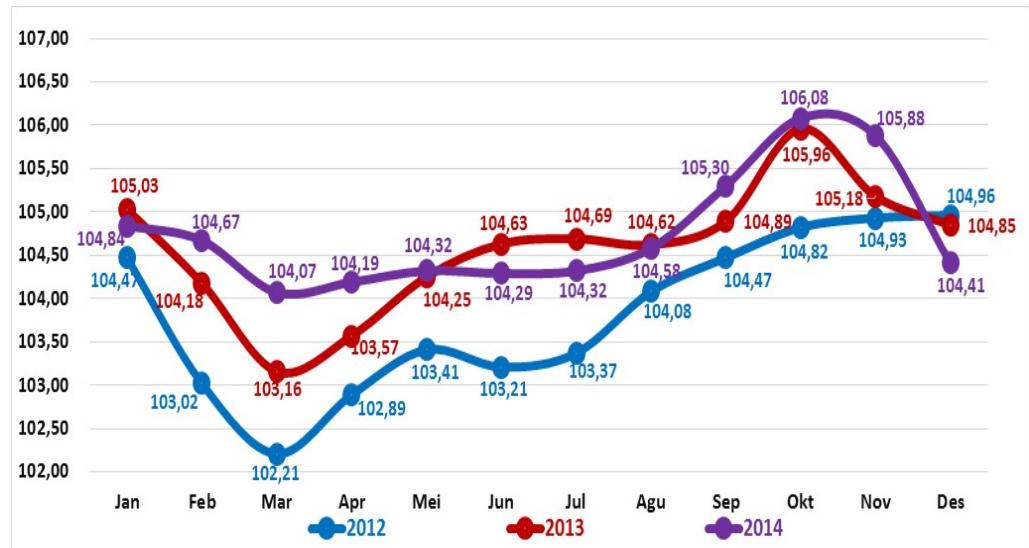
tumpuan hidup petani kian berkurang, bukan saja karena penduduk bertambah, tetapi karena pemusatan kepemilikan tanah oleh pemodal besar yang hidup di perkotaan. Itu beberapa penyebab utama mengapa akses kepada tanah dan air serta sumber daya alam kian sulit bagi petani dan nelayan". Kenyataan bahwa sebagian besar petani pengguna lahan merupakan petani gurem dengan tingkat produktivitas dan upah buruh yang sangat rendah. menunjukkan bahwa petani Jawa Timur masih belum sejahtera hal tersebut juga terukur dari besaran Nilai Tukar Petani (NTP). Selama ini, pertumbuhan ekonomi di pedesaan tercermin dari

kemampuan konsumsi masyarakat Jawa Timur disektor pertanian yang perubahan peningkatannya dikonfirmasi oleh indikator kesejahteraan petani berupa indeks Nilai Tukar Petani (NTP).

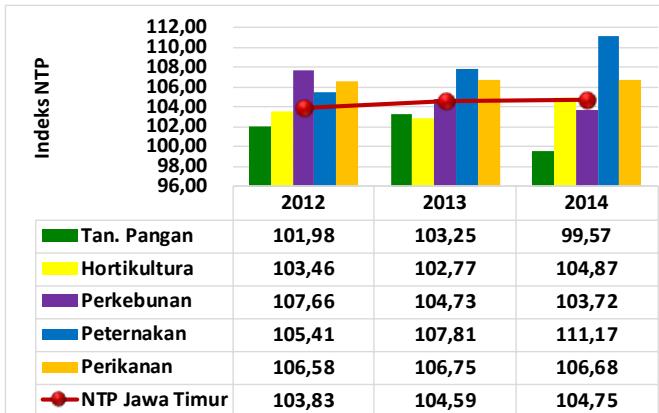
Secara konsepsional NTP adalah pengukur kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan petani dengan barang/jasa yang diperlukan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam memproduksi produk pertanian. Variabel yang digunakan dalam perhitungan Nilai Tukar Petani (NTP), yakni indeks rasio harga yang diterima dengan harga yang dibayar oleh rumah tangga tani di 29 kabupaten. Sebagai rasio antara indeks harga yang diterima petani (I_t) dengan indeks harga yang dibayar petani (I_b) maka apabila besaran $NTP > 100$, berarti petani mengalami surplus dan meningkat daya beli petani di pedesaan. Demikian pula jika $NTP = 100$ berarti petani mengalami impas, dan tingkat kesejahteraan petani tidak mengalami perubahan dibandingkan periode sebelumnya. Sebaliknya jika $NTP < 100$, berarti petani mengalami defisit dan berkurang tingkat kemampuan daya beli petani dibandingkan dengan periode sebelumnya. Perkembangan Nilai Tukar Petani tahun 2014 pada grafik terlihat sangat berfluktuasi setiap bulannya dengan NTP tertinggi pada bulan Oktober yang disebabkan meningkatnya Indeks harga yang diterima petani sub sektor tanaman pangan (padi dan palawija), peternakan (ternak besar/kecil dan unggas).

Perkembangan Nilai Tukar Petani tahun 2014 pada grafik Gambar 6.10 terlihat sangat berfluktuasi setiap bulannya dengan NTP tertinggi pada bulan Oktober yang disebabkan meningkatnya Indeks harga yang diterima petani sub sektor tanaman pangan (padi dan palawija), peternakan (ternak besar/kecil dan unggas). Selanjutnya rendahnya rerata NTP pada bulan Maret dipicu rendahnya harga gabah dan harga buah-buahan (jeruk dan durian).

Gambar 6.10
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Bulanan Tahun 2012 - 2014 (2012=100)



Gambar 6.11
Nilai Tukar Petani SubSektor Jawa Timur
Tahun 2012 - 2014

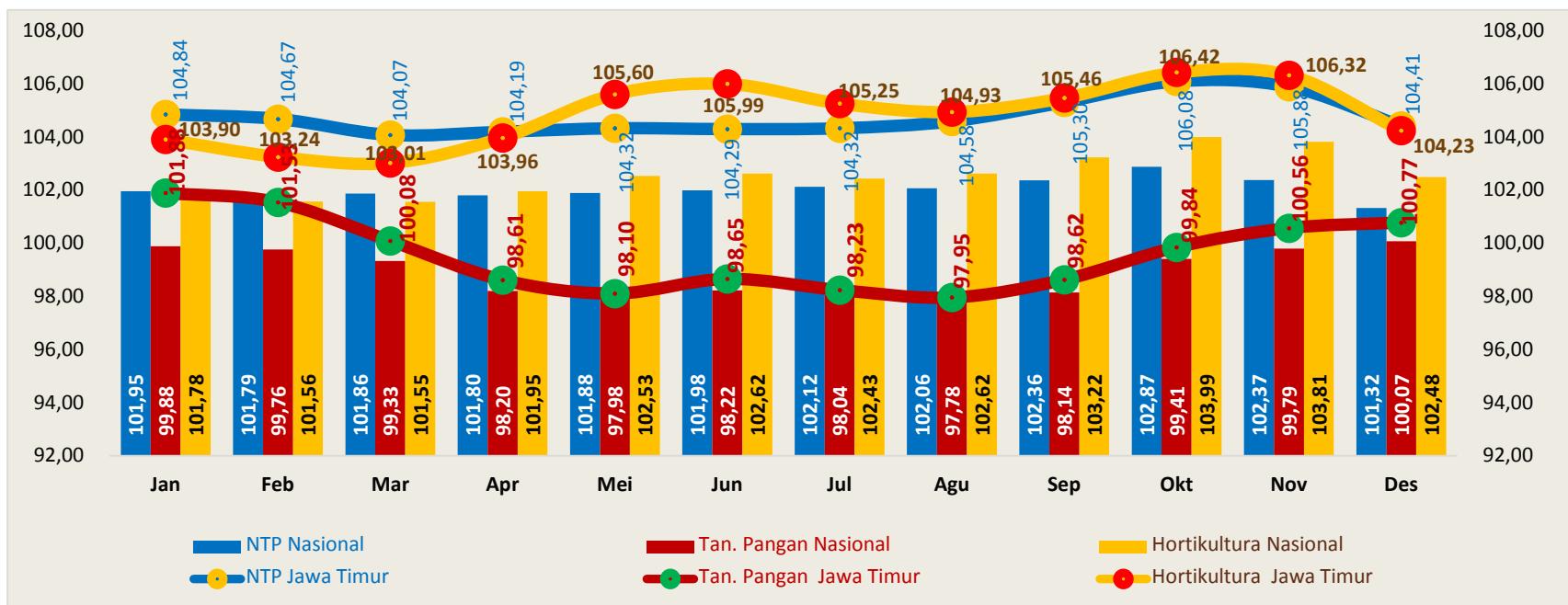


Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur (Statistik Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Timur Tahun 2015)

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2014 (Statistik Nilai Tukar Petani di Provinsi Jawa Timur, 2015)

Peningkatan rerata NTP Jawa Timur tahun 2014 sebesar 0,15 persen jika dibandingkan tahun 2013 yaitu dari 104,59 menjadi 104,75 yang disebabkan peningkatan indeks harga yang diterima petani (7,35 persen) lebih besar dari kenaikan indeks harga yang dibayar petani (7,19 persen) terlihat pada Gambar 6.11 tentang Nilai Tukar Petani SubSektor Jawa Timur Tahun 2012 – 2014 yang menunjukkan bahwa rata-rata nilai tukar produk pertanian terhadap barang konsumsi rumah tangga petani dan biaya produksi tahun 2014, secara umum masih lebih tinggi dibanding kondisi tahun 2013. Sedangkan rerata NTP sub sektor tanaman pangan dan hortikultura tahun 2014 perbulannya pada Gambar 6.12 yang menunjukkan menurunnya daya beli petani tanaman pangan yang terukur dari besarnya rerata NTP tanaman pangan sebesar 99,57 dan komoditas hortikultura 104,86. Rata-rata NTP Jawa Timur selama tiga tahun terakhir (2012 – 2014) dengan tahun dasar 2012 =100 menunjukkan bahwa rerata NTP Jawa Timur lebih tinggi dari pada NTP tahun sebelumnya.

Gambar 6.12
Nilai Tukar Petani (NTP) Jawa Timur Bulanan Tahun 2014 (2012=100)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, upaya Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani mulai nampak. Nilai Tukar Petani (NTP) 2012-2014 tercatat di atas 100 yang disebabkan Indeks yang diterima petani pada tahun tersebut lebih besar daripada indeks yang dibayar petani. Meskipun indeks yang diterima petani lebih besar dibanding indeks yang dibayar bukan secara otomatis menunjukkan petani sudah sejahtera. Setidaknya, dari angka NTP dapat diperoleh informasi awal sejauh mana petani bisa memanfaatkan hasil pertaniannya dibanding total kebutuhan hidup. Umumnya NTP di atas 100 mengindikasikan petani mengalami perbaikan kualitas hidup. Kesejahteraan petani akan terasa nyata jika pendapatan yang diterima bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Maka menjaga kestabilan harga itu adalah sangat penting

Gambar 6.13
Jaringan Irigasi Usahatani / Jaringan Irigasi Desa, 2014



Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015

Gambar 6.14
Jaringan Irigasi Usahatani / Jaringan Irigasi Desa, 2014



Sumber: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015

khususnya berbagai barang dan jasa yang dibutuhkan bagi petani. Jika kenaikan NTP itu lebih dominan dipengaruhi inflasi, maka perubahan NTP menjadi tidak begitu berarti bagi petani, mengingat sebagian besar dari petani sebagai pekerja di sektor pertanian masih tergolong hidup di bawah garis kemiskinan.

Kemiskinan adalah suatu fenomena atau proses multidimensi, yang artinya kemiskinan disebabkan oleh banyak faktor (World Bank, 2000). Namun, kemiskinan merupakan suatu fenomena yang erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi di perdesaan pada umumnya dan di sektor pertanian pada khususnya. Oleh sebab itu, fenomena kemiskinan tidak dapat dipahami sepenuhnya tanpa memahami fenomena kemiskinan di perdesaan atau sektor pertanian. Tingginya jumlah petani (pekerja sektor pertanian) pada kategori rumah tangga miskin dibandingkan penduduk yang sumber utama pendapatannya dari sektor-sektor lainnya yang pada akhirnya menyebabkan perubahan komposisi jumlah pekerja di sektor pertanian semakin menurun dan jumlah pekerja sektor non pertanian meningkat. Hal tersebut menguatkan paradigma bahwa pergeseran atau alih profesi tenaga kerja dari pertanian ke non pertanian di Jawa Timur memang sudah terjadi.

6.3. Analisa Sarana Prasarana dan Kelembagaan

Infrastruktur, sarana dan prasarana pertanian sangat penting bagi pengembangan wilayah di Jawa Timur dan erat kaitannya dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat pedesaan. Sarana dan prasarana pertanian di pedesaan meliputi jaringan irigasi, jalan usaha tani, embung dan pasar agribisnis. Di Jawa Timur, dalam perkembangannya sebanyak 30 persen jaringan irigasi tidak optimal dan memerlukan rehabilitasi. Perkembangan Pengelolaan Air Irigasi dari Tahun 2010 – 2014 melalui Rehabilitasi Pengembangan Jaringan Irigasi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier mencapai 246.280 hektar yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuangan, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapnya pada jaringan irigasi pemerintah, perkembangan embung sebagai sumber air hortikultura sebanyak 209 unit, perkembangan optimasi lahan seluas 50.546 hektar dan peningkatan indeks pertanaman padi melalui System of Rice Intensification (SRI) sebanyak 51.923 hektar.



Box 6.1. Rumus Kebutuhan Alsintan Indeks, BEP dan Kapasitas Alsintan

$$A^{keb} = \frac{Lt \times i}{Kap\ BEP \times 1,2}$$

A^{keb} = alsintan yang dibutuhkan untuk memenuhi sesuai luas tanam yang ada (unit)
Lt = luas areal tanaman (ha)
BEP = *break event point*
Kap BEP = kapasitas kerja alsintan yang mencapai *point* (ha/tahun/unit)

Indeks, BEP dan Kapasitas Alsintan

Uraian	Indeks Alsintan 2014 ¹⁾	Jenis Alsintan	BEP ²⁾	Kapasitas (unit/ha)
Pengolahan tanah	80	Traktor	16,11	25
		Tangan, Bajak singkal		
Penanaman Penyiangan	10	Transplanter	17,90	20
	20	Power weeder	26,03	20
Pemberantasan hama	100	Pompa	20,72	6
Pompa Air	80	Reaper	47,06	15
Pemanenan	50	Thresher	16,66	10
Perontokan	80	Dryer	130,1	20
Pengeringan	50	RMU	106,3	30
Penggilingan	100	Pemipil Jagung	14,47	54

Sumber : ¹⁾ Trip Alihamsyah (2008) dalam buku Kalender Tanam Terpadu Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Penerapan yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2013, untuk padi sawah

Sebagaimana termuat dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dalam Bagian Kedua tentang Prasarana Pertanian dan Sarana Produksi Pertanian, yang terinci dalam Pasal 16, bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab menyediakan dan / atau mengelola prasarana Pertanian yang meliputi: jalan usaha Tani, jalan produksi, dan jalan desa, bendungan, dam, jaringan irigasi, dan embung; dan jaringan listrik, pergudangan, pelabuhan, dan pasar. Selanjutnya dalam Pasal 17 juga menyebutkan bahwa selain Pemerintah dan Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan dan/atau mengelola prasarana pertanian yang dibutuhkan Petani. Sebaliknya Petani memiliki kewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada.

Sebagai salah satu unsur pendukung pengembangan pertanian, mekanisasi pertanian sebagai sarana pertanian berupa alat dan mesin pertanian (alsintan) memiliki peran penting dan strategis dalam peningkatan produksi, efisiensi dan nilai tambah komoditas pertanian terutama semakin meningkatnya kebutuhan produksi pertanian, perkembangan sosial-ekonomi, dan keterbatasan tenaga kerja. Didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2001 tentang Alat dan Mesin Budidaya Tanaman serta Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan atau Mesin Pertanian dijelaskan bahwa jenis alat dan atau mesin yang digunakan mulai dari kegiatan proses produksi sampai dengan pasca panen yaitu : a) penyiapan dan pengolahan lahan; b) pemberihan; c) penanaman; d) pemeliharaan; e) perlindungan; f) pemanenan; g) perontok; h) pemipil; i) perajang; j) pembersih; k) penyortir; l) pengolahan; m) pelayu; n) pengering; o) penggilingan; p) penyimpanan; dan q) pengemasan/pengepakan.



Tabel 6.3
Kebutuhan dan Ketersediaan Alat dan mesin Pertanian di Jawa Timur
Tahun 2010-2014

Box 6.2. Sasaran Luas Tanam dan Luas Panen

Sasaran (ha)	2015	2016	2017	2018	2019
Luas tanam					
- Padi	2.060.005	2.090.906	2.122.269	2.154.103	2.186.415
- Jagung	1.422.096	1.443.428	1.465.079	1.487.055	1.509.361
- Kedelai	453.288	462.354	471.601	481.033	490.654
Luas Panen					
- Sayuran	171.563	173.281	175.014	176.764	178.533
- Buah-buahan	99.976	100.563	103.592	105.669	106.725

Sumber : Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014-2019

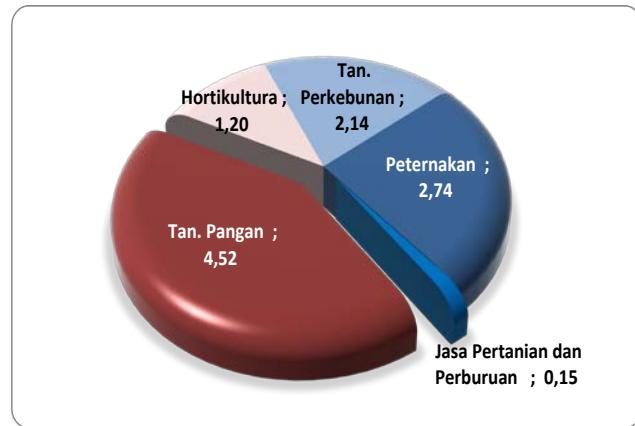
Uraian	$A^{keb} = \frac{Lt \times i}{Kap BEP \times 1,2}$					Ketersediaan s/d Tahun 2015 (unit)	Kurang (unit)
	2015	2016	2017	2018	2019		
APPO	3.789	3.846	3.904	3.963	4.022	1.729	2.060
Hand traktor ¹⁾	3.065.825	3.085.443	3.175.823	3.238.678	3.271.995	44.408	3.021.417
Transplanter	9.590	9.734	9.880	10.028	10.179	258	9.332
Power Weeder	13.190	13.388	13.589	13.792	13.999	-	13.190
Cultivator	34.333	34.848	35.371	35.902	36.440	102	34.231
Pompa air ¹⁾	113.684	115.389	117.120	118.877	120.660	73.735	39.949
Reaper	2.437.381	2.451.889	2.525.337	2.575.816	2.601.651	-	2.437.381
Combine Harvester	395.521	401.454	407.476	413.588	419.792	362	395.159
Threser	532.271	541.929	551.671	561.584	571.758	1.082	531.189
Dryer	53.177	54.138	55.110	56.100	57.113	9	53.168
RMU	16.140	16.382	16.628	16.877	17.131	176	15.964
Pemipil	56.907	57.760	58.627	59.506	60.399	78	56.829
Hand sprayer	271.654	275.616	279.637	283.717	287.858	-	271.654
Perontok Kedelai	2.322	2.368	2.415	2.464	2.513	-	2.322
Power sprayer	2.413.423	2.427.600	2.500.712	2.550.852	2.576.342	-	2.413.423

Sumber : Data diolah dari Kalender Tanam Terpadu Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Penerapan (Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian RI, 2013)

Keterangan: ¹⁾data Ketersediaan termasuk swadaya kelompok

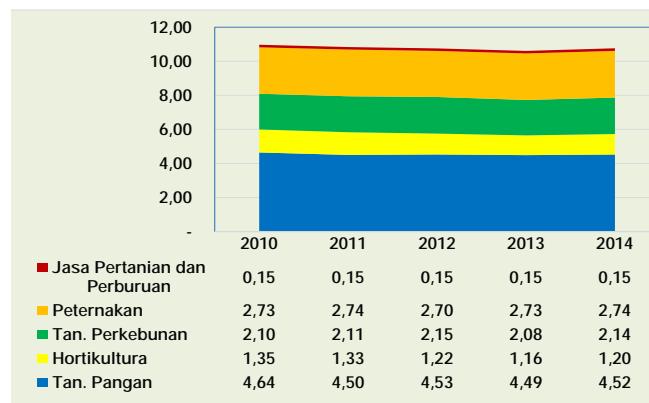
Perkembangan alat dan atau mesin pertanian sampai dengan tahun 2015 terlihat pada Tabel 6.3 untuk mengitung kebutuhan pertahunnya dihitung mengacu Sistem Informasi Katam Terpadu - Kalender Tanam dalam buku Kalender Tanam Terpadu Penelitian, Pengkajian, Pengembangan, dan Penerapan yang diterbitkan Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian tahun 2013. Perkiraan kebutuhan alsintan dihitung dari luas areal tanaman dikalikan indeks penggunaan alsintan yang dibagi *break event point* alsintan kemudian dikurangi jumlah alsintan yang ada (Alihamsyah 2008).

Gambar 6.15
Distribusi PDRB (ADHB) Seri 2010 Jawa Timur
Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan,
Perburuan dan Jasa Pertanian Tahun 2014 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur,2015

Gambar 6.16
Distribusi PDRB (ADHB) Seri 2010 Jawa Timur Menurut
Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan
dan Jasa Pertanian Tahun 2010 - 2014 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur,2015

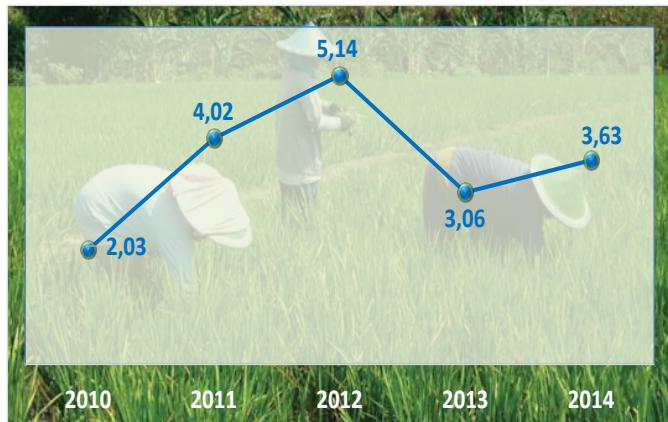
6.4. Analisa Ekonomi, Konsumsi dan Pengembangan Pemasaran Hasil Pertanian

6.4.1. Analisa Ekonomi

Sebagai sektor primer yang membentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertanian mempunyai tingkat produktivitas yang sangat tergantung pada kesuburan lahan dan teknologi yang ditetapkan serta kondisi iklim. Saat ini, kontribusi sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB masih menduduki urutan ketiga setelah sektor perdagangan dan industri pengolahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi Jawa Timur karena kontribusinya yang besar sekaligus sebagai daya dukung terhadap perkembangan sektor Industri dan perdagangan. Meskipun perkembangan share sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung menurun namun perannya sebagai multiplier effect terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur masih sangat besar.

Dalam perhitungan PDRB, yang termasuk dalam sub sektor tanaman pangan dan hortikultura meliputi padi, jagung, kedelai, kacang tanah, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman pangan lainnya dan hasil-hasil produk ikutannya seperti beras tumbuk, dan gapplek. Sumbangan tanaman pangan dan hortikultura terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Provinsi Jawa Timur Seri 2010 terus mengalami penurunan dan pada tahun 2014 meningkat menjadi 5,73 persen. Pada tahun 2010, kontribusi tanaman pangan dan hortikultura terdiri subsektor tanaman pangan sebesar 4,64 persen dan hortikultura sebesar 1,35 persen maka pada tahun 2014 subsektor tanaman pangan menjadi 4,52 persen dan subsektor hortikultura sebesar 1,20 persen. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur tahun 2014 (angka sangat sementara dengan tahun dasar 2010 = 100) tumbuh sebesar 5,86 persen dan mengalami penurunan sebesar 0,22 persen jika dibandingkan tahun 2013 yang mencapai 6,08 persen. Gambaran Distribusi PDRB (ADHB) Seri 2010 Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Tahun 2014 pada Gambar 6.15, menunjukkan kontribusi terbesar adalah sub sektor Tanaman Pangan sebesar 4,52 persen, selanjutnya sub sektor Peternakan, sebesar 2,74 persen sub sektor Perkebunan sebesar 2,14 persen dan sub sektor Hortikultura sebesar 1,20 persen serta Jasa Pertanian Perkebunan

Gambar 6.17
Pertumbuhan Ekonomi Jawa Timur Menurut Lapangan
Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan
Tahun 2010 – 2014 (%)



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2015

sebesar 0,15 persen. Gambar 6.16 menunjukkan Distribusi PDRB (ADHB) Seri 2010 Jawa Timur Menurut Lapangan Usaha Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian Tahun 2010 – 2014 terlihat bahwa komposisi terbesar adalah tanaman pangan dan terkecil adalah jasa pertanian dan perkebunan. Secara keseluruhan selama lima tahun menunjukkan perkembangan fluktuatif meskipun terdapat peningkatan pada tahun 2014 dibanding tahun 2013.

Adapun Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2010 – 2014 sub sektor pertanian mengalami fluktuasi yang cenderung melambat secara signifikan. Pertumbuhan tahun 2010 yaitu dari 2,03 persen menjadi 3,63 persen ditahun 2014 (Gambar 6.17). Keadaan sempat membaik pada tahun 2011 hingga 2012 dengan pertumbuhan yang mencapai 5,14 persen, namun kembali melambat tahun 2013 hingga mencapai 3,06 persen dan meningkat di tahun 2014 menjadi 3,63 persen. Meskipun secara keseluruhan sub sektor pertanian pada tahun 2014 mengalami peningkatan dibanding tahun 2013 sub sektor kehutanan dan perikanan justru mengalami penurunan.

Pertumbuhan ekonomi dari sektor pertanian yang melambat tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat kelemahan-kelemahan yang terjadi pada sektor pertanian. Kelemahan tersebut diantaranya; sistem agribisnis yang masih membutuhkan banyak perbaikan, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, kurangnya infrastruktur dan fasilitas yang memadai serta makin maraknya pengalihan fungsi lahan dari pertanian menjadi non pertanian.

6.4.2. Analisa Konsumsi

Isu strategis terkait perubahan iklim global, krisis pangan dan energi menimbulkan dampak langsung bagi masyarakat luas terutama masyarakat pedesaan yang kegiatan utamanya pada sektor pertanian. Disisi lain, pertambahan jumlah penduduk dari tahun ketahun di Jawa Timur menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Dengan demikian perlu upaya keras pemerintah Jawa Timur untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga di Jawa Timur serta berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

Box 6.3. Analisis Aspek Ketersediaan Pangan

1. Data netto ketersediaan padi diperoleh dari produksi padi dengan memperhitungkan susut gabah (data Benih, Pakan dan Tercecer). Nilai konversi untuk benih sebesar 0,9 persen dari produksi, pakan ternak sebesar 0,44 persen dari produksi, dan yang tercecer sebesar 5,4 persen dari produksi (Faktor konversi dari Neraca Bahan Makanan (NBM) 2006/07). Secara untuk menghitung produksi netto beras dari gabah menggunakan faktor konversi nasional sebesar 0,632 (atau 63,2 persen), tetapi dalam buku ini Jawa Timur menggunakan konversi 0,65 (65 persen);
2. Perhitungan susut jagung dengan nilai konversi untuk benih sebesar 0,9 persen dari produksi, pakan ternak sebesar 6 persen dari produksi, dan yang tercecer sebesar 5 persen dari produksi. Untuk mendapat produksi netto jagung faktor konversi nasional sebesar 0,93 (atau 93 persen);
3. Perhitungan susut ubi kayu dengan nilai konversi pakan ternak sebesar 2 persen dari produksi, dan yang tercecer sebesar 2,13 persen dari produksi;
4. Perhitungan susut ubi jalar dengan nilai konversi pakan ternak sebesar 2 persen dari produksi, dan yang tercecer sebesar 10 persen dari produksi;
5. Penghitungan nilai kalori 1 kg beras atau jagung ekivalen dengan nilai kalori 3 kg ubi kayu dan ubi jalar.

(Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor :
43/Permentan/Ot.140/7/2010, Tanggal : 27 Juli 2010
tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi)

Undang-undang Republik Indonesia No 18 tahun 2012 tentang Pangan menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam undang-undang disebutkan bahwa Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Ketersediaan pangan merupakan salah satu indikator ketahanan pangan suatu wilayah. Ketersediaan pangan Jawa Timur dipengaruhi produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Perkembangan produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura cenderung fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Perkembangan selama tahun 2010 – 2014 pada Tabel 6.4. menunjukkan bahwa realisasi produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura mengalami penurunan dan mencapai angka terendah pada tahun 2011 kecuali kedelai, kacang hijau, ubi kayu dan sayuran. Perkembangan produksi tanaman pangan pada tahun 2010 – 2014 dari Angka Tetap (ATAP) BPS, mengalami pertumbuhan yang cukup fluktuatif disetiap komoditas. Pertumbuhan positif terlihat pada produksi padi sebesar 1,96 persen, jagung sebesar 1,04 persen, kedelai sebesar 1,41 persen, ubi kayu sebesar 0,26 persen, dan sebesar 29,61 persen. Produksi tanaman pangan terendah terjadi pada tahun 2011 dan tertinggi pada tahun 2012, penurunan produksi tahun 2011 terjadi pada komoditas padi, jagung dan kacang tanah yang disebabkan penurunan luas panen serta penurunan produktivitas pada komoditas padi dan kacang hijau. Produksi padi terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 10,58 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami penurunan 1,07 juta ton dibanding dengan produksi Padi tahun 2010. Penurunan produksi terjadi karena penurunan luas panen seluas 37,19 ribu hektar, dan penurunan produktivitas sebesar 4,40 kuintal / hektar) dibandingkan produktivitas tahun sebelumnya dan produksi padi tertinggi pada tahun 2014.

Tabel 6.4.
Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2010-2014

Komoditas	Realisasi Produksi (ton)					Pertumbuhan 5 tahun
	2010	2011	2012	2013	2014	
Padi	11.643.773	10.576.543	12.198.707	12.049.342	12.397.049	1,96
Jagung	5.587.318	5.443.705	6.295.301	5.760.959	5.737.382	1,04
Kedelai	339.491	366.999	361.986	329.461	355.464	1,41
Kc. Tanah	214.131	211.416	213.792	207.971	188.491	(3,06)
Kc. Hijau	79.877	80.329	66.778	57.686	60.310	(6,34)
Ubi Kayu	3.667.058	4.032.081	4.246.028	3.601.074	3.635.454	0,26
Ubi Jalar	141.103	217.545	411.957	393.199	312.421	29,61
Sayuran (SBS) ¹⁾	1.344.344	1.493.815	1.736.182	1.649.926	1.806.887	7,97
Buah (BST) ^{1,2)}	2.584.404	3.508.214	4.042.257	4.292.384	4.252.203	14,05
Jeruk Siam	267.062	315.132	362.680	514.855	568.774	21,38
Mangga	416.803	754.930	839.613	799.410	922.727	25,74
Pisang	921.964	1.188.927	1.362.405	1.527.375	1.336.685	10,79
Bawang Merah	203.739	198.387	222.862	243.087	293.179	9,85
Cabe Besar	71.565	73.674	99.670	101.691	111.022	12,36
Cabe Rawit	142.109	181.806	244.040	227.486	238.820	15,09
Anggrek ¹⁾	3.430.362	1.952.960	2.483.618	2.890.127	2.440.221	(3,77)
Krisan ¹⁾	43.490.166	51.005.632	57.126.398	65.675.925	88.165.020	19,62
Jahe ²⁾	18.444.867	14.564.262	17.464.640	44.263.473	81.081.205	58,88
Temulawak ²⁾	11.123.355	10.935.780	8.316.896	12.150.662	7.887.423	(3,66)

Sumber : ATAP BPS Provinsi Jawa Timur, 2015, dengan keterangan : ¹⁾ Satuan tangkai; ²⁾ satuan kilogram

Produksi padi terendah terjadi pada tahun 2011 sebesar 10,58 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami penurunan 1,07 juta ton dibanding dengan produksi Padi tahun 2010. Penurunan produksi terjadi karena luas panennya mengalami penurunan seluas 37,19 ribu hektar, dan produktifitasnya juga mengalami penurunan sebesar 4,40 kuintal / hektar) dibandingkan produktivitas tahun sebelumnya dan produksi padi tertinggi pada tahun 2014. Angka produksi jagung terendah juga terjadi pada tahun 2011 sebesar 5,44 juta ton pipilan kering apabila dibandingkan produksi Jagung tahun 2010, terjadi penurunan

produksi sebesar 0,14 juta ton karena penurunan luas panen sebesar 53,66 ribu hektar, meskipun tingkat produktivitasnya meningkat sebesar 0,79 kuintal/hektar menjadi 45,21 kuintal/hektar dan tertinggi pada tahun 2012. Sedangkan produksi kedelai terendah pada tahun 2013 sebesar 329.461 ton biji kering dan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 366,99 ribu ton biji kering, meningkatnya produksi Kedelai tahun 2011 terjadi karena naiknya produktivitas sebesar 0,77 kuintal/hektar, demikian juga luas panennya naik seluas 5,92 ribu hektar. Produksi kacang tanah terendah pada tahun 2014 sebesar 188.491 ton dan capaian tertinggi pada tahun 2010 sebesar 214.131 ton, kacang hijau terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 57.686 ton dan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 80.329 ton, ubi kayu terendah terjadi pada tahun 2013 sebesar 3.601.074 ton dan tertinggi pada tahun 2011 sebesar 4.246.028 ton sedangkan untuk produksi ubi jalar terendah pada tahun 2010 sebesar 141.103 dan tertinggi tahun 2012 mencapai 411.957 ton. Produksi padi Jawa Timur angka tetap (ATAP) tahun 2014 sebesar 12,4 juta ton gabah kering giling (GKG) mengalami peningkatan sebesar 347,71 ribu ton dibandingkan produksi ATAP tahun 2013 sebesar 12,05 juta ton GKG. Peningkatan produksi padi terjadi karena adanya peningkatan luas panen sebesar 35,61 ribu ton dan tingkat produktivitas sebesar 0,66 kuintal/hektar. Peningkatan produksi padi terjadi pada subround I (Januari – April) dan II (Mei – Agustus) tahun 2014 karena adanya curah hujan yang tinggi pada akhir tahun 2013 dan awal 2014, sehingga petani cenderung tanam padi, artinya adanya pergeseran tanam dari palawija pindah ke tanaman padi. Produksi jagung di Provinsi Jawa Timur tahun 2014, sebesar 5,74 juta ton pipilan kering dan jika dibanding tahun 2013 menunjukkan penurunan produksi sebesar 23,58 ribu ton disebabkan menurunnya produktivitas sebesar 0,31 kuintal/hektar dari 48,03 kuintal/hektar menjadi 47,72 kuintal/hektar meskipun justru mengalami peningkatan luas panen sebesar 2,76 ribu hektar dari 1,199 juta hektar menjadi 1,202 juta hektar. Penurunan produksi Jagung di Jawa Timur tahun 2014 terjadi pada subround I (Januari-April) sebesar 128,24 ribu ton akibat berkurangnya luas panen, sedangkan pada subround III (September-Desember) sebesar -34,26 ribu ton selain akibat berkurangnya luas panen juga menurunnya produktivitas jagung. Sebaliknya produksi kedelai tahun 2014 meningkat 26 ribu ton menjadi 355,46 ribu ton biji kering dibanding tahun 2013

karena peningkatan luas panen sebesar 4,26 ribu hektar dan produktivitas sebesar 0,90 kuintal/hektar serta peningkatan Areal Tanam (PAT) di kabupaten Bojonegoro, Ngawi, Pasuruan, dan Lumajang. Produksi kacang tanah tahun 2014 sebesar 188,49 ribu ton biji kering atau turun sebesar 19,48 ribu ton dibandingkan tahun 2013 karena turunnya luas panen sebesar 10,12 ribu hektar dan produktivitas sebesar -0,39 kuintal per hektar. Produksi kacang hijau 2014 sebesar 60,31 ribu ton Ose kering atau naik sebesar 2,62 ribu ton dibandingkan tahun 2013. Kenaikan produksi kacang hijau 2014 karena naiknya luas panen sebesar 1,41 ribu hektar dan produktivitas sebesar 0,19 kuintal per hektar. Produksi ubi Jalar tahun 2014 sebesar 312,42 ribu ton umbi basah atau turun sebesar 80,78 ribu ton karena penurunan luas panen sebesar 5,66 ribu hektar sedangkan produktivitas naik sebesar 26,27 kuintal/hektar. Produksi ubi kayu 2014 sebesar 3,64 juta ton umbi basah atau naik sebesar 34,38 ribu ton dibandingkan tahun 2013 karena naiknya produktivitas sebesar 17,29 kuintal per hektar sedangkan luas panen mengalami penurunan sebesar 11,08 ribu hektar.

Pada komoditas hortikultura, angka luas panen komoditas sayuran tahun 2011 mencapai 166,93 ribu hektar dibandingkan ATAP tahun 2010 seluas 158,46 hektar menunjukkan peningkatan 8,47 hektar. Selain itu juga terdapat peningkatan produktivitas pada tahun 2010 sebesar 84,84 kuintal per hektar menjadi 89,49 hektar pada tahun 2011 meningkatkan produksi sayuran sebanyak 149,53 ribu ton pada tahun 2011 menjadi 1,49 juta ton dibanding tahun 2010 mencapai 1,34 juta ton. Demikian pula dengan perkembangan buah-buahan, peningkatan produktivitas dari 40,26 kilogram perohon menjadi 55,11 kilogram perohon meningkatkan produksi pada tahun 2011 meskipun terjadi penurunan luas panen buah seluas 0,53 juta pohon dari 64,19 juta pohon pada tahun 2010 menjadi 63,66 juta pohon pada tahun 2011 sehingga produksi buah-buahan dari 2,58 juta ton menjadi 3,51 juta ton. Sedangkan perkembangan produksi tanaman buah-buahan tahun 2013 sebesar 4.292.384 ton dan pada tahun 2014 sebesar 4.252.203 ton mengalami penurunan 40.181 ton akibat berkurangnya jumlah pohon yang menghasilkan sebanyak 271.985 pohon. Upaya peningkatan produksi pada tanaman buah-buahan dilakukan Pemerintah melalui Penumbuhan dan

Box 6.4. Pola Konsumsi

Pola konsumsi pangan di Indonesia menunjukkan bahwa hampir 50 persen dari kebutuhan total kalori berasal dari serealia. Standar kebutuhan kalori per hari per kapita adalah 2,000 Kkal, dan untuk mencapai 50% kebutuhan kalori dari serealia dan umbi-umbian (menurut angka Pola Pangan Harapan), maka seseorang harus mengkonsumsi kurang lebih 300 gram serealia per hari sehingga dalam analisis ini 300 gram serealia per hari merupakan nilai konsumsi normatif (konsumsi yang direkomendasikan).

Dari analisa ketersediaan pangan tersebut diperoleh Rasio Ketersediaan Pangan ('IAV') apabila nilai 'IAV' lebih dari 1, maka daerah tersebut surplus pangan dan apabila nilai 'IAV' kurang dari 1 menunjukkan kondisi defisit pangan (Lampiran Peraturan Menteri Pertanian/Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/Ot.140 /7/2010, Tanggal : 27 Juli 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi)

Pengembangan Kawasan Jeruk tahun 2014 di kabupaten sentra jeruk, salah satunya di Kabupaten Tuban seluas 900 ha kawasan jeruk baru dan yang mulai menghasilkan sekitar 100 ha, kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Gresik.

Penurunan luas panen dan produktivitas sebagian besar komoditas tanaman pangan dan hortikultura tahun 2011 dibandingkan tahun 2010 terjadi karena kondisi curah hujan yang ekstrem, dimana jumlah Curah Hujan setahun pada tahun 2011 sebesar 48.753 mm rerata satu tahun 1.625 mm, sedangkan tahun 2010 sebesar 74.767 mm rerata satu tahun 2.492 mm, selanjutnya untuk Hari Hujan Setahun tahun 2011 sebesar 2.945 hari retata satu tahun hanya 98 hari hujan sedangkan tahun 2010 sebesar 4.333 hari rerata satu tahun 144 hari hujan. Kondisi demikian terulang pada tahun 2012 terhadap 2013 dan menyebabkan petani beralih ke komoditas lain (palawija) dan produktivitas padi menurun. Selanjutnya untuk komoditas Palawija (Jagung dan Kedelai) mengalami peningkatan produktivitas. Potensi komoditas tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur menunjukkan kinerja yang relatif tinggi meskipun untuk komoditas kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu dan buah-buahan mengalami pelambatan. Hal ini menunjukkan potensi pertanian di Jawa Timur yang sangat besar dan merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat Jawa Timur. Dukungan penyediaan sarana prasarana pertanian dan infrastruktur untuk memperlancar sistem distribusi dan pemasaran hasil pertanian akan sangat membantu meningkatkan pendapatan petani. Jawa Timur mempunyai peran yang sangat besar terhadap penyediaan pangan nasional dengan kontribusi terhadap pangan nasional 20-30 persen kebutuhan aneka ragam pangan nasional.

Hasil proyeksi penduduk (BPS Indonesia) menunjukkan bahwa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2014 sebanyak 252,16 juta orang dengan tingkat konsumsi beras tahun 2014 berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional September 2014 sebesar 84,292 kg/kapita/tahun, jagung pipilan kering sebesar 0,936 kg/kapita/tahun, kedelai sebesar 0,052 kg/kapita/tahun, dan ubi kayu (Pengeluaran untuk Konsumsi Penduduk Indonesia, BPS, September 2014). Sedangkan konsumsi buah dan sayuran dari rekomendasi Organisasi Pangan dan

Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dalam bukunya Food and Nutrition in Numbers 2014 merekomendasikan minimal 400 gram buah dan sayuran per hari. Hal ini berarti bahwa tingkat konsumsi buah dan sayuran perkapita pertahunnya masih sangat rendah, mengingat berdasarkan data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI Tahun 2014 bahwa tingkat konsumsi Konsumsi Penduduk Indonesia terhadap Kelompok Bahan Pangan buah dan sayuran sebesar 87,1 kg/kapita/tahun terdiri tingkat konsumsi buah per kapita sebesar 30,2 kg/tahun dan sayuran per kapita sebesar 56,9 kg/tahun (Statistik Ketahanan Pangan Tahun 2013).

Mengacu Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi, hasil Analisa Ketersediaan Pangan Jawa Timur Tahun 2010-2014 yang terlihat pada Tabel 6.5. menunjukkan bahwa Ketersediaan Pangan sebesar tahun 2014 sebesar 978 gram/kapita/hari dengan nilai ' I_{AV} ' sebesar 3,26 masih diatas angka rerata Ketersediaan Pangan Tahun 2010-2014 yang mencapai 968 gram/kapita/hari dengan capaian rerata nilai ' I_{AV} ' sebesar 3,23. Melalui hasil Analisa Ketersediaan Pangan Jawa Timur Tahun 2010-2014 dapat diartikan bahwa penduduk Jawa Timur selama Tahun 2010-2014 mengalami surplus pangan karena kebutuhan konsumsi normatif dapat dipenuhi dari produksi bersih serealia (beras dan jagung) serta umbi-umbian yang tersedia.

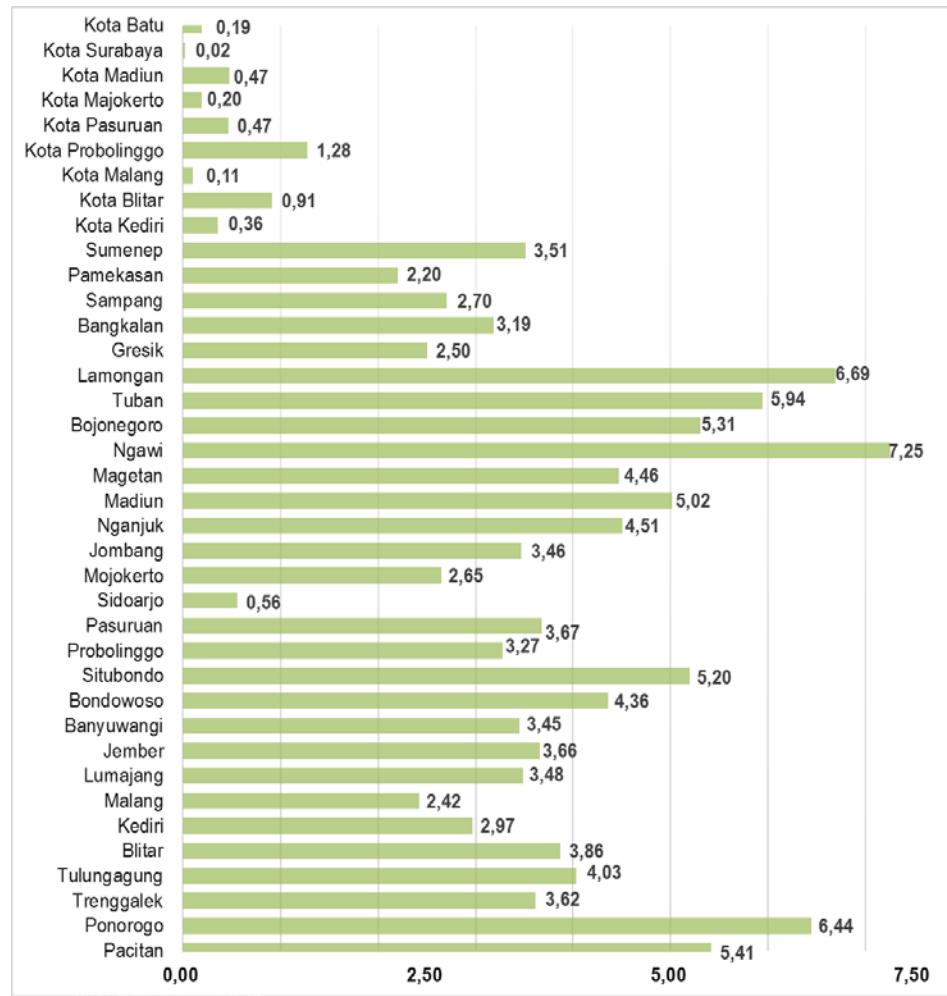
Tabel 6.5
Analisa Ketersediaan Pangan Jawa Timur Tahun 2010-2014

Tahun	Ketersediaan Pangan (ton)					Ketersediaan Pangan (gram/kapita/hari)	I_{AV} Rasio		
	Setara Beras				Serealia dan Umbi				
	Padi	Jagung	Ubi Kayu	Ubi Jalar					
2010	7.349.549	4.577.857	1.171.870	41.390	13.140.666	958	3,19		
2011	6.675.914	4.460.191	1.288.519	63.813	12.488.437	904	3,01		
2012	7.699.824	5.157.929	1.356.889	120.841	14.335.483	1.031	3,44		
2013	7.605.545	4.720.126	1.150.783	115.338	13.591.793	971	3,24		
2014	7.825.017	4.700.809	1.161.770	91.643	13.779.240	978	3,26		
Rata - Rata						968	3,23		

Sumber : ATAP BPS Provinsi Jawa Timur, 2015 (diolah)

Meskipun Ketersediaan pangan di Jawa Timur dalam kondisi surplus, akan tetapi di beberapa kota dan kabupaten mengalami defisit pangan yang tidak bisa dipenuhi oleh daerah tersebut yang terlihat pada Gambar 6.18.

Gambar 6.18
Rasio Ketersediaan Pangan ('I_{AV}') Jawa Timur Tahun 2014



Sumber: ATAP BPS Provinsi Jawa Timur, 2015 (diolah)

Secara regional, untuk mengetahui upaya Pemerintah Jawa Timur dalam pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakatnya dengan fokus pada upaya peningkatan produksi sebagaimana terlihat pada Tabel 6.6. yang hanya memperhitungkan volume produksi tanaman pangan dan mengabaikan besaran stok (perubahan stok akibat impor dan eksport antar provinsi) serta penggunaan untuk bahan baku industri non pangan. Angka ketersediaan pangan per kapita, diperoleh dari penyediaan (ton) dibagi dengan jumlah penduduk Jawa Timur.

Tabel 6.6
Produksi, Konsumsi dan Surplus Komoditas Tanaman Pangan Utama
Jawa Timur Tahun 2014

Rincian	Padi	Beras	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu
Total Produksi (ton)	12.397.049		5.737.382	355.464	3.635.454
Jumlah Penduduk		38.610.200	38.610.200	38.610.200	38.610.200
Konsumsi (kg/kapita/th)		84,292	0,936	0,052	0,400
Penyediaan (ton)	12.397.049	7.514.967	5.737.382	355.464	3.635.454
Penggunaan	835.561	3.455.181	718.888	20.990	165.604
Pakan	54.547	12.775	344.243	1.209	72.709
Tercecet	669.441	187.874	286.869	17.773	77.435
Bibit	111.573		51.636		
Konsumsi (ton)		3.254.531	36.139	2.008	15.460
Surplus		4.059.787	5.018.494	334.474	3.469.850
Ketersediaan/kapita: Kg/kapita/tahun		194,64	148,60	9,21	94,16

Sumber : ¹ATAP 2014 BPS Provinsi Jawa Timur; ² Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 BPS Provinsi Jawa Timur; ³ Konversi Konsumsi dalam Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Hasil Susenas BPS September-2014 (diolah); 4) Permentan /Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor : 43/Permentan/Ot.140/7/2010, Tanggal : 27 Juli 2010 tentang Pedoman Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Tingkat Provinsi; 5) Buletin Konsumsi Pangan, volume 5 nomor 2 tahun 2014,Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian

Pada Tabel 6.6 tersebut terlihat bahwa upaya peningkatan produksi untuk penyediaan pangan dari komoditas tanaman pangan (padi, jagung, kedelai dan ubi kayu) dengan ketersediaan per kapita (kg/kapita/tahun) diatas angka rerata konsumsi (kg/kapita/tahun) artinya penyediaan pangan Jawa Timur mengalami

surplus. Kelangkaan produksi untuk komoditas tanaman pangan terutama kedelai pada saat tertentu disebabkan penyediaan pangan Jawa Timur dipengaruhi aktivitas perubahan stok serta penggunaan untuk bahan baku industri non pangan. Sedangkan perkembangan Produksi, Konsumsi dan Surplus Komoditas Hortikultura (buah dan sayuran) terurai dalam Tabel 6.7. dengan menggunakan asumsi seperti tanaman pangan, yaitu hanya memperhitungkan volume produksi dan mengabaikan besaran stok (perubahan stok akibat impor dan eksport antar provinsi) serta penggunaan untuk bahan baku industri non pangan.

Tabel 6.7
Produksi, Konsumsi dan Surplus Hortikultura Utama Jawa Timur Tahun 2014

Uraian	Jeruk Siam	Mangga	Pisang	Bawang Merah	Cabe Besar	Cabe Rawit
Produksi (ton)	568.774	922.727	1.336.685	293.179	111.022	238.820
Jumlah Penduduk	38.610.200	38.610.200	38.610.200	38.610.200	38.610.200	38.610.200
Konsumsi (kg/kapita/th)	3,48	0,62	2,93	2,64	1,60	1,53
Penyediaan (ton)	568.774	922.727	1.336.685	293.179	111.022	238.820
Penggunaan (ton)	111.201	24.100	113.107	101.940	61.643	59.033
Bibit (ton)	-	-	-	0,24	0,71	0,71
Tercecer	3,91	7,00	4,70	8,36	5,27	5,27
Konsumsi	111.197	24.093	113.102	101.931	61.637	59.027
Surplus	457.573	898.627	1.223.578	191.240	49.378	179.787
Ketersediaan perkapita (Kg/kapita/tahun)	14,73	23,90	34,62	7,59	2,88	6,19

Sumber : ¹)ATAP 2014 BPS Provinsi Jawa Timur; ²) Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 BPS Provinsi Jawa Timur; ³)Ringkasan Eksekutif Pengeluaran dan Konsumsi Penduduk Indonesia, Hasil Susenas BPS September-2014 (diolah); 4) Buletin Konsumsi Pangan, volume 5 nomor 3 tahun 2014, volume 5 nomor 2 tahun 2014, volume 5 nomor 1 tahun 2014, volume 4 nomor 4 tahun 2013, volume 4 nomor 1 tahun 2013, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementerian Pertanian

Sesuai angka proyeksi BPS tahun 2014, jumlah penduduk Jawa Timur sebesar 38.610.200 jiwa, namun jumlah konsumsi buah dan sayuran pada tahun 2014 penduduk Jawa Timur diatas angka penyediaan yang diperoleh dari tingkat produksi buah dan sayuran (jeruk, mangga, pisang, bawang merah, cabe besar dan cabe rawit). Hal tersebut menyebabkan ketersediaan komoditas bawang merah, cabe besar dan cabe rawit per kapita (kg/kapita/tahun) dibawah angka rerata konsumsi (kg/kapita/tahun) artinya penyediaan pangan Jawa Timur mengalami defisit dan seringkali menjadi pemicu terjadinya inflasi.

Rendahnya tingkat konsumsi buah dan sayuran selain disebabkan rendahnya ketersediaan komoditas bawang merah, cabe besar dan cabe rawit per kapita (kg/kapita/tahun) juga disebabkan beberapa hal lainnya seperti distribusi buah dan sayur yang kurang merata di pasaran, serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi buah dan sayuran. Kebutuhan konsumsi perkapita dipengaruhi oleh jumlah konsumen, preferensi konsumen, harga, dan tingkat pendapatan, maka tingkat konsumsi buah dan sayuran memiliki elastisitas yang lebih besar dibandingkan bahan pangan karbohidrat dan sangat dipengaruhi permintaan. Mengingat rendahnya tingkat konsumsi buah dan sayuran oleh masyarakat dibanding angka rekomendasi FAO/WHO sebesar minimal 400 gram buah dan sayuran per hari yang menunjukan bahwa masih besarnya peluang untuk meningkatkan konsumsi masyarakat terhadap buah dan sayuran.

Menghadapi Pasar Tunggal ASEAN atau Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Jawa Timur melakukan berbagai upaya seperti Pengembangan Kelembagaan Pemasaran, Promosi dan Pelayanan Informasi Agribisnis.

- a. Kelembagaan pemasaran yang ada di Jawa Timur terdiri dari Sub Terminal Agribisnis (STA) dan Pasar Tani. Sub Terminal Agribisnis (STA) merupakan infrastruktur pemasaran untuk transaksi jual beli hasil – hasil pertanian, baik untuk transaksi fisik (lelang, langganan, pasar spot) maupun non fisik (kontrak, pesanan, future market) dan letaknya berada di sentra produksi. STA sebagai suatu insfrastruktur pasar tidak saja merupakan tempat transaksi jual beli, namun juga merupakan wadah yang dapat mengakomodasi berbagai kepentingan pelaku agribisnis, seperti sarana dan prasarana pengemasan, sortasi, grading, penyimpanan, ruang pamer, transportasi, dan pelatihan. Pada saat ini terdapat 4 STA yang telah beroperasional, yaitu STA Mantung, STA Karah Kota Surabaya. STA Sidomulyo Kota Batu dan STA Desa Bungur Kab. Nganjuk. Fasilitasi Pasar Tani merupakan salah satu upaya meningkatkan posisi tawar petani produsen. Melalui Pasar Tani, petani / kelompok tani / Gapoktan maupun produsen olahan dapat memasarkan hasil pertaniannya secara langsung kepada konsumen. Di Jawa Timur, terdapat beberapa lokasi pasar tani yang sudah berjalan, yaitu Pasar Tani Wilayah Kabupaten Malang, wilayah Kota Malang, wilayah Kota Batu yang disatukan dalam satu wadah dengan naman Asosiasi Pasar Tani Maju Bersama Malang Raya, selain itu juga

- ada Pasar Tani wilayah Kabupaten Gresik, wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Wilayah Kota Surabaya yang juga disatukan dalam satu wadah yaitu Asosiasi Pasar Tani Sisik Suro, serta ada pengembangan wilayah kegiatan pasar tani yaitu di Kabupaten Ponorogo dengan nama wadah yaitu Pasar Tani Ahad Pagi.
- b. Beberapa kegiatan promosi produk – produk pertanian unggulan baik segar maupun olahan dari Jawa Timur juga pada tahun berupa pameran.
 - c. Layanan Informasi Agribisnis yang telah dilakukan adalah pemantauan harga komoditas pertanian melalui SMS maupun Internet sehingga petani dapat mengetahui dengan cepat harga komoditas pertanian pada tempat tertentu dan waktu tertentu.

Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Pertanian merupakan salah satu anggota dari Agribusiness Working Group (AWG) yang dibentuk oleh Pemerintah Indonesia dengan Singapura dengan agenda utama adalah meningkatkan target ekspor sayuran dan buah-buahan yaitu sebesar 20% per tahun. Indonesia dalam hal ini, Kementerian Pertanian dengan Dinas terkait dan eksportir serta Gapoktan telah melakukan perencanaan usaha dan berbagai kegiatan yang fokus untuk ekspor ke Singapura bersama Agrifood and Veterinary Authority of Singapore (AVA) serta melakukan pemetaan produksi buah dan sayuran Indonesia yang diminati Singapura. Di Jawa Timur, pemetaan komoditas unggulan khususnya hortikultura dari berbagai kabupaten digambarkan letak dari komoditas tersebut lengkap dengan koordinat Global Positioning System (GPS) untuk beberapa daerah dan juga kapasitas produksinya serta kapan waktu panen dan kontak person (petani). Website Pemetaan komoditas unggulan khususnya produk hortikultura yang berasal dari berbagai kabupaten yang ada di Jawa Timur dapat dilihat pada alamat www.petaniberniaga.com.

6.5. Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian

Berdasarkan Hasil Pencacahan Lengkap Sensus Pertanian 2013 (ST2013) mencatat bahwa sebanyak 6,18 juta orang petani di Jawa Timur terdapat 4,98 juta rumah tangga usaha pertanian dan diantaranya terdapat 137,37 ribu rumah tangga jasa pertanian subsektor tanaman pangan dan sebanyak 31,01 ribu rumah tangga subsektor hortikultura. Selanjutnya perkembangan jumlah petani dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas bulan Agustus), Penduduk Berumur 15 Tahun

ke Atas di Jawa Timur yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan Tahun 2014 sebanyak 7.261.367 orang atau 37,61 persen dari 19.306.508 tenaga kerja Jawa Timur yang tersebar ke dalam empat sub sektor pertanian. Secara nasional, prosentase tenaga kerja pertanian di Jawa Timur sebesar 18,63 persen dari tenaga kerja pertanian nasional yang mencapai 38,97 juta jiwa. Jumlah tenaga kerja sektor pertanian yang besar tersebut, ternyata hanya mampu memberikan kontribusi PDRB Jawa Timur tahun 2014 sebesar 13,73 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa produktivitas tenaga kerja pertanian masih rendah, dan hal tersebut disebabkan masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan adopsi teknologi. Upaya peningkatan kualitas tenaga kerja pertanian diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, yang akhirnya mampu meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Jawa Timur.

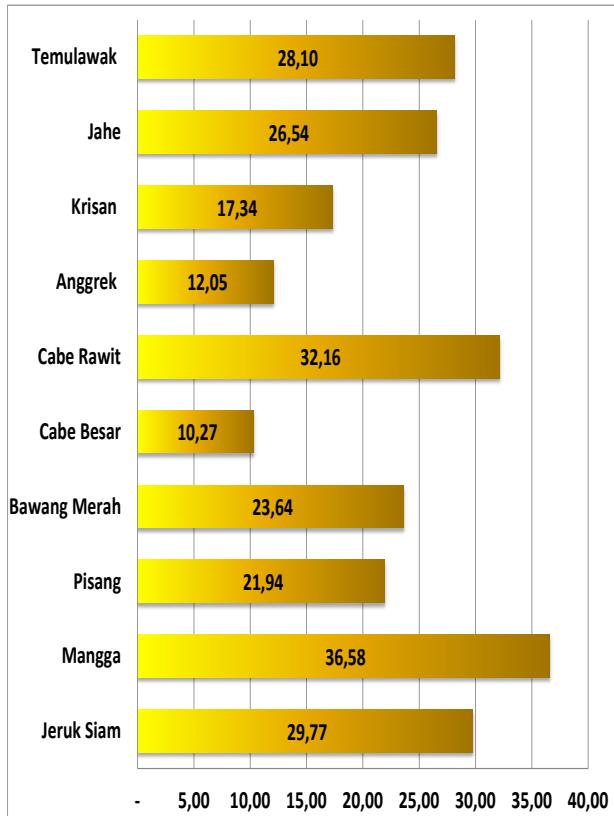
Upaya pengembangan sumberdaya manusia pertanian di Jawa Timur dilakukan melalui berbagai pelatihan dan sekolah lapang dengan gambaran :

- Unit Pelaksana Teknis Pendidikan dan Pelatihan Pertanian memfasilitasi pelatihan bagi petani dan pelaku agribisnis dengan kapasitas 45 angkatan atau 1.350 orang setiap tahunnya;
- 20.975 petani dari 832 kelompoktani yang telah mampu menerapkan pengendalian hama terpadu tanaman pangan dan hortikultura melalui Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) dan 45 orang alumni SLPHT untuk Penguatan Regu Pengendalian Hama;
- Sebanyak 108.314 kelompoktani telah mampu menerapkan Pengelolaan Tanaman Terpadu;
- Sebanyak 228 kelompoktani atau 3.904 petani mampu menerapkan *Good Agriculture Practices* (GAP) yang terdiri petani GAP 1.550 komoditas buah-buahan, petani GAP 1.352 komoditas sayuran, dan 1.002 petani GAP tanaman hias dan tanaman obat.

6.6. Implikasi Kebijakan

Upaya peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura merupakan salah satu peran strategis Jawa Timur dalam berkontribusi untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Hal tersebut bukan merupakan tugas yang ringan,

Gambar 6.19
Rerata Kontribusi Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur terhadap Nasional Tahun 2010-2014 (persen)



Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur, 2015 dan Pusat Data Informasi Kementerian Pertanian RI (Data Diolah)

mengingat pertumbuhan penduduk Indonesia pertahunnya cukup tinggi. Peran strategis lainnya adalah turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Jawa Timur, penyediaan bahan baku industri, pengentasan kemiskinan, penciptaan kesempatan kerja, dan peningkatan pendapatan masyarakat terutama dalam meningkatkan kesejahteraan petani Jawa Timur serta pelestarian lingkungan melalui penerapan budidaya yang baik dan benar, serta ramah lingkungan sehingga menghasilkan produk pertanian aman konsumsi.

Berbagai peran strategis dimaksud sejalan dengan tujuan pembangunan perekonomian nasional sekaligus merupakan implementasi dari Strategi Revitalisasi Pertanian sebagaimana amanat dari 9 Agenda Pembangunan dan 18 Prioritas Pembangunan yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2009 ~ 2014. Pada periode ini, pembangunan tanaman pangan dan hortikulturatetap memegang peran strategis dalam perekonomian domestik maupun nasional, hal tersebut terlihat secara signifikan dalam kontribusi melalui :

1. Penyediaan bahan pangan utama (tanaman pangan dan hortikultura) bagi penduduk Jawa Timur sekaligus sebagai lumbung pangan nasional yang terukur dari kontribusi terhadap produksi nasional tahun 2014, yaitu : Padi (Gabah Kering Giling) sebesar 17,50 persen, Jagung (Pipilan) sebesar 30,18 persen, Kedelai (Ose) sebesar 37,22 persen, Kacang tanah (biji kering) sebesar 29,50 persen, Kacang Hijau (biji kering) sebesar 24,66 persen, Ubi Kayu (umbi) sebesar 15,51 persen, Ubi Jalar (umbi) sebesar 13,11 persen, Sayuran (sayuran dan buah semusim) sebesar 14,09 persen dan Buah-Buahan (buah dan sayur tahunan) sebesar 21,93 persen;
2. Penyediaan bahan baku industri dari produksi tanaman pangan dan hortikultura, terutama untuk industri makanan serta industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional;
3. Jumlah Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Timur pada tahun 2014 sebanyak 19.306.508 orang atau sebesar 16,84 persen dari 114.628.026 jumlah nasional. Perkembangan tenaga kerja yang terserap sektor pertanian pada Februari 2014 berdasarkan Berita Resmi Statistik No. 79/11/35/Th. XII, 5 November 2014, jumlah tenaga kerja yang terserap pada Agustus 2014 masih

didominasi oleh sektor pertanian sebesar 7.261.367 orang atau menyerap tenaga kerja sebanyak 37,61 persen dari 19.306.508 penduduk 15 Tahun Ke Atas yang bekerja menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Jawa Timur. Prosentase tenaga kerja sektor pertanian Jawa Timur sebesar 18,63 persen dari 38.973.033 tenaga kerja sektor pertanian nasional ((BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional 2014) ;

4. Sumber pendapatan yang terukur dari meningkatnya secara nyata pendapatan petani, terutama dari keluarga miskin yang tercermin dari meningkatnya Nilai Tukar Petani (NTP) yang merupakan indikator tingkat kesejahteraan petani. Pada tahun 2014, rerata Nilai Tukar Petani Jawa Timur mencapai 104,75 rerata NTP Tanaman Pangan sebesar 99,57 dan NTP Hortikultura mencapai 104,87;
5. Pelestarian lingkungan melalui berbagai kegiatan utama antara lain SLPHT (Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu), SLPTT (Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu) dan Sekolah Lapangan Good Agriculture Practices (SLGAP).

Terlepas dari keberhasilan yang telah dicapai dan peran strategis tahun 2009 - 2014, maka tantangan pembangunan tanaman pangan dan hortikultura tahun 2015 - 2019 mendatang dirasakan semakin berat. Tantangan kedepan pada tahun 2015 - 2019 adalah bagaimana meningkatkan ketersediaan bahan pangan, pakan dan agroindustri produk dalam negeri, memperbaiki sistem distribusi dan meningkatkan keamanan pangan, meningkatkan nilai tambah, mutu dan daya saing produk pertanian di pasar domestik dan internasional, serta permasalahan yang belum terselesaikan yang menjadi isu strategis seperti meningkatnya populasi penduduk, meningkatnya impor produk pertanian, tekanan globalisasi dan liberalisasi pasar, pesatnya kemajuan teknologi dan informasi, makin terbatasnya sumberdaya lahan, air dan energi, banyaknya jaringan infrastruktur pertanian yang rusak, serta perkembangan dinamis sosial budaya masyarakat.



STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JAWA TIMUR

STRATEGI DAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KAWASAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JAWA TIMUR

Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur sebagai rancang bangun dan instrumen perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip dasar dan prasyarat keberhasilan pembangunan pertanian di Jawa Timur. Strategi utama yang merupakan pilar-pilar penting dari Master Plan ini telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012, tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian. Strategi pengembangan kawasan sesuai dengan Permentan : (1) pentahapan melalui penilaian kelas perkembangan kawasan dan proses pengembangannya; dan (2) strategi penguatan sesuai kebutuhan tahapan dan proses pengembangannya.

Keberhasilan Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur sangat ditentukan oleh beberapa prinsip-prinsip dasar sebagai syarat keberhasilan pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura Jawa Timur yang mengacu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012 dan Kriteria Dasar serta Kriteria Khusus Pengembangan Kawasan. Berdasarkan tingkat perkembangannya, proses pengembangan kawasan dikelompokkan menjadi lima kelompok sesuai tahap perkembangan, yaitu : (1) tahap inisiasi; (2) tahap penumbuhan; (3) tahap pengembangan kawasan; (4) tahap pemantapan kawasan; (5) tahap integrasi antar kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada tingkat keterkaitan antar pertanian, kekuatan sub sistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan. Berkembangnya kawasan tanaman pangan dan hortikultura dalam mendukung pembangunan ekonomi Jawa Timur menuju negara maju membutuhkan strategi pengembangan kawasan diawali dari optimalisasi potensi komoditas unggulan yang telah berkembang di wilayah tertentu dan kemudian secara terfokus dan terarah dikembangkan dengan basis kawasan dengan memperhatikan

Proses pengembangan kawasan dikelompokkan menjadi lima kelompok : (1) tahap inisiasi pada kawasan yang belum berkembang; (2) tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; (3) tahap pengembangan kawasan; (4) tahap pemantapan kawasan; (5) tahap integrasi antar kawasan.

(Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012)



Box 7.1. Kriteria Dasar Kawasan

- Komoditas unggulan tanaman pangan: padi, jagung, kedelai dan ubi kayu;
- Luasan kawasan padi, jagung, dan ubi kayu minimal 5.000 hektar, kedelai minimal 2.000 hektar dan ubi kayu minimal 500 hektar;
- Pengembangan kawasan tanaman pangan khususnya padi, jagung dan kedelai dilakukan melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP2TT)
- Kawasan hortikultura berupa kawasan yang telah eksis atau calon lokasi baru yang memiliki potensi sumberdaya alam sesuai dengan agroekosistem, dan lokasinya dapat berupa hamparan dan/atau spot partial (luasan terpisah) namun terhubung dengan aksesibilitas memadai.

Kriteria Khusus Kawasan

- Kriteria khusus kawasan tanaman pangan : a) Kawasan padi = 5.000 Ha/2-4 kecamatan (fasilitasi GP2TT 2.500 Ha); b) Kawasan jagung = 3.000 Ha/2-4 kecamatan (fasilitasi GP2TT 1.500 Ha); dan c) Kawasan kedelai = 3.000Ha /2-4 kecamatan (fasilitasi GP2TT 1.500 Ha);
- Kriteria khusus kawasan hortikultura mencakup berbagai aspek teknis yang bersifat spesifik komoditas baik untuk tanaman buah, sayuran, tanaman obat

keterkaitan hulu-hilir secara berkesinambungan. Pengembangan kawasan komoditas unggulan tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan keterpaduan dari berbagai program dan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah kontribusi dari berbagai sektor terkait, seperti perindustrian, perdagangan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, pekerjaan umum, pusat penelitian, perguruan tinggi, swasta, asosiasi, perbankan, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.

7.1. Klasifikasi Kelas Kawasan

Kawasan pertanian yang ada saat ini baik merupakan kawasan pertanian tradisional maupun kawasan pertanian yang dibangun Pemerintah dapat diklasifikasikan dalam tiga katagori kelas kawasan, yaitu: a) Kawasan yang belum berkembang; b) Kawasan yang cukup berkembang dan c) Kawasan yang telah berkembang. Klasifikasi kawasan pertanian sebagaimana Tabel 7.1

Tabel 7.1. Ciri-ciri Kawasan Pertanian menurut Tahapan Perkembangannya

Ciri-ciri Kelas Kawasan		
Belum berkembang	Cukup berkembang	Sudah berkembang
Masih dominan kegiatan <i>on-farm</i>	Kegiatan <i>on-farm</i> sudah berkembang	Kelembagaan pelayanan terkait pertanian sudah beragam jenisnya
Teknologi budidaya belum maju	Kelembagaan pelayanan terkait pertanian sudah mulai dibentuk	Pemasaran produk sudah berkembang, bahkan keluar wilayahnya
Sarana dan prasarana belum lengkap	Sarana dan prasarana sudah lebih lengkap	Kegiatan produksi sudah mengutamakan kualitas
Diperlukan penguatan kegiatan <i>on-farm</i>	Diperlukan kegiatan industri hilir	Kegiatan <i>off farm</i> sudah mulai berkembang
Masih memerlukan bimbingan dari Penyuluh Pertanian	Diperlukan penyuluhan bidang budidaya	Penguatan penyuluhan di bidang hilir dan pemasaran

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012

Khusus untuk kawasan tanaman pangan, kriteria kawasan antara lain memperhatikan produktivitas, optimalisasi luas tanam, tingkat kehilangan hasil, mutu, efisiensi, harga dan margin, optimalisasi tingkat pendapatan (keberagaman sumber pendapatan). Tipe kawasan, kriteria dan orientasi penguatan kawasan tanaman pangan ditunjukkan oleh Tabel 7.2. Sedangkan

Tabel 7.2. Klasifikasi Kawasan Tanaman Pangan menurut Perkembangannya

Tipe Kelas Kawasan	Kriteria Kawasan	Orientasi Penguatan
Pertumbuhan	Produktivitas < rata rata provinsi	Peningkatan produktivitas
	Pemanfaatan lahan belum optimal	Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
	Tingkat kehilangan hasil mutu tinggi	Penurunan tingkat kehilangan hasil
Pengembangan	Produktivitas hampir sama rata rata provinsi	Peningkatan produktivitas
	Pemanfaatan lahan hampir optimal	Penurunan tingkat kehilangan hasil
	Tingkat kehilangan hasil sedang	Peningkatan mutu hasil
	Mutu hasil belum optimal	
Pemantapan	Produktivitas > rata rata nasional	Pengenalan teknologi baru
	Mutu hasil belum optimal	Peningkatan mutu hasil
	Efisiensi usaha belum optimal	Efisiensi usaha melalui pemanfaatan limbah lingkungan
	Optimalisasi pendapatan melalui produksi sub sektor tanaman sudah maksimal (kecuali ada introduksi teknologi baru)	Diversifikasi produk tanaman pangan
		Pengaturan harga dan margin
		Diversifikasi pendapatan melalui sub sektor lain

Sumber : Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/8/2012

klasifikasi kawasan hortikultura sesuai Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/CT.140/8/ 2012 untuk komoditas cabai merah, bawang merah dan jeruk tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian (tabel 7.3).

Tabel 7.3. Klasifikasi Kawasan Hortikultura

Kriteria Kawasan Hortikultura	Baru / inisiasi	Penumbuhan	Pengembangan	Pemantapan	Integrasi antar kawasan
Tersedia Lahan usaha dan SDM	✓	✓	✓	✓	✓
Penerapan GAP/SOP		✓	✓	✓	✓
Dukungan penangkar ³⁾	✓	✓	✓	✓	✓
Budidaya sudah berorientasi pasar		✓	✓	✓ ¹⁾	✓ ¹⁾
Tersedia Master Plan pengembangan ¹⁾			✓	✓	✓
Menerapkan teknologi budidaya dan pasca panen berorientasi mutu			✓	✓	✓
Prasarana dan sarana ¹⁾				✓	✓
Tersedia modal pengemb. usaha ¹⁾				✓	✓
Terbentuk kawasan jeruk skala ekonomi (minimal 500 Ha) ¹⁾				✓	✓
Jejaring usaha mulai terbentuk / berfungsi ¹⁾				✓	✓
Registrasi lahan usaha				✓	✓
Terbentuk kemitraan				✓	✓
Budidaya berorientasi pasar				✓	✓
Terintegrasi melalui informasi pengaturan pola tanam ²⁾					✓
Terintegrasi ketersediaan produk ²⁾					✓
Terintegrasi melalui informasi pasar ^{1) 3)}					✓

Sumber : Direktorat Jenderal Hortikultura 2015 (diolah dari FGD Pedoman Penyusunan Master Plan Pengembangan Kawasan Pertanian, Bogor, 16 Maret 2015

Keterangan : ¹⁾Jeruk ²⁾Cabai dan Bawang Merah ³⁾Bawang Merah

Klasifikasi kawasan dalam Tabel 7.3. tersebut merupakan kondisi ideal yang seharusnya diterapkan dalam pengembangan kawasan hortikultura. Akan tetapi

realita dilapang menunjukkan bahwa didalam setiap areal kawasan hortikultura tersebut secara kelembagaan ditingkat petani dilakukan oleh beberapa kelompoktani yang berbeda dalam menerapkan usahatani/ budidayanya, mengingat alokasi program / kegiatan dari pemerintah berupa fasilitasi SLGAP belum menyentuh seluruh kelompoktani dalam kawasan tersebut di setiap kabupaten. Sesuai kondisi tersebut maka klasifikasi kawasan hortikultura dilakukan berdasarkan luas areal, produksi dan produktivitasnya sebagai berikut : a) Kawasan Baru / Inisiasi, apabila rerata luas panen dan produksi kabupaten dibawah rerata provinsi; b) Kawasan Penumbuhan, apabila rerata luas panen kabupaten dibawah rerata provinsi dan produksi kabupaten dibawah rerata provinsi; c) Kawasan Pengembangan, apabila rerata luas panen dan produksi kabupaten diatas rerata provinsi; dan d) Kawasan Pemantapan apabila rerata produksi dan produktivitas kabupaten diatas rerata provinsi.

7.2. Strategi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Berdasarkan isu strategis saat ini serta hasil identifikasi potensi, peluang, maupun permasalahan bidang pertanian untuk lima tahun kedepan melalui analisis SWOT:

1. Penguatan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura
2. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi
3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;
4. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani.

7.3. Kebijakan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Dalam rangka pencapaian ketahanan pangan sebagai bagian dari kedaulatan pangan, maka kebijakan sesuai strategi pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur :

7.3.1. *Penguatan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura*

a. *Peningkatan Luas Tanam*

- 1) Optimasi lahan;
- 2) Peningkatan indeks pertanaman (IP);

b. *Peningkatan Produktivitas*

- 1) Penerapan teknologi budidaya;
- 2) Penyediaan benih unggul;
- 3) Penyediaan pupuk dan pestisida;
- 4) Pemberdayaan penangkar benih;
- 5) Bantuan alat dan mesin pertanian;
- 6) Pengembangan jaringan dan optimasi air;
- 7) Pengembangan sistem perlindungan yang ramah lingkungan

7.3.2. *Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi*

- a. Perlindungan Petani dan akses permodalan
- b. Peningkatan SDM Petani

7.3.3. *Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Pertanian*

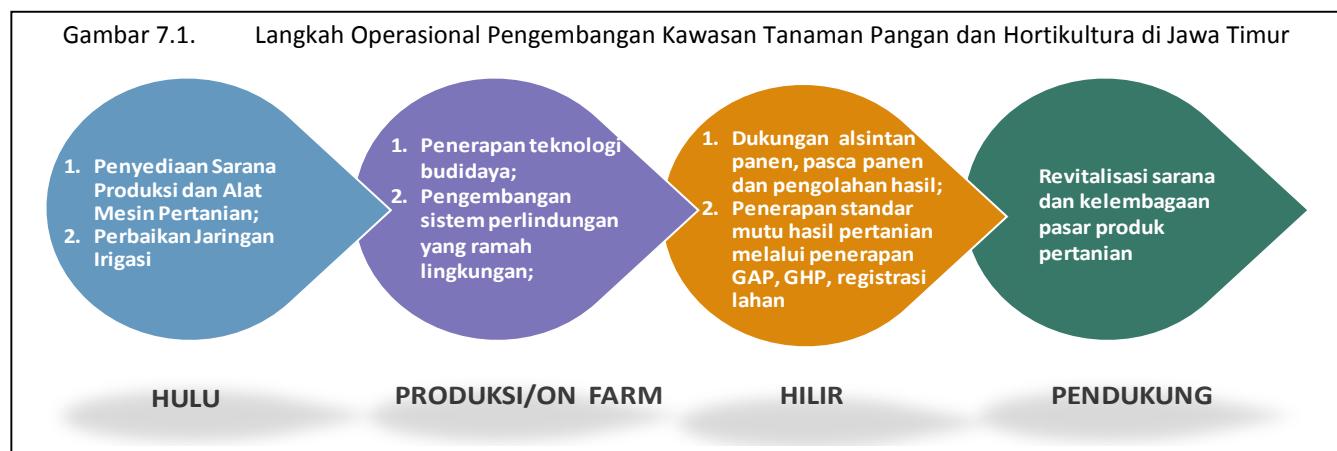
- a. Penerapan teknologi panen dan pasca panen;
- b. Penerapan standar mutu hasil pertanian melalui penerapan GAP, GHP, registrasi lahan;
- c. Peningkatan nilai tambah melalui pengolahan melalui integrasi kawasan budidaya dengan sentra pengolahan;

7.3.4. *Penguatan Peran dan Fungsi Kelembagaan Petani*

- a. Penerapan teknologi pengelolaan tanaman secara terpadu;
- b. Revitalisasi sarana dan kelembagaan pasar produk pertanian (pasar tani, sub terminal agribisnis) melalui promosi produk pertanian, stabilisasi harga, pengembangan jaringan pasar yang terintegrasi, pelayanan informasi pasar dan kemitraan.

7.4. Langkah Operasional

Dalam mencapai sasaran strategis pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura di Jawa Timur, maka disusun langkah operasional dengan pendekatan agribisnis sebagai berikut:



7.4.1. Pengembangan Hulu

a. Penyediaan Sarana Produksi dan Alat dan Mesin Pertanian

Penguatan sarana prasarana pertanian terutama benih/bibit, pupuk dan obat-obatan harus dijamin ketersediaannya, demikian pula dengan ketersediaan alat dan mesin sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi sebagai kebijakan sarana

**Box : 7.2 Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) Nomor
48/Permentan/OT.140/10/2006
tentang Budidaya Tanaman
Pangan yang Baik dan Benar**

Budidaya Tanaman Pangan yang Baik dan Benar atau *Good Agriculture Practices* (GAP) meliputi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, penjagaan kesehatan dan peningkatan kesejahteraan pekerja, pencegahan penularan OPT dan menetapkan prinsip *traceability* (suatu produk dapat ditelusuri asal-usulnya, dari pasar sampai kebun). Tujuan GAP adalah :

- 1) Meningkatkan mutu hasil tanaman pangan termasuk keamanan konsumsi tanaman pangan;
- 2) Meningkatkan efisiensi produksi dan daya saing tanaman pangan;
- 3) Memperbaiki efisiensi penggunaan sumber daya alam;
- 4) Mempertahankan kesuburan lahan, kelestarian lingkungan dan sistem produksi yang berkelanjutan;
- 5) Mendorong petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap mental yang bertanggung jawab terhadap produk yang dihasilkan, kesehatan dan keamanan diri dan lingkungan;
- 6) Meningkatkan peluang dan daya saing penerimaan oleh pasar internasional maupun domestik;
- 7) Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen

dan prasarana pertanian yang merupakan implementasi dari UU No.19 2013 tentang Pemberdayaan Petani. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan benih, pupuk, dan/atau alat dan mesin pertanian sesuai dengan kebutuhan dan harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat lokasi, tepat jenis, tepat mutu dan tepat jumlah serta harga yang terjangkau. Oleh karena itu, penyediaan sarana prasarana produksi dan pendukung selain harus dalam jumlah yang cukup, berada dekat dengan kawasan pertanian dan biaya pelayanan yang terjangkau.

Pemerintah berperan dalam menjamin terlaksananya prinsip 6 tepat melalui:

- (1) peningkatan peran kelembagaan usaha swasta dan masyarakat dalam penyediaan / produksi secara mandiri dan pendaftaran benih dan pupuk yang ramah lingkungan; (2) peningkatan pemahaman dan kesadaran untuk menggunakan benih unggul bersertifikat dan penggunaan pupuk secara berimbang; dan (3) pengawalan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih dan pupuk bersubsidi, serta (4) penyaluran benih dan pupuk bersubsidi dengan memperhatikan aspek spesifik lokasi/wilayah.

b. Perbaikan Jaringan Irigasi

Dalam Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian RI Tahun 2015 – 2019 dijelaskan bahwa tata kelola sumberdaya air diarahkan melalui pengelolaan konservasi sumberdaya air, pendayagunaan air untuk berbagai kebutuhan, pengendalian daya rusak air, pemberdayaan masyarakat serta pengelolaan sistem data dan informasi sumberdaya air yang ditujukan untuk mewujudkan kemanfaatan sumberdaya air yang berkelanjutan.

Kebijakan yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan air baku secara berkelanjutan adalah: a) peningkatan fungsi dan rehabilitasi jaringan irigasi; b) optimisasi kegiatan operasi dan pemeliharaan infrastruktur irigasi; c) peningkatan fungsi jaringan irigasi yang sudah dibangun namun belum berfungsi baik khususnya pada areal yang ketersediaan airnya terjamin dan petani penggarapnya sudah siap; d) rehabilitasi pada areal irigasi yang mengalami kerusakan terutama padadaerah andalan penghasil padi serta meningkatkan efisiensi irigasi dengan perbaikan

saluran irigasi, e) pengembangan sistem irigasi hemat air. Perbaikan irigasi dan infrastruktur pertanian harus menjadi prioritas karena perbaikan sarana dan prasarana pertanian menjadi kunci keberhasilan peningkatan produktivitas karena akan meningkatkan indeks pertanaman. Dewasa ini, sekitar 30 persen jaringan irigasi di Jawa Timur yang memerlukan perbaikan.

7.4.2. Pengembangan Produksi / On Farm

a. Penerapan Teknologi Budidaya

Salah satu kunci keberhasilan dalam persaingan global adalah penerapan teknologi maju yang ramah lingkungan untuk menghasilkan produk bermutu dan aman konsumsi. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlu adanya penerapan GAP (Good Agriculture Practices) dan penerapan PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu).

1) Penerapan GAP (*Good Agriculture Practices*)

Konsep GAP sendiri diartikan sebagai aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang tersedia untuk memanfaatkan sumberdaya alam dengan cara yang menjamin keberlanjutan dalam menghasilkan produk pertanian lain yang sehat, aman dan bermutu dengan cara yang manusiawi, yang secara ekonomi layak dan secara sosial dapat diterima. Penerapan GAP tidak akan berhasil baik tanpa adanya perencanaan makro yang baik, termasuk tersedianya Standar Prosedur Operasional (SPO) budidaya masing-masing komoditas. Keberadaan SPO budidaya tersebut merupakan persyaratan dasar dalam penerapan GAP untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan aman konsumsi. Penerapan GAP hortikultura dilakukan pada kebun/plot percontohan di lahan milik petani dengan luasan sesuai komoditas yang diusahakan. Untuk buah-buahan dilakukan pada kebun percontohan seluas 3-5 ha dalam satu hamparan. Sedangkan untuk sayuran dilakukan pada plot percontohan seluas 1-2 hektar, yang berada di tengah-tengah hamparan areal dampak seluas minimal 5 hektar yang telah melaksanakan SLPHT.

Dalam rangka menghadapi era perdagangan bebas, penerapan Good Agricultural Practices (GAP) dalam upaya menghasilkan produk hortikultura yang berdaya saing di pasar internasional adalah merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi. Penerapan GAP mampu memberi nilai tambah bagi petani dalam bentuk efisiensi penggunaan input serta pasar yang lebih luas. Dengan telah diterbitkannya Permentan No. 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang GAP Buah dan Sayuran, maka Indonesia telah memiliki Sistem Jaminan Mutu sebagai langkah untuk merespon peningkatan permintaan masyarakat akan buah bermutu dan aman konsumsi. GAP Buah dan Sayur ini adalah merupakan suatu standard budidaya yang bersifat umum dan sukarela, yang operasionalisasinya di tingkat lapang diterjemahkan dalam bentuk penerapan Standard Operating Procedure (SOP) spesifik komoditas dan lokasi, pengendalian hama dan penyakit terpadu serta pencatatan kegiatan usaha (farm recording). GAP mengatur berbagai aspek mulai dari aspek lahan, penggunaan benih, budidaya, pengendalian OPT hingga penanganan pascapanen segar. Perwujudan penerapan GAP ini dibuktikan dengan penerbitan nomor registrasi yang diberikan melalui kegiatan registrasi yang mengacu kepada Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/OT.140/10/2010 mengenai Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun/lahan Usaha Buah dan Sayur yang baik. Bentuk registrasi tersebut berupa Surat Keterangan Penerapan Budidaya yang Baik (GAP) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya kebun yang telah mendapat nomor registrasi tersebut diharapkan siap untuk ditindak lanjuti dengan sertifikasi seperti Prima, Global GAP, maupun berbagai standard jaminan mutu lainnya.

2) Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT)

Pada tahun 2015, penerapan PTT dalam pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan melalui Gerakan Penerapan Pengelolaan Tanaman Terpadu (GP-PTT) sehingga tidak dikenal lagi SL-PTT Kawasan Pertumbuhan, Kawasan Pengembangan dan Kawasan Pemanfaatan. Pengelolaan tanaman dan sumberdaya terpadu (PTT) merupakan pendekatan inovatif dalam upaya meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani serta sebagai suatu pendekatan pembangunan tanaman pangan

khususnya dalam mendorong peningkatan produksi. Teknologi intensifikasi bersifat spesifik lokasi, tergantung pada masalah yang akan diatasi (demand driven technology). Komponen teknologi PTT ditentukan bersama-sama petani melalui analisis kebutuhan teknologi (need assessment).

GP-PTT dilaksanakan oleh kelompoktani yang sudah terbentuk dan masih aktif. Kelompoktani yang dimaksud diupayakan kelompoktani yang dibentuk berdasarkan hamparan, atau lokasi lahan usahataninya diupayakan masih dalam satu hamparan setiap kelompok. Hal ini perlu untuk mempermudah interaksi antar anggota karena mereka saling mengenal satu sama lainnya dan diharapkan tinggal saling berdekatan sehingga bila teknologi GP-PTT sudah diadopsi secara individu akan mudah ditiru petani lainnya. Peserta GP-PTT wajib mengikuti setiap tahap pertanaman dan mengaplikasikan kombinasi komponen teknologi yang sesuai spesifik lokasi mulai dari pengolahan tanah, budidaya, penanganan panen dan pasca panen.

b. Pengembangan Sistem Perlindungan yang Ramah Lingkungan

Perlindungan tanaman sebagai salah satu upaya dalam penanganan dampak perubahan ekologi dan ekosistem secara mendadak. Perlindungan dilakukan dengan tetap memperhatikan prinsip ramah lingkungan, efisien dan diupayakan dilakukan dengan menggunakan musuh alami. Beberapa langkah dalam mengantisipasi dan menangani bencana alam dan serangan organisme tanaman diantaranya melalui:

- Penyediaan dan penyaluran bantuan input produksi bagi petani yang terkena puso atau banjir;
- Perluasan penggunaan teknik dan teknologi budidaya pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
- Penerapan pengendalian hama terpadu melalui brigade proteksi tanaman;
- Revitalisasi gudang pestisida, penyediaan sarana pengendalian organisme pengganggu tanaman;
- Pengelolaan OPT melalui sekolah lapang;
- Pengembangan klinik PHT
- Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP);
- Peningkatan teknologi pengendalian OPT ramah lingkungan;

- Pengendalian OPT ramah lingkungan pada daerah serangan endemis, sumber infeksi, daerah serangan baru dan daerah eksploratif;
- Rekomendasi penanganan dampak perubahan iklim.

7.4.3. Pengembangan Industri Hilir

Industri hilir merupakan salah satu kunci sukses dalam meningkatkan daya saing produk pertanian. Selain itu, peningkatan efisiensi produksi maupun distribusi produk antara lain melalui pengembangan dan penggunaan teknologi budidaya dan input yang lebih efisien, kelembagaan petani yang menunjang efisiensi produksi, konsolidasi lahan pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan luas penguasaan lahan pertanian per individu petani.

Pengembangan industri hilir di kawasan diarahkan untuk mengolah komoditas pertanian primer menjadi produk olahan baik produk antara (intermediate product) maupun produk akhir (final product), guna peningkatan nilai tambah dan daya saing. Sasaran antara dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah berkembangnya agroindustri terutama di pedesaan dari produk-produk unggulan pertanian serta meningkatnya jumlah sertifikasi produk pertanian. Sedangkan sasaran akhir dari peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian adalah meningkatnya ekspor dan substitusi impor produk pertanian. Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, maka upaya-upaya yang dilakukan mulai di tingkat hulu hingga penanganan di hilir, meliputi:

a. Fasilitasi Alsintan Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

Upaya pengembangan pengolahan mendukung industri pangan dan pertanian berbasis perdesaan dilakukan melalui penanganan panen, pascapanen dan pengolahan hasil. Penanganan panen, pascapanen tanaman pangan, khususnya padi, bertujuan untuk mendapatkan gabah/beras dengan mutu tinggi, mengefisiensikan tenaga dalam pelaksanaan pemanenan dan perontokan, serta memperkecil kehilangan hasil melalui fasilitasi alat dan mesin pertanian. Sedangkan untuk komoditas hortikultura, selama ini kegiatan penanganan pasca panen masih banyak dilakukan secara tradisional dan sederhana. Karenanya, penanganan produk

hortikultura, khususnya buah dan sayur perlu mendapatkan perhatian terutama pada saat panen raya. Dengan fasilitasi packing house beserta peralatan pasca panen pendukung diharapkan dapat menekan tingkat kehilangan dan/atau kerusakan hasil panen produk pertanian dengan meningkatkan daya simpan dan daya guna hasil pertanian.

b. Penerapan sertifikasi mutu produk pertanian

Upaya untuk meningkatkan daya saing, salah satunya adalah dengan menerapkan standar mutu bagi pelaku usaha dan masyarakat mengingat identitas produk suatu kawasan adalah produk akhir, meskipun dalam bentuk segar oleh karena itu perlu dilakukan standardisasi produk akhir suatu kawasan terutama untuk komoditas yang mempunyai prospek pasar. Untuk menjamin mutu dan keamanan pangan serta nilai tambah dan daya saing, khususnya pangan segar hasil pertanian, perlu diatur sistem pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan pangan sesuai UU Nomor 7 tahun 1996 tentang Pangan (Pasal 20) yang mengamanatkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan wajib menyelenggarakan sistem jaminan mutu, sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi, dan terhadap pangan tertentu yang diperdagangkan. Juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2004 tentang Keamanan, mutu dan gizi pangan disebutkan bahwa setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan bertanggung jawab menyelenggarakan sistem jaminan mutu sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi. Dengan demikian, dalam rangka pengawasan keamanan, mutu dan gizi pangan, setiap pangan baik yang diproduksi di dalam negeri atau yang dimasukan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebelum diedarkan wajib memiliki Surat Persetujuan pendaftaran yang diterbitkan berdasarkan hasil penilaian keamanan, mutu dan gizi pangan olahan.

Berdasarkan Surat Gubernur Jawa Timur Nomor 520/8135.1/2004 tanggal 14 Oktober 2004, yang menunjuk Otoritas Kompeten dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengawasan dan Sertifikasi Hasil Pertanian (PSHP) yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2008 dan telah memperoleh sertifikat ISO 9001:2008 pada tanggal 12 Oktober 2011 untuk menangani pengawasan buah dan sayuran segar berupa :

- Sertifikasi Prima 3;
- Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT);
- Rekomendasi Keamanan Pangan.

Sertifikat Prima 3 diberikan apabila pelaku usaha pangan hasil pertanian telah memenuhi aspek keamanan pangan (aman pestisida/Good Pesticide Practices). Sertifikat Prima 3 berlaku selama 3 (tiga) tahun. Pendaftaran Pangan Segar dilaksanakan dengan mengacu Permentan Nomor : 51/Permentan/OT.140/10/2008 tentang Pendaftaran Pangan Segar Yang Beredar di Wilayah Negara Republik Indonesia, dan nomor pendaftaran ini berlaku selama 5 (lima) tahun. Rekomendasi Keamanan Pangan di Jawa Timur sangat dibutuhkan apabila komoditas pangan akan dieksport sesuai amanat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27 Juncto 38 Tahun 2009 tentang Pengawasan Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan sebagai syarat eksportir untuk proses selanjutnya di Balai Karantina Pertanian.

7.4.4. Pendukung Kawasan melalui Revitalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Produk Pertanian

Untuk mengoptimalkan pasar dalam negeri dan memperkuat daya saing produk pertanian, sinergitas pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat perlu ditingkatkan. Beberapa upaya yang harus dilakukan :

- Perbaikan tata niaga dilakukan untuk menekan biaya inefisiensi yang timbul;
- Pembinaan terhadap produk agar memiliki standar kualitas sehingga bisa bersaing dengan kualitas produk impor;
- Kegiatan promosi produk pertanian untuk memperluas dan meningkatkan pangsa pasar produk pertanian unggulan nasional baik di dalam negeri maupun di pasar ekspor.

Dalam rangka pengembangan dan penguatan jaringan pasar produk pertanian, dalam lima tahun mendatang akan dilakukan upaya-upaya:

- Memperkuat kelembagaan dan sistem pelayanan informasi pasar dan jaringan pasar produk pertanian mulai di tingkat sentra produksi hingga ke sentra konsumen sehingga ketersediaan pasokan dan kestabilan harga terjaga;

- Fasilitasi kelembagaan pasar dan sistem resi gudang guna meningkatkan nilai tambah dan posisi tawar bagi petani;
- Menggalakkan kampanye positif produk-produk pertanian andalan ekspor;
- Pendampingan penerapan standar mutu sehingga produk pertanian yang dipasarkan sesuai standar mutu negara tujuan ekspor;
- Membuka target pasar baru diluar pasar eksisting.

7.5. Indikator Keberhasilan

Indikator Kinerja merupakan alat ukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian visi dan misi pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura. Gambaran perkembangan, capaian dan hasil kinerja tersebut akan diuraikan secara bertahap setiap tahunnya terukur dari : 1) Tersusunnya Roadmap Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura di Kabupaten; 2) Meningkatnya produksi, produktivitas dan kualitas serta meningkatnya nilai tambah produk, jaringan pemasaran, pendapatan petani dan penyerapan tenaga kerja yang dicirikan:

- a. Penerapan budidaya dan pasca panen yang baik dan benar (GAP dan GHP)
- b. Tersedianya prosedur baku budidaya (SOP),
- c. Teregistrasinya kebun dan lahan usaha hortikultura dan menurunnya tingkat serangan OPT;
- d. Tumbuhnya /meningkatnya penangkar benih bermutu;
- e. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan petani;
- f. Berkembangnya industri pengolahan hasil komoditas hortikultura unggulan yang merupakan diversifikasi dari produk segar;
- g. Diterapkannya aspek konservasi lahan, pola tanam serta pemanfaatan bahan-bahan pengendalian OPT secara alami / ramah lingkungan;
- h. Tertatanya manajemen rantai pasokan yang dicirikan dengan terdistribusinya secara proporsional keuntungan dalam jalur rantai pasar;
- i. Meningkatnya jumlah investor untuk mengembangkan usaha hortikultura di kawasan, yang dicirikan oleh pengelolaan usaha hortikultura berskala kebun.



8

ROAD MAP DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
JAWA TIMUR

A large green number '8' is overlaid on the background image of a bridge structure.

8

ROAD MAP DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA JAWA TIMUR

Master Plan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur sebagai rancang bangun bagi pembangunan pertanian Jawa Timur. Oleh karenanya, implementasi yang bertahap namun berkesinambungan adalah kunci keberhasilan. Perencanaan pengembangan kawasan melalui pendekatan *top-down policy*, yaitu sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pertanian nasional dan *bottom-up planing*, sesuai dengan kebutuhan masyarakat/petani. Keluaran dari perencanaan adalah rancang bangun kawasan dan rencana aksi jangka menengah dalam rincian tahunan.

8.1. Overview Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) Jawa Timur

Fokus pembangunan di Jawa Timur sesuai RPJMD tahun 2014 - 2019 pada pengembangan kawasan agropolitan. Agropolitan adalah kota pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnisnya serta mampu melayani, mendorong, menarik dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Tujuan utama pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pengembangan wilayah dan peningkatan keterkaitan desa dan kota dengan mendorong berkembangnya sistem dan usaha agribisnis yang berdaya saing berbasis kerakyatan, berkelanjutan (tidak merusak lingkungan) dan terdesentralisasi (wewenang berada di Pemerintah Daerah dan Masyarakat) di kawasan agropolitan. Secara khusus, tujuan PKA adalah: a) mengurangi kesenjangan kesejahteraan antar wilayah, b) mengurangi kesenjangan antara kota dan desa, c) mengurangi kesenjangan pendapatan antar masyarakat, d) mengurangi kemiskinan, e) mencegah terjadinya urbanisasi tenaga produktif, dan f) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sasaran pengembangan kawasan agropolitan adalah untuk mengembangkan kawasan pertanian yang berpotensi menjadi kawasan agropolitan, melalui: a) Pemberdayaan masyarakat pelaku agribisnis agar mampu meningkatkan produksi, produktivitas komoditi pertanian serta produk-produk olahan pertanian, yang dilakukan dengan pengembangan sistem dan usaha agribisnis yang efisien dan menguntungkan serta berwawasan lingkungan; b) Penguatan kelembagaan petani; c) Pengembangan kelembagaan sistem agribisnis (penyedia agroinput, pengolahan hasil, pemasaran, dan penyediaan jasa); d) Pengembangan Kelembagaan Penyuluhan Pembangunan Terpadu; e) Pengembangan iklim yang kondusif bagi usaha dan investasi; f) Peningkatan sarana-prasarana meliputi: jaringan jalan termasuk jalan usaha tani (*farm road*), irigasi, pasar, air bersih, pemanfaatan air limbah, dan sampah; g) Peningkatan sarana-prasarana kesejahteraan sosial meliputi pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan sarana-prasarana umum lainnya seperti listrik, telekomunikasi dan lain sebagainya. Gerakan dan partisipasi aktif masyarakat (baik petani, penyedia agroinput, pengolah hasil, pemasaran dan penyedia jasa) yang di fasilitasi Pemerintah melalui dana stimulan untuk mendorong Pemerintah Daerah dan masyarakat, yang diarahkan untuk membiayai sarana dan prasarana yang bersifat publik dan strategis, dalam rangka meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan keluarga dan masyarakat tani pada kawasan agropolitan.

Pengembangan Kawasan Agropolitan di Jawa Timur terbagi dalam 8 kawasan sebagai berikut : 1) Kawasan Agropolitan Madura; 2) Kawasan Agropolitan Ijen; 3) Kawasan Agropolitan Bromo - Tengger - Semeru; 4) Kawasan Agropolitan Wilis; 5) Kawasan Metropolitan; 6) Kawasan Segitiga Emas; 7) Kawasan Regional Kelud; 8) Kawasan Pesisir dan Pulau - pulau kecil.

Keragaan Komoditas Unggulan dan Prasarana yang tersedia di Kawasan Agropolitan sesuai dengan komoditas unggulan tanaman pangan dan hortikultura : Banyuwangi (jeruk siam, Pisang, padi, jagung,), Bondowoso (kopi, adpokad, durian, strawberry), Lumajang (pisang agung semeru, pisang mas kirana, manggis, kentang, kobis), Probolinggo (mangga, manggis, dan kentang), Pasuruan (apel, durian, padi, dan jagung), Malang (apel, belimbing, kelengkeng, bawang merah, cabe, dan bunga potong), Blitar (blimming, langsep), Tulungagung (padi, jagung), Trenggalek (durian, salak dan manggis), Nganjuk (bawang merah, padi, jagung,), Madiun (jambu biji, jambu air, nangka, jeruk, mangga), Ngawi (padi organik, dan kedelai), Ponorogo

(durian, mangga, dan cabai), Pacitan (janggelan, biofarmaka, jagung, ubi kayu, dan jeruk keprok), Jombang (tomat, bawang merah, cabai, belimbing, salak, padi dan jagung), Mojokerto (padi organik, jagung, ubi jalar, bawang putih, dan wortel), Lamongan (jagung), Tuban (duku Prunggahan, kacang tanah, srikaya, dan belimbing tasikmadu), Bojonegoro (salak, belimbing, padi dan jagung), Bangkalan (salak, dan bunga melati), Pamekasan (jagung), Kediri (jagung, dan padi), Jember (padi, jagung dan durian), Situbondo (padi, jagung, kedelai dan durian), Sampang (semangka, cabe jamu, bentul), Sumenep (bawang merah, cabe, gayam, sukun dan alpokad).

Permasalahan umum kawasan agropolitan yang timbul selama ini ialah faktor sumber daya manusia termasuk petugas, sarana dan prasarana serta informasi tentang agribisnisnya. Upaya pemecahan masalah dilakukan dengan melakukan koordinasi provinsi dan kabupaten melakukan pembinaan dan evaluasi.

8.2. Road Map dan Rencana Aksi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur

Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur dilakukan berdasarkan potensi dan keunggulan masing-masing wilayah yang tersebar di Jawa Timur dan sudah terpetakan sebagai keunggulan nasional. Peran strategis masing-masing komoditas tanaman pangan dan hortikultura telah menjadikan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional dan kedepannya akan menjadi pilar utama untuk mencapai kedaulatan pangan di Indonesia. Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing komoditas dari setiap kabupaten / kota di Jawa Timur, telah ditetapkan 7 (tujuh) kawasan komoditas tanaman pangan dan hortikultura.

Kawasan Tanaman Pangan Jawa Timur	Peningkatan produktivitas 2 - 3 persen untuk meningkatkan kontribusi produksi Jawa Timur terhadap produksi nasional	<ul style="list-style-type: none"> • 29 Kabupaten kawasan padi Jawa Timur termasuk 5 sentra padi nasional di lokasi kawasan agropolitan; • 15 Kabupaten kawasan Jagung • 10 Kabupaten Kawasan Kedelai dan • 10 Kabupaten Kawasan Ubi Kayu 	<p>Strategi Utama :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produktivitas 2. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) untuk Padi 3. Penurunan tingkat kehilangan hasil 4. Pengembangan industri olahan
-----------------------------------	---	---	---

8.2.1. Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan Jawa Timur

Kebutuhan pangan selama ini terpenuhi dari produksi dalam negeri dan impor. Namun karena pertumbuhan jumlah penduduk maka ketergantungan akan pangan impor menyebabkan rentannya ketahanan pangan sehingga berdampak terhadap aspek sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Oleh sebab itu, komoditas tanaman pangan terutama padi (beras) menjadi komoditas strategis dalam perekonomian dan ketahanan pangan, sehingga menjadi basis utama dalam pembangunan pertanian ke depan. Produksi komoditas tanaman pangan terutama padi Jawa Timur cenderung berfluktuasi selama lima tahun berakhir sehingga dilakukan melalui pengembangan kawasan.

Pengembangan kawasan tanaman pangan di Jawa Timur dikelompokan berdasarkan kelas kawasan sesuai dengan rerata produktivitas komoditas tanaman pangan, yaitu padi, jagung, kedelai dan ubi kayu selama tahun 2010 – 2014. Selanjutnya perbedaan kelas kawasan tersebut menjadi dasar upaya penguatan yang akan dilakukan sesuai tingkat kebutuhan. Di Jawa Timur untuk kawasan padi dilakukan di 29 kabupaten, jagung 15 kabupaten dan kedelai serta ubi kayu masing-masing dilakukan di 10 kabupaten potensial (Tabel 8.1).

Tabel 8.1. Klasifikasi Kawasan Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 2015

Tipe Kelas Kawasan Berdasarkan Produktivitas	Kabupaten			
	Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu
Penumbuhan (produktivitas kabupaten < produktivitas provinsi)	Pacitan	---	---	Pacitan
Pengembangan (produktivitas kabupaten hampir sama produktivitas provinsi)	Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Sumenep	---	Ngawi dan Trenggalek	---
Pemantapan (produktivitas kabupaten > produktivitas provinsi dan nasional)	Ponorogo, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Gresik, Pamekasan	Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Tuban, Kediri, Situbondo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Blitar, Ngawi, Magetan, Lamongan, Gresik	Ponorogo, Tulungagung, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Lamongan, Sampang	Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Jombang, Magetan, Tuban

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2014

a. Kawasan Padi

Secara umum, Kawasan Padi Jawa Timur memiliki potensi yang cukup besar di 29 kabupaten di Jawa Timur dengan sentra produksi terbesar di 5 (lima) kabupaten Kawasan Padi yang merupakan bagian dari Pengembangan Kawasan Agropolitan (PKA) di Jawa Timur : Kabupaten Jember dan Banyuwangi (PKA Ijen), Pasuruan (PKA Bromo Tengger Semeru), Bojonegoro, dan Lamongan (PKA Segitiga Emas). Penetapan Kawasan Padi berdasarkan data historis tahun 2010 – 2014 dari rata-rata produktivitas padi (kuintal per hektar) dengan pemetaan produktivitas padi di 29 kabupaten (Gambar 8.1).

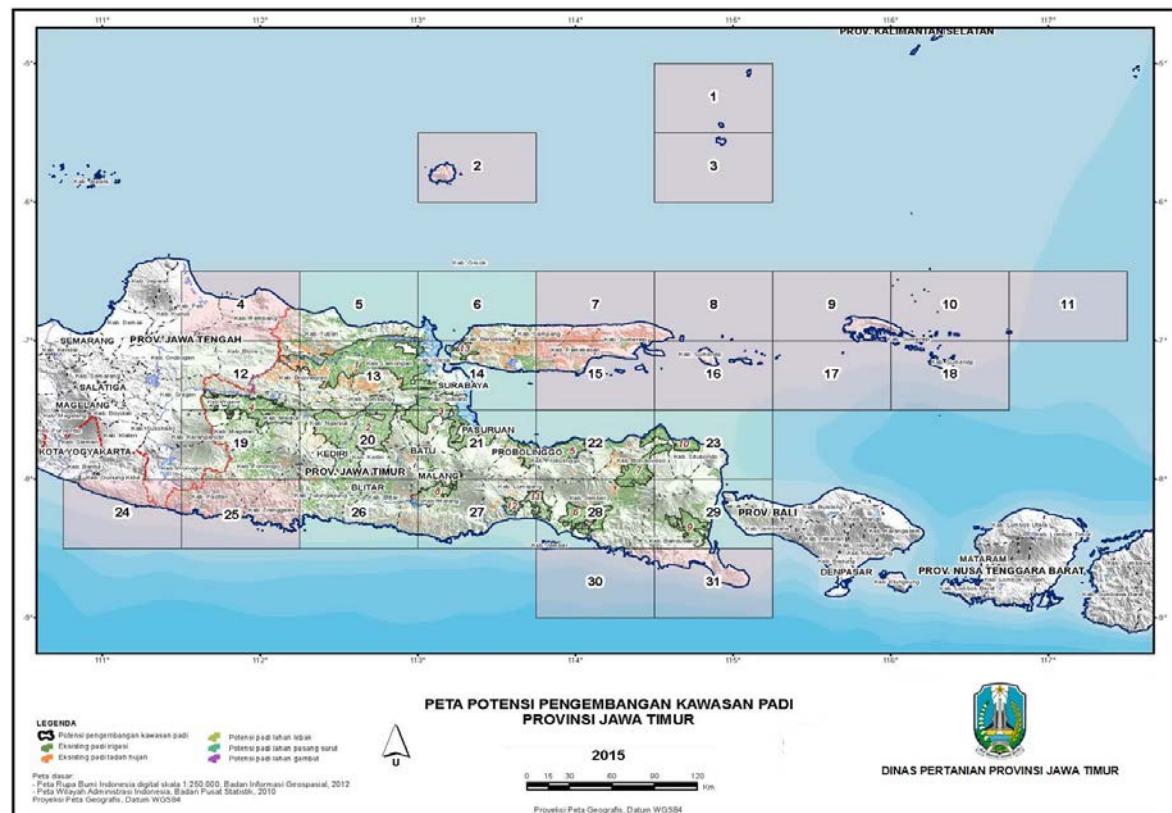
Gambar 8.1. Peta Rerata Produktivitas Padi Jawa Timur
Tahun 2010 – 2014



Sedangkan Hasil penilaian peta potensi padi di Jawa Timur menurut Atlas Peta Potensi Pengembangan Kawasan Pertanian Padi, Jagung, Kedelai dan Ubi Kayu Provinsi Jawa Timur tahun 2015 yang merupakan data eksisting tahun 2015 mempunyai sebaran potensi pengembangan di 13 wilayah, yaitu: (1) Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Mojokerto, Tuban dan Kota Surabaya, seluas 233.402 ha; (2) Kota Kediri, Kabupaten Kediri, Jombang, dan Nganjuk, seluas 183.568 ha; (3) Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan, dan Sidoarjo, seluas 111.746 ha; (4) Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Magetan, dan Ngawi, seluas 82.682 ha; (5) Kabupaten Probolinggo dan Kota Probolinggo, seluas 53.746 ha; (6) Kabupaten Jember, seluas 49.570 ha, (7) Kabupaten Bondowoso, Jember, dan

Situbondo, seluas 45.016 ha; (8) Kota Malang dan Kabupaten Malang, seluas 38.613 ha, (9) Kabupaten Banyuwangi, seluas 36.865 ha; (10) Kabupaten Situbondo, seluas 29.606 ha; (11) Kabupaten Jember dan Lumajang, seluas 22.732 ha, (12) Kabupaten Lumajang, seluas 10.899 ha, dan (13) Kabupaten Bangkalan, seluas 10.328 ha.

Gambar 8.2. Peta Kawasan Padi Tahun 2015



Potensi pengembangan komoditas padi di Provinsi Jawa Timur berupa padi irigasi (PI) dan padi tada hujan (PT), seluas 1.133.071 ha atau 23,60% dari luas total Provinsi Jawa Timur dengan rincian padi irigasi (PI) seluas 894.540 ha atau 78,95% dari luas total padi di Provinsi Jawa Timur dan padi tada hujan (PT) seluas 238.531

ha atau 21,05% dari luas total padi di Provinsi Jawa Timur. Lahan yang termasuk di dalam kawasan pengembangan padi seluas 586.608 ha atau 51,77% dari luas potensi pengembangan padi di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Lamongan, Probolinggo, Jember, dan Ngawi merupakan wilayah yang mempunyai penyebaran cukup luas. Lahan yang berpotensi untuk pengembangan padi, tetapi berada di luar kawasan, seluas 546.463 ha atau 48,23% dari luas potensi pengembangan padi di Provinsi Jawa Timur. Lahan tersebut terdapat pada sawah irigasi dan tada hujan. Kabupaten yang mempunyai potensi untuk pengembangan padi cukup luas, tetapi tidak termasuk kawasan padi, karena penyebarannya sporadis dan tidak adanya konektivitas, antara lain: Kabupaten Tulung Agung, Blitar, Magetan, dan Pacitan.

Pengembangan Kawasan Padi dimaksudkan untuk meningkatkan perekonomian Jawa Timur sekaligus mencapai ketahanan pangan melalui pencapaian surplus 5 juta ton sebagai kontribusi Jawa Timur terhadap produksi nasional. Selanjutnya Orientasi Pengembangan berdasarkan Klasifikasi Kawasan Tanaman Pangan Jawa Timur Tahun 2015 :

- 1. Penumbuhan** (produktivitas kabupaten < produktivitas provinsi)
 - a. Peningkatan produktivitas
 - b. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP)
 - c. Penurunan tingkat kehilangan hasil
- 2. Pengembangan** (produktivitas kabupaten hampir sama produktivitas provinsi)
 - a. Peningkatan produktivitas
 - b. Penurunan tingkat kehilangan hasil
 - c. Peningkatan mutu hasil
- 3. Pemantapan** (produktivitas kabupaten > produktivitas provinsi dan nasional)
 - a. Pengenalan teknologi baru
 - b. Peningkatan mutu hasil
 - c. Pengembangan industri olahan

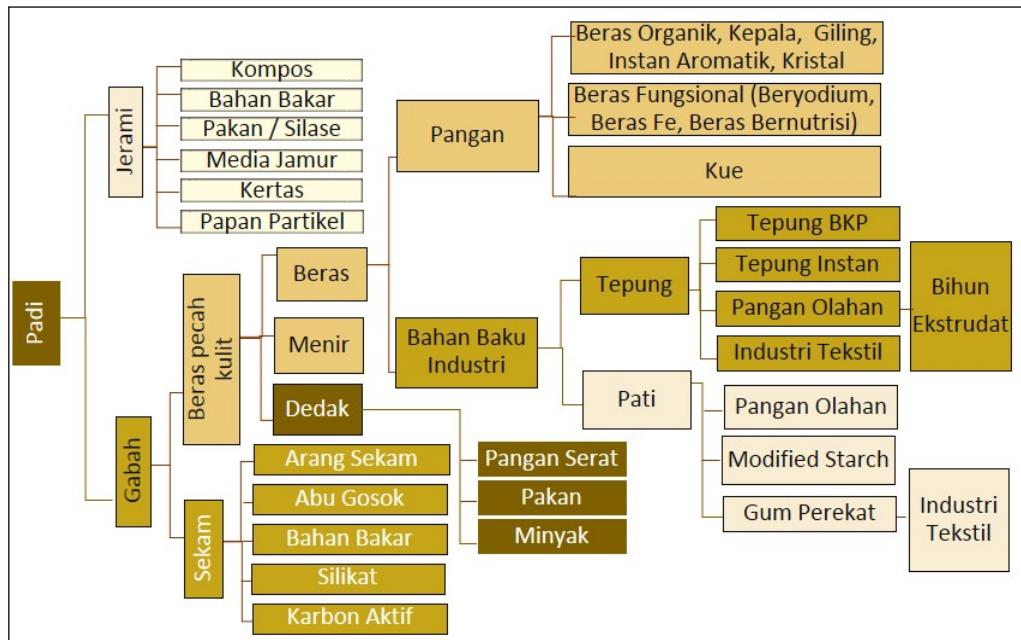
Implementasi Master Plan kali ini direncanakan tahun 2015 hingga tahun 2019 yang sinergis secara teknis sesuai potensi Kawasan Padi Jawa Timur terutama dalam meningkatkan produktivitas, peningkatan areal tanam melalui peningkatan IP padi sawah.

Gambar 8.3. Tahapan Pengembangan Kawasan Padi di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Hulu	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pembinaan Penangkar benih, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pembinaan Penangkar benih, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pemantapan Penangkar benih, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pemantapan Penangkar benih, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pemantapan Penangkar benih, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES
Onfarm	Optimalisasi lahan dan sarana prasarana, Penerapan sistem tanam jajar legowo, SRI, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi lahan dan sarana prasarana, Penerapan sistem tanam jajar legowo, SRI, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi lahan dan sarana prasarana, Penerapan sistem tanam jajar legowo, SRI, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi lahan dan sarana produksi, Perluasan penerapan sistem tanam jajar legowo, SRI, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi lahan dan sarana produksi, SRI, GPPTT, SLPHT Pengamanan Produksi Antisipasi DPI
Hilir	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu, Pengembangan Industri Olahan	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu, Pengembangan Industri Olahan	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Penerapan penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu, Pengembangan Industri Olahan	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Penerapan penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu, Pengembangan Industri Olahan	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Penerapan penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu, Pengembangan Industri Olahan
Pendukung	Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan, Pengendalian Inflasi	Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan, Pengendalian Inflasi	Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan, Pengendalian Inflasi	Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan, Pengendalian Inflasi	Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan, Pengendalian Inflasi

Industri primer dari padi berupa beras yang selain dapat dikonsumsi langsung, beras juga dapat diolah untuk berbagai keperluan dengan nilai tambah yang cukup tinggi. Dalam hal ini pemanfaatan teknologi pascapanen padi dan produk sampingnya memegang peranan penting. Alternatif dan peluang peningkatan nilai tambah padi melalui sistem industri beras terlihat pada Gambar 8.4.

Gambar 8.4. Alternatif dan Peluang Industri Beras



Sumber : Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005

b. Kawasan Jagung

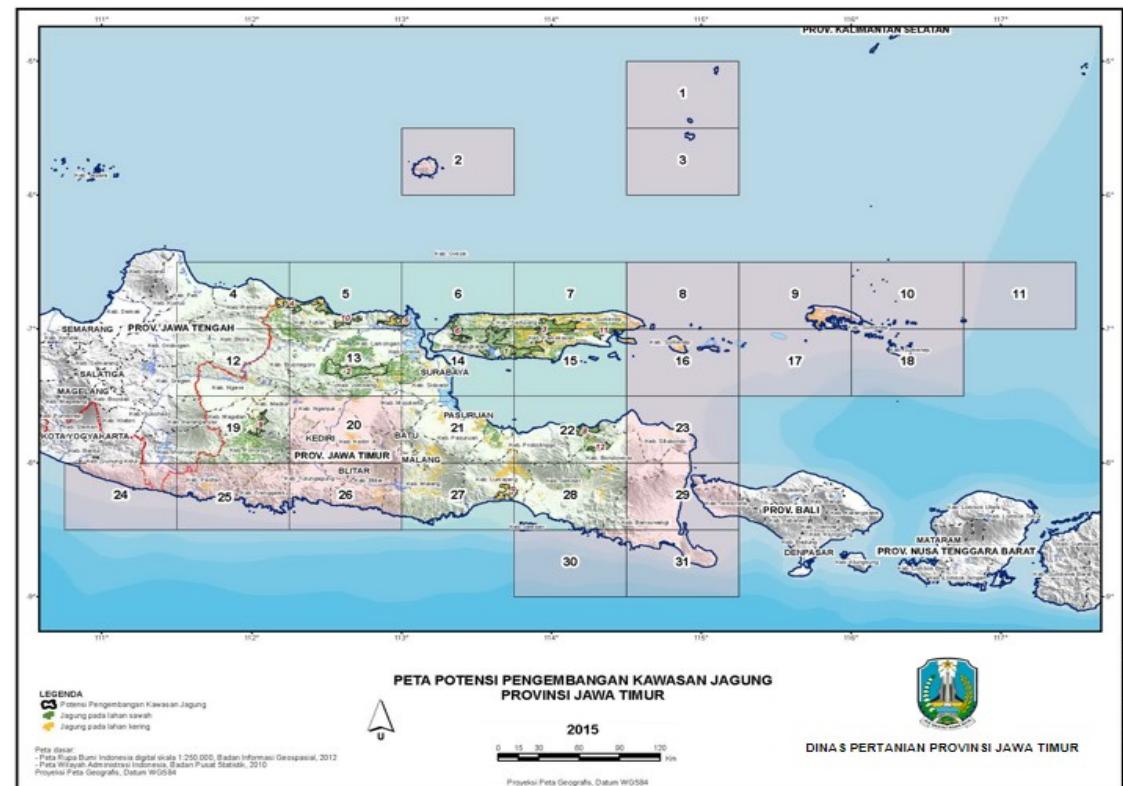
Jagung termasuk komoditas strategis dalam pembangunan pertanian dan pembangunan ekonomi Jawa Timur yang dapat dikembangkan di 29 kabupaten se Jawa Timur serta mempunyai fungsi multiguna, baik untuk pangan maupun pakan. Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian dalam buku Prospek dan Arah Pengembangan Agribisnis Jagung disebutkan bahwa Kebutuhan jagung untuk bahan baku industri pakan, makanan, dan minuman meningkat 10-15 persen pertahun.

Gambar 8.5. Peta Rerata Produktivitas Jagung Jawa Timur
Tahun 2010 – 2014



Pengembangan Kawasan Jagung Jawa Timur ditetapkan berdasarkan data historis (Gambar 8.5), yaitu rata-rata produktivitas jagung (kuintal per hektar) tahun 2010 – 2014 dengan pemetaan produktivitas jagung di 20 kabupaten meliputi: Kabupaten Pacitan Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Situbondo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Lamongan, Gresik.

Gambar 8.6. Peta Kawasan Jagung Tahun 2015



Hasil penilaian peta potensi pengembangan kawasan jagung di Provinsi Jawa Timur sebagai data eksisting tahun 2015 yang terinci per kabupaten pada Gambar 8.6 menunjukkan bahwa potensi pengembangan kawasan jagung di Provinsi Jawa Timur terdapat di 12 wilayah, yaitu: (1) Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sampang, seluas 43.118 ha; (2) Kabupaten Bajonegoro, Gresik, Lamongan, dan Mojokerto, seluas 34.304 ha; (3) Kabupaten Pamekasan, Sampang, dan Sumenep, seluas 31.812 ha; (4) Kabupaten Tuban, seluas 20.688 ha; (5) Kabupaten Gresik dan Lamongan, seluas 11.198 ha; (6) Kabupaten Bangkalan, seluas 9.965 ha; (7) Kabupaten Lumajang, seluas 9.715 ha; (8) Kabupaten Situbondo, seluas 7.865 ha; (9)

Kabupaten Madiun, seluas 7.146 ha; (10) Kabupaten Lamongan dan Tuban, seluas 6.252 ha; (11) Kabupaten Sumenep, seluas 5.853 ha; (12) Kabupaten Bondowoso, seluas 5.494 ha.

Gambar 8.7. Tahapan Pengembangan Kawasan Tanaman Jagung di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

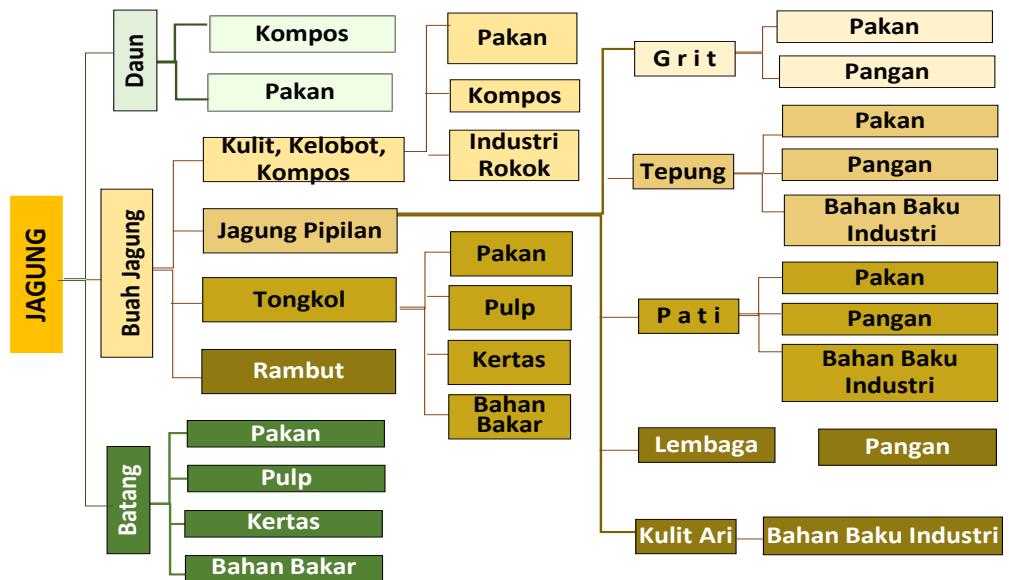
	2015	2016	2017	2018	2019
Hulu	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi, Pengembangan Pupuk Organik, Perbaikan JITUT/JIDES
Onfarm	Optimalisasi sarana prasarana, Penerapan sistem tanam jajar legowo, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi sarana prasarana, Penerapan sistem tanam jajar legowo, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi sarana prasarana, Perluasan sistem tanam jajar legowo, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI
Hilir	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu,	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu,	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu,	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu,	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen, Sosialisasi Penanganan GHP dan Sertifikasi Mutu,
Pendukung	Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan,				

Potensi pengembangan komoditas jagung di Provinsi Jawa Timur terdapat pada lahan sawah dan lahan kering pada wilayah datar sampai bergelombang dengan lereng <15% dengan berbagai jenis bahan induk dan reaksi tanah (pH), seluas 688.063 ha atau 14,33% dari luas total Provinsi Jawa Timur dengan rincian jagung pada lahan sawah seluas 375.413 ha atau 54,56% dari luas total jagung di Provinsi Jawa Timur dan jagung lahan kering seluas 312.650 ha atau 45,44% dari luas total jagung di Provinsi Jawa Timur. Lahan yang termasuk di dalam kawasan pengembangan jagung seluas 135.212 ha atau 19,65% dari luas total jagung di

Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Sampang dan Lamongan merupakan wilayah yang mempunyai penyebaran cukup luas. Lahan yang berpotensi untuk pengembangan jagung, tetapi berada di luar kawasan, seluas 552.851 ha atau 80,35% dari luas potensi pengembangan jagung di Provinsi Jawa Timur. Lahan tersebut terdapat pada sawah tada hujan dan lahan kering. Kabupaten yang mempunyai potensi pengembangan padi cukup luas, tetapi tidak termasuk dalam pengembangan kawasan jagung, karena penyebarannya sporadis dan tidak adanya konektivitas, antara lain: Kabupaten Ponorogo, Malang, Jombang, Pasuruan, dan Jember. Upaya meningkatkan pertumbuhan produksi hingga tahun 2019 sebesar 1,50 persen terlihat dalam Master Plan Kawasan Jagung Jawa Timur tahun 2015 – 2019.

Sebagai bahan pangan yang mengandung 70 persen pati, 10 persen protein, dan 5 persen lemak, jagung mempunyai potensi besar untuk dikembangkan menjadi beragam macam produk. Produk turunan potensial yang bisa dihasilkan dari komoditas jagung terlihat pada Gambar 8.8

Gambar 8.8. Alternatif dan Peluang Industri Jagung



Sumber : Prospek dan Arah Pengembangan Agrobisnis Jagung, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005

c. Kawasan Kedelai

Kedelai merupakan komoditas tanaman pangan terpenting ketiga setelah padi dan jagung yang tingkat kebutuhan kedelai terus meningkat seiring dengan meningkatnya permintaan untuk bahan industri pangan. Produk kedelai sebagai bahan olahan pangan berpotensi dan berperan dalam menumbuhkembangkan industri kecil menengah bahkan berpeluang pula sebagai komoditas ekspor. Berkembangnya industri pangan berbahan baku kedelai membuka peluang kesempatan kerja dalam sistem produksi, mulai dari budidaya, panen, pengolahan pascapanen, transportasi, pasar hingga industri pengolahan pangan. Pengembangan Kawasan Kedelai di Jawa Timur ditujukan untuk peningkatan pertumbuhan produksi hingga pada tahun 2019 sebesar 3,00 persen untuk memenuhi

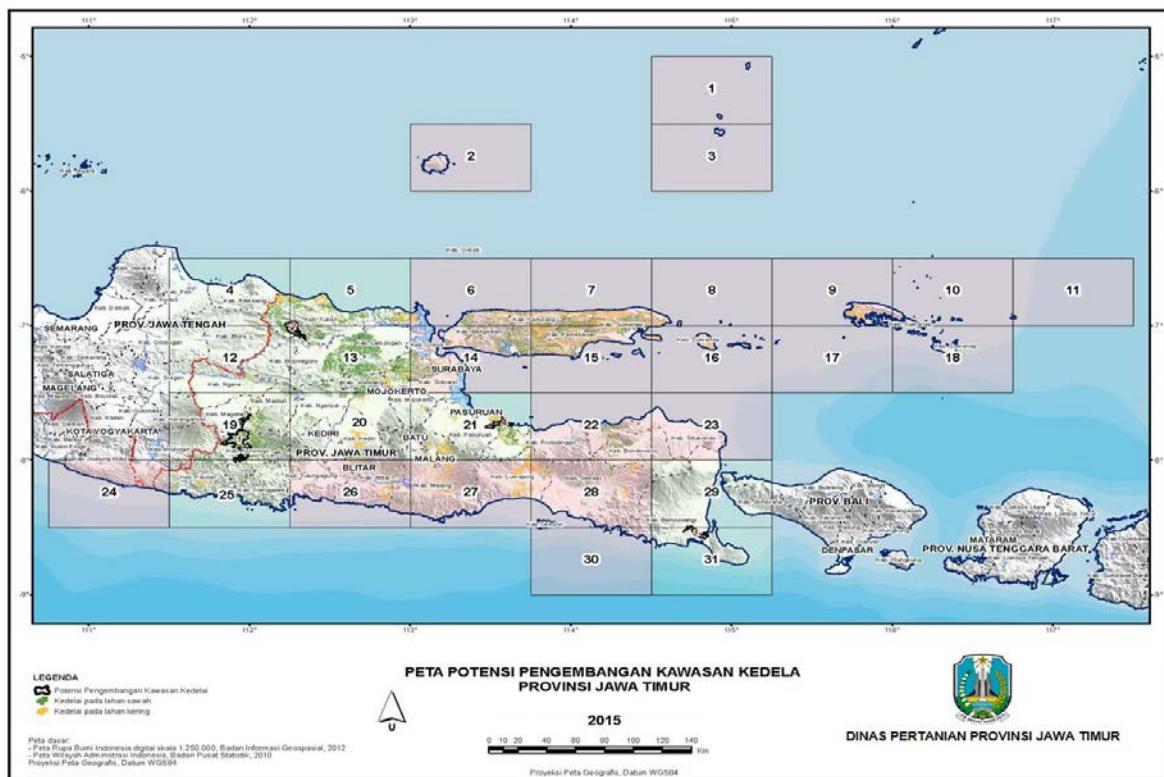
kebutuhan domestik dan meningkatkan kontribusi produksi Jawa Timur terhadap produksi nasional melalui pengembangan Kawasan Kedelai berdasarkan rerata produktivitas.

Gambar 8.9. Peta Rerata Produktivitas Kedelai Jawa Timur
Tahun 2010 – 2014



Potensi kedelai Jawa Timur tersebar di 29 kabupaten se Jawa Timur dengan sentra produksi terbesar di 15 kabupaten berdasarkan data historis tahun 2010 – 2014 (Gambar 8.9) yang terdiri : Kabupaten Ponorogo, Ngawi, Madiun, Magetan (PKA Wilis), Pasuruan, Lumajang (PKA Bromo – Tengger – Semeru), Jember, Banyuwangi (PKA Ijen), Jombang, Nganjuk, Tulungagung, Trenggalek (PKA Kelud) Lamongan (PKA Segitiga Emas), Sampang (PKA Madura) dan Mojokerto (PKA Metropolitan).

Gambar 8.10. Peta Kawasan Kedelai Tahun 2015



Hasil penilaian peta potensi pengembangan kawasan kedelai di Provinsi Jawa Timur yang terinci per kabupaten disajikan Gambar 8.10. menunjukkan bahwa potensi pengembangan kawasan kedelai di Provinsi Jawa Timur tersebar di 4 wilayah, yaitu: (1) Kabupaten Magetan dan Ponorogo, seluas 25.818 ha; (2) Kabupaten Tuban, seluas 7.496 ha; (3) Kabupaten Banyuwangi, seluas 4.160 ha; dan (4) Kabupaten Parusuan dan Probolinggo, seluas 4.010 ha. Potensi pengembangan komoditas kedelai di Provinsi Jawa Timur pada lahan sawah dan lahan kering pada wilayah datar sampai berombak dengan lereng <8% dengan reaksi tanah (pH) tergolong agak masam sampai netral, seluas 229.873 ha atau 4,79% dari luas total Provinsi Jawa

Timur. Secara lebih rinci adalah kedelai pada lahan sawah seluas 124.174 ha atau 54,02% dan kedelai pada lahan kering seluas 105.699 ha atau 45,98% dari luas total kedelai di Provinsi Jawa Timur.

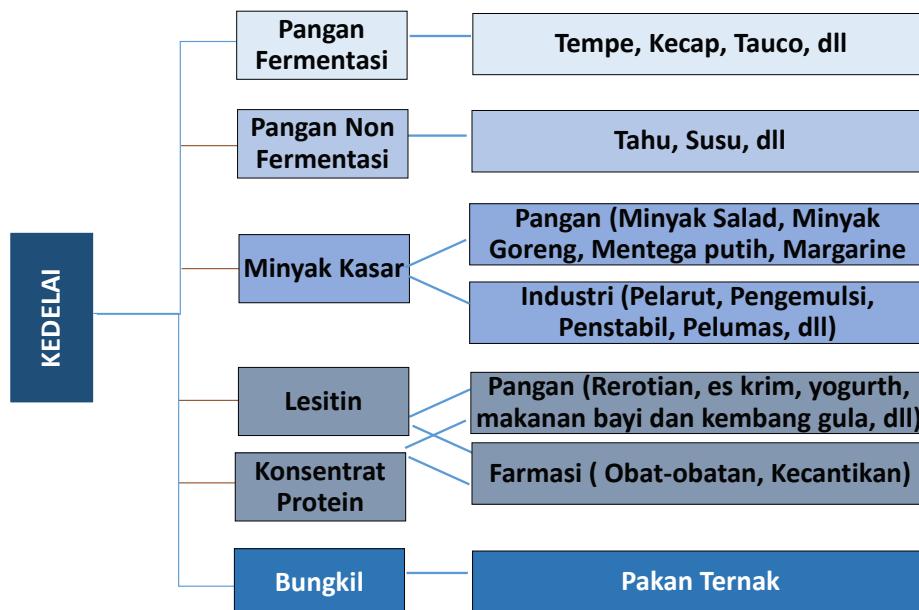
Gambar 8.11. Tahapan Pengembangan Kawasan Tanaman Kedelai di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Hulu	Penguatan sistem perbenihan yang menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi	Penguatan sistem perbenihan yang menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi	Penguatan sistem perbenihan yang menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi	Penguatan sistem perbenihan yang menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi	Penguatan sistem perbenihan yang menjamin ketersediaan benih unggul bersertifikat, Penyediaan sarana prasarana budidaya serta irigasi
Onfarm	Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI	Optimalisasi sarana prasarana, GPPTT, SLPHT, Pengamanan Produksi, Antisipasi DPI
Hilir	Fasilitasi Sarana Prasarana Panen dan Pasca Panen,				
Pendukung	Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan,				

Lahan yang termasuk di dalam kawasan pengembangan kedelai berupa lahan sawah, seluas 27.673 ha atau 12,04% dari luas total kedelai di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang mempunyai penyebaran terluas, yaitu 14.267 ha. Sedangkan lahan yang potensi untuk pengembangan kedelai sangat luas tetapi berada di luar kawasan, seluas 202.200 ha atau 87,96% dari luas potensi pengembangan kedelai di Provinsi Jawa Timur. Lahan tersebut terdapat pada sawah dan lahan kering. Kabupaten Sumenep dan Bangkalan mempunyai penyebaran cukup luas sebesar 40.048 ha dan 19.325 ha.

Kedelai dapat diolah menjadi berbagai produk, baik produk pangan, obat-obatan, industri maupun pakan (Gambar 8.12).

Gambar 8.12. Alternatif dan Peluang Industri Kedelai



Sumber : Prospek dan Arah Pengembangan Agrobisnis Kedelai, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005

Produk olahan kedelai yang populer di masyarakat dewasa ini adalah produk fermentasi seperti tempe, kecap, tauco, dan produk nonfermentasi seperti tahu, susu, dan daging tiruan (meat analog). Produk fermentasi lain yang populer adalah natto (di Jepang), dan produk nonfermentasi lainnya seperti keju kedelai, yuba dan lain-lain. Produk lainnya dari kedelai adalah minyak kasar, isolat protein, lesitin, dan bungkil kedelai. Minyak kedelai dapat diolah lagi untuk produk pangan dan produk industri. Produk pangan yang menggunakan minyak kedelai antara lain adalah minyak salad, minyak goreng, mentega putih, margarine, dan mayonaise. Isolat protein dan lesitin banyak digunakan dalam berbagai produk industri makanan, antara lain roti-rotian, es krim, yoghurt, makanan bayi (infant formula), kembang

gula dan lain-lain. Bungkil kedelai yang mengandung protein tinggi adalah bahan baku penting rangsum ternak (pakan). Di Jawa Timur, kedelai lebih banyak digunakan untuk tahu dan tempe (Prospek dan arah Pengembangan Agribisnis Kedelai, 2005).

d. Kawasan Ubi Kayu

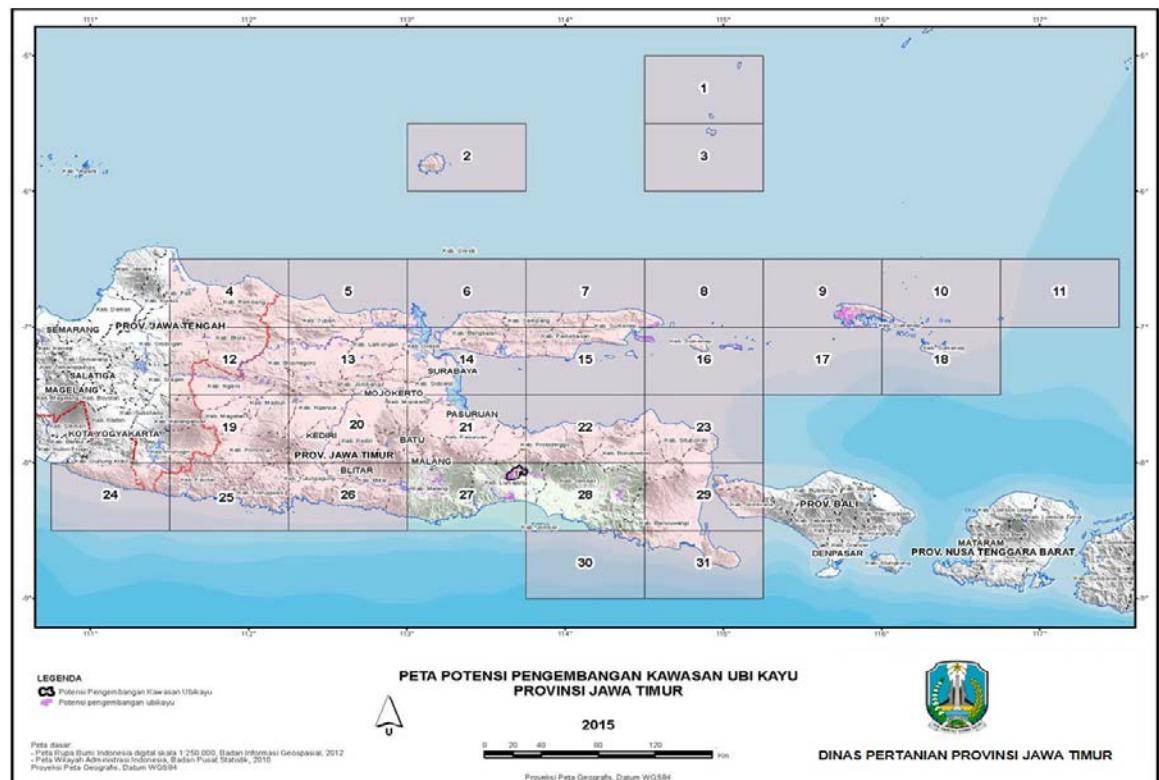
Ubikayu merupakan salah satu komoditas strategis sebagai sumber pendapatan bagi petani yang memiliki arti dan peran dalam peningkatan kesejahteraan petani. Ubikayu selain dapat dijadikan bahan pangan dimanfaatkan juga sebagai konsumsi pangan lokal, bahan baku industri dan pakan ternak. Oleh karena itu pengembangan ubikayu sangat penting artinya di dalam upaya penyediaan bahan pangan karbohidrat non beras, diversifikasi/ penganekaragaman konsumsi pangan lokal, pengembangan industri pengolahan hasil dan agroindustri dan sebagai sumber devisa melalui ekspor serta upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan. Peluang pengembangan ubikayu sangat luas, hal tersebut mengingat ketersediaan lahan yang cukup luas seperti potensi lahan kering, tegal, ladang dan lahan sementara tidak diusahakan, juga tersedia paket teknologi budidaya ubikayu yang spesifik lokasi. Meskipun demikian, komoditas ubikayu masih dianggap sebagai komoditas inferior, hal ini terlihat dari : 1) Rendahnya minat petani melakukan budidaya ubikayu akibat rendahnya insentif yang diperoleh dibanding komoditas lainnya; 2) Persaingan penggunaan sumberdaya lahan dengan komoditas lain; 3) Pola tanam belum diterapkan secara optimal; 4) Rendahnya produktivitas di tingkat petani; 5) Kelembagaan/kemitraan belum tumbuh dan berkembang dan 6) Sistem pemasaran belum berjalan dengan baik. Potensi ubi kayu di Jawa Timur tersebar di 14 se Jawa Timur (Gambar 8.13).

Gambar 8.13. Peta Rerata Produksi Ubi Kayu Jawa Timur
Tahun 2010 – 2014



Sedangkan pengembangan Kawasan Ubi Kayu diintensifkan di 10 kabupaten yang ditetapkan berdasarkan data historis tahun 2014 – 2019 : 1) Kabupaten Pacitan, Ponorogo, Magetan (PKA Wilis); 2) Malang, Pasuruan, (PKA Bromo – Tengger – Semeru); 3) Jombang, Trenggalek, Blitar, Kediri, (PKA Kelud); 4) Tuban (PKA Segitiga Emas). Hasil penilaian peta potensi pengembangan kawasan ubi kayu di Provinsi Jawa Timur yang terinci per kabupaten disajikan pada Gambar 8.13

Gambar 8.14 Peta Kawasan Ubi Kayu Tahun 2015



Gambar 8.14 menunjukkan bahwa potensi pengembangan kawasan ubi kayu di Provinsi Jawa Timur terdapat di Kabupaten Lumajang, seluas 9.042 ha. Potensi pengembangan komoditas ubi kayu di Provinsi Jawa Timur pada lahan kering pada wilayah datar sampai bergelombang dengan lereng <15% dengan berbagai bahan induk tanah dan reaksi tanah (pH), seluas 85.385 ha atau 1,78% dari luas total Provinsi Jawa Timur. Lahan yang termasuk di dalam kawasan pengembangan ubi kayu berupa lahan kering, seluas 7.181 ha atau 8,41% dari luas total ubi kayu di Provinsi Jawa Timur. Sedangkan lahan yang potensi untuk pengembangan ubi kayu tetapi berada di luar kawasan, seluas 78.204 ha atau 91,59% dari luas potensi

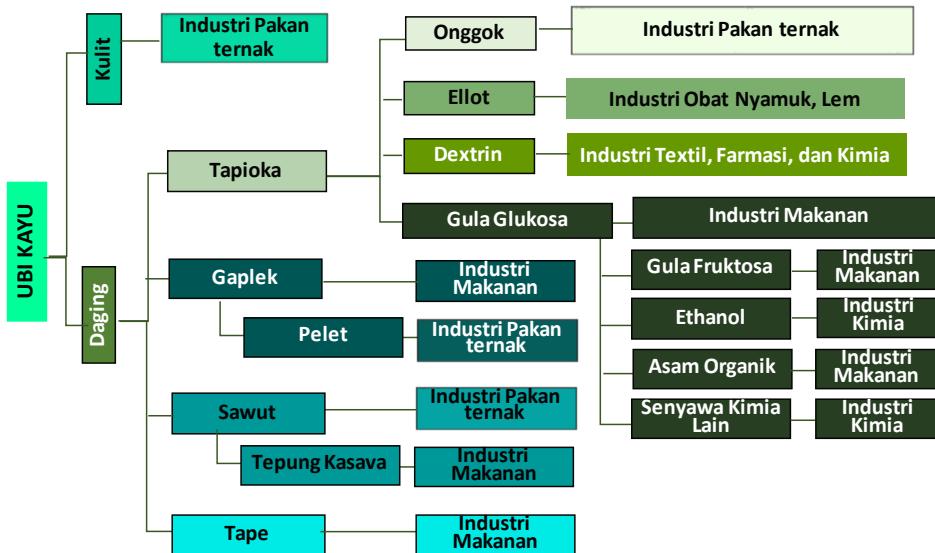
pengembangan ubi kayu di Provinsi Jawa Timur. Lahan tersebut terdapat pada lahan kering. Kabupaten Sumenep dan Malang mempunyai penyebaran cukup luas, sebesar 18.881 ha dan 10.595 ha.

Gambar 8.15. Tahapan Pengembangan Kawasan Tanaman Ubi Kayu di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Hulu	Meningkatkan penggunaan benih unggul bersertifikat,				
Onfarm	Optimalisasi lahan, Pengamanan Produksi,				
Hilir	Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil,	Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil,	Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil,	Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil,	Fasilitasi sarana prasarana pasca panen dan pengolahan hasil,
Pendukung	Penguatan Kelembagaan Pemasaran, Kemitraan,				

Ubi kayu di Indonesia banyak digunakan sebagai sumber bahan pangan (58 persen), bahan baku industri (28 persen), komoditi ekspor (dalam bentuk gapplek 8 persen), pakan (2 persen), dan sisanya (4 persen) sebagai limbah pertanian (Muchjidin Rachmat dan Sri Nuryanti, 2014 dalam buku Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian). Menurut BPS (2008) terdapat 62 jenis industri skala sedang dan besar yang menggunakan ubikayu dan produk olahan antara seperti tepung tapioka, gapplek dan ampas tapioka. mi, makaroni, kertas, farmasi, dan kayu. Pengolahan ubikayu sebagai bahan industri.

Gambar 8.16. Alternatif dan Peluang Industri Ubi Kayu



Sumber : Memperkuat Daya Saing Produk Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2014

Pemanfaatan ubikayu untuk industri skala sedang antara lain untuk industri pengolahan makanan, pati, pakan, roti, gula dan sirup, minuman, mi, makaroni, kertas, farmasi, dan kayu. Pengolahan ubikayu sebagai bahan industri besar antara lain untuk bahan baku (a) dekstrin untuk tekstil, kertas perekat plywood, dan industri kimia/farmasi, (b) citric acid untuk makanan dan minuman, (c) monosodium glutamate, (d) sorbitol, (e) campuran pakan, dan (f) ethanol. Tepung tapioka dan (c) monosodium glutamate, (d) sorbitol, (e) campuran pakan, dan (f) ethanol. Tepung tapioka dan produk turunan yang disebut polyol, merupakan bahan baku pasta gigi, produk kosmetik, dan vitamin C.

Kawasan Hortikultura Jawa Timur		<p>Sentra Hortikultura :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jeruk siam / keprok • Bawang Merah • Cabai Merah 	<p>Strategi Utama :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Produktivitas • Peningkatan Nilai Tambah dan daya Saing Produk
--	--	---	---

a. Kawasan Hortikultura

Komoditas hortikultura merupakan komoditas potensial yang mempunyai nilai ekonomi dan permintaan pasar yang tinggi akan tetapi penanganan komoditas hortikultura di dalam suatu kawasan sampai sekarang masih belum optimal, meskipun potensi bisnis di dalam kawasan tersebut cukup besar yang terindikasi dari 323 varietas, terdiri dari 80 varietas sayuran, 60 varietas buah, 117 komoditas florikultura, dan 66 varietas tanaman biofarmaka sehingga dalam pengembangannya ditetapkan 40 komoditas unggulan nasional dan diantaranya cabai, bawang merah dan jeruk sesuai Keputusan Menteri Pertanian RI nomor 45 /Kpts/PD.200/I/2015 tentang penetapan Kawasan Cabai, Bawang Merah dan Jeruk Nasional. Beberapa permasalahan

- Rendahnya produksi, produktivitas dan kualitas hortikultura akibat belum optimalnya pembinaan teknis terutama dalam penerapan inovasi teknologi baik prapanen dan pascapanen sehingga menyebabkan daya saing produk hortikultura masih lemah
- Lokasi terpencar;
- Penerapan GAP – SOP yang masih belum konsisten;
- Petani hortikultura masih memiliki daya tawar yang lemah dibanding pelaku usaha lainnya yang disebabkan oleh masih lemahnya fungsi atau peran dari kelembagaan hortikultura (Poktan, Gapoktan, Asosiasi).

Berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/CT.140/8/ 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian dan sesuai Strategi Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dimuat dalam Bab VII, maka pengembangan kawasan hortikultura Jawa Timur dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan klasifikasi kawasan hortikultura untuk komoditas cabai merah, bawang merah dan jeruk sesuai kelas kawasan yang terlihat pada Tabel 8.2 : a) Kawasan Baru / inisiasi; b) Kawasan

Penumbuhan; c) Kawasan Pengembangan; d) Kawasan Pemantapan dan e) Kawasan yang terintegrasi antar kawasan.

Tabel 8.2. Klasifikasi Kawasan Hortikultura Jawa Timur Tahun 2015

Tipe Kelas Kawasan	Kabupaten			Dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur tahun 2011 – 2031 dan Renstra Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019
	Jeruk	Bawang Merah	Cabai Merah	
Inisiasi (Rerata luas panen dan produksi < rerata provinsi)	Pacitan, Blitar, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Madiun, Magetan, Sumenep, Kota Malang	Tulungagung, Banyuwangi, Situbondo, Jombang, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sumenep	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Situbondo, Mojokerto, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Kota Malang, Kota Surabaya	1. Bawang Merah: Batu, Nganjuk, Kediri, Ngawi, Mojokerto, Probolinggo, Bojonegoro, Bondowoso, Malang, Sampang, Pamekasan dan Sumenep), 2. Cabe Merah : Tuban, Kediri, Bojonegoro, Blitar, Mojokerto, Probolinggo, Banyuwangi, Malang, Jember, Bangkalan, Pamekasan 3. Jeruk : Kediri, Banyuwangi, Jember, Malang, Lumajang, Magetan, Pacitan Bojonegoro, Batu, Tuban
Penumbuhan (Rerata luas panen < rerata provinsi dan produksi > rerata provinsi)	Tulungagung, Kediri, Pasuruan, Ngawi, Gresik, Bangkalan, Pamekasan	Ponorogo, Malang, Bondowoso, Mojokerto, Magetan, Kota Probolinggo	Ponorogo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Madiun, Sampang, Kota Batu	
Pengembangan (Rerata luas panen dan produksi > rerata provinsi)	Ponorogo	Kediri, Sampang, Pamekasan	Jember dan Tuban	
Pemantapan (Rerata produksi dan produktivitas kabupaten > rerata provinsi)	Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi	Probolinggo dan Nganjuk	Blitar, Kediri, Malang, Lumajang dan Banyuwangi	

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2014

a. Kawasan Jeruk Siam / Keprok

Jeruk merupakan komoditas buah yang cukup menguntungkan untuk diusahakan saat ini. Buah Jeruk dapat tumbuh dan diusahakan petani di dataran rendah hingga dataran tinggi dengan varietas/spesies komersial yang berbeda, dan dapat dikonsumsi oleh masyarakat berpendapatan rendah hingga yang berpenghasilan tinggi. Sentra produksi jeruk yang ada sekarang belum berbentuk dalam suatu hamparan tetapi merupakan kantong-kantong produksi yang sempit dan terpencar di kawasan sentra produksi, dengan tingkat pemeliharaan yang

bervariasi dan belum optimal serta pengelolaan pascapanennya yang sederhana dan pemasaran yang tidak berpihak kepada petani. Prospek agribisnis jeruk di masa mendatang jika digarap serius, selain dapat meningkat kesejahteraan petaninya juga bagi perekonomian Jawa Timur.

Tabel 8.3. Profil Jeruk Siam / Keprok Jawa Timur Tahun 2015

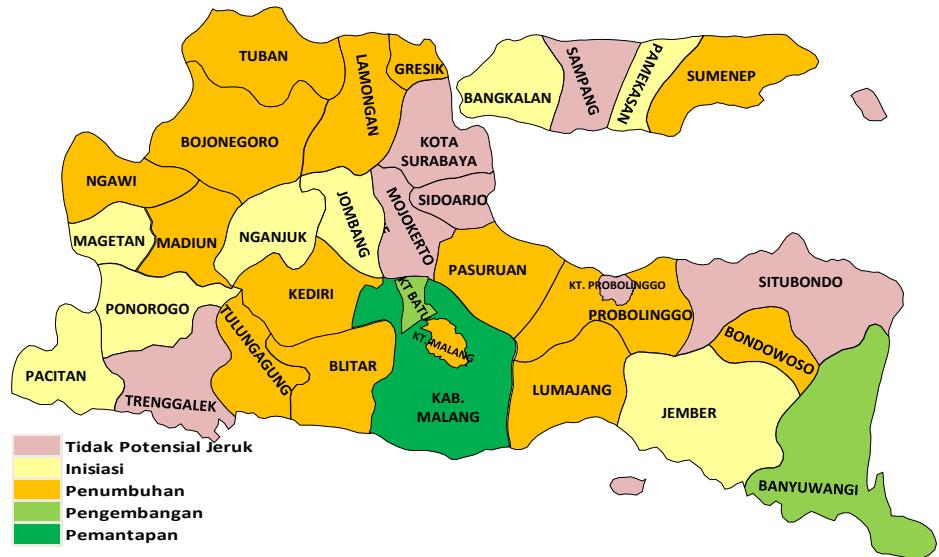
Uraian		Kabupaten	Jenis Kawasan Jeruk			
			Inisiasi	Penumbuhan	Pengembangan	Pemanfaatan
Potensi	Rerata luas panen dan produksi < rerata provinsi	Pacitan, Blitar, Bondowoso, Probolinggo, Nganjuk, Madiun, Magetan, Sumenep, Kota Malang	Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sumenep, Kota Malang	Pacitan, Ponorogo, Jember, Jombang, Nganjuk, Magetan, Bangkalan, Pamekasan	Banyuwangi dan Kota Batu	Kabupaten Malang
	Rerata luas panen < rerata provinsi dan produksi > rerata provinsi)	Tulungagung, Kediri, Pasuruan, Ngawi, Gresik, Bangkalan, Pamekasan				
	Rerata luas panen dan produksi > rerata provinsi	Ponorogo				
	Rerata produksi dan produktivitas kabupaten > rerata provinsi	Malang, Lumajang, Jember dan Banyuwangi				
Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Banyuwangi, Malang, Jember, Pacitan, Pamekasan, Bangkalan, Batu, Magetan, Ponorogo, Nganjuk, Jombang	Banyuwangi, Malang, Jember, Pacitan, Pamekasan, Bangkalan, Kota Batu, Magetan	Bangkalan, Malang dan Kota Batu	Malang	
	Penerapan <i>Good Agriculture Processing</i>	Banyuwangi, Malang, Jember, Pacitan, Pamekasan, Bangkalan, Kota Batu, Magetan				
	Registrasi Lahan Usaha / Kebun	Bangkalan, Malang dan Kota Batu				
	Penerapan <i>Good Handling Processing</i>	Malang				

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015

Pengembangan Kawasan Jeruk Siam / Keprok di Jawa Timur ditujukan untuk Peningkatan Produksi dan Produktivitas Buah Ramah Lingkungan untuk meningkatkan kontribusi produksi Jawa Timur terhadap produksi nasional. Keberhasilan pengembangan agribisnis jeruk di sistem produksi sangat ditentukan oleh ketersediaan bibit bermutu dan agroinput pada saat dibutuhkan, tersedianya inovasi teknologi yang dibutuhkan, dan ditunjang oleh industri jasa dan pendukung lainnya seperti industri kemasan, transportasi dan informasi.

Walaupun buah jeruk dapat dijumpai sepanjang tahun, tetapi periode panen buah jeruk umumnya dimulai dari bulan Februari hingga September dengan puncaknya terjadi pada bulan Mei, Juni, dan Juli.

Gambar 8.17 Peta Kawasan Jeruk Siam / Keprok Tahun 2015



Pengembangan agribisnis jeruk pada lima tahun mendatang diarahkan untuk: (1) Mencukupi kebutuhan konsumsi dalam negeri terutama Jawa Timur; (2) Substitusi impor; dan (3) Mengisi peluang pasar ekspor.

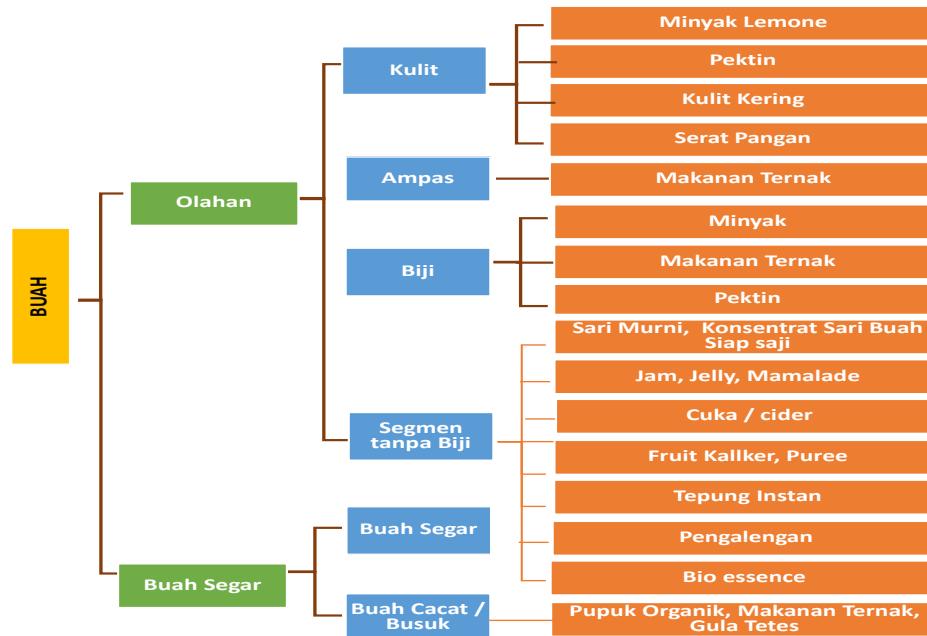
Gambar 8.18. Tahapan Pengembangan Kawasan Tanaman Jeruk Siam di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Hulu	pembangunan infrastruktur kebun (pengairan dan jalan produksi), perluasan areal, akses permodalan, alsin pertanian	pembangunan infrastruktur kebun (sistem pengairan dan akses jalan produksi), perluasan areal, akses permodalan, alsin pertanian	akses permodalan, alsin pertanian	akses permodalan, alsin pertanian	akses permodalan, alsin pertanian
Onfarm	Sekolah Lapang (SL) GAP/SOP budidaya, SL PHT, Pelatihan Petugas, Petani dan penangkar benih, Pendampingan teknis, pembangunan kebun, peremajaan tanaman, penerapan GAP, pengendalian OPT, pengawasan sertifikasi benih, registrasi kebun, registrasi packing house, penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pascapanen	penerapan manajemen mutu, penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, peremajaan tanaman, pengawasan sertifikasi benih, registrasi kebun dan sertifikasi produk, registrasi packing house, penyediaan prasarana dan sarana budidaya dan pascapanen	Peremajaan tanaman, penerapan GAP/SOP budidaya, SL GHP, pengendalian OPT, sertifikasi kebun, Peremajaan Tanaman, Penguatan kelembagaan, perbaikan produktivitas dan mutu produk	penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, penerapan sistem manajemen mutu produk, sertifikasi kebun, Penguatan kelembagaan	penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, penerapan sistem manajemen mutu produk, sertifikasi kebun, penerapan sistem manajemen rantai pasopenerapan GAP/SOP budidaya, GHP, penerapan sistem manajemen mutu produk, sertifikasi kebun, Penguatan kelembagaan
Pendukung	Peningkatan kapabilitas petugas, petani dan penangkar jeruk	Peningkatan kapabilitas petugas, petani dan penangkar jeruk	Peningkatan kapabilitas petugas, petani dan penangkar jeruk	Peningkatan kapabilitas petugas, petani dan penangkar jeruk	Peningkatan kapabilitas petugas, petani dan penangkar jeruk
Hilir	Pengembangan kemitraan, promosi dan pameran	Pengembangan kemitraan, promosi dan pameran	rintisan pengembangan industri pengolahan (sebagai antisipasi over produksi), promosi dan pameran	rintisan pengembangan industri pengolahan (sebagai antisipasi over produksi), promosi dan pameran	rintisan pengembangan industri pengolahan (sebagai antisipasi over produksi), promosi dan pameran

Berdasarkan prediksi peningkatan jumlah penduduk, konsumsi buah jeruk per kapita, kebutuhan buah segar, untuk olahan dan eksport serta dengan mempertimbangkan 10 % kerusakan akibat penanganan pasca panen yang kurang optimal sehingga diperoleh angka sasaran produksi jeruk Jawa Timur yang termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 – 2019.

Usaha agribisnis hulu jeruk diawali dari kegiatan pembibitan. Artinya, pembangunan agribisnis jeruk yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi menuntut adanya dukungan industri benih jeruk yang tangguh. Sistem produksi dan alur distribusi jeruk bebas penyakit yang sudah berlaku secara nasional merupakan yang paling lengkap dibandingkan dengan komoditas buah lainnya.

Gambar 8.12. Alternatif dan Peluang Industri Jeruk



Sumber : *Prospek dan Arah Pengembangan Agrobisnis Jeruk , Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005*

Pengembangan olahan produk jeruk selama ini terkendala oleh ketersediaan suplai bahan baku, baik dari jenis jeruk sebagai bahan baku, volumen, kualitas dan kontinuitas. Namun untuk jeruk keprok / siam, sebagian besar buah jeruk yang dihasilkan dari seluruh sentra produksi di Jawa Timur diperdagangkan dan dikonsumsi dalam bentuk segar, karena jenis jeruk Siam merupakan jeruk meja untuk konsumsi langsung dan tidak sesuai untuk olahan.

b. Kawasan Bawang Merah

Bawang merah merupakan salah satu komoditas sayuran unggulan yang tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Komoditas ini juga merupakan sumber pendapatan dan kesempatan kerja yang memberikan kontribusi cukup tinggi terhadap perkembangan ekonomi wilayah.

Selama periode 2010 - 2014, pertumbuhan produksi rata-rata bawang merah adalah sebesar 9,85 persen per tahun, dengan kecenderungan (trend) pola pertumbuhan yang fluktuatif. Komponen pertumbuhan areal panen (4,99 persen) ternyata lebih banyak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan produksi bawang merah dibandingkan dengan komponen produktivitas (6,15 persen).

Bulan panen bawang merah cukup bervariasi dari tahun ke tahun dengan puncak panen terjadi hampir selama 6-7 bulan setiap tahun, dan terkonsentrasi antara bulan Juni-Desember-Januari, sedangkan bulan kosong panen terjadi pada bulan Februari sampai Mei dan November. Berdasarkan pengamatan tersebut, musim tanam puncak diperkirakan terjadi pada bulan April sampai Oktober. Salah satu faktor utama yang dapat menentukan keberhasilan usaha peningkatan produksi bawang merah adalah ketersediaan benih/bibit bermutu. Produsen benih bawang merah di sentra-sentra produksi biasanya adalah petani yang memiliki skala usaha relatif luas atau petani individual yang menyisihkan sebagian hasil panen untuk digunakan sebagai benih musim tanam berikutnya.

Tabel 8.4. Profil Bawang Merah Jawa Timur Tahun 2015

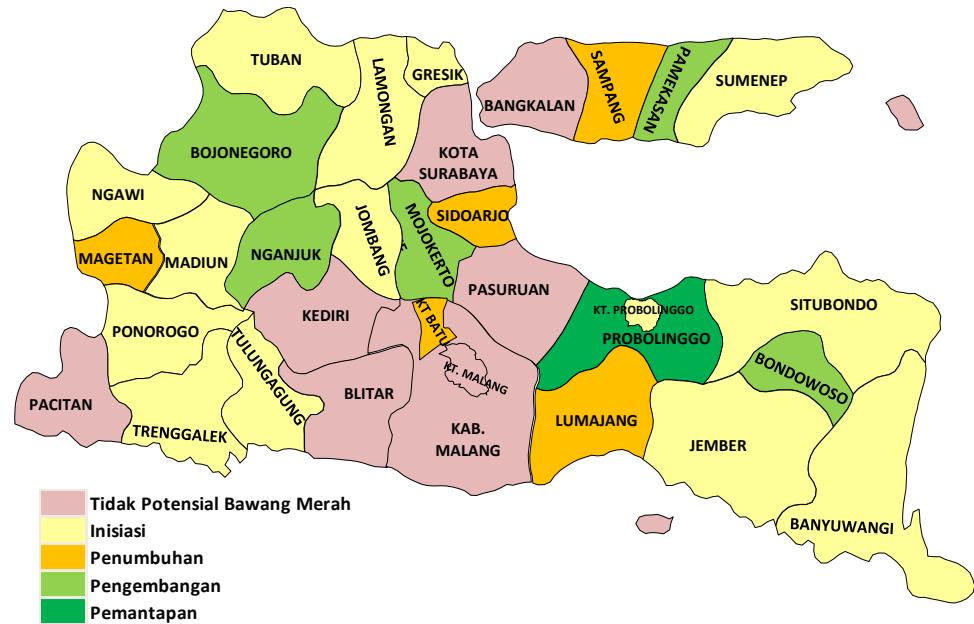
	Uraian	Kabupaten	Jenis Kawasan Bawang Merah			
			Inisiasi	Penumbuhan	Pengembangan	Pemanfaatan
Potensi	Rerata luas panen dan produksi < rerata provinsi	Tulungagung, Banyuwangi, Situbondo, Jombang, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sumenep	Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Banyuwangi, Situbondo, Jombang, Madiun, Ngawi, Tuban,	Malang, Lumajang, Sidoarjo, Magetan, Sampang, Kota Batu	Kediri, Bondowoso, Mojokerto, Nganjuk, Bojonegoro, Pamekasan	Probolinggo
	Rerata luas panen < rerata provinsi dan produksi > rerata provinsi)	Ponorogo, Malang, Bondowoso, Mojokerto, Magetan, Kota Probolinggo				

	Uraian	Kabupaten	Jenis Kawasan Bawang Merah			
			Inisiasi	Penumbuhan	Pengembangan	Pemantapan
	Rerata luas panen dan produksi > rerata provinsi	Kediri, Sampang, Pamekasan	Lamongan, Gresik, Sumenep, Kota Probolinggo			
	Rerata produksi dan produktivitas kabupaten > rerata provinsi	Probolinggo dan Nganjuk				
Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Probolinggo, Kediri, Nganjuk, Magetan, Mojokerto, Pamekasan, Bojonegoro, Sidoarjo, Sampang, Bondowoso, Trenggalek, Kota Batu, Malang				
	Penerapan <i>Good Agriculture Processing</i>	Probolinggo, Kediri, Sidoarjo, Nganjuk, Magetan, Mojokerto, Pamekasan, Bojonegoro, Sampang, Bondowoso, Kota Batu, Malang				
	Registrasi Lahan Usaha / Kebun	Probolinggo, Kediri, Nganjuk, Mojokerto, Pamekasan, Bojonegoro, Bondowoso				
	Penerapan <i>Good Handling Processing</i>	Probolinggo				

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015

Pengembangan agribisnis bawang merah pada lima tahun mendatang diarahkan untuk: (a) pengembangan varietas bawang merah setara kualitas impor sebagai salah satu upaya substitusi (pengurangan ketergantungan terhadap pasokan impor), (b) pengembangan industri benih bawang merah dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan benih bermutu, (c) perluasan areal tanam bawang merah sebagai upaya antisipasi peningkatan konsumsi dan d) pengembangan diversifikasi produk bawang merah dalam upaya peningkatan nilai tambah.

Gambar 8.20 Peta Kawasan Bawang Merah Tahun 2015



Sasaran pengembangan bawang merah meliputi: (a) tersedianya benih varietas unggul bawang merah untuk luas tanam seluas 25 ribu hektar tiap tahunnya; (b) meningkatnya produksi bawang merah rata-rata 2,60 persen per tahun selama periode 2015-2019; (c) berkembangnya industri benih bawang merah dalam rangka menjaga kontinuitas pasokan benih bermutu; serta (d) berkembangnya diversifikasi produk bawang merah dalam upaya peningkatan nilai tambah. Berdasarkan prediksi peningkatan jumlah penduduk, konsumsi bawang merah per kapita, kebutuhan bawang merah konsumen dalam negeri, kebutuhan industri olahan dan ekspor serta dengan mempertimbangkan 10 persen kerusakan akibat penanganan pasca panen yang kurang optimal.

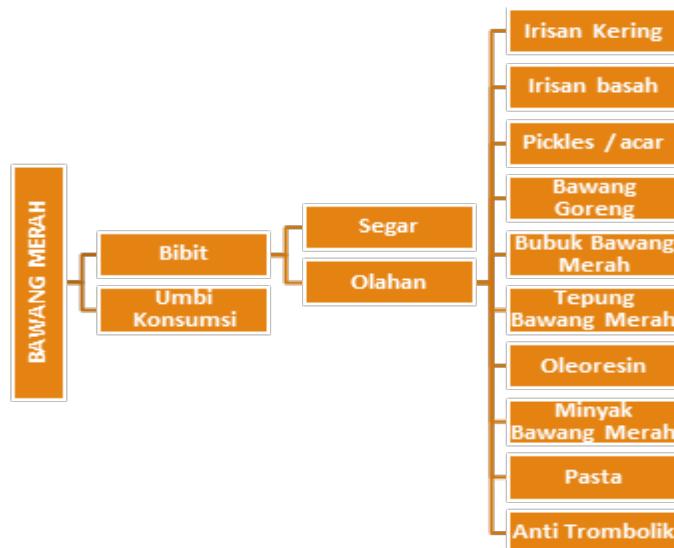
Gambar 8.21. Tahapan Pengembangan Kawasan Tanaman Bawang Merah di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Hulu	perluasan areal alat/ sistem irigasi teknis	perluasan areal, alat/ sistem irigasi teknis	perluasan areal, alat/ sistem irigasi teknis	perluasan areal, alat/ sistem irigasi teknis	perluasan areal, alat/ sistem irigasi teknis
Onfarm	Sosialisasi penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT,	Sosialisasi penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT,	Sosialisasi & penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT,	Sosialisasi & penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT,	penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan,
Pendukung	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya, akses permodalan	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya, akses permodalan
Hilir	penyiapan gudang simpan,	penyiapan gudang simpan, alat pengolahan	penyiapan gudang simpan, alat pengolahan, peningkatan kapasitas kelembagaan,	penyiapan gudang simpan, alat pengolahan, peningkatan kapasitas kelembagaan,	penyiapan gudang simpan, alat pengolahan, peningkatan kapasitas kelembagaan

Komoditas bawang merah termasuk ke dalam kelompok rempah tidak bersubstitusi yang berfungsi sebagai bumbu penyedap makanan serta bahan obat tradisional. Selain dijual dalam bentuk bawang segar, berbagai produk olahan dapat dihasilkan dari komoditas bawang , seperti bawang goreng, minyak bawang goreng, tepung bawang goreng, dan lain sebagainya (Gambar 8.22). Sehingga jika dikelola

dengan baik, komoditas bawang beserta produk turunnya mempunyai potensi nilai ekonomi yang cukup tinggi.

Gambar 8.22. Alternatif dan Peluang Industri Bawang Merah

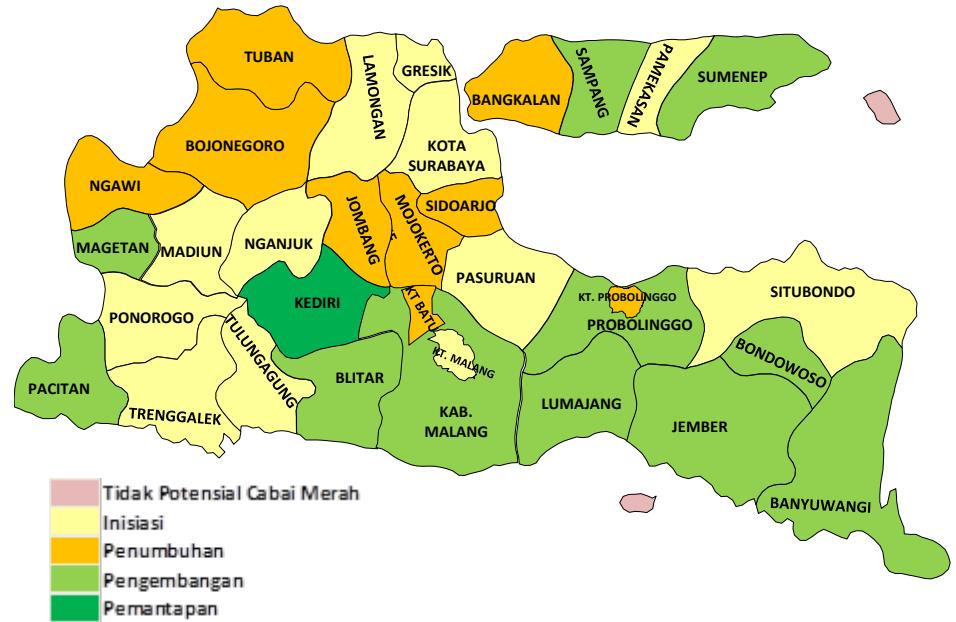


Sumber : *Prospek dan Arah Pengembangan Agrobisnis Bawang Merah , Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2005*

c. Kawasan Cabai Merah

Cabai (*Capsicum Annum var L*) merupakan salah satu komoditas hortikultura yang cukup penting karena selain memiliki nilai ekonomis tinggi juga turut berkontribusi secara signifikan terhadap inflasi, terutama pada saat harga cabai melambung. Fluktuasi harga yang terjadi di pasar eceran disebabkan oleh faktor-faktor yang mempengaruhi sisi penawaran dan proses penyediaan (produksi dan distribusi) cabai merah yang belum sepenuhnya dikuasai para petani.

Gambar 8.23 Peta Kawasan Cabai Merah Tahun 2015



Tabel 8.4. Profil Cabai Merah Jawa Timur Tahun 2015

	Uraian	Kabupaten	Jenis Kawasan Cabai Merah			
			Inisiasi	Penumbuhan	Pengembangan	Pemantapan
Potensi	Rerata luas panen dan produksi < rerata provinsi	Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Situbondo, Mojokerto, Nganjuk, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Pamekasan, Sumenep, Kota Malang, Kota Surabaya	Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Situbondo, Pasuruan, Nganjuk, Madiun, Madiun, Lamongan, Gresik, Pamekasan, Kota Malang, Kota Batu	Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, Kota Probolinggo, Kota Batu	Pacitan Blitar Malang Lumajang Jember Banyuwangi Bondowoso Probolinggo Magetan Sampang Sumenep	Kediri
	Rerata luas panen < rerata provinsi dan produksi > rerata provinsi)	Ponorogo, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Jombang, Madiun, Sampang, Kota Batu				
	Rerata luas panen dan produksi > rerata provinsi	Jember dan Tuban	Kota Surabaya			

ROAD MAP DAN RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KAWASAN

Uraian		Kabupaten	Jenis Kawasan Cabai Merah			
			Inisiasi	Penumbuhan	Pengembangan	Pemantapan
	Rerata produksi dan produktivitas kabupaten > rerata provinsi	Blitar, Kediri, Malang, Lumajang dan Banyuwangi				
Pelaksanaan Kegiatan	Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Kediri, Banyuwangi, Jember, Magetan, Malang, Sampang, Bojonegoro, Blitar, Probolinggo, Pacitan, Bangkalan, Ngawi, Nganjuk, Tuban, Jombang, Lumajang, Bondowoso, Kota Probolinggo, Kota Batu, Mojokerto, Sidoarjo				
	Penerapan <i>Good Agriculture Processing</i>	Kediri, Banyuwangi, Jember, Magetan, Malang, Sampang, Bojonegoro, Blitar, Probolinggo, Pacitan, Nganjuk, Kota Batu, Lumajang, Bondowoso Mojokerto, Sidoarjo				
	Registrasi Lahan Usaha / Kebun	Kediri, Banyuwangi, Magetan, Malang, Sampang, Lumajang, Jember, Blitar, Probolinggo, Pacitan, Nganjuk, Bondowoso				
	Penerapan <i>Good Handling Processing</i>	Kediri				

Sumber

: Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, 2015

Kebutuhan cabai merah setiap tahunnya mengalami kecenderungan peningkatan permintaan untuk kebutuhan sehari-hari. Keunggulan tanaman cabai selain karena digunakan untuk bumbu masak juga sebagai bahan baku industri dan memiliki peluang eksport.

Untuk memenuhi kebutuhan cabai merah diperlukan upaya peningkatan produksi yang mengacu pada peningkatan efisiensi baik ekonomi, mutu maupun produktivitas melalui penerapan teknologi budidaya mulai dari penentuan lokasi, penanganan benih, penanaman, pemeliharaan, hingga penanganan panen yang tepat yang mengacu pada cara budidaya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP).

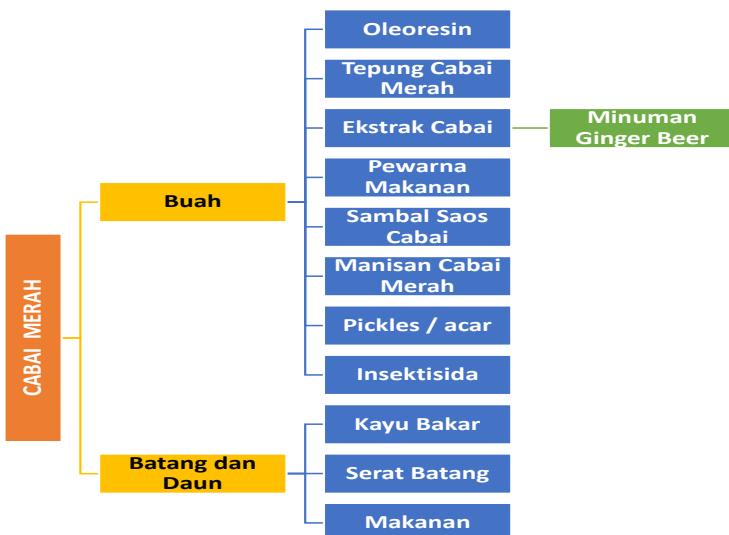
Gambar 8.24. Tahapan Pengembangan Kawasan Tanaman Cabai Merah di Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

		2015	2016	2017	2018	2019
Hulu	Penyediaan sarana prasarana budidaya dan irigasi	Penyediaan sarana prasarana budidaya dan irigasi	Penyediaan sarana prasarana budidaya dan irigasi, perluasan areal, akses permodalan	Penyediaan sarana prasarana budidaya dan irigasi, perluasan areal, akses permodalan	Penyediaan sarana prasarana budidaya dan irigasi, perluasan areal, akses permodalan	Penyediaan sarana prasarana budidaya dan irigasi, perluasan areal, akses permodalan
Onfarm	Sosialisasi & penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan, registrasi lahan usaha, teknologi budidaya off season	Sosialisasi & penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan, registrasi lahan usaha, teknologi budidaya off season	Penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan, registrasi lahan usaha, teknologi budidaya off season	Penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan, registrasi lahan usaha, teknologi budidaya off season	Penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan, registrasi lahan usaha, teknologi budidaya off season	Penerapan GAP/SOP budidaya, GHP, pengendalian OPT, perbenihan, registrasi lahan usaha, teknologi budidaya off season
Pendukung	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya, akses permodalan	ketersediaan benih tahan cuaca ekstrem, demo penggunaan benih tahan hujan, teknologi budidaya off season, gudang benih, peningkatan kualitas SDM budidaya, akses permodalan
Hilir	alat pengolah/pengering,	alat pengolah/pengering	alat pengolah/pengering, Perluasan Pasar, STA/pasar tani,	alat pengolah/pengering, Perluasan Pasar	alat pengolah/pengering, Perluasan Pasar	alat pengolah/pengering Perluasan Pasar

Provinsi Jawa Timur mempunyai potensi sumberdaya alam khususnya lahan kering yang sesuai untuk pengembangan cabai merah. Produksi cabe merah di Jawa Timur dalam lima tahun terakhir (2010-2014) menunjukkan peningkatan rata-rata pertumbuhan sekitar 7,67 persen pertahun. Permasalahan : a) peningkatan produksi cabai yaitu tingkat pengetahuan petani yang masih relatif rendah, keterbatasan modal, lahan garapan yang sempit serta kurangnya ketampilan petani; b) sulitnya mengendalikan harga cabai di pasaran yang sangat fluktuatif karena petani masih

belum konsisten menerapkan pengaturan pola produksi, disisi lain pengaturan pola produksi cabai tersebut harus didukung kegiatan pengolahan hasil (cabai) dan ironisnya harga cabai olahan impor lebih murah dibandingkan olahan petani.

Gambar 8.22. Alternatif dan Peluang Industri Cabai Merah



Sumber : *Teknologi Budidaya Cabai Merah*, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, 2008

8.3. Program / Kegiatan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2015 – 2019

8.3.1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian dan perkebunan untuk mendukung ketahanan dan kemandirian pangan nasional, serta peningkatan ekspor nonmigas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada :

- Pembinaan dan Pengembangan Sarana dan Prasarana Petani
- Pengembangan Jaringan Irigasi Usaha Tani, Desa (JITUT, JIDES)

- c. Pengembangan Pupuk Organik
- d. Pengembangan Usaha Tani Pertanian
- e. Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- f. Pengelolaan Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura
- g. Pembinaan dan Pengembangan Tanaman Pangan
- h. Pembinaan dan Pengembangan Hortikultura
- i. Pengembangan Produksi Benih Hortikultura
- j. Pengembangan Produksi Benih Padi
- k. Pengembangan Produksi Benih Palawija
- l. Sertifikasi Bibit Unggul Pertanian
- m. Pendampingan Pengembangan Sarana dan Prasarana Pertanian (DAK)

8.3.2. Program Pengembangan Agribisnis

Program ini bertujuan memfasilitasi pengembangan usaha agrobisnis yang mencakup usaha di bidang pertanian hulu, on farm (budi daya), hilir (agroindustri), dan usaha jasa pendukungnya yang kuat dan terpadu. Agrobisnis lebih ditekankan pada kegiatan perdagangan, sedangkan agroindustri merupakan kegiatan pengolahan hasil pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, antara lain, pada:

- a. Pengembangan Sistem Agribisnis Melalui Cooperatif Farming
- b. Pengembangan Kualitas dan Mutu Produk Melalui Sistem Good Agricultural Practices (GAP)
- c. Peningkatan Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
- d. Peningkatan Standar Mutu Produk
- e. Peningkatan Pemasaran ProdukProduk Komoditas
- f. Pengembangan Kerjasama Antar Daerah
- g. Pengembangan Kebun Agribisnis Tanaman Pangan dan Hortikultura
- h. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan

8.3.3. Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian

Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas dan daya saing masyarakat pertanian, terutama petani yang tidak dapat menjangkau akses terhadap sumber daya usaha pertanian. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dititikberatkan, pada:

- a. Pelatihan petani dan pelaku agribisnis
- b. Anti Poverty Program (APP) Bidang Pertanian
- c. Pendidikan Kemasyarakatan dalam rangka Mendukung Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- d. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura
- e. Gebyar Hari Krida Pertanian

8.3.4. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Produksi Tanaman Pangan

- a. Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi
- b. Pengelolaan Produksi Tanaman Serelia
- c. Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan
- d. Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan Dari Gangguan OPT dan DPI
- e. Penanganan Pasca Panen Tanaman Pangan
- f. Pengembangan Metode Pengujian Mutu Benih dan Penerapan
- g. Sistem Mutu Laboratorium Pengujian Benih
- h. Pengembangan Peramalan Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan

8.3.5. Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Hasil Hortikultura Ramah Lingkungan

- a. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Buah Berkelaanjutan
- b. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat Berkelaanjutan
- c. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Florikultura Berkelaanjutan
- d. Pengembangan Sistem Perbenihan Hortikultura
- e. Pengembangan Perlindungan Tanaman Hortikultura

8.3.6. Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian

- a. Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian dan Bioindustri
- b. Pengembangan Mutu dan Standarisasi Hasil Pertanian
- c. Pengembangan Usaha dan Investasi
- d. Pengembangan Pemasaran Domestik
- e. Pengembangan Pemasaran Internasional

8.3.7. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

- a. Perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian
- b. Pengelolaan air irigasi untuk pertanian
- c. Penyaluran pupuk bersubsidi
- d. Pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin pertanian
- e. Pelayanan Pembiayaan Pertanian, Pengembangan Usaha
- f. Agribisnis Perdesaan (PUAP)



9

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

PEMANTAUAN EVALUASI DAN PELAPORAN

9

9.1 Pemantauan dan Evaluasi

Secara umum pelaksanaan pemantauan dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan kegiatan pengembangan kawasan dapat berjalan sesuai dengan rencana aksi yang telah disusun. Adapun hasil evaluasi dimaksudkan untuk digunakan sebagai umpan balik dan masukan dalam penyempurnaan dan tindak lanjut perencanaan sesuai tahap-tahap rencana yang tertuang dalam Rencana Aksi.

Prinsip-prinsip umum dari pemantauan dan evaluasi adalah sebagai berikut:

- a. Ruang lingkup waktu pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mulai dari tahap pra pelaksanaan, pelaksanaan dan hasil pelaksanaan yang dilakukan secara reguler tiga bulanan, insidentil dan berjenjang.
- b. Ruang lingkup substansi pemantauan dan evaluasi kegiatan pengembangan kawasan dilakukan terhadap rencana dan realisasi tahapan-tahapan yang tertuang dalam rencana aksi dan mengukur indikator aspek: input, proses, output, outcome, dan impact.
- c. Pelaksana pemantauan dan evaluasi adalah sesuai dengan tanggung jawab tugas dan fungsi organisasi yang telah dibentuk.

Proses dan metode pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun format acuan dan kuesioner umum dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian di Jawa Timur;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan pertanian di kabupaten/kota;
- c. Proses evaluasi dilakukan secara partisipatif yang melibatkan petani dan pelaku usaha sebagai penerima manfaat;
- d. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan:
 - Membandingkan realisasi program/kegiatan dibandingkan dengan targetnya;
 - Menyusun check list kriteria keberhasilan pada aspek manajerial dan teknis;
 - Mengukur progress dari tahapan pengembangan kawasan; dan
 - Identifikasi masalah dan solusi serta usulan tindak lanjut.

9.2 Pelaporan

Pelaporan pengembangan kawasan pertanian lebih difokuskan pada aspek teknis kinerja pengembangan sesuai Master Plan Jawa Timur dan rencana aksi di masing - masing kawasan di Kabupaten. Laporan Kinerja Pengembangan Kawasan merupakan laporan yang bersifat substantif dan komprehensif berbentuk laporan tinjauan hasil tahunan dengan substansi pelaporan menyajikan hasil pemantauan dan evaluasi pengembangan kawasan, mencakup : 1) jenis-jenis kegiatan yang telah dilaksanakan; 2) hasil dari kegiatan berupa output dan outcome sesuai indikator kinerja; 3) check list kriteria keberhasilan baik aspek manajemen dan aspek teknis; 4) capaian tahapan pengembangan kawasan (tahap inisiasi, penumbuhan, pengembangan atau tahap pemantapan kawasan); dan 5) permasalahan, solusi dan usulan tindak lanjut.

Proses dan metode pelaksanaan pelaporan pengembangan kawasan pertanian dilakukan oleh Tim Teknis Provinsi dengan melaporkan pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi serta kinerja pengembangan kawasan pertanian seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur kepada Tim Pembina Pusat melalui Tim Teknis Pusat dan (b) Gubernur /Kepala Daerah melalui Tim Pembina Provinsi.



10

PENUTUP

PENUTUP



10

4.1. Kesimpulan

Dasar pengembangan kawasan di Jawa Timur adalah besarnya potensi sumberdaya alam dan potensi komoditas tanaman pangan dan hortikultura yang dikuatkan dengan kebijakan sektoral dan kebijakan tata ruang wilayah Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian, penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura Jawa Timur sangat diperlukan terutama dalam menjabarkan program dan kegiatan secara efektif dan rasional sesuai dengan potensi, kendala, dan prospek yang ada di Jawa Timur. Secara umum, pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura dilakukan secara intensif melalui Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT) dan *Good Agriculture Practices* (GAP).

Perencanaan Pengembangan Kawasan Jawa Timur disusun secara komprehensif yang berbasis komoditas tanaman pangan dan hortikultura dengan pendekatan agribisnis yang mencakup aspek dengan sasaran strategis:

1. Peningkatan produksi, produktivitas padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk di sentra produksi
2. Peningkatan nilai tambah dan daya saing padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk dalam memenuhi pasar domestik dan ekspor
3. Peningkatan pendapatan keluarga petani di kawasan padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk.

Implementasi Sasaran Strategis tersebut di Jawa Timur melalui : a) Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; b) Program Pengembangan Agribisnis; c) Program Peningkatan Kapasitas SDM Non Aparatur Pertanian. Selanjutnya dalam pelaksanaannya, strategi kedepan :

1. Penguatan sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura;
2. Meningkatkan kapasitas petani dalam mengakses permodalan, dan teknologi;
3. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produksi dan pemasaran hasil pertanian;
5. Penguatan peran dan fungsi kelembagaan petani untuk meningkatkan kemandirian petani.

Dengan memperhitungkan berbagai potensi dan peran strategis masing-masing komoditas dari setiap kabupaten / kota di Jawa Timur, telah ditetapkan 7 (tujuh) kawasan komoditas tanaman pangan dan hortikultura, yaitu : padi, jagung, kedelai, ubi kayu, cabai merah, bawang merah dan jeruk, dengan tipe kawasan :

1. Inisiasi : Jeruk (Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Bondowoso, Probolinggo, Pasuruan, Madiun, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Sumenep, Kota Malang); Bawang Merah (Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Banyuwangi, Situbondo, Jombang, Madiun, Ngawi, Tuban, Lamongan, Gresik, Sumenep, Kota Probolinggo); Cabai Merah (Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Situbondo, Pasuruan, Nganjuk, Madiun, Lamongan, Gresik, Pamekasan, Kota Malang, Kota Surabaya);
2. Penumbuhan : Padi (Pacitan); Ubi Kayu (Pacitan); Jeruk (Pacitan, Ponorogo, Jember, Jombang, Nganjuk, Magetan, Bangkalan, Pamekasan); Bawang Merah (Malang, Lumajang, Sidoarjo, Magetan, Sampang, Kota Batu);

- Cabai Merah (Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Bangkalan, Kota Probolinggo, Kota Batu);
3. Pengembangan : Padi (Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Lumajang, Jember, Nganjuk, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Bojonegoro, Lamongan, Bangkalan, Sampang, Sumenep) dan kedelai (Ngawi dan Trenggalek; Jeruk (Banyuwangi dan Kota Batu); Bawang Merah (Kediri, Bondowoso, Mojokerto, Nganjuk, Bojonegoro, Pamekasan); Cabai Merah (Pacitan, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Probolinggo, Magetan, Sampang, Sumenep);
4. Pemantapan : Padi (Ponorogo, Malang, Pasuruan, Banyuwangi, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Madiun, Magetan, Ngawi, Tuban, Gresik, Pamekasan); Jagung (Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Tuban, Kediri, Situbondo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Blitar, Ngawi, Magetan, Lamongan, Gresik); Kedelai (Ponorogo, Tulungagung, Lumajang, Banyuwangi, Jember, Pasuruan, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Lamongan, Sampang) dan Ubi Kayu (Ponorogo, Trenggalek, Blitar, Kediri, Malang, Pasuruan, Jombang, Magetan, Tuban); Jeruk (Kabupaten Malang); Bawang Merah (Kabupaten Probolinggo); Cabai Merah (Kabupaten Kediri)

5.2. Rencana Tindak Lanjut

Sebagai Rencana Tindak Lanjut disusun skenario pengembangan kawasan tanaman pangan dan hortikultura Jawa Timur :

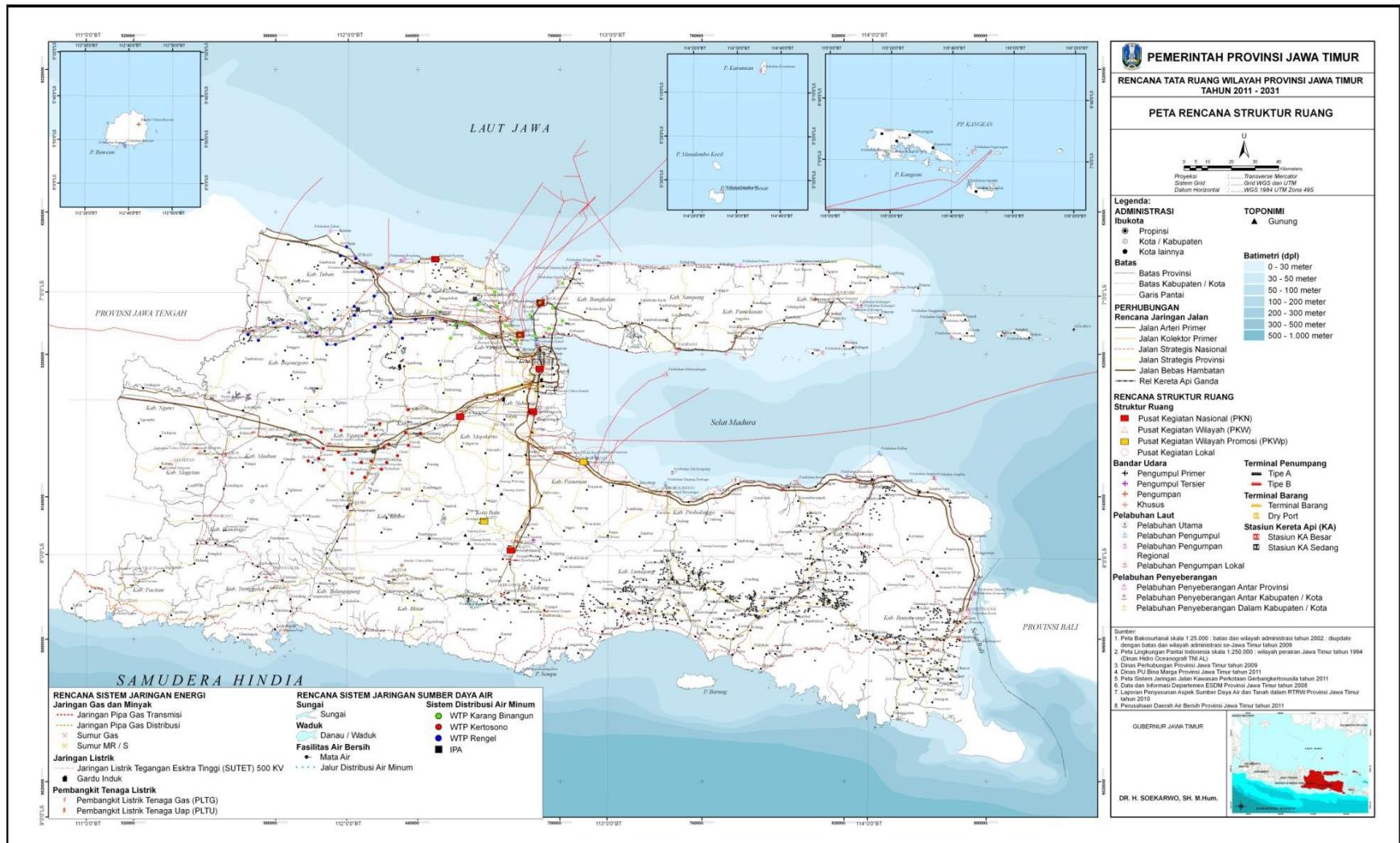
1. Peningkatan Produktivitas Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
2. Peningkatan Indeks Pertanaman (IP) untuk Padi
3. Penurunan Tingkat Kehilangan Hasil Tanaman Pangan Dan Hortikultura;
4. Peningkatan Nilai Tambah Dan Daya Saing Tanaman Pangan Dan Hortikultura Melalui Pengembangan Industri Olahan ;



LAMPIRAN

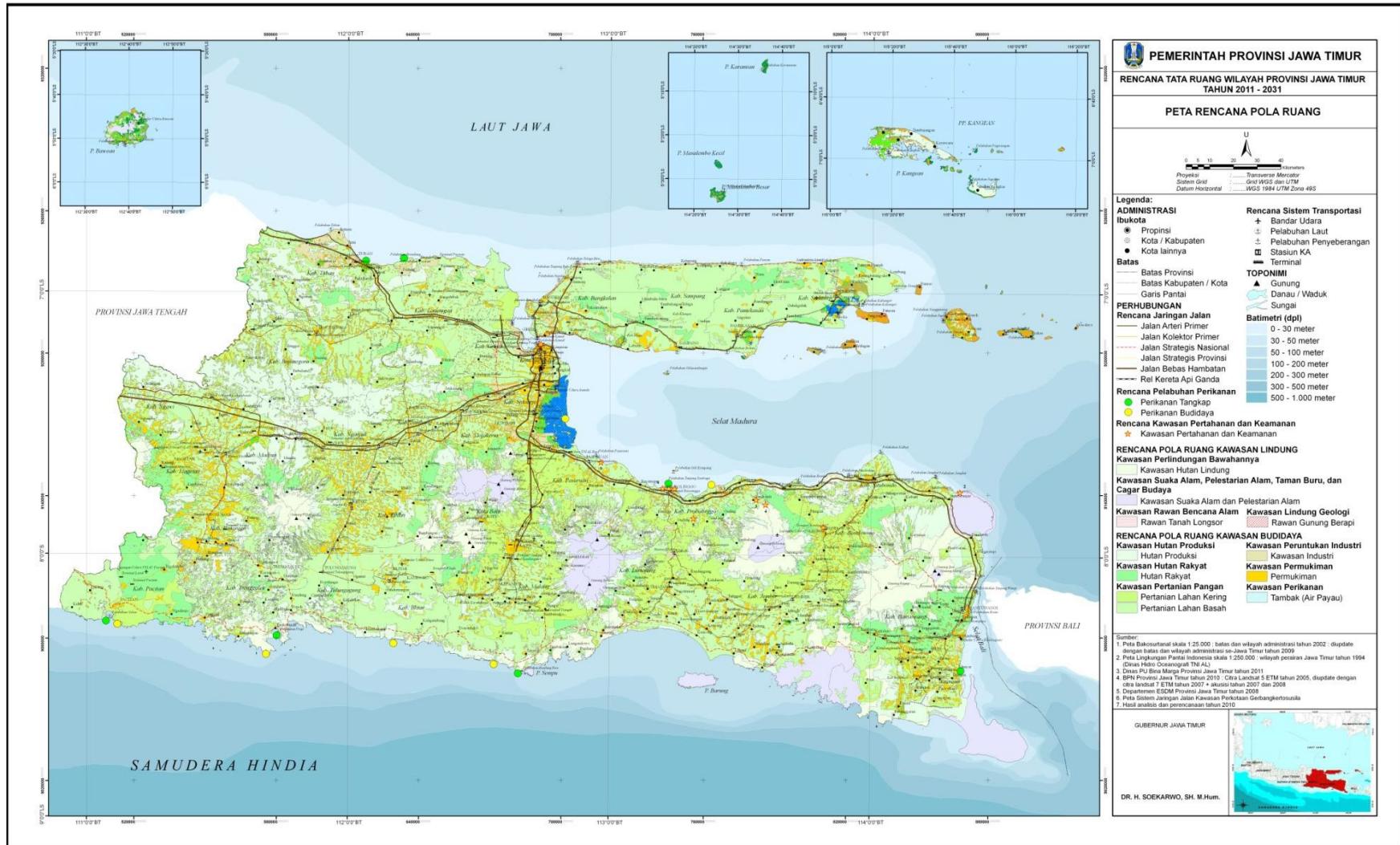
0 | Masterplan Pengembangan Kawasan Tanaman Pangan dan Hortikultura
Jawa Timur Tahun 2015 – 2019

Lampiran 1 : Peta Rencana Struktur Ruang Provinsi Jawa Timur (Dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur, 2012)

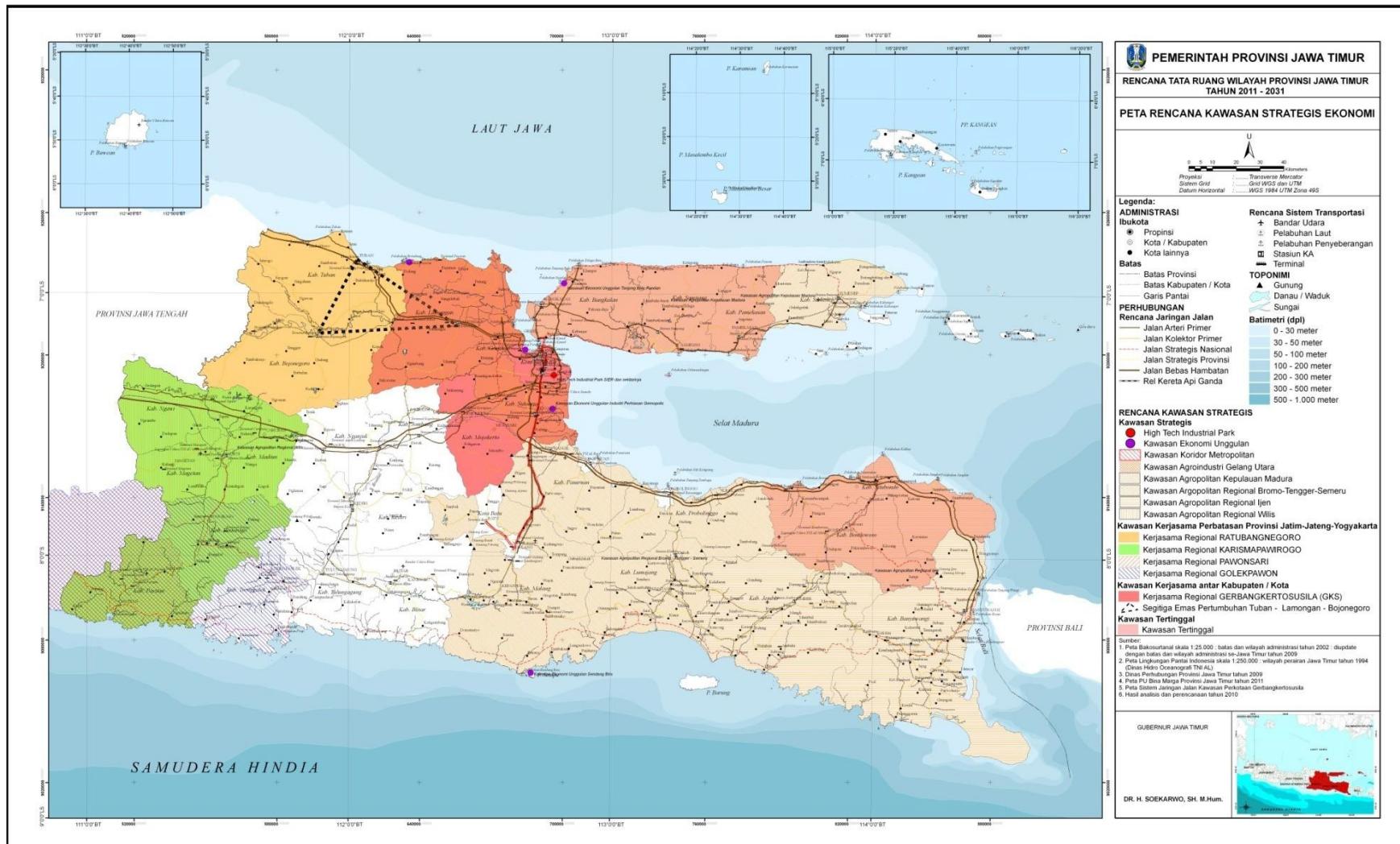


lampiran

Lampiran 2 : Peta Rencana Pola Ruang Provinsi Jawa Timur, (Dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur, 2012)

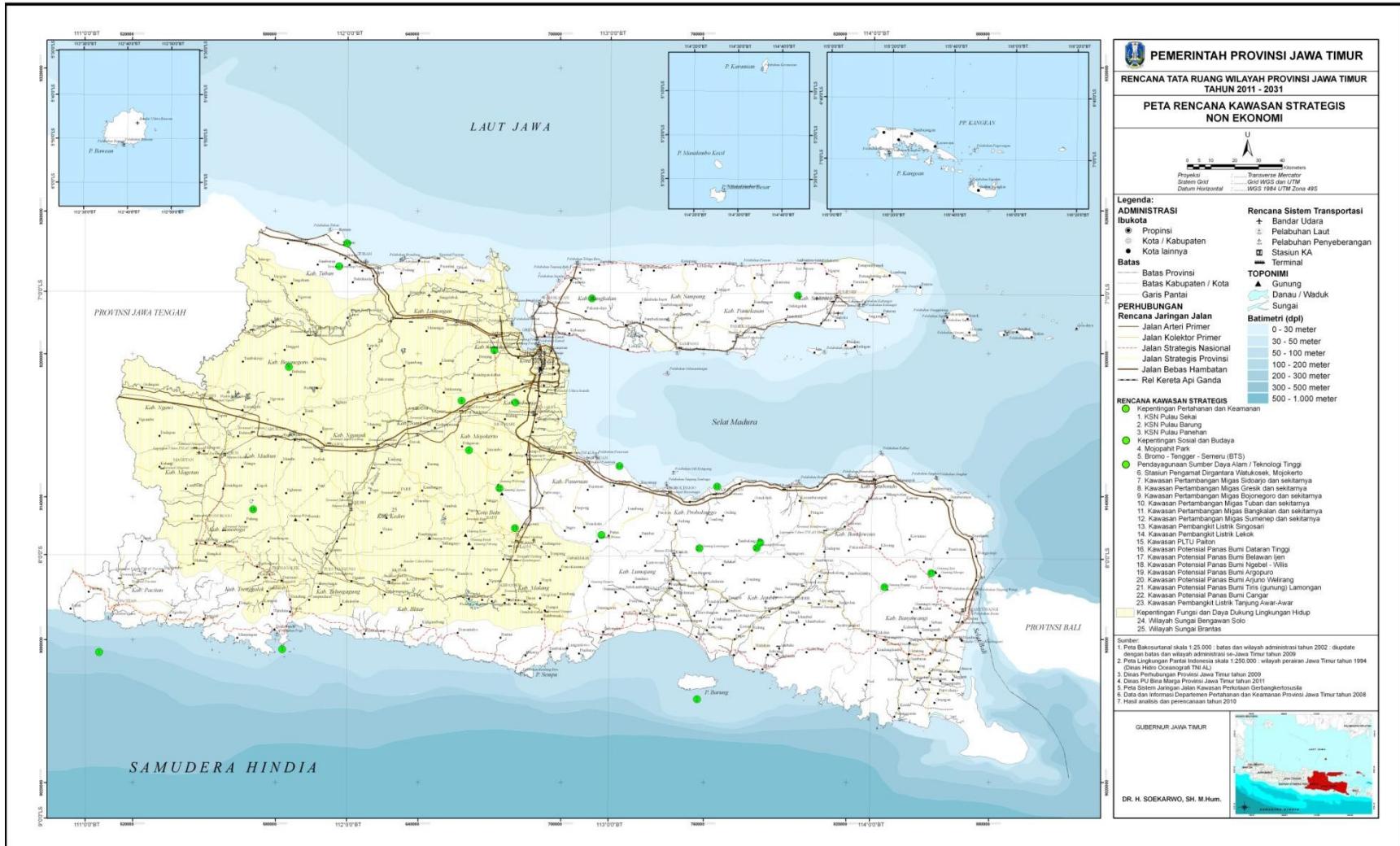


Lampiran 3 : Peta Rencana Kawasan Strategis Ekonomi Provinsi Jawa Timur (Dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur, 2012)



lampiran

Lampiran 4 : Peta Kawasan Strategis Non Ekonomi (Pertahanan Dan Keamanan, Kepentingan Sosial Dan Budaya, Pendayagunaan Sumber Daya Alam/Teknologi Tinggi, Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan) Provinsi Jawa Timur (Dokumen RTRW Provinsi Jawa Timur, 2012)



Lampiran 5 : Keadaan Cuaca Bulanan Jawa Timur Tahun 2010 - 2014 (BPS Provinsi Jawa Timur dalam Provinsi Jawa Timur dalam Angka, Tahun 2010-2014)

Tahun	Bulan	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Jumlah	Rata-rata
2010	Suhu Maksimum (°C)	34,8	33,8	34,5	33,8	33,2	33,4	33,4	33,0	34,3	34,4	34,8	33,4	406,8	33,9
	Suhu Minimum (°C)	22,4	14,8	22,8	23,2	21,2	23,2	21,3	22,7	23,8	22,8	23,4	22,2	263,8	22,0
	Kelembaban Rata-rata (%)	75,5	76,5	75,5	77,5	78,5	73,5	69,5	70,5	68,5	72,0	74,5	74,0	886,0	73,8
	Curah Hujan (mm)	581,7	487,6	313,5	140,8	373,8	91,9	135,8	16,0	129,0	269,0	140,8	214,9	2.894,8	241,2
	Lama Penyinaran (%)	41,9	89,0	66,0	45,0	50,0	60,2	80,2	91,6	70,3	59,4	62,7	24,3	740,6	61,7
	Jumlah	935,9	879,0	692,0	503,8	740,9	457,5	506,6	402,7	492,0	630,2	514,3	544,6	7.299,3	608,3
	Rata-rata	117,0	109,9	86,5	63,0	92,6	57,2	63,3	50,3	61,5	78,8	64,3	68,1	912,4	76,0
2011	Suhu Maksimum (°C)	33,3	33,6	33,7	32,7	32,6	32,6	31,8	32,4	33,4	34,8	34,6	34,2	399,7	33,3
	Suhu Minimum (°C)	23,0	23,0	23,0	23,0	23,5	20,4	20,6	20,0	21,7	22,6	23,5	22,9	267,2	22,3
	Kelembaban Rata-rata (%)	75,5	76,5	76,0	75,5	73,5	68,5	67,5	67,5	66,5	63,0	71,5	77,0	858,5	71,5
	Curah Hujan (mm)	230,5	212,8	398,5	140,8	156,8	31,3	30,7	-	-	9,7	260,9	317,1	1.789,1	149,1
	Lama Penyinaran (%)	40,6	43,0	54,0	48,0	72,3	92,1	94,2	92,5	93,9	92,0	63,6	42,7	828,9	69,1
	Jumlah	582,1	570,2	765,6	498,9	533,8	408,4	406,0	373,6	376,1	376,8	626,2	676,5	6.193,9	516,2
	Rata-rata	72,8	71,3	95,7	62,4	66,7	51,1	50,8	46,7	47,0	47,1	78,3	84,6	774,2	64,5
2012	Suhu Maksimum (°C)	34,6	33,6	32,7	33,4	32,7	32,0	32,4	33,1	33,4	35,1	35,4	34,3	402,7	33,6
	Suhu Minimum (°C)	23,5	23,1	22,8	24,1	22,7	21,5	20,6	20,6	20,6	23,5	24,6	22,4	270,0	22,5
	Kelembaban Rata-rata (%)	75,0	74,0	71,5	74,0	70,5	72,0	69,0	68,5	62,5	60,0	65,5	76,5	839,0	69,9
	Curah Hujan (mm)	445,9	179,1	210,9	140,8	114,0	67,7	-	-	-	2,1	58,0	171,0	1.389,5	115,8
	Lama Penyinaran (%)	18,0	61,0	45,0	83,0	79,0	87,0	89,0	97,0	98,0	94,0	76,0	48,0	875,0	72,9
	Jumlah	776,1	547,2	553,7	532,1	487,6	451,0	375,5	383,1	366,5	364,0	420,5	533,6	5.790,6	482,5
	Rata-rata	97,0	68,4	69,2	66,5	61,0	56,4	46,9	47,9	45,8	45,5	52,6	66,7	723,8	60,3
2013	Suhu Maksimum (°C)	33,8	34,0	34,1	33,2	33,2	32,0	32,4	33,1	33,7	35,8	35,4	33,9	404,6	33,7
	Suhu Minimum (°C)	23,5	23,6	23,4	24,2	23,8	21,5	20,6	20,6	21,6	22,5	22,2	23,6	271,1	22,6
	Kelembaban Rata-rata (%)	77,0	75,5	72,0	79,5	75,5	79,5	71,5	66,5	62,0	64,5	70,0	72,0	865,5	72,1
	Curah Hujan (mm)	364,9	287,0	461,1	140,8	195,8	239,5	109,2	0,6	0,2	3,6	108,0	359,3	2.270,0	189,2
	Lama Penyinaran (%)	49,0	47,0	68,0	54,0	52,0	44,0	58,0	95,0	93,0	91,0	41,0	51,0	743,0	61,9
	Jumlah	730,9	646,9	831,4	519,4	559,8	602,3	461,2	375,7	362,2	375,6	445,4	712,6	6.623,1	551,9
	Rata-rata	91,4	80,9	103,9	64,9	70,0	75,3	57,7	47,0	45,3	46,9	55,7	89,1	827,9	69,0
2014	Suhu Maksimum (°C)	33,4	34,0	33,5	35,0	33,0	34,0	32,0	32,0	34,0	35,0	31,3	34,8	402,0	33,5
	Suhu Minimum (°C)	22,6	22,4	23,1	23,4	23,2	23,3	21,2	21,1	21,0	22,5	28,7	22,8	275,3	22,9
	Kelembaban Rata-rata (%)	77,0	78,0	75,0	76,0	70,5	75,5	73,0	68,0	55,0	57,0	63,0	76,5	844,5	70,4
	Curah Hujan (mm)	258,7	247,1	455,1	273,0	104,7	201,8	47,8	-	-	-	72,4	319,6	1.980,2	165,0
	Lama Penyinaran (%)	42,0	40,0	74,0	54,0	86,0	89,0	90,0	99,0	67,0	98,0	81,0	33,0	853,0	71,1
	Jumlah	615,7	605,7	839,0	642,6	486,5	603,3	436,6	382,7	314,5	355,3	432,4	668,5	6.382,7	531,9
	Rata-rata	77,0	75,7	104,9	80,3	60,8	75,4	54,6	47,8	39,3	44,4	54,1	83,6	797,8	66,5

Lampiran 6 : Penggunaan Lahan Sawah dan Lahan Pertanian Bukan Sawah (ha) per Kabupaten/kota Tahun 2010 – 2014, ((BPS Provinsi Jawa Timur dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur, Rekapitulasi Luas Baku Lahan Menurut Jenis Lahan, 27 Maret 2015)

Kabupaten / Kota	Luas Sawah yang Ditanami Padi (hektar)					Lahan Pertanian Bukan Sawah (hektar)					2014		
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	Tegal/ kebun	Ladang	Smntr tdk Diusahakan	Total
Pacitan	13.040	12.945	12.829	12.743	12.418	52.377	50.133	51.343	51.343	309	-	51.652	51.961
Ponorogo	34.800	34.800	34.800	34.326	34.338	39.119	39.119	36.013	36.013	-	-	36.013	36.013
Trenggalek	11.782	11.938	11.696	11.864	11.628	26.433	26.128	26.361	26.361	1.481	-	27.842	29.323
Tulungagung	25.368	25.201	25.429	25.361	25.873	26.743	26.676	33.453	33.453	222	143	33.818	34.183
Blitar	31.048	31.108	33.845	31.111	31.056	45.063	45.698	45.182	45.182	1.766	124	47.072	48.962
Kediri	39.415	40.951	41.065	41.229	39.147	27.831	27.279	26.634	26.634	565	-	27.199	27.764
Malang	43.855	43.812	39.777	39.820	40.537	104.263	104.512	96.565	96.565	6.275	-	102.840	109.115
Lumajang	34.581	34.607	34.304	34.030	34.416	56.307	55.720	55.931	55.931	-	148	56.079	56.227
Jember	81.286	79.643	79.299	74.592	76.963	32.021	33.398	31.941	31.941	2.291	1.178	35.410	38.879
Banyuwangi	62.132	61.752	62.028	59.819	59.070	35.495	35.648	35.438	35.438	-	74	35.512	35.586
Bondowoso	33.264	33.257	33.264	34.080	34.030	31.869	30.995	30.063	30.063	-	-	30.063	30.063
Situbondo	31.531	32.131	32.923	32.252	32.301	32.487	32.636	31.341	31.341	1.155	274	32.770	34.199
Probolinggo	36.273	36.131	36.446	36.376	36.198	51.640	51.153	50.798	50.798	-	12	50.810	50.822
Pasuruan	39.177	39.641	39.415	40.189	40.203	45.850	45.835	45.079	45.079	833	15	45.927	46.775
Sidoarjo	22.701	21.736	21.551	21.090	20.771	1.531	1.525	1.225	1.225	-	280	1.505	1.785
Mojokerto	29.590	29.421	30.457	30.599	30.837	12.073	12.385	11.780	11.780	485	36	12.301	12.822
Jombang	42.665	42.938	42.914	43.091	43.430	10.392	10.321	10.541	10.541	-	-	10.541	10.541
Nganjuk	41.859	41.859	39.919	41.135	42.603	10.512	18.539	18.538	18.538	313	-	18.851	19.164
Madiun	30.312	30.591	31.007	30.930	31.002	9.671	9.587	10.336	10.336	-	-	10.336	10.336
Magetan	22.617	22.576	23.129	22.944	22.599	14.105	14.105	12.650	12.650	-	-	12.650	12.650
Ngawi	47.802	47.464	48.231	48.291	47.207	17.202	17.920	17.842	17.842	233	-	18.075	18.308
Bojonegoro	76.601	75.659	76.152	78.683	77.636	43.801	39.826	23.521	23.521	15.772	14	39.307	55.093
Tuban	54.912	55.103	55.264	55.443	55.117	66.463	70.183	72.724	72.724	225	50	72.999	73.274
Lamongan	82.826	83.144	89.301	84.237	83.844	32.028	32.064	28.561	28.561	3.350	-	31.911	35.261
Gresik	37.381	36.683	37.541	37.786	37.875	26.731	26.637	21.648	21.648	1.133	2.361	25.142	28.636
Bangkalan	29.380	29.378	29.154	29.000	29.540	66.739	64.754	61.240	61.240	975	2.247	64.462	67.684
Sampang	20.506	20.090	20.096	20.115	20.087	80.765	80.765	78.514	78.514	-	2.251	80.765	83.016
Pamekasan	14.118	15.725	17.106	17.048	17.056	46.780	46.675	46.186	46.186	-	3	46.189	46.192
Sumenep	24.312	24.312	24.549	24.477	24.834	118.743	119.305	121.235	121.235	71	5.173	126.479	131.723
Kota Kediri	1.338	1.328	1.060	1.097	952	643	643	560	560	66	-	626	692
Kt Blitar	1.141	1.134	1.120	1.120	1.104	38	35	35	35	-	-	35	35
Kt Malang	1.070	1.070	991	943	926	1.603	1.663	1.631	1.631	-	4	1.635	1.639
Kt Pr.lingga	1.866	1.865	1.832	1.832	1.764	614	637	614	614	-	-	614	614
Kt Pasuruan	1.167	1.153	1.148	1.101	1.093	488	664	493	493	-	8	501	509
Kt Mojokerto	601	591	590	584	520	130	130	130	130	-	-	130	130
Kt Madiun	1.098	1.098	912	906	893	220	186	152	152	-	-	152	152
Kta Surabaya	1.754	1.642	1.597	1.577	1.423	1.513	1.246	1.840	1.840	-	875	2.715	3.590
Kt Batu	2.107	1.972	1.263	1.042	474	5.945	3.321	3.314	3.314	-	-	3.314	3.314
JAWA TIMUR	1.107.276	1.106.449	1.114.004	1.102.863	1.101.765	1.176.228	1.178.046	1.141.452	1.141.452	37.520	15.270	1.194.242	1.247.032

Lampiran 7 : Proyeksi Penduduk Pertengaham Tahun Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2010 – 2014, (BPS Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka Tahun 2014 dan 2015)

Kabupaten	Jumlah Penduduk (jiwa)					Kepadatan Penduduk (jiwa /km²)				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Pacitan	541.799	543.904	545.905	547.917	549.481	382,0	384,0	381,0	382,0	387,0
Ponorogo	856.682	859.302	861.806	863.890	865.809	576,0	578,0	605,0	606,0	612,0
Trenggalek	675.584	678.792	681.706	683.791	686.781	543,0	545,0	542,0	544,0	552,0
Tulungagung	992.317	998.707	1.004.711	1.009.411	1.015.974	862,0	868,0	867,0	871,0	883,0
Blitar	1.118.919	1.124.775	1.130.423	1.136.701	1.140.793	638,0	638,0	640,0	644,0	651,0
Kediri	1.503.095	1.512.610	1.521.895	1.530.504	1.538.929	988,0	994,0	992,0	998,0	1011
Malang	2.451.997	2.471.990	2.490.878	2.508.698	2.527.087	709,0	715,0	716,0	721,0	731,0
Lumajang	1.008.486	1.013.403	1.017.900	1.023.818	1.026.378	558,0	561,0	561,0	564,0	569,0
Jember	2.337.909	2.353.025	2.367.482	2.381.400	2.394.608	698,0	703,0	714,0	718,0	722,0
Banyuwangi	1.559.088	1.567.084	1.574.528	1.582.586	1.588.082	433,0	435,0	437,0	439,0	442,0
Bondowoso	738.383	743.369	748.127	752.791	756.989	470,0	473,0	481,0	484,0	482,0
Situbondo	649.092	653.609	657.874	660.702	666.013	392,0	395,0	395,0	397,0	403,0
Probolinggo	1.099.011	1.107.923	1.116.390	1.123.204	1.132.690	662,0	668,0	646,0	650,0	664,0
Pasuruan	1.516.492	1.530.287	1.543.723	1.556.711	1.569.507	1.020,0	1029	1035	1043	1056
Sidoarjo	1.949.595	1.983.271	2.016.974	2.048.986	2.083.924	2.712,0	2758	2794	2838	2898
Mojokerto	1.028.605	1.039.299	1.049.886	1.057.808	1.070.486	1.056,0	1067	1071	1079	1099
Jombang	1.205.114	1.212.881	1.220.404	1.230.881	1.234.501	1.082,0	1089	1082	1091	1108
Nganjuk	1.019.018	1.024.105	1.028.914	1.033.597	1.037.723	794,0	798,0	791,0	795,0	808,0
Madiun	663.476	666.305	669.088	671.883	673.988	656,0	659,0	593,0	596,0	602,0
Magetan	621.274	622.902	624.373	625.703	626.614	881,0	884,0	877,0	879,0	888,0
Ngawi	818.989	820.880	822.605	824.587	827.829	588,0	590,0	585,0	587,0	594,0
Bojonegoro	1.212.301	1.217.775	1.223.079	1.227.704	1.232.386	524,0	526,0	525,0	527,0	532,0
Tuban	1.120.910	1.127.884	1.134.584	1.141.497	1.147.097	567,0	571,0	569,0	573,0	580,0
Lamongan	1.180.699	1.182.808	1.184.581	1.186.382	1.187.084	671,0	672,0	673,0	674,0	675,0
Gresik	1.180.974	1.196.516	1.211.686	1.227.101	1.241.613	954,0	966,0	969,0	981,0	1003
Bangkalan	909.398	918.813	928.024	937.497	945.821	698,0	705,0	708,0	716,0	726,0
Sampang	880.696	892.301	903.613	913.499	925.911	716,0	725,0	735,0	743,0	750,0
Pamekasan	798.605	808.114	817.690	827.407	836.224	1.002,0	1014	1020	1032	1051
Sumenep	1.044.588	1.050.678	1.056.415	1.061.211	1.067.202	499,0	499,0	505,0	508,0	512,0
KotaKediri	269.193	271.511	273.695	276.619	278.072	3.901,0	3935	4085	4129	4030
KotaBlitar	132.383	133.492	134.723	135.702	136.903	4.012,0	4045	4083	4112	4149
KotaMalang	822.201	828.491	834.527	840.803	845.973	7.475,0	7532	7587	7644	7691
KotaProbolinggo	217.679	220.102	222.292	223.881	226.777	4.031,0	4076	3970	3998	4200
KotaPasuruan	186.805	188.414	190.191	192.285	193.329	4.916,0	4958	5005	5060	5088
KotaMojokerto	120.623	121.517	122.594	123.806	124.719	6.031,0	6076	6130	6190	6236
KotaMadiun	171.305	172.073	172.886	174.114	174.373	5.038,0	5061	5085	5121	5129
KotaSurabaya	2.771.615	2.788.932	2.805.718	2.821.929	2.833.924	8.373,0	8426	8502	8551	8562
KotaBatu	190.806	192.813	194.700	196.189	198.608	945,0	955,0	974,0	981,0	983,0
JawaTimur	37.565.706	37.840.657	38.106.590	38.363.195	38.610.202	783,0	789,0	791,0	795,0	804,0

lampiran

Lampiran 8 : Jumlah Rumah Tangga Usaha Pertanian Pengguna Lahan dan Rumah Tangga Petani Gurem, ST2003 dan ST2013

Kabupaten / Kota	Rumah Tangga Usaha Pertanian				Rumah Tangga Petani Gurem			
	ST 2003	ST 2013	Perubahan		ST 2003	ST 2013	Perubahan	
			Absolut	%			Absolut	%
Pacitan	137.825	132.020	(5.805)	(4,21)	79.179	86.748	7.569	9,56
Ponorogo	202.180	178.919	(23.261)	(11,51)	165.558	149.523	(16.035)	(9,69)
Trenggalek	158.554	146.472	(12.082)	(7,62)	124.993	122.215	(2.778)	(2,22)
Tulungagung	199.324	146.856	(52.468)	(26,32)	172.648	120.481	(52.167)	(30,22)
Blitar	250.904	208.639	(42.265)	(16,85)	197.736	164.755	(32.981)	(16,68)
Kediri	268.856	198.299	(70.557)	(26,24)	229.239	163.429	-65.81	(28,71)
Malang	382.765	327.769	(54.996)	(14,37)	284.976	234.946	-50.03	(17,56)
Lumajang	197.985	168.536	(29.449)	(14,87)	155.247	126.419	(28.828)	(18,57)
Jember	454.747	323.709	(131.038)	(28,82)	387.522	257.248	(130.274)	(33,62)
Banyuwangi	274.574	215.079	(59.495)	(21,67)	216.369	160.708	(55.661)	(25,73)
Bondowoso	178.543	148.479	(30.064)	(16,84)	143.665	116.509	(27.156)	(18,90)
Situbondo	153.190	128.580	(24.610)	(16,07)	124.073	100.589	(23.484)	(18,93)
Probolinggo	235.335	188.084	(47.251)	(20,08)	189.903	145.882	(44.021)	(23,18)
Pasuruan	228.055	178.611	(49.444)	(21,68)	182.951	141.029	(41.922)	(22,91)
Sidoarjo	111.687	40.382	(71.305)	(63,84)	99.006	30.980	(68.026)	(68,71)
Mojokerto	159.106	93.561	(65.545)	(41,20)	133.699	73.656	(60.043)	(44,91)
Jombang	204.003	124.298	(79.705)	(39,07)	174.164	96.743	(77.421)	(44,45)
Nganjuk	219.096	165.573	(53.523)	(24,43)	187.896	134.937	(52.959)	(28,19)
Madiun	146.326	111.207	(35.119)	(24,00)	125.209	87.104	(38.105)	(30,43)
Magetan	140.788	102.778	(38.010)	(27,00)	118.599	83.430	(35.169)	(29,65)
Ngawi	212.577	168.168	(44.409)	(20,89)	175.286	129.474	(45.812)	(26,14)
Bojonegoro	273.650	239.582	(34.068)	(12,45)	203.919	168.354	(35.565)	(17,44)
Tuban	224.436	196.956	(27.480)	(12,24)	147.024	115.043	(31.981)	(21,75)
Lamongan	222.476	186.624	(35.852)	(16,11)	153.218	116.568	-36.65	(23,92)
Gresik	127.353	98.164	(29.189)	(22,92)	94.794	65.652	(29.142)	(30,74)
Bangkalan	160.256	138.473	(21.783)	(13,59)	122.857	114.750	(8.107)	(6,60)
Sampang	172.101	158.903	(13.198)	(7,67)	129.648	134.069	4.421	3,41
Pamekasan	146.850	141.602	(5.248)	(3,57)	105.046	108.186	3.14	2,99
Sumenep	248.910	219.699	(29.211)	(11,74)	180.754	160.362	(20.392)	(11,28)
Kota Kediri	8.406	4.418	(3.988)	(47,44)	7.647	3.594	(4.053)	(53,00)
Kota Blitar	9.656	4.917	(4.739)	(49,08)	9.056	4.329	(4.727)	(52,20)
Kota Malang	16.417	6.038	(10.379)	(63,22)	14.520	4.933	(9.587)	(66,03)
Kota Probolinggo	12.815	9.687	(3.128)	(24,41)	11.887	8.820	(3.067)	(25,80)
Kota Pasuruan	4.796	3.306	(1.490)	(31,07)	4.249	2.581	(1.668)	(39,26)
Kota Mojokerto	3.566	1.482	(2.084)	(58,44)	3.362	1.211	(2.151)	(63,98)
Kota Madiun	9.421	2.350	(7.071)	(75,06)	8.918	1.929	(7)	(78,37)
Kota Surabaya	12.973	5.949	(7.024)	(54,14)	12.184	4.177	(8)	(65,72)
Kota Batu	18.979	17.337	(1.642)	(8,65)	16.625	14.474	(2)	(12,94)
Jawa Timur	6.189.481	4.931.506	(1.257.975)	(20,32)	4.893.626	3.755.837	(1.137.789)	(23,25)

Lampiran 9 : Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Jeruk Siam, Cabai Merah dan Bawang Merah Jawa Timur Tahun 2010 - 2014
 (Data ATAP BPS Provinsi Jawa Timur)

Kabupaten / Kota	Padi (ton)						Jagung (ton)					
	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
Pacitan	153.328	160.269	172.688	186.386	160.364	166.607	108.848	91.521	147.641	102.294	101.887	110.438
Ponorogo	398.144	300.603	406.678	402.047	420.357	385.566	180.962	171.036	243.408	246.564	193.720	207.138
Trenggalek	165.343	148.379	167.222	182.848	169.560	166.671	62.249	64.970	74.238	59.444	76.415	67.463
Tulungagung	271.668	266.658	299.755	259.581	289.083	277.349	52.173	151.730	232.657	262.850	256.180	191.118
Blitar	314.297	326.780	303.332	289.494	302.958	307.372	229.722	235.543	317.255	273.529	321.769	275.564
Kediri	314.594	300.889	306.175	281.392	286.003	297.810	301.446	262.405	316.025	300.068	318.023	299.593
Malang	407.564	444.990	416.607	464.498	438.116	434.355	320.086	297.302	272.764	306.479	285.630	296.452
Lumajang	396.411	357.761	408.635	387.168	400.617	390.118	147.930	161.552	190.905	167.234	135.772	160.679
Jember	851.598	813.514	968.505	964.001	978.373	915.198	360.153	404.403	418.141	384.881	390.759	391.667
Banyuwangi	788.742	695.962	732.262	706.419	747.808	734.238	190.989	178.683	133.402	120.911	137.031	152.203
Bondowoso	336.968	304.025	317.439	329.557	316.465	320.891	181.167	209.137	182.305	179.348	154.920	181.375
Situbondo	234.719	213.330	266.005	290.954	253.556	251.713	216.016	206.315	257.174	301.733	265.725	249.393
Probolinggo	276.932	304.197	302.572	311.258	292.546	297.501	324.623	272.464	345.079	318.557	233.783	298.901
Pasuruan	574.679	585.734	571.510	624.198	661.321	603.488	156.476	178.343	199.534	215.836	233.623	196.762
Sidoarjo	187.963	157.883	203.573	179.873	202.309	186.320	571	537	799	446	217	514
Mojokerto	309.678	276.301	306.881	316.213	301.178	302.050	150.779	116.801	135.107	122.617	109.252	126.911
Jombang	463.979	380.819	462.628	432.173	431.175	434.155	194.233	185.524	242.795	197.353	233.448	210.671
Nganjuk	429.348	411.107	507.670	406.786	471.760	445.334	200.083	239.197	267.650	235.951	213.160	231.208
Madiun	409.094	399.810	499.679	466.125	520.417	459.025	43.706	39.041	33.472	29.029	30.560	35.162
Magetan	277.488	262.993	288.756	305.327	303.495	287.612	78.404	82.707	77.064	76.738	79.210	78.825
Ngawi	668.024	574.224	708.694	776.937	738.304	693.237	88.847	100.236	111.907	143.718	169.113	122.764
Bojonegoro	900.328	675.697	808.112	806.548	847.857	807.708	196.102	155.396	171.877	166.519	190.611	176.101
Tuban	493.106	454.177	576.738	503.395	537.665	513.016	459.299	480.822	515.919	431.786	454.782	468.522
Lamongan	838.596	601.505	856.890	846.275	959.135	820.480	281.998	280.650	348.883	261.706	316.607	297.969
Gresik	330.864	272.323	386.435	367.902	376.553	346.815	111.438	93.869	155.010	121.085	120.364	120.353
Bangkalan	225.277	253.693	259.861	295.178	312.080	269.218	168.050	174.455	120.993	127.527	136.712	145.547
Sampang	217.984	213.821	245.536	217.955	242.174	227.494	151.750	113.265	161.738	108.645	95.332	126.146
Pamekasan	130.991	147.232	178.801	148.663	152.341	151.606	116.894	147.192	150.308	95.338	113.245	124.595
Sumenep	177.575	176.175	160.365	205.636	189.670	181.884	477.924	310.056	420.796	359.689	324.330	378.559
Kota Kediri	13.890	15.040	9.770	11.153	9.586	11.888	3.499	6.217	6.887	6.020	5.713	5.667
Kota Blitar	12.429	8.474	10.899	9.391	9.464	10.131	5.003	7.354	6.932	8.340	9.318	7.390
Kota Malang	11.087	11.523	12.563	11.285	13.271	11.946	1.432	867	916	937	620	954
Kota Probolinggo	11.596	9.627	13.178	11.939	14.109	12.090	19.594	20.749	32.342	26.682	27.786	25.431
Kota Pasuruan	12.299	13.825	19.830	15.128	15.732	15.363	116	-	-	-	-	23
Kota Mojokerto	4.785	4.683	6.674	3.768	4.221	4.826	74	30	-	-	30	27
Kota Madiun	12.523	14.150	17.135	16.425	14.325	14.912	-	-	-	-	-	-
Kota Surabaya	12.842	13.120	13.776	11.057	9.448	12.049	391	661	493	222	316	417
Kota Batu	7.037	5.250	4.878	4.409	3.653	5.045	4.291	2.675	2.885	884	1.419	2.431
Jawa Timur	11.643.773	10.576.543	12.198.707	12.049.342	12.397.049	11.773.083	5.587.318	5.443.705	6.295.301	5.760.959	5.737.382	5.764.933

lampiran

Lanjutan ...

Kabupaten / Kota	Kedelai (ton)						Ubi Kayu (ton)					
	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
Pacitan	4.811	4.297	3.853	3.908	4.996	4.373	325.342	563.230	486.383	355.366	439.828	434.030
Ponorogo	35.474	23.547	21.200	15.311	22.371	23.581	640.997	595.943	705.280	578.494	582.880	620.719
Trenggalek	2.169	6.789	8.746	6.523	8.683	6.582	343.894	380.313	441.121	271.968	319.567	351.373
Tulungagung	2.654	10.998	10.577	6.162	7.820	7.642	140.311	180.423	146.588	127.168	175.384	153.975
Blitar	9.571	9.821	12.390	15.012	10.682	11.495	68.875	138.332	157.732	109.165	83.018	111.424
Kediri	326	633	408	131	316	363	110.755	94.145	102.650	81.189	175.957	112.939
Malang	868	677	137	774	502	592	280.762	451.011	396.749	335.980	476.891	388.279
Lumajang	3.632	5.287	2.119	1.770	3.933	3.348	50.803	33.962	39.289	32.193	70.504	45.350
Jember	19.321	23.004	27.232	21.108	23.868	22.907	48.645	52.587	47.803	41.679	59.733	50.089
Banyuwangi	53.464	61.767	49.208	55.116	49.277	53.766	45.403	48.477	39.848	37.821	37.467	41.803
Bondowoso	1.103	122	83	47	77	286	151.423	125.237	142.940	117.918	106.739	128.852
Situbondo	2.346	592	205	6	9	632	4.308	720	9.239	8.253	4.497	5.403
Probolinggo	3.182	1.070	544	333	215	1.069	110.006	89.803	125.875	146.356	92.727	112.953
Pasuruan	26.694	21.649	24.164	19.290	20.960	22.551	162.725	108.997	157.224	98.576	67.846	119.074
Sidoarjo	885	1.870	989	534	1.426	1.141	-	-	122	-	-	24
Mojokerto	5.821	4.339	4.953	4.964	4.623	4.940	26.491	15.036	33.733	27.069	54.898	31.445
Jombang	11.602	8.294	12.744	8.248	10.822	10.342	35.253	28.626	33.941	13.897	12.261	24.796
Nganjuk	13.154	24.905	23.863	22.705	19.188	20.763	118.146	131.956	125.299	120.336	120.306	123.209
Madiun	11.291	17.077	11.754	10.863	6.474	11.492	75.278	58.854	61.967	60.268	50.162	61.306
Magetan	3.406	2.905	5.304	3.315	6.421	4.270	78.977	113.125	98.662	94.209	81.710	93.337
Ngawi	18.035	24.311	29.347	14.481	21.160	21.467	170.273	109.441	115.215	165.423	135.971	139.265
Bojonegoro	16.113	23.759	26.568	18.801	27.926	22.633	65.536	51.673	94.163	83.401	71.198	73.194
Tuban	6.433	3.104	2.639	2.466	2.034	3.335	92.198	113.015	171.939	244.522	95.729	143.481
Lamongan	36.377	35.530	32.409	36.953	33.274	34.909	41.859	53.273	88.993	34.134	13.100	46.272
Gresik	2.261	1.522	2.093	1.096	1.452	1.685	37.323	14.255	13.841	22.493	10.014	19.585
Bangkalan	2.435	7.716	3.713	11.058	13.547	7.694	53.956	85.613	75.987	63.864	50.262	65.936
Sampang	32.119	31.031	35.951	41.166	44.611	36.976	185.688	188.003	160.548	129.369	125.958	157.913
Pamekasan	594	649	1.150	621	707	744	32.922	29.138	31.603	37.029	38.508	33.840
Sumenep	13.226	9.420	7.388	6.431	7.813	8.856	163.069	171.429	137.725	159.350	78.160	141.947
Kota Kediri	8	10	23	32	16	18	717	641	358	610	543	574
Kota Blitar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Malang	-	-	-	-	-	-	2.337	1.537	1.278	1.704	2.731	1.917
Kota Probolinggo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Pasuruan	-	13	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
Kota Mojokerto	17	118	82	97	93	81	-	-	-	-	-	-
Kota Madiun	97	167	149	139	168	144	-	-	-	-	-	-
Kota Surabaya	-	1	2	-	-	1	196	1.073	206	303	325	421
Kota Batu	2	5	-	-	-	1	2.590	2.213	1.727	966	580	1.615
Jawa Timur	339.491	366.999	361.986	329.461	355.464	350.680	3.667.058	4.032.081	4.246.028	3.601.074	3.635.454	3.836.339

Lanjutan ...

Kab. / Kota	Jeruk (ton)						Cabai Merah (ton)						Bawang Merah					
	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata	2010	2011	2012	2013	2014	Rerata
Pacitan	178	108	297	1.044	1.250	575	449	1.604	18.719	1.091	1.608	4.694	56	56	722	47	47	186
Ponorogo	15.354	10.192	18.636	23.382	25.036	18.520	357	590	11.265	371	604	2.637	1.370	1.521	12.391	945	2.397	3.725
Trenggalek	24	1	6	3	18	10	116	108	1.091	70	171	311	-	-	90	-	-	18
Tulungagung	556	453	635	649	1.132	685	581	562	7.532	620	962	2.052	63	-	90	138	502	159
Blitar	1.467	841	612	1.096	1.262	1.056	10.040	9.854	70.704	12.423	15.828	23.770	234	210	2.085	14	33	515
Kediri	1.028	318	320	462	656	557	10.109	8.554	127.707	8.559	4.538	31.893	5.584	7.569	81.134	7.860	12.827	22.995
Malang	47.890	36.279	66.810	51.200	21.432	44.722	17.939	20.970	217.548	25.020	21.581	60.612	4.890	4.943	55.842	9.535	7.095	16.461
Lumajang	7.810	9.714	16.417	12.234	19.073	13.050	3.876	3.989	60.258	6.440	8.618	16.636	-	-	-	-	24	5
Jember	90.425	51.548	119.478	115.037	147.763	104.850	4.045	3.666	45.637	3.540	5.525	12.483	13	-	120	-	7	28
Banyuwangi	80.094	185.971	107.966	273.444	314.580	192.411	6.146	8.452	80.776	7.816	7.210	22.080	351	433	4.898	459	740	1.376
Bondowoso	61	16	20	337	988	284	310	313	4.188	296	163	1.054	673	717	7.716	939	1.623	2.334
Situbondo	48	71	40	47	60	53	128	58	751	197	301	287	535	473	4.841	854	1.114	1.563
Probolinggo	134	47	107	148	158	119	1.833	501	21.444	4.384	2.131	6.059	32.443	33.149	429.667	47.285	57.041	119.917
Pasuruan	8.981	3.952	11.953	14.147	16.025	11.012	1.059	1.131	7.133	690	1.721	2.347	9	87	393	4	190	136
Sidoarjo	179	134	137	136	73	132	3	-	166	2	2	35	-	-	10	0	0	2
Mojokerto	96	45	75	30	34	56	394	269	2.125	95	84	593	8.817	6.438	75.500	2.295	7.005	20.011
Jombang	5	1	43	11	35	19	338	753	5.294	257	462	1.421	155	51	1.545	18	374	428
Nganjuk	94	-	457	728	2.217	699	1.242	3.263	27.165	852	611	6.627	109.018	110.846	1.165.065	117.501	140.222	328.530
Madiun	219	90	60	324	414	221	228	285	5.470	396	636	1.403	52	89	2.285	811	1.243	896
Magetan	661	683	707	904	396	670	2.937	966	12.391	869	690	3.570	5.708	1.675	14.027	995	1.467	4.774
Ngawi	352	288	288	300	349	316	485	527	6.700	1.092	1.475	2.056	415	850	5.186	635	1.066	1.630
Bojonegoro	143	228	47	46	47	102	181	565	13.193	2.155	9.098	5.038	2.992	3.570	48.165	6.157	9.068	13.991
Tuban	27	21	16	71	149	57	3.924	2.018	199.488	18.144	19.638	48.642	201	48	853	32	108	248
Lamongan	47	24	16	33	30	30	176	25	773	66	95	227	693	596	5.508	350	416	1.513
Gresik	309	216	596	293	51	293	607	395	6.059	660	973	1.739	7	7	168	35	38	51
Bangkalan	216	220	682	250	468	367	14	120	269	113	120	127	12	139	1.859	-	28	408
Sampang	0	0	1	11	20	6	118	166	1.253	83	50	334	16.782	14.751	90.188	24.482	27.281	34.696
Pamekasan	90	121	772	2.456	904	869	385	567	20.784	2.894	3.444	5.615	3.438	3.847	125.689	13.977	13.798	32.150
Sumenep	374	21	277	109	231	202	307	904	3.961	276	237	1.137	1.690	775	16.622	2.537	1.595	4.644
Kota Kediri	1	-	-	-	-	0	17	6	7	9	1	8	18	28	221	-	14	56
Kota Blitar	12	25	46	47	56	37	14	21	281	42	44	80	-	-	-	-	-	-
Kota Malang	226	109	139	249	589	263	77	72	474	77	59	152	66	1	4	-	-	14
Kota Probolinggo	-	-	-	1	1	0	-	33	241	98	84	91	3.621	2.082	38.780	2.710	2.530	9.944
Kota Pasuruan	110	100	100	100	56	93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Mojokerto	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kota Madiun	-	-	-	-	-	-	10	-	30	7	-	9	-	-	-	-	-	-
Kota Surabaya	32	19	20	36	0	21	252	108	245	84	48	147	-	-	-	-	-	-
Kota Batu	9.822	13.273	14.904	15.490	13.221	13.342	2.868	2.261	15.578	1.904	2.211	4.964	3.833	3.438	36.951	2.473	3.286	9.996
Jawa Timur	267.062	315.132	362.680	514.855	568.774	405.700	71.565	73.674	996.700	101.691	111.022	270.930	203.739	198.387	2.228.615	243.087	293.179	633.402

lampiran

Lampiran 10 : Rasio Ketersediaan Pangan I_{AV} Jawa Timur Tahun 2014 Tahun 2010-2014)

Kabupaten / Kota	Produksi Padi, Jagung, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar (ton)					Ketersediaan pangan (gram) /kap /hari					I_{AV} Rasio				
	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014	2010	2011	2012	2013	2014
Pacitan	290.149	356.616	386.308	315.751	325.648	1.467	1.796	1.939	1.579	1.624	4,89	5,99	6,46	5,26	5,41
Ponorogo	604.518	520.575	681.757	640.865	610.486	1.933	1.660	2.167	2.032	1.932	6,44	5,53	7,22	6,77	6,44
Trenggalek	265.331	268.558	307.460	251.095	271.869	1.076	1.084	1.236	1.006	1.085	3,59	3,61	4,12	3,35	3,62
Tulungagung	259.257	351.284	427.556	420.477	448.824	716	964	1.166	1.141	1.210	2,39	3,21	3,89	3,80	4,03
Blitar	408.856	443.873	503.466	442.235	482.675	1.001	1.081	1.220	1.066	1.159	3,34	3,60	4,07	3,55	3,86
Kediri	481.387	435.507	487.492	451.310	500.056	877	789	878	808	890	2,92	2,63	2,93	2,69	2,97
Malang	613.142	672.018	619.683	671.792	669.119	685	745	682	734	725	2,28	2,48	2,27	2,45	2,42
Lumajang	388.999	370.978	429.448	395.671	391.354	1.057	1.003	1.156	1.059	1.045	3,52	3,34	3,85	3,53	3,48
Jember	851.108	865.440	974.225	941.786	960.353	997	1.008	1.127	1.083	1.099	3,32	3,36	3,76	3,61	3,66
Banyuwangi	671.167	604.480	592.035	560.968	599.950	1.179	1.057	1.030	971	1.035	3,93	3,52	3,43	3,24	3,45
Bondowoso	409.912	403.883	396.142	393.252	361.395	1.521	1.489	1.451	1.431	1.308	5,07	4,96	4,84	4,77	4,36
Situbondo	326.520	303.924	381.565	433.506	379.198	1.378	1.274	1.589	1.798	1.560	4,59	4,25	5,30	5,99	5,20
Probolinggo	476.172	444.020	514.097	504.411	405.880	1.187	1.098	1.262	1.230	982	3,96	3,66	4,21	4,10	3,27
Pasuruan	543.791	551.144	575.315	603.198	631.174	982	987	1.021	1.062	1.102	3,27	3,29	3,40	3,54	3,67
Sidoarjo	119.110	100.096	129.270	113.901	127.875	167	138	176	152	168	0,56	0,46	0,59	0,51	0,56
Mojokerto	332.439	286.292	346.630	331.042	310.844	885	755	905	857	796	2,95	2,52	3,02	2,86	2,65
Jombang	463.386	401.708	502.056	439.729	468.290	1.053	907	1.127	979	1.039	3,51	3,02	3,76	3,26	3,46
Nganjuk	473.824	499.557	581.179	491.350	512.354	1.274	1.336	1.548	1.302	1.353	4,25	4,45	5,16	4,34	4,51
Madiun	318.747	303.524	363.303	338.052	370.373	1.316	1.248	1.488	1.378	1.506	4,39	4,16	4,96	4,59	5,02
Magetan	270.696	280.847	297.273	302.036	306.340	1.194	1.235	1.304	1.323	1.339	3,98	4,12	4,35	4,41	4,46
Ngawi	552.445	484.880	587.888	672.010	657.559	1.848	1.618	1.958	2.233	2.176	6,16	5,39	6,53	7,44	7,25
Bojonegoro	750.329	571.062	682.116	678.498	716.324	1.696	1.285	1.528	1.514	1.592	5,65	4,28	5,09	5,05	5,31
Tuban	718.728	719.547	849.103	753.327	746.510	1.757	1.748	2.050	1.808	1.783	5,86	5,83	6,83	6,03	5,94
Lamongan	773.989	627.094	855.762	759.962	869.833	1.796	1.453	1.979	1.755	2.008	5,99	4,84	6,60	5,85	6,69
Gresik	312.731	254.805	376.271	340.765	340.248	725	583	851	761	751	2,42	1,94	2,84	2,54	2,50
Bangkalan	300.284	335.944	295.018	315.044	330.161	905	1.002	871	921	956	3,02	3,34	2,90	3,07	3,19
Sampang	325.557	292.268	343.813	272.693	274.245	1.013	897	1.042	818	811	3,38	2,99	3,47	2,73	2,70
Pamekasan	189.201	223.480	247.001	184.246	201.419	649	758	828	610	660	2,16	2,53	2,76	2,03	2,20
Sumenep	556.046	420.392	490.257	476.144	410.734	1.458	1.096	1.271	1.229	1.054	4,86	3,65	4,24	4,10	3,51
Kota Kediri	11.868	14.792	11.934	12.182	10.930	121	149	119	121	108	0,40	0,50	0,40	0,40	0,36
Kota Blitar	11.944	11.382	12.562	12.761	13.608	247	234	255	258	272	0,82	0,78	0,85	0,86	0,91
Kota Malang	8.924	8.509	9.102	8.435	9.765	30	28	30	27	32	0,10	0,09	0,10	0,09	0,11
Kota Probolinggo	23.373	23.077	34.816	29.397	31.672	294	287	429	360	383	0,98	0,96	1,43	1,20	1,28
Kota Pasuruan	7.858	8.726	12.517	9.549	9.930	115	127	180	136	141	0,38	0,42	0,60	0,45	0,47
Kota Mojokerto	3.081	2.980	4.213	2.378	2.689	70	67	94	53	59	0,23	0,22	0,31	0,18	0,20
Kota Madiun	7.905	8.931	10.816	10.367	9.042	126	142	171	163	142	0,42	0,47	0,57	0,54	0,47
Kota Surabaya	8.489	9.171	9.165	7.258	6.370	8	9	9	7	6	0,03	0,03	0,03	0,02	0,02
Kota Batu	9.401	7.070	6.867	4.347	4.144	135	100	97	61	57	0,45	0,33	0,32	0,20	0,19
Jawa Timur	13.140.666	12.488.437	14.335.483	13.591.793	13.779.240	958	904	1.031	971	978	3,19	3,01	3,44	3,24	3,26

Lampiran 10 : Kontribusi Produksi Padi, Jagung, Kedelai, Ubi Kayu, Jeruk, Cabai Merah dan Bawang Merah Jawa Timur terhadap Produksi Nasional Tahun 2014

No.	Kabupaten/Kota	Padi	Jagung	Kedelai	Ubi Kayu	Jeruk	Cabai Merah	Bawang Merah
1	Pacitan	0,226	0,536	0,523	1,877	0,070	0,150	0,004
2	Ponorogo	0,593	1,019	2,343	2,487	1,402	0,056	0,194
3	Trenggalek	0,239	0,402	0,909	1,364	0,001	0,016	-
4	Tulungagung	0,408	1,348	0,819	0,748	0,063	0,090	0,041
5	Blitar	0,428	1,693	1,119	0,354	0,071	1,473	0,003
6	Kediri	0,404	1,673	0,033	0,751	0,037	0,422	1,039
7	Malang	0,618	1,503	0,053	2,035	1,200	2,008	0,575
8	Lumajang	0,565	0,714	0,412	0,301	1,068	0,802	0,002
9	Jember	1,381	2,056	2,499	0,255	8,277	0,514	0,001
10	Banyuwangi	1,056	0,721	5,160	0,160	17,621	0,671	0,060
11	Bondowoso	0,447	0,815	0,008	0,455	0,055	0,015	0,132
12	Situbondo	0,358	1,398	0,001	0,019	0,003	0,028	0,090
13	Probolinggo	0,413	1,230	0,023	0,396	0,009	0,198	4,623
14	Pasuruan	0,933	1,229	2,195	0,289	0,898	0,160	0,015
15	Sidoarjo	0,286	0,001	0,149	-	0,004	0,000	0,000
16	Mojokerto	0,425	0,575	0,484	0,234	0,002	0,008	0,568
17	Jombang	0,609	1,228	1,133	0,052	0,002	0,043	0,030
18	Nganjuk	0,666	1,121	2,009	0,513	0,124	0,057	11,363
19	Madiun	0,735	0,161	0,678	0,214	0,023	0,059	0,101
20	Magetan	0,428	0,417	0,672	0,349	0,022	0,064	0,119
21	Ngawi	1,042	0,890	2,216	0,580	0,020	0,137	0,086
22	Bojonegoro	1,197	1,003	2,924	0,304	0,003	0,847	0,735
23	Tuban	0,759	2,393	0,213	0,408	0,008	1,827	0,009
24	Lamongan	1,354	1,666	3,484	0,056	0,002	0,009	0,034
25	Gresik	0,532	0,633	0,152	0,043	0,003	0,091	0,003
26	Bangkalan	0,441	0,719	1,419	0,214	0,026	0,011	0,002
27	Sampang	0,342	0,502	4,671	0,537	0,001	0,005	2,211
28	Pamekasan	0,215	0,596	0,074	0,164	0,051	0,320	1,118
29	Sumenep	0,268	1,706	0,818	0,333	0,013	0,022	0,129
30	Kota Kediri	0,014	0,030	0,002	0,002	-	0,000	0,001
31	Kota Blitar	0,013	0,049	-	-	0,003	0,004	-
32	Kota Malang	0,019	0,003	-	0,012	0,033	0,005	-
33	Kota Probolinggo	0,020	0,146	-	-	0,000	0,008	0,205
34	Kota Pasuruan	0,022	-	-	-	0,003	-	-
35	Kota Majokerto	0,006	0,000	0,010	-	-	-	-
36	Kota Madiun	0,020	-	0,018	-	-	-	-
37	Kota Surabaya	0,013	0,002	-	0,001	0,000	0,004	-
38	Kota Batu	0,005	0,007	-	0,002	0,741	0,206	0,266
	Jawa Timur	17,498	30,183	37,221	15,512	31,860	10,331	23,759